

LAPORAN AKHIR

STUDI EVALUASI PROGRAM KOMPAK DI TANAH PAPUA

Disusun oleh Tim Peneliti AKATIGA



LAPORAN AKHIR

STUDI EVALUASI PROGRAM KOMPAK DI TANAH PAPUA

MEI 2022

TIM PENELITI

Koordinator Tim

Charina Chazali (AKATIGA)

Tim Kuantitatif

Peneliti Utama

: Adenantera Dwicaksono (AKATIGA)

Supervisor

: Nurul Widyaningrum (AKATIGA)

Asisten

: Nofalia Nurfitriani (AKATIGA) dan Fikry Pratama (AKATIGA)

Pengembang CAPI

: Lucia Resty

Tim Kualitatif

Peneliti Utama

: Aprilia Ambarwati (AKATIGA)

Supervisor

: Yulia Indrawati Sari (AKATIGA)

Koordinator Lapangan (Kualitatif): Fadhli Ilhami (AKATIGA), Muklas Aji S., Panji Ardiansyah, I Ngurah Suryawan, Fauzan Djamal.

Koordinator Lapangan (Kuantitatif): Heppi Hestiana, Salman Fariz, Setri Wulan Indrawati, Agustian, Fachrul Rozi, Ngatman, Iryadi, Pebrianti, Erfina, Rusminah.

Penyunting: Acep Muslim **Desain & Tata letak:** AM. **Foto halaman depan:** Santi Dwiningsih (Asmat)

AKATIGA Centre for Social Analysis

Jl. Tubagus Ismail II No 2

Bandung | (022) 2502302

office@akatiga.org

www.akatiga.org

PENGANTAR

Laporan akhir ini disusun oleh tim peneliti AKATIGA. Pada proses penelitian, AKATIGA mendapatkan dukungan dan fasilitasi dari Lily Hoo, Ancilla Irwan, Paramagarjito B. Irtanto, Gregorius Kelik Endarso, Gregorius Daan V. Pattinasarany, Kwan Men Yon, Isono Sadoko, Iis Surtina, Siti Zulva, Herawati Yulia, Mutiara Pasaribu.

Laporan ini telah ditelaah oleh Theofransus L. A. Litaay (Kantor Staf Presiden Republik Indonesia) dan Julius Ary Mollet (Pusat Studi Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Papua-Universitas Cenderawasih). Laporan ini juga mendapat masukan penting dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) dan the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) pada saat tahap presentasi draf. Kami mengucapkan terima kasih untuk masukan-masukan tersebut. Acep Muslim menyunting laporan ini, baik versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Laporan ini tidak mungkin dapat dituntaskan tanpa kerja keras para 55 peneliti lapangan yang bekerja di 60 kampung di Papua dan Papua Barat dan tim administrasi AKATIGA. Kami juga sampaikan banyak terima kasih kepada tim implementasi, koordinator kabupaten, dan koordinator distrik dari program KOMPAK di Tanah Papua yang telah memberikan dukungan sepanjang proses penelitian.

Terakhir, kami sangat berterima kasih atas partisipasi dan kesabaran dari Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Jayapura, Nabire, Asmat, Sorong, dan Manokwari Selatan, responden dan informan kunci lainnya yang telah menyediakan waktunya bersama tim peneliti dalam proses penggalan data.

Penelitian ini mendapatkan dukungan dana dari KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan).

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

ADD	Dana transfer yang diterima desa dari APBD kabupaten. Besaran ADD yang dialokasikan kabupaten paling sedikit 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH).
AIDS	<i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> ; sekumpulan gejala penyakit yang menyerang tubuh manusia setelah sistem kekebalannya dirusak oleh virus yang disebut HIV.
Admindak	Administrasi Kependudukan; rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.
APBD Kabupaten	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten. APBD kabupaten berisi daftar sistematis yang memuat penerimaan dan pengeluaran kabupaten dan kota selama satu tahun (1 Januari sampai 31 Desember) berjalan.
APBD Provinsi	Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi; rencana keuangan tahunan pemerintah provinsi. APBD provinsi berisi daftar sistematis yang memuat penerimaan dan pengeluaran provinsi selama satu tahun (1 Januari sampai 31 Desember) berjalan.
APBK	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; rencana keuangan tahunan pemerintah kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat. APBK berisi daftar sistematis yang memuat penerimaan dan pengeluaran kampung selama satu tahun (1 Januari sampai 31 Desember) berjalan.
BaKTI	Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia; sebuah yayasan yang bekerja di kawasan timur Indonesia yang menjadi mitra strategis KOMPAK dalam implementasi program di Tanah Papua.
Bamuskam	Badan Musyawarah Kampung; istilah yang digunakan setara dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Tanah Papua. Biasanya merupakan kumpulan dari tokoh adat.
BANGGA	Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua yang Sejahtera. Pilot program ini dilakukan pada tiga kabupaten di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Asmat, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Paniai.
BAPPEDA	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.

Bidan Desa	Tenaga kesehatan yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten di tingkat desa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
BLT	Bantuan Langsung Tunai; program bantuan pemerintah berupa pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin.
BPJS Kesehatan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Kesehatan. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
BPS	Badan Pusat Statistik.
CAPI	<i>Computer-Assisted Personal Interview</i> ; sebuah terobosan pada tahapan pengumpulan data. Dengan CAPI, proses wawancara dengan responden dan entri data dilakukan secara bersamaan.
Dana Desa	Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
DAK	Dana Alokasi Khusus; dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
DID	Dana Insentif Daerah; salah satu dana transfer umum dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/capaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.
Distrik	Istilah untuk tingkat administrasi pemerintah setara kecamatan di Papua dan Papua Barat.
DMMD	Distrik Membangun Membangun Distrik; program penjabaran dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat yang mengatur/mengakomodir peran distrik untuk membangun daerah.
DPMK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang bekerja di tingkat kabupaten/provinsi. DPMK bisa saja bergabung dengan dinas lain sesuai dengan kebutuhan di setiap kabupaten/provinsi.
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota.

FGD	<i>Focus Group Discussion</i> , salah satu metode pengumpulan data melalui diskusi terfokus dari suatu kelompok untuk membahas tema tertentu.
GEDSI	<i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> ; perhatian khusus pada kesetaraan gender dan pelibatan kelompok marginal termasuk penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
HIV	<i>Human Immunodeficiency Virus</i> ; virus penyebab AIDS yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, yang kemudian dapat menimbulkan AIDS.
INPRES	Instruksi Presiden; peraturan yang dikeluarkan oleh presiden mengenai pelaksanaan suatu keputusan presiden yang memuat aturan-aturan teknis.
Kader Kampung	Kader Pemberdayaan Masyarakat yang ada di kampung, baik laki-laki maupun perempuan yang mendapatkan tugas melakukan pendataan administrasi kependudukan di kampung.
Kemenkeu	Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Komite Sekolah	Lembaga mandiri yang berada di tingkat sekolah yang berfungsi dalam memberikan rekomendasi dalam kebijakan dan program pendidikan di sekolah. Komite Sekolah juga berfungsi untuk mengawasi kebijakan dan pelaksanaan di sekolah. Komite sekolah beranggotakan perwakilan orangtua/wali, tokoh masyarakat, dunia usaha, alumni, dll.
KOMPAK	Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan; program kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia yang mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan.
LANDASAN	Landasan Papua merupakan Program Perbaikan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan di Papua dan Papua Barat.
LPMP	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan; unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi dengan menyelenggarakan berbagai fungsi peningkatan kualitas pendidikan.
LPJ	Laporan Pertanggungjawaban kepala kampung, diserahkan setiap tahun. LPJ biasanya juga dilaporkan kepada Bamuskam dan dilaporkan kepada pemerintah kabupaten (Bupati). Idealnya tanpa LPJ, dana ADD tidak akan cair.
MAHKOTA	Menuju Masyarakat Indonesia yang Kokoh Sejahtera; program yang didanai Pemerintah Australia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan sistem perlindungan sosial untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan.

Malaria	Suatu penyakit yang disebabkan oleh sejenis parasit genus <i>Plasmodium</i> , dengan gejala utama demam yang berulang-ulang. Penyakit infeksi yang banyak dijumpai di daerah tropis, yang disertai dengan gejala demam fluktuasi suhu secara teratur, yang ditularkan oleh nyamuk <i>Anopheles</i> yang terinfeksi. Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan utama di daerah tropis dan subtropis, termasuk banyak dijumpai di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Master Plan Distrik	Rencana Strategis Distrik.
MBS	Manajemen Berbasis Sekolah; salah satu basis manajemen pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama secara partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat di sekitarnya dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan.
OAP	Orang Asli Papua, merupakan orang yang kedua atau salah satu orang tuanya merupakan orang dari Tanah Papua atau orang yang diangkat secara adat menjadi orang Papua, mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat.
ODK	<i>Open Data Kit</i> , merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk pengambilan data baik itu berbasis spasial ataupun non-spasial.
OH	<i>Outcome Harvesting</i> , merupakan pendekatan evaluasi yang mengidentifikasi, menjelaskan, memverifikasi perubahan yang dihasilkan oleh suatu intervensi tertentu.
OPD	Organisasi Pemerintah Daerah. OPD merujuk pada dinas yang bekerja pada pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten.
Otsus	Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat di Tanah Papua.
Perbup	Peraturan Bupati adalah pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Permendes	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu; wadah pemeliharaan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Pelaksanaan Posyandu di tingkat desa, kampung atau kelurahan. Kegiatan pokok Posyandu adalah KIA, KB, imunisasi, penyuluhan gizi, penanggulangan diare.

Polindes	Pondok Bersalin Desa; salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk KB di desa. Salah satu syarat adanya Polindes di desa selain tersedianya tempat juga sangat terkait dengan keberadaan bidan di desa atau kampung tersebut.
PP	Peraturan Pemerintah.
PROSPEK	Program Strategis Pembangunan Kampung; program dari dana Otsus untuk kampung yang diluncurkan oleh Gubernur Provinsi Papua.
PROSPPEK	Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung; program yang dirancang untuk mendukung pembangunan Provinsi Papua Barat.
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat; unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
Pustu	Puskesmas Pembantu; unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Pustu biasanya berada di tingkat kampung/desa.
Pusling	Puskesmas Keliling; unit pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil berupa kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas. Pusling ini berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
P3MD	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
RAPBS	Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah yang disusun setiap tahun mencakup pendapatan dan pengeluaran sekolah untuk satu tahun ke depan. Seperti RKPK untuk kampung.
RENJA Distrik	Rencana Kerja Distrik; dokumen perencanaan distrik untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran tahun yang sama.
RENSTRA Distrik	Rencana Strategis Distrik; dokumen acuan bagi pemerintah distrik dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya yang akan di laksanakan pada periode lima tahunan.
RKPK	Rencana Kerja Pemerintah Kampung; dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMK.

RKAS	Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah; rencana pengembangan sekolah untuk jangka waktu empat tahun.
RKS	Rencana Kerja Sekolah; pendetailan dari RKAS dan biasanya dibuat setiap tahun.
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode lima tahun, berupa penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah.
RPJMK	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung; dokumen perencanaan untuk periode enam tahun.
RPK	Rencana Pelaksanaan Kegiatan; perencanaan kegiatan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan alokasi dana yang tersedia dalam tahun berjalan.
RUK	Rencana Usulan Kegiatan; usulan kegiatan yang dihasilkan dari tahap perencanaan di Puskesmas.
Sekda	Sekretaris Daerah; pimpinan di kantor Sekretariat Daerah (Setda) yang merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah.
SD	Sekolah Dasar.
SAIK Plus	Sistem Administrasi dan Informasi Kampung Plus (SAIK+). Program SAIK+ merupakan pengembangan dari program SAIK yang diperbaharui dan terintegrasi dengan sistem informasi elektronik lainnya di Provinsi Papua Barat.
SIO Papua	Sistem Informasi Orang Papua. Program SIO Papua diperkenalkan oleh KOMPAK-LANDASAN di Provinsi Papua.
SIK	Sistem Informasi Kampung.
SNP	Standar Nasional Pendidikan; kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.
SPM	Standar Pelayanan Minimal; ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar.
Tanah Papua	Tanah Papua pada laporan ini merupakan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	iii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	iv
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR KOTAK	xiii
DAFTAR TABEL	xiii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
Perubahan	2
Mekanisme Perubahan	4
Faktor pendukung perubahan	4
Faktor penghambat perubahan	5
Pembelajaran dan Rekomendasi	6
1. PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang.....	10
1.2. Tujuan dan Pertanyaan Studi	12
1.3. Metodologi	13
1.3.1. Kerangka analisis <i>Outcome Harvesting</i>	13
1.3.2. Metode penggalian data	15
1.4. Tahapan Penelitian.....	21
1.5. Pemilihan Lokasi Penelitian	22
1.6. Limitasi Penelitian	24
1.6. Struktur Laporan	26
2. SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI KAMPUNG	27
2.1. Temuan Perubahan	29
2.1.1 Tersedianya basis data kampung yang inklusif, relevan, dan terbarukan	29
2.1.2. Peningkatan kapasitas kader	36
2.2. Mekanisme Perubahan	37
2.2.1 Faktor pendukung perubahan	37
2.2.2. Faktor penghambat perubahan	39
2.3. Pembelajaran	43
3. SINERGI SEKTORAL	47
3.1. Temuan Perubahan	48
3.1.1. Terbukanya ruang komunikasi antara unit layanan dan pemerintah kampung	48
3.1.2. Terbukanya akses dana kampung untuk unit layanan dasar	51
3.2. Mekanisme Perubahan pada Sinergi Sektoral	62
3.2.1. Faktor pendukung perubahan	62

3.2.2 Faktor penghambat perubahan	66
3.3. Pembelajaran	70
4. REGULASI DAN KEBIJAKAN.....	74
4.1. Temuan Perubahan	75
4.1.1 Perubahan di tingkat regulasi dan kebijakan	75
4.1.2 Perubahan di tingkat kapasitas.....	86
4.2. Mekanisme Perubahan	91
4.2.1. Faktor pendukung perubahan	91
4.2.2. Faktor penghambat perubahan	93
4.3. Pembelajaran dan Rekomendasi	96
5. PARTISIPASI PUBLIK	99
5.1. Temuan Perubahan	100
5.1.1. Peningkatan pengetahuan dan peran Bamuskam dalam pengawasan pembangunan ...	100
5.1.3. Memperbesar pemanfaat saluran penyampaian keluhan atau komplain warga kampung.....	108
5.1.4. Peningkatan peran aktivis kader kampung dalam pembangunan kampung	115
5.2. Pembelajaran	118
6. SIMPULAN DAN REKOMENDASI	121
6.1. Simpulan.....	121
6.2 Rekomendasi	124
REFERENSI.....	127
LAMPIRAN: PROSEDUR ANALISIS DAN HASIL SURVEI	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Program KOMPAK di Tanah Papua	12
Gambar 1.2. Lingkup perubahan dalam pendekatan <i>Outcome Harvesting</i>	15
Gambar 1.3. Proses dan kerangka penelitian	16
Gambar 1.4. Peta lokasi studi	24
Gambar 2.1. Tampilan website SAIK+ dan SIO Papua	28
Gambar 2.2. Kepemilikan sistem informasi kampung (SIK) di kampung intervensi dan non-intervensi	29
Gambar 2.3. Data yang dikumpulkan dalam Sistem Informasi Kampung (SIK)	30
Gambar 2.4. Pelatihan LANDASAN yang diikuti kepala kampung dan KPMK	38
Gambar 3.1. Jumlah dan persentase responden kepala kampung yang mengundang pelaku kesehatan dan pendidikan dalam pertemuan perencanaan kampung	51
Gambar 3.2. Dukungan RPJMK dan RPKK terhadap layanan pendidikan dan kesehatan (Puskesmas dan Posyandu)	53
Gambar 3.3.-A Persepsi kepuasan responden terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan Adminduk berdasarkan lokasi	57
Gambar 3.3-B Persepsi responden terhadap kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan Adminduk sekarang dan dua tahun lalu berdasarkan lokasi	57
Gambar 3.3.-C Persepsi kepuasan responden terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan Adminduk berdasarkan gender	58
Gambar 3.3-D. Persepsi Responden Anggota Rumah Tangga Terhadap Kualitas Layanan Kesehatan, Pendidikan, dan Adminduk Sekarang dan Dua Tahun yang Lalu berdasarkan Jenis Kelamin	58
Gambar 3.4. Sinergi dokumen rencana unit layanan dengan rencana kampung	60
Gambar 3.5. Pertemuan kepala kampung & KPMK dengan aktor LANDASAN dalam satu tahun terakhir (2020-2021)	63
Gambar 3.6. Keikutsertaan serta jenis pelatihan yang diikuti oleh kepala sekolah dasar dan kepala Puskesmas dalam satu tahun terakhir	70
Gambar 5.1. Undangan dan Kehadiran Kelompok Masyarakat menurut Kepala Kampung	107
Gambar 5.2-A Kehadiran Responden Rumah Tangga dalam Pertemuan Kampung dalam Setahun Terakhir berdasarkan Lokasi	108

Gambar 5.2-B Persentase Responden berdasarkan Kehadiran pada Pertemuan Kampung Terakhir berdasarkan Gender	108
Grafik 5.3. Mekanisme penyampaian keluhan di kampung	112
Grafik 5.4-A Penyampaian Keluhan/Kritik/Saran terkait Layanan Kesehatan (kiri atas), Pendidikan (kanan atas), dan Adminduk (bawah) oleh Responden Warga berdasarkan Lokasi	114
Gambar 5.4-B Penyampaian Keluhan/Kritik/Saran terkait Layanan Kesehatan (kiri atas), Pendidikan (kanan atas), dan Adminduk (bawah) oleh Responden Warga berdasarkan Gender	114

DAFTAR KOTAK

KOTAK 2.1. Penggunaan data SAIK sebagai rujukan distribusi bantuan di Kaso (Sorong) dan Wura (Nabire)	33
KOTAK 2.2. Inisiatif Kepala Distrik Makbon pada Pendataan	42
KOTAK 3.1. Sinergi Sektorial meningkatkan Komunikasi antara Pemerintah Kampung dan Unit Layanan di Asmat	50
KOTAK 3.2. Belum ada Pengawasan atas Dana Kampung untuk Unit Layanan	54
KOTAK 3.3. Replikasi Sinergi Perencanaan pada Kampung-kampung non-intervensi KOMPAK di Distrik Oransbari	64
KOTAK 4.1. Penguatan Relasi antar Aktor Pembangunan di Manokwari Selatan	90
KOTAK 5.1. Peningkatan Kapasitas Sekretaris Bamuskam Perempuan di Kampung Alo, Sorong	104
KOTAK 5.2. Peran Komite Sekolah dalam Penyelesaian masalah di SD Kasih Tuhan, Asmat	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Responden dan tema pertanyaan survei	19
Tabel 1.2. Lokasi studi kualitatif	22
Tabel 1.3. Lokasi studi kuantitatif (survei)	23
Tabel 3.1. Tabel akreditasi SD dan Puskesmas di lokasi intervensi KOMPAK	56
Tabel 4.1. Rangkuman perubahan tingkat regulasi dan kebijakan	76

RINGKASAN EKSEKUTIF

Studi ini bertujuan untuk menilai perubahan-perubahan dan proses dari pemanfaatan model KOMPAK di Tanah Papua yang terjadi pada tahun 2017-2021¹. Program KOMPAK melakukan beragam intervensi di Tanah Papua seperti analisis peningkatan kebijakan, asistensi teknis, dan peningkatan kapasitas kepada aktor lokal, serta ujicoba pelaksanaan program. Studi ini dilakukan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: (1) apakah model KOMPAK sudah mencapai sasaran yang diharapkan dan bagaimana potensi keberlanjutannya?; (2) faktor apa saja yang memengaruhi capaian?; (3) pembelajaran apa yang dapat dipetik untuk desain program pembangunan berikutnya?

Untuk mencapai tujuan dan menjawab pertanyaan di atas, studi ini menggunakan kerangka analisis *outcome harvesting* (OH) yang fokus mempelajari dan menilai perubahan-perubahan (*outcomes*) yang dihasilkan aktivitas/kegiatan di dalam program. Kerangka analisis ini cocok diterapkan pada program yang kompleks serta pada program yang capaiannya terkait erat dengan capaian dari program/inisiatif yang dilaksanakan pemangku kepentingan lain. Dalam studi ini, ruang lingkup perubahan yang diteliti mencakup empat area, yakni sistem informasi kampung, sinergi sektoral, regulasi/kebijakan, dan partisipasi publik. Penggalan data dilakukan dengan kombinasi metode kuantitatif (survei) dan kualitatif (wawancara mendalam, pengamatan, transek, dan diskusi kelompok) serta dilengkapi dengan analisis dokumen program dan *workshop* pemetaan perubahan dengan tim implementasi KOMPAK.

Studi dilaksanakan di 60 lokasi kampung (kuantitatif) dan 15 kampung (kualitatif) yang tersebar di lima kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kabupaten terpilih dalam studi ini adalah Jayapura, Asmat, Nabire, Sorong, dan Manokwari Selatan. Kelima kabupaten ini terpilih berdasarkan ragamnya program KOMPAK dan capaiannya. Jumlah keseluruhan responden (survei) adalah 2.159 yang terdiri dari rumah tangga, kepala kampung, kader kampung, dan unit layanan. Sedangkan total jumlah informan kualitatif yang diwawancarai adalah 367 orang yang terdiri dari aktor-aktor yang diintervensi langsung oleh KOMPAK seperti aparat kampung, pelaku unit layanan, kader kampung, pemerintah kabupaten, distrik, dan provinsi, serta rumah tangga sebagai penerima manfaat.

¹ Istilah Tanah Papua dalam laporan ini merujuk pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Perubahan

Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, studi ini mengidentifikasi berbagai perubahan sebagai hasil intervensi KOMPAK pada aspek pendataan, sinergi sektoral, regulasi, dan partisipasi publik. Studi ini menemukan bahwa program KOMPAK berhasil memengaruhi beragam perubahan positif di empat area yang diteliti. Perubahan yang dimaksud terjadi di tingkat provinsi, kabupaten, dan distrik/kampung.

- **Pada area Sistem Informasi Kampung**, studi menemukan bahwa KOMPAK berhasil mendorong tersedianya SIK dengan melengkapi data tingkat kampung yang inklusif dan relevan dengan konteks Tanah Papua². **Di area sinergi sektoral**, program KOMPAK berhasil mempertemukan dan memperbaiki komunikasi antara pelaku unit layanan dan pemerintah kampung sehingga mendorong tersedianya akses dana yang dikelola kampung untuk unit layanan. Sedangkan di **tingkat perubahan kebijakan provinsi dan kabupaten**, studi ini menunjukkan bahwa KOMPAK telah mendorong pemerintah daerah, baik kabupaten dan provinsi, untuk menerbitkan dan atau mengadopsi kebijakan/regulasi yang mendukung perbaikan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan. Temuan studi ini menunjukkan dua program yang telah didorong oleh KOMPAK dan berhasil diadopsi pemerintah provinsi sehingga implementasinya mencakup masyarakat di kampung, yaitu PROSPPEK di Papua Barat dan BANGGA di Papua. Terakhir, **pada aspek partisipasi publik**, intervensi KOMPAK pada area sinergi sektoral meningkatkan pengetahuan dan kapasitas Bamuskam akan fungsi dan prosedur pengawasan pembangunan kampung meskipun belum menjadi perubahan perilaku yang menerus. Kemudian, studi ini menemukan bahwa aktor-aktor yang berpotensi menjadi jembatan aspirasi masyarakat kepada unit layanan dan aparat kampung adalah aktor yang memiliki kedekatan dengan masyarakat dan jaringan ke kelompok elit, seperti kader Posyandu.
- Secara khusus, studi ini juga mengangkat temuan-temuan perubahan pengetahuan dan kapasitas aktor-aktor yang diintervensi secara langsung oleh KOMPAK pada empat area di atas. **Perubahan pengetahuan dan kapasitas yang paling terlihat ditemukan di tingkat kader kampung dibandingkan dengan perubahan pengetahuan dan kapasitas pada aparat kampung, pelaku unit layanan, Bamuskam, dan staf OPD.** Interaksi kader dengan program telah meningkatkan kapasitas/pengetahuan baru bagi kader kampung baik dari sisi teknis dan non teknis. Perubahan kader dari sisi teknis adalah kecakapan dalam mengaplikasikan sistem informasi kampung dan melakukan pendataan. Sedangkan perubahan pada sisi non teknis terdiri dari peningkatan pemahaman kader atas kebutuhan warga kampung dan terlibat pada proses perencanaan kampung. Derajat perubahan kapasitas kader di atas tentunya

² Inklusif dan relevan maksudnya adalah secara eksplisit memilah data kependudukan berdasarkan gender, OAP dan non-OAP, serta data kemiskinan. Hal ini relevan dengan konteks Otsus yang bertujuan untuk menyejahterakan penduduk khususnya OAP di Papua dan Papua Barat.

bervariasi. Perubahan ini belum dapat secara langsung mengubah peran dan perilaku kader untuk memastikan agar kebijakan-kebijakan kampung sudah berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Ini dikarenakan kader kampung yang mayoritas berasal dari kelompok muda belum mampu mengatasi persoalan relasi kuasa dengan kelompok tua dan elite di kampung. Namun demikian, dengan kepercayaan diri yang meningkat dan jejaring yang lebih luas, kader kampung berpotensi menjadi agen pembangunan yang signifikan di tingkat kampung.

- Perubahan pengetahuan dan kapasitas juga ditemukan di level individu OPD yang berinteraksi pada berbagai intervensi peningkatan kapasitas KOMPAK seperti pelatihan, bimbingan teknis dan kajian/analisis kebijakan. Sebagai contoh, perubahan kapasitas di level individu OPD ini melingkupi (1) peningkatan pengetahuan mengenai peran pendampingan dan teknik fasilitasi pada kampung dan distrik; (2) kapasitas dalam memetakan permasalahan daerah serta menyusun perencanaan dan penganggaran daerah; dan (3) perubahan komunikasi dan relasi antar-OPD. Perubahan kapasitas individu ini belum sampai pada pencapaian perubahan yang lebih tinggi seperti di level organisasi karena terkendala beberapa hal. Kendala-kendala tersebut meliputi belum adanya insentif dan disinsentif yang tepat bagi OPD untuk mengaplikasikan materi pelatihan, isu kewenangan individu aktor OPD dalam mendorong perubahan dalam organisasinya, serta belum adanya mekanisme *transfer knowledge* yang sistematis dalam setiap organisasi apalagi lintas OPD.

Namun demikian, studi ini juga menemukan belum tercapainya beberapa perubahan penting yang menjadi tujuan program. Dengan periode program yang pendek (sekitar lima tahun), dalam konteks kompleksitas Tanah Papua, program-program KOMPAK masih berada dalam proses pengembangan untuk mencapai tujuan/esensi program.

- Terkait program SIK, data sudah disediakan secara terpisah dan digunakan pemerintah kampung untuk distribusi bantuan. Namun data tersebut belum digunakan untuk menjadi basis perencanaan kampung maupun untuk mempercepat layanan Adminduk.
- Pada aspek sinergi sektoral, komunikasi yang terbangun antar aktor pembangunan dan tersedianya akses dana kampung untuk unit layanan belum tentu memengaruhi peningkatan kualitas layanan dasar. Hal ini terjadi karena belum ada mekanisme pengawasan yang efektif baik dari pemerintah kampung kepada unit layanan maupun sebaliknya, sehingga belum tercipta esensi dari sinergi sektoral.
- Pada aspek kebijakan/regulasi, beberapa aturan yang didorong KOMPAK masih terhambat dalam menumbuhkan rasa kepemilikan bersama (*ownership*) dari Pemda untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan tersebut. Sehingga perlu diperkuat dalam

bentuk rumusan mekanisme kebijakan turunan, insentif dan disinsentif yang menciptakan kesepakatan, dukungan dari pemimpin daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjamin keberlanjutan program dan implementasi program.

- Secara khusus, studi ini juga belum melihat sistematisasi dari pengarusutamaan GEDSI (selain pada program BANGGA Papua yang sudah komprehensif), misalnya *roadmap* dan umpan balik dalam membangun pendampingan dan penguatan kesadaran GEDSI (termasuk di kelompok elite laki-laki) paska workshop/pelatihan/pembuatan modul.

Mekanisme Perubahan

Untuk menjawab pertanyaan kedua, studi ini menelusuri mekanisme terjadinya perubahan serta kontribusi KOMPAK dalam memengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi terkait tata kelola di Tanah Papua. Studi ini juga menjelaskan pengaruh faktor-faktor lain, seperti konteks dan peran organisasi, institusi, program lain, terhadap perubahan yang terjadi. Di samping itu, studi ini juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi tidak tercapainya suatu perubahan.

Faktor pendukung perubahan

Terdapat empat temuan yang menjelaskan faktor pendukung dan mekanisme bagaimana perubahan-perubahan pada empat area di atas terjadi. Faktor pendukung terdiri dari faktor internal KOMPAK dan non-KOMPAK. Dari sisi internal KOMPAK, terdapat empat mekanisme, strategi, aktor, dan faktor yang mendukung terjadinya perubahan.

- *Pertama*, KOMPAK berhasil **membangun mekanisme peningkatan kapasitas yang praktis dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah dari berbagai level**. KOMPAK memberikan serangkaian pelatihan formal dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dalam cara dan prosedur untuk mengakses dana kampung, meningkatkan akreditasi unit layanan, pengembangan kapasitas kader kampung, dan bimbingan teknis perumusan penganggaran yang inklusif dan efektif untuk Pemda. Dengan penguatan kapasitas ini, aktor-aktor lokal bisa menerapkan apa yang mereka pelajari setelah pelatihan. KOMPAK juga berperan dalam memberikan umpan balik kepada Pemda, yang menjadi nilai tambah bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.
- *Kedua*, **strategi KOMPAK yang komprehensif dalam membangun *evidence-based policy making***. Strategi tersebut mencakup kajian untuk perbaikan regulasi yang disertai dengan pendampingan teknis keahlian di aspek tata kelola, pendataan, dan sinergi sektoral. Strategi KOMPAK juga diaplikasikan pada lintas wilayah administratif, dari level provinsi, kabupaten, sampai distrik dan kampung.

- *Ketiga*, **KOMPAK juga berkolaborasi dengan organisasi dan program yang memiliki kepentingan yang selaras** seperti MAHKOTA dan Puskapa UI dalam mengimplementasikan programnya. Upaya-upaya tersebut diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemda agar tercipta perubahan pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan layanan dasar.
- KOMPAK berhasil **mengidentifikasi, melibatkan, memiliki, dan bekerjasama dengan aktor-aktor kunci; baik dari level pengambil keputusan hingga implementasi**; yang memiliki pengalaman panjang melakukan lobi dan advokasi, ditambah dengan **jaringan kuat** pemangku kepentingan pada berbagai level di Tanah Papua.

Empat faktor pendukung internal KOMPAK **di atas selaras dengan faktor di luar KOMPAK** yang memengaruhi keberhasilan pengaruh dan perubahan, yaitu **desain dan implementasi program yang sesuai dengan kepentingan aktor-aktor kunci di Tanah Papua dari mulai tingkat provinsi sampai kampung**. Studi ini mengangkat **relevansi program KOMPAK di Tanah Papua yang mampu mengelaborasi dan mengangkat narasi OAP yang kuat, khususnya pada konteks Otsus di Papua dan Papua Barat**. Hal ini ditunjukkan pada pendataan dengan fokus pada data terpilah OAP dan non-OAP, upaya perbaikan tata kelola penggunaan dana Otsus sampai tingkat kampung, perlindungan sosial bagi ibu dan anak OAP, dan lain sebagainya.

Faktor penghambat perubahan

Selain menjelaskan faktor pendukung, studi ini juga menjelaskan beberapa kendala yang menghambat tercapainya suatu perubahan secara optimal. Kendala yang dimaksud berasal dari luar dan internal KOMPAK.

- **Dari luar KOMPAK**, secara umum kompleksitas konteks dan birokrasi di Tanah Papua yang secara signifikan menghambat implementasi program. Secara khusus, hambatan dari luar KOMPAK yang dihadapi oleh program terdiri dari (1) kendala struktural seperti **ketimpangan relasi kuasa**; (2) kendala geografis seperti **kendala aksesibilitas dan keterbatasan teknologi informasi**; (3) kendala kelembagaan seperti **mutasi dan rotasi aktor kunci di pemerintah daerah**; (4) **perubahan prioritas anggaran pemerintah**; (5) **ketidakjelasan kewenangan sistem informasi**; dan (6) **kapasitas dinas dalam penyediaan layanan**, (7) **kendala kultural** seperti relasi patron klien, (8) **pandemi COVID-19** memengaruhi kinerja program serta mengubah prioritas anggaran dan sumber daya pemerintah pada penanganan pandemi.
- **Dari internal KOMPAK**, KOMPAK juga memiliki kendala dari **sisi mitigasi untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah konteks birokrasi di Tanah Papua** seperti

yang dikemukakan di atas. Yang dilakukan oleh KOMPAK ketika berhadapan dengan situasi kompleks di atas adalah melakukan manuver atau merespon dengan cepat dalam menghadapi kendala-kendala tersebut. **Kompleksnya kendala ini mengindikasikan pentingnya mengembangkan investasi program pada pendampingan jangka panjang, berkelanjutan, sistematis dan berbasis konteks Tanah Papua.**

Pembelajaran dan Rekomendasi

Menjawab pertanyaan ketiga, berdasarkan analisis atas ragam perubahan, faktor pendukung dan faktor penghambat perubahan, studi ini menarik beberapa poin pembelajaran dan rekomendasi sebagai berikut.

- **Membangun program yang relevan dengan konteks wilayah intervensi.** Studi ini menunjukkan bahwa program KOMPAK memberikan pembelajaran mengenai pentingnya relevansi tujuan program dengan konteks wilayah intervensi, sehingga pemangku kepentingan di berbagai level mendukung implementasi program. Relevansi ini terutama ditemukan pada kasus penguatan narasi OAP pada desain dan implementasi program KOMPAK, SAIK yang menjadi basis perencanaan dan pengelolaan dana Otsus yang semakin inklusif, serta dukungan pada program perlindungan sosial bagi OAP. Studi ini merekomendasikan pentingnya melanjutkan dan mengembangkan program pendataan SAIK yang terbukti relevan dan penting dalam konteks di Tanah Papua dan diperlukan strategi yang mampu diadopsi secara mandiri setelah pendampingan program KOMPAK.
- **Mendorong insentif yang tepat dan jelas.** Studi ini mengindikasikan peran penting insentif yang jelas untuk mendorong perubahan bagi pemangku kepentingan di berbagai level. Salah satu mekanisme insentif yang terlihat dalam studi ini adalah dari pelaku unit layanan. Pelaku unit layanan dapat mengakses dana kampung dan inilah yang menjadi motivasi pelaku unit layanan untuk berkomunikasi dan melobi kepala kampung. Berbeda dengan mekanisme insentif di area sinergi sektoral, mekanisme insentif pada sistem pendataan belum mendorong pelaku program untuk mendukung program. Pada area sistem informasi kampung data terpilah telah dikumpulkan oleh kader kampung dan menjadi dasar kebijakan Otsus di level provinsi dan kabupaten, tetapi belum optimal dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan program dan layanan. Studi ini merekomendasikan perlunya pemberian insentif kepada aparat dan kader kampung atas pemanfaatan data-data yang telah dikumpulkan dan dimutakhirkan. Misalnya, membangun mekanisme kesepakatan antardinas agar aktor di level kampung dapat memahami dan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan sesuai dengan aturan. Insentif ini juga dibutuhkan untuk aktor-aktor yang berpotensi dalam mempermudah proses pendataan seperti distrik. Selain itu,

mekanisme insentif yang tepat juga perlu dikembangkan untuk memperkuat peran fasilitator-fasilitator di level kabupaten untuk bisa melanjutkan pendampingan kepada level kampung. Terakhir, dengan beragamnya pendataan kependudukan lain seperti pendataan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maka dibutuhkan upaya untuk menjembatani keterlibatan kader program untuk membangun sinergi berbagai sistem pendataan yang ada, berdasarkan potensi dan kekuatan masing-masing program.

- **Pendekatan intervensi program lintas level administratif.** Studi ini menunjukkan implementasi area program KOMPAK khususnya sistem informasi kampung yang komprehensif dalam mencapai keberlanjutan program. Komprehensif dalam arti bahwa KOMPAK berupaya melembagakan inisiatif/program pendataan secara spesifik kepada pemerintah lintas level administratif. Misalnya, untuk SIK model KOMPAK (SAIK dan SIO Papua), KOMPAK dapat memberikan dukungan mulai dari penguatan kader kampung sampai mendukung terciptanya lingkungan kebijakan yang kondusif di tingkat provinsi. Oleh karena itu, keberhasilan program pendataan di tingkat kampung tidak terlepas dari kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten. Studi ini merekomendasikan pentingnya setiap program untuk bergerak lintas level administratif, penguatan di tingkat kampung dan masyarakat perlu disertai dengan perbaikan lingkungan kebijakan yang kondusif di tingkat yang lebih tinggi, demikian pula sebaliknya.
- **Membangun kombinasi metode pelatihan yang aplikatif dan pendampingan yang sistematis.** Studi ini menunjukkan bahwa pelatihan-pelatihan KOMPAK yang menekankan pada metode aplikatif dan praktik langsung berhasil meningkatkan keterampilan kader dan staf OPD. Akan tetapi, pelatihan dengan mekanisme ini belum berhasil mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk membangun tujuan utama program seperti manfaat pendataan untuk kebijakan (level kampung sampai provinsi), literasi data, dan hakikat dari sinergi sektoral untuk perbaikan layanan dasar. Studi ini merekomendasikan pentingnya mengkombinasikan dan mempertahankan pelatihan dalam bentuk metode praktik langsung dan aplikatif dengan pendampingan kelompok kecil namun menerus, serta menggunakan mekanisme informal untuk mengembangkan kapasitas dan dukungan aktor-aktor yang diintervensi ke arah tujuan program. Mekanisme informal dan dalam kelompok kecil didukung teknologi aplikatif sesuai dengan konteks Tanah Papua yang memiliki kekuatan akan kekerabatan dan persaudaraan serta mempertimbangkan tantangan geografis, aksesibilitas, dan jaringan komunikasi.
- **Pengembangan monitoring dan evaluasi non-administratif.** Studi ini mengindikasikan fokus monitoring dan evaluasi program pada tataran administratif yang penting untuk mendorong pelaku program fokus pada kegiatan yang dilakukan,

tetapi berpotensi menghambat proses fasilitasi dan kualitas capaian program. Untuk memperkuat ruang pendampingan dan fasilitasi di atas, studi ini merekomendasikan pentingnya program untuk menyederhanakan metode monitoring dan evaluasi administratif seperti *checklist* kegiatan. Ke depan, program KOMPAK dan mitra pembangunan lainnya dapat melengkapi proses monitoring dan evaluasi administratif dengan mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur kualitas partisipasi. Walaupun kualitas partisipasi seringkali sulit diukur, perlu dikembangkan sebuah alat dan mekanisme monitoring dan evaluasi yang mendorong pelaku tidak hanya menyelesaikan laporan dan aktivitas tetapi juga kualitas fasilitasi dan aktivitas yang dilakukan. Selain itu, penting untuk melakukan triangulasi dalam sistem monitoring kepada penerima manfaat dan/atau aktor lain terkait dengan kerja dan capaian dari aktor-aktor yang diintervensi. Hal ini bertujuan agar pelaksana program KOMPAK dapat mengetahui secara cepat kondisi lapangan, capaian, dan kendala, sehingga dapat merumuskan respon atau mitigasi dengan cepat. Upaya ini tentunya perlu disertai dengan pengakuan dan insentif serta penghargaan atas aktor-aktor lokal yang berhasil mencapai hasil yang baik dari sisi proses dan kualitas fasilitasi.

- **Pengembangan SAIK untuk kebijakan dan perbaikan kualitas data.** Studi ini menemukan bahwa KOMPAK berhasil membangun basis data terpilah yang lebih terbaru dan mendapat dukungan para pemangku kepentingan di tingkat kampung, kabupaten, dan provinsi terutama di Provinsi Papua Barat. Data tersebut bahkan sudah dijadikan basis distribusi bantuan. Lebih lanjut lagi, data tersebut telah diadopsi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan komitmen pembiayaan perluasan program. Namun, studi ini menemukan masih banyak kampung non-intervensi yang kesulitan untuk membangun dan menyediakan SIK tersebut. Kendala yang dialami antara lain karena kampung-kampung ini relatif lebih jarang mendapatkan program/inisiatif dalam penguatan kapasitas (baik dari pemerintah maupun luar pemerintah) dibandingkan kampung-kampung intervensi KOMPAK, aksesibilitas yang lebih menantang, serta kendala jaringan komunikasi. Studi ini merekomendasikan penting untuk meneruskan dukungan program baik KOMPAK maupun mitra pembangunan lain dalam mengembangkan program SIK terutama di Provinsi Papua Barat. Studi ini merekomendasikan perbaikan program SAIK yang dapat difokuskan untuk memastikan ketersediaan data yang berkualitas di seluruh wilayah kampung, membangun literasi data, dan mengoptimalkan penggunaan data untuk kebijakan. Selain itu, diperlukan upaya untuk memulai integrasi data SAIK dengan data nasional melalui kerjasama dengan BPS.
- **Pengembangan kader sebagai penggerak perubahan.** Studi ini menunjukkan potensi kader dalam mendorong perubahan. Hal ini mengindikasikan pentingnya sebuah program membangun kader lokal yang bisa menjadi penggerak perubahan. Untuk membangun perubahan tata kelola pemerintahan, diperlukan peran kader yang dapat

menginisiasi aktivitas pembangunan kampung dan memfasilitasi komunikasi antara masyarakat miskin dan marjinal dengan kelompok elite. Akan tetapi, kader masih menghadapi kendala kapasitas dan relasi kuasa dengan kelompok tua dan elite di kampung untuk menginisiasi perubahan. Di masa mendatang, studi ini merekomendasikan pentingnya program untuk mengembangkan kapasitas dan kecakapan dalam fasilitasi, berkomunikasi, dan memperluas jaringan kader dengan aktor-aktor pembangunan lainnya. Di sisi lain, kader Posyandu juga berpotensi menjadi aktor yang menjembatani komunikasi antara masyarakat, unit layanan, dan pemerintah kampung. Karenanya, kader Posyandu juga dapat dikembangkan kapasitasnya dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat kampung.

- **Pengembangan keterlibatan dan dukungan politik dengan pemangku kepentingan yang lebih luas.** Studi ini menunjukkan beberapa program KOMPAK masih mendapatkan kendala dukungan OPD (khususnya Kepala Dinas) yang tidak sepenuhnya memberikan komitmen pendanaan dan dukungan kepada fasilitator dari OPD. Selain itu, masih ada aturan yang belum diturunkan ke dalam bentuk kebijakan yang lebih konkret agar OPD mendapatkan kejelasan dari sisi implementasi. Dengan kata lain, keberlanjutan program rentan dengan perubahan faktor eksternal. Hal ini mengindikasikan pentingnya upaya di masa yang akan datang untuk membangun keterlibatan berbagai aktor yang lebih luas seperti OPD yang terkait, bukan hanya aktor dan lembaga yang menjadi target intervensi program.
- **Merumuskan *roadmap* yang konkret dan spesifik untuk mengintegrasikan prinsip GEDSI di desain dan implementasi program.** Studi ini mengindikasikan bahwa selama ini, KOMPAK sudah memberikan masukan-masukan teknis pada prinsip GEDSI di setiap program/kebijakan yang dilaksanakan bersama Pemda, khususnya pada BANGGA Papua. Akan tetapi, cakupan dari GEDSI sangat luas dan bersinggungan dengan kelompok-kelompok yang bervariasi dan mungkin masing-masing kelompok membutuhkan *treatment* khusus dalam kerangka program. Untuk itu, studi ini merekomendasikan di masa depan, KOMPAK perlu merumuskan *roadmap* konkret dari prinsip GEDSI yang diintegrasikan pada program—yang berisi target dan capaian realistis namun spesifik, kelompok sasaran yang spesifik—ditambah dengan panduan implementasi praktis yang berdasarkan konteks dari wilayah program. Hal di atas juga perlu diiringi dengan pendampingan yang berkesinambungan kepada aktor-aktor yang diintervensi agar pelan-pelan memiliki pemahaman prinsip GEDSI. Terakhir, monitoring dan evaluasi berbasis proses juga perlu dilakukan agar aktor-aktor lokal yang diintervensi dan pelaksana program KOMPAK bisa mendapatkan *feedback* dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip GEDSI di implementasi program.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

KOMPAK merupakan program fasilitasi yang didanai oleh Pemerintah Australia (DFAT) untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target mengurangi tingkat kemiskinan dan mengatasi kesenjangan di Indonesia. Untuk mencapai tujuannya, KOMPAK membagi kegiatan unggulan/*flagship* yang saling mendukung satu sama lain. Kegiatan unggulan/*flagship* KOMPAK terdiri dari:³

1. **Instrumen dan analisis pengelolaan keuangan publik.** KOMPAK memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan keuangan publik untuk membantu pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dalam mengalokasikan pendanaan untuk pemerintah daerah, serta untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan alokasi pendanaan dan meningkatkan kualitas belanja untuk layanan dasar.
2. **Penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati (PASH) yang inklusif.** KOMPAK memberikan dukungan besar kepada pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk memperkuat layanan administrasi kependudukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen identitas hukum dan kelengkapan data kependudukan.
3. **Penguatan kecamatan dan desa.** KOMPAK memperkuat kecamatan sebagai pusat untuk tata kelola dan bantuan teknis desa sehingga kecamatan dan desa bisa berperan sebagai pusat tata kelola peningkatan kualitas layanan dasar.
4. **Sistem informasi desa/kampung.** KOMPAK mendorong pemanfaatan data untuk perencanaan dan penganggaran dengan mengonsolidasikan data individual warga, sehingga memungkinkan adanya data statistik makro dan mikro yang akurat. Hal ini memungkinkan para perencana untuk mengetahui jumlah penduduk dan daerah dengan angka kemiskinan yang tinggi, dan mengidentifikasi kelompok rentan, seperti mereka yang tidak memiliki dokumen kependudukan.
5. **Akuntabilitas sosial.** KOMPAK memperkuat akuntabilitas sosial guna meningkatkan kualitas penyediaan layanan dengan skema umpan balik warga dan model literasi

³ Seluruh penjelasan kegiatan unggulan KOMPAK diambil dari website KOMPAK, Kegiatan Unggulan KOMPAK (2020), Tentang KOMPAK (2020).

anggaran untuk meningkatkan partisipasi dan suara perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan dalam musyawarah perencanaan.

6. **Keperantaraan pasar.** KOMPAK mendorong keperantaraan pasar untuk memperkuat pengembangan ekonomi lokal, yaitu merintis pendekatan keperantaraan pasar untuk meningkatkan produktivitas usaha kecil dan mikro dan penghidupan warga miskin.

Dari seluruh kegiatan unggulan di atas, KOMPAK mendukung pemerintah daerah di Tanah Papua sejak 2016 dengan mengaplikasikan lima *flagship*, yaitu instrumen dan analisis pengelolaan keuangan publik, penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati, penguatan kecamatan dan desa/kampung, akuntabilitas sosial, dan sistem informasi desa/kampung.

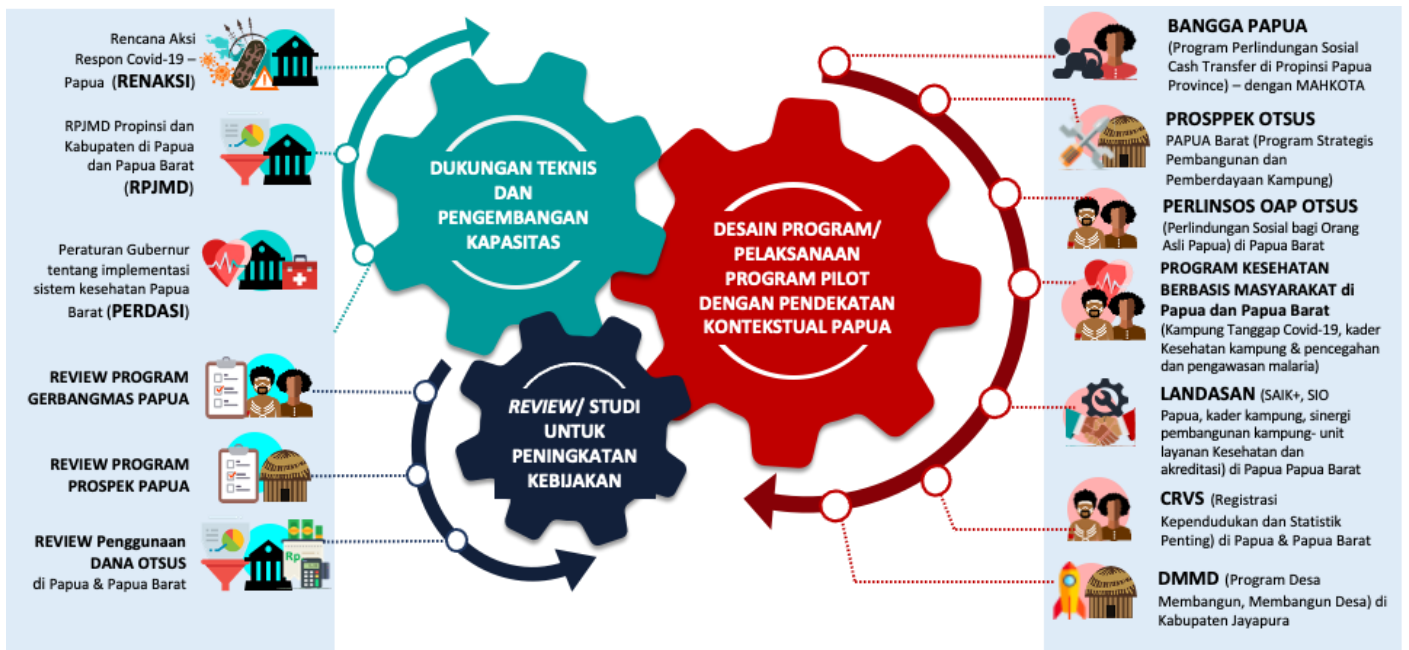
Dengan serangkaian aktivitas, KOMPAK di Tanah Papua bekerja di seluruh level pemerintahan dari kampung hingga pusat. Fokus kunci intervensi KOMPAK baik di Tanah Papua terbagi menjadi tiga yaitu 1) kajian peningkatan kebijakan, 2) pemberian dukungan asistensi teknis dan peningkatan kapasitas, dan 3) ujicoba pelaksanaan program.

KOMPAK melakukan berbagai kegiatan uji coba dan bantuan teknis untuk membantu pemerintah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Tanah Papua. Uji coba KOMPAK di tingkat kabupaten difokuskan pada peningkatan percepatan penyediaan layanan dasar. Sedangkan untuk bantuan kebijakan teknis di tingkat provinsi, dukungan KOMPAK difokuskan pada optimalisasi penggunaan dana Otsus. Pada dasarnya, KOMPAK berperan sebagai fasilitator untuk mendukung pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten di Papua dan Papua Barat dalam mencapai tujuan dan prioritas pembangunan.

Dalam melakukan intervensi, KOMPAK menggunakan model pendekatan yang berbasis pada akar masalah dan kebutuhan Pemda sehingga agenda KOMPAK disesuaikan dengan agenda pembangunan baik di Papua maupun Papua Barat (lihat Gambar 1). Dalam hal ini, dukungan KOMPAK tersebut berupa ujicoba dan asistensi teknis untuk mendukung Pemda mencapai target dan tujuan pembangunan. Karenanya, program-program KOMPAK yang dianggap berhasil merupakan bagian integral dari program Pemda.

Menjelang akhir masa fasilitasi KOMPAK kepada Pemerintah Indonesia pada tahun 2022, diperlukan evaluasi untuk melihat proses dan pemanfaatan model KOMPAK yang telah dijalankan, sebagai upaya pelembagaan dukungan KOMPAK. Keseluruhan praktik baik dan pembelajaran akan bermanfaat bagi pemerintah di berbagai tingkatan untuk memastikan keberlanjutan model sekaligus memperkuat faktor pendukung dan meminimalkan faktor-faktor penghambat dalam proses pelembagaannya. Dengan latar belakang tersebut, *Evaluasi Model KOMPAK di Tanah Papua* ini dilaksanakan. Hasil studi evaluasi ini diharapkan juga dapat menjadi dasar untuk pelaksanaan program berikutnya di Tanah Papua.

Gambar 1.1. Program KOMPAK di Tanah Papua



1.2. Tujuan dan Pertanyaan Studi

Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk melihat proses dan pemanfaatan dari model KOMPAK yang telah dijalankan di Tanah Papua, sebagai upaya pelembagaan intervensi-intervensi KOMPAK. Secara spesifik evaluasi ini bertujuan untuk:

1. Menilai efektivitas implementasi model/pendekatan utama KOMPAK di Tanah Papua.
2. Memahami faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pencapaian target.
3. Menggambarkan perubahan apa yang terjadi sebagai pengaruh dari intervensi KOMPAK di Tanah Papua.
4. Mengidentifikasi pembelajaran dan memberikan rekomendasi mengenai apa yang bisa dilanjutkan/diperbaiki untuk program pembangunan/tata kelola selanjutnya di Tanah Papua.

Untuk mencapai tujuan di atas, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan utama sebagai berikut.

1. Apakah model/pendekatan KOMPAK telah mencapai sasaran yang diharapkan? Dan apakah ada usaha replikasi model KOMPAK oleh pemerintah daerah?

2. Faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi capaian? Apa saja mekanisme atau proses kunci dalam pelaksanaan program yang dapat direplikasi?
3. Apa pembelajaran yang dipetik untuk meningkatkan desain/pelaksanaan program pembangunan/tatakelola di Tanah Papua berikutnya?

1.3. Metodologi

1.3.1. Kerangka analisis *Outcome Harvesting*

Penelitian ini menggunakan pendekatan *outcome harvesting*⁴ (OH) untuk mengidentifikasi berbagai perubahan yang terjadi dari berbagai intervensi yang dilakukan oleh KOMPAK. OH merupakan salah satu kerangka analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menjelaskan, membuktikan *outcomes* (perubahan-perubahan) yang dihasilkan oleh suatu intervensi atau inisiatif yang sifatnya kompleks, dinamis, dan karenanya sulit untuk mendefinisikan secara konkret apa yang ingin dicapai langsung oleh program tersebut ataupun ketika program yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan (Wilson-Grau, 2015).

Oleh karena itu, kerangka analisis ini dapat digunakan pada program KOMPAK di Tanah Papua, khususnya dengan tiga kondisi (Wilson-Grau, 2015):

1. Fokus kepada *outcome*/perubahan dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh program. Sehingga, OH tidak ditujukan sebagai asesmen sesuai dengan dokumen perencanaan atau yang tertulis dalam *logical framework* program, tetapi mengidentifikasi dan mempelajari proses apa saja yang telah berubah (atau tidak berubah) dan alasannya.
2. Program atau intervensi yang kompleks, di mana hubungan antara apa yang dilakukan (sebab) dengan efeknya (akibat) tidak bisa dinilai secara linier. Tetapi, program yang berada pada situasi dan konteks yang sangat kompleks dan dinamis, misalnya kegiatan advokasi, peningkatan kapasitas, pemberdayaan, dan sebagainya dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam hal ini, KOMPAK merupakan program pengembangan kapasitas dan pemberdayaan yang kompleks dan terkait erat dengan pencapaian dan kegiatan dari program, inisiatif, atau pemangku kepentingan lainnya.

⁴ Pendekatan ini digunakan untuk melihat perubahan pada program yang berada pada situasi dan konteks yang kompleks dan dinamis. Perubahan dilihat secara luas mencakup pengetahuan, perilaku, hubungan/relasi, regulasi, proses/mekanisme yang terjadi pada level aktor-aktor sosial yang terlibat atau berinteraksi dengan pelaksana program dan orang-orang yang mendapatkan manfaat dari program.

3. Dapat dipakai jika kegiatan evaluasi lebih diperuntukkan mempelajari perubahan dan memahami mengapa perubahan itu dapat terjadi atau tidak terjadi.

Outcomes didefinisikan secara luas sebagai berbagai perubahan (misalnya kebijakan yang berubah, proses legislasi yang diubah atau dihentikan, koalisi baru terbentuk, perilaku yang berubah) dari para aktor terkait baik di tingkat agen perubahan, aktor sosial, maupun masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program. Perubahan yang terjadi dapat berupa pengetahuan, perilaku, kesadaran, dan cara pandang di berbagai tingkatan (kampung, distrik, kabupaten, provinsi). Dalam mengidentifikasi perubahan, peneliti perlu mengumpulkan bukti-bukti perubahan yang ada, lalu menarik mundur untuk menilai kontribusi suatu intervensi terhadap perubahan tersebut dan mengenali kontribusi dari faktor/aktor lainnya. Perubahan yang dicari dapat bersifat negatif atau positif, diperkirakan terjadi atau tidak. Dan yang paling penting, perubahan tersebut tidak dapat dikaitkan hanya dengan kontribusi satu pihak saja, tetapi juga dipengaruhi atau merupakan kontribusi dari aktor/pihak lain.

Terdapat tiga ruang lingkup perubahan yang dianalisis melalui OH (lihat gambar 1.2) yaitu:

1. Lingkup kendali (*the sphere of control*) yaitu perubahan perilaku dari agen perubahan yang dapat dikontrol oleh pelaksana kegiatan dalam sebuah program. Dalam penelitian ini, pelaksana kegiatan program KOMPAK di Tanah Papua adalah tim implementasi KOMPAK dan Yayasan BaKTI.
2. Lingkup pengaruh (*the sphere of influence*) merupakan lingkup di mana agen perubahan mengintervensi atau melakukan upaya untuk memengaruhi perubahan aktor sosial tertentu. Untuk program KOMPAK di Tanah Papua, aktor sosial yang teridentifikasi antara lain adalah kader kampung (misalnya kader SAIK/SIO), pemerintah kampung, penyedia layanan dasar (sekolah dasar dan Puskesmas), pemerintah distrik, kabupaten, provinsi.
3. Lingkup perhatian (*the sphere of concern*) merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh agen perubahan yang dipengaruhi oleh banyak faktor, khususnya pada level masyarakat sebagai penerima manfaat program.

Studi ini lebih menitikberatkan pada perubahan-perubahan yang berada pada lingkup pengaruh (*the sphere of influence*) dan lingkup perhatian (*the sphere of concern*).

Gambar 1.2. Lingkup perubahan dalam pendekatan *Outcome Harvesting*

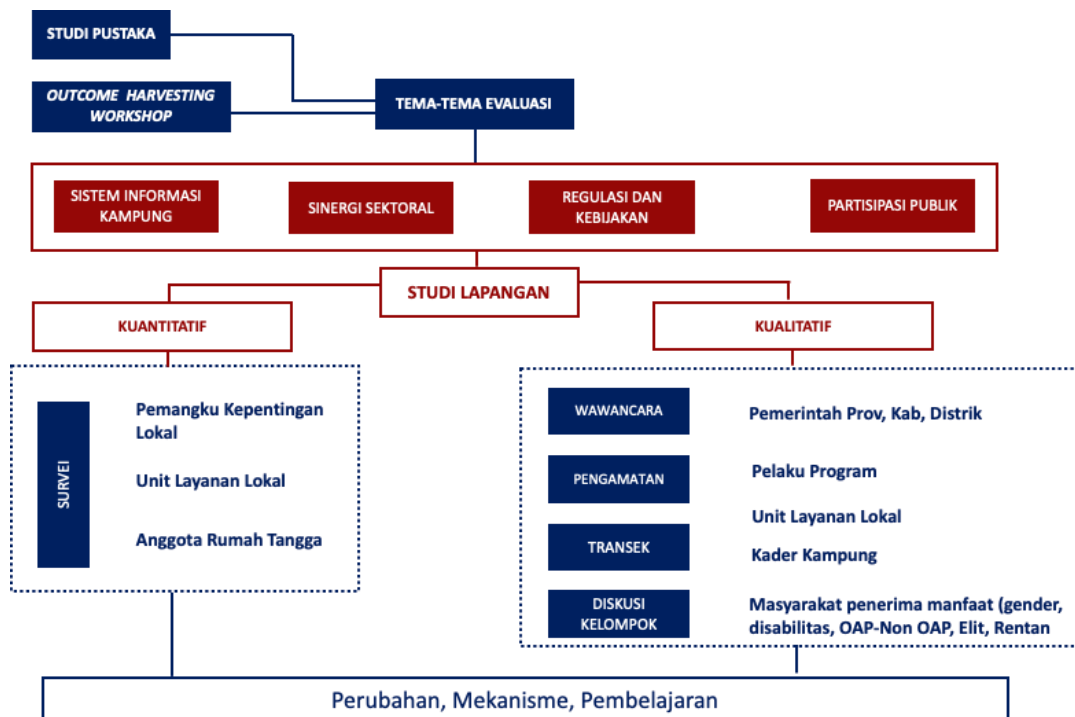


1.3.2. Metode penggalan data

Studi ini menggunakan *mixed methods* dengan beberapa teknik penggalan data untuk mengumpulkan berbagai macam perubahan yang dipengaruhi oleh intervensi KOMPAK selama periode 2017 hingga 2021. Kedua metode ini saling mendukung satu dengan lainnya. Metode kualitatif mencoba menjawab pertanyaan besar terkait kualitas capaian model/pendekatan utama KOMPAK sekaligus faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pencapaian target di lokasi KOMPAK. Sedangkan metode kuantitatif lebih untuk menjawab capaian model/pendekatan utama KOMPAK melalui perbandingan capaian di daerah antara lokasi KOMPAK dengan non-KOMPAK.

Gambar di halaman berikutnya menjabarkan kerangka, tahapan, dan proses penelitian ini.

Gambar 1.3. Proses dan kerangka penelitian



1.3.2.1. Kualitatif

Untuk metode kualitatif, kami menggunakan beberapa teknik penggalan data sebagai berikut.

- A. **Transek.** Transek (*transect walk*) merupakan penelurusan (biasanya berjalan kaki) di lokasi studi yang dilakukan bersama dengan warga lokal untuk mengeksplorasi dan mengamati kondisi kampung seperti aksesibilitas, aktivitas warga, dan fasilitas dasar yang dimiliki kampung. Penelusuran atau pengamatan ini biasanya dilakukan di fase awal penelitian lapangan dan diiringi dengan bertanya kepada warga lokal agar peneliti dapat mendapatkan gambaran awal mengenai lokasi yang diteliti.
- B. **Wawancara mendalam.** Wawancara mendalam merupakan teknik utama yang digunakan dalam pengumpulan data kualitatif. Teknik ini digunakan terutama untuk memperoleh informasi sensitif atau spesifik, seperti pengalaman dan pengetahuan unik. Wawancara mendalam dengan informan dilakukan secara fleksibel baik formal ataupun diskusi santai sesuai dengan kondisi agar informan dapat menjawab pertanyaan dengan nyaman. Peneliti memiliki kesempatan dalam menggali atau mendorong informan untuk menceritakan lebih dalam tentang pengalaman, pendapat, dan perasaan para informan.

Elaborasi pertanyaan-pertanyaan kunci terhadap informan mencakup beberapa hal yang ditujukan untuk menganalisis perubahan. Pertama adalah menanyakan

pengalaman interaksi informan dengan aktor-aktor dalam program atau yang mengikuti intervensi program. Kedua, pertanyaan mengenai perubahan dan sampai mana perubahan tersebut terjadi, lalu menelusuri kontribusi KOMPAK dan luar KOMPAK terhadap perubahan tersebut. Ketiga, bentuk relasi dan interelasi dari berbagai perubahan dan kontribusi KOMPAK, serta upaya apa yang dilakukan untuk melanjutkan hasil atau perubahan yang telah terjadi (keberlanjutan).

Wawancara mendalam dilakukan kepada beberapa kategori informan sebagai berikut:

- *Pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, distrik, dan kampung)*. Untuk level provinsi dan kabupaten, tim peneliti mewawancarai BAPPEDA, sekretaris daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informasi. Sedangkan informan pada level distrik adalah kepala distrik dan staf pendataan. Pada level kampung, studi ini melakukan wawancara kepada kepala kampung, aparat kampung (seperti bendahara atau sekretaris kampung), serta kepala dan anggota Bamuskam.
- *Pelaku unit layanan (Puskesmas dan Sekolah Dasar)*. Informan yang diwawancarai pada kategori ini adalah kepala Puskesmas, bidan, kader Posyandu, kepala sekolah, guru senior, dan komite sekolah.
- *Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPMK)* atau disebut kader kampung. Kader kampung merupakan aktor penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di level kampung. Kader kampung biasanya merupakan orang-orang muda yang dipilih dan disahkan oleh kepala kampung serta mendapatkan insentif dari dana yang dikelola kampung. Kader kampung merupakan salah satu informan kunci dalam studi ini karena salah satu intervensi utama KOMPAK di Tanah Papua berada pada pengembangan kapasitas kader kampung.
- *Warga kampung intervensi KOMPAK dan di luar intervensi KOMPAK*. Meskipun intervensi KOMPAK di Tanah Papua tidak langsung menasar pada warga kampung, namun studi ini mewawancarai warga kampung untuk melakukan triangulasi pada perubahan-perubahan yang terjadi dan dirasakan khususnya pada pelayanan dasar (pendidikan dasar, kesehatan, dan administrasi kependudukan), serta partisipasi warga dalam perencanaan dan keputusan atau kebijakan kampung. Studi ini berusaha memperhatikan komposisi dari informan berdasarkan gender, OAP dan non OAP, miskin, tinggal di lokasi terjauh dari pusat kampung, serta kelompok disabilitas. Jenis informan warga yang diwawancarai yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kelompok perempuan, lansia, dan kelompok disabilitas. Khusus untuk

kelompok disabilitas, tim peneliti berusaha melakukan wawancara langsung dengan didampingi oleh keluarga informan atau mendapatkan informasi dari keluarga penyandang disabilitas jika wawancara langsung tidak memungkinkan.

- *Pelaku program KOMPAK Tanah Papua* yaitu kordinator kabupaten dan kordinator distrik. Kedua kordinator ini merupakan aktor kunci program karena berdomisili di lokasi penelitian dan merupakan penanggungjawab dari capaian program di masing-masing lokasi.

C. **Pengamatan.** Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung layanan dasar yang berada di level kampung dan khusus untuk mengamati kader dalam menggunakan aplikasi teknologi sistem informasi kampung, yaitu SIO Papua dan SAIK+.

D. **Diskusi kelompok.** Tim peneliti melakukan diskusi kelompok khususnya pada informan di level kampung. Diskusi ini dilakukan untuk melakukan konfirmasi dari hasil-hasil temuan yang didapatkan pada wawancara mendalam. Akan tetapi, dengan kondisi pandemi COVID-19, diskusi kelompok tidak wajib dilakukan dan hanya dapat dilaksanakan pada kondisi yang memungkinkan seperti ruangan terbuka dan tidak mengundang terlalu banyak peserta diskusi (5–10 orang).

Untuk memastikan validitas informasi, peneliti melakukan triangulasi dari sisi metode dan sumber informasi. Para peneliti menelisik jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan cara (1) menggunakan metode yang berbeda: observasi, wawancara, dan penggalian data sekunder; (2) mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sama pada informan yang berbeda.

Peneliti kualitatif pada studi ini terdiri dari para peneliti yang memiliki pengalaman dalam melakukan studi kualitatif khususnya studi monitoring dan evaluasi, dengan kombinasi gender serta latar belakang pendidikan dan pengalaman. Terdapat lima tim lapangan kualitatif dan setiap tim terdiri dari tiga orang yang bertanggungjawab pada pengambilan data di satu kabupaten (dua kampung intervensi KOMPAK dan satu kampung non intervensi KOMPAK). Sehingga, total peneliti lapangan kualitatif adalah 15 peneliti. Data lapangan dikumpulkan selama 24–27 hari pada bulan November-Desember 2021. Secara total, tim kami melakukan wawancara dengan 367 informan dari berbagai latar belakang gender dan kategori (petugas/pejabat, informan kunci, warga di area program, dan warga di luar area program).

1.3.2.2. Kuantitatif

Penggalian data melalui survei dilakukan sebagai pelengkap dari hasil wawancara mendalam serta diskusi kelompok. Pada metode penggalian data kualitatif, studi ini menangkap jenis-jenis perubahan yang terjadi dan mengidentifikasi bagaimana intervensi KOMPAK mendorong terjadinya perubahan tersebut. Survei melengkapi informasi tersebut dengan melihat seberapa besar/seberapa banyak perubahan tersebut dinyatakan atau dirasakan oleh responden. Survei ini juga membandingkan kondisi-kondisi layanan sekarang antara kampung-kampung intervensi dengan kampung non-intervensi. Tim lapangan kuantitatif terdiri dari 10 tim yang setiap timnya terdiri dari empat enumerator. Sehingga, total peneliti lapangan kuantitatif terdiri dari 40 enumerator yang tersebar di lima kabupaten.

Karena fokus survei ini terletak pada perubahan-perubahan di tingkat layanan, maka responden survei berada di tingkat kampung dan tingkat unit layanan. Tabel 1.1 menampilkan responden survei dan tema-tema pertanyaan di setiap kategori. Sebagai catatan, karena KOMPAK tidak memberikan intervensi langsung kepada masyarakat, maka pertanyaan-pertanyaan kepada responden masyarakat terutama ditujukan untuk menangkap persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan secara umum, dan tidak dipecah secara mendetil.

Tabel 1.1. Responden dan tema pertanyaan survei

RESPONDEN	JUMLAH & KRITERIA RESPONDEN	TEMA PERTANYAAN
Pemerintah kampung	60 responden Kepala kampung, atau sekretaris kampung, atau kepala urusan/kepala bagian	<ul style="list-style-type: none">• Partisipasi masyarakat dalam perencanaan kampung• Penggunaan/kondisi sistem pendataan Adminduk• Sinergi antara rencana kampung dan kebutuhan unit layanan• Peningkatan kapasitas aparat kampung
KPMK	99 responden Kader kampung atau yang ditunjuk sebagai kader	<ul style="list-style-type: none">• Partisipasi masyarakat dalam perencanaan kampung• Penggunaan/kondisi sistem pendataan Adminduk• Sinergi antara rencana kampung dan kebutuhan unit layanan• Peningkatan kapasitas aparat kampung
Sekolah Dasar	55 Kepala SD/guru paling senior	<ul style="list-style-type: none">• Data pelayanan SD

		<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi sekolah dalam proses perencanaan kampung • Pendampingan dari distrik dan kabupaten • Peningkatan kapasitas kepala sekolah/guru • Dukungan dari kampung terhadap SD
Puskesmas	<p>19 responden</p> <p>Kepala Puskesmas/dokter Puskesmas/Bidan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Data pelayanan Puskesmas • Partisipasi Puskesmas dalam proses perencanaan kampung • Pendampingan dari distrik dan kabupaten • Peningkatan kapasitas pelaksana unit layanan • Dukungan dari kampung terhadap layanan kesehatan
Posyandu	<p>99 responden</p> <p>Koordinator kader/kader paling senior</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Data pelayanan Posyandu • Partisipasi kader Posyandu dalam proses perencanaan kampung • Pendampingan dari distrik dan kabupaten • Peningkatan kapasitas kader Posyandu • Dukungan dari kampung terhadap layanan kesehatan
Rumah Tangga	<p>609 responden</p> <p>Kepala rumah tangga</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar anggota rumah tangga, meliputi: usia, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, kepemilikan dokumen administrasi kependudukan (KTP dan akta kelahiran) • Kepemilikan tabungan • Kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional • Kondisi kesejahteraan rumah tangga: kepemilikan dan luas tanah/bangunan, kepemilikan aset • Program bantuan pemerintah • Pemanfaatan layanan kesehatan dan Admindak

	<p>1218 responden</p> <p>Anggota rumah tangga berusia minimal 15 tahun, satu laki-laki dan satu perempuan dari setiap rumah tangga</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi responden di dalam kegiatan kampung dan musyawarah kampung • Tingkat kepuasan, persepsi terhadap kualitas layanan, serta pengajuan keluhan dalam hal layanan kesehatan, pendidikan dan Adminduk
--	--	--

Adapun teknik analisis kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis data survei adalah analisis deskripsi untuk semua responden dan regresi logistik khusus untuk data responden rumah tangga. Penjelasan lebih lengkap untuk teknik analisis disajikan pada Lampiran.

1.4. Tahapan Penelitian

Studi ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

- A. **Studi Pustaka (analisis dokumen program).** Pada tahap awal, tim peneliti melakukan analisis pada dokumen program KOMPAK seperti desain program dan laporan implementasi KOMPAK di Tanah Papua, *blog*, publikasi, dan materi lainnya.
- B. **Workshop outcome harvesting.** *Workshop* ini dilakukan sebagai pintu awal untuk menggali cerita-cerita perubahan selama program KOMPAK berlangsung berdasarkan pengetahuan dari pelaksana program (KOMPAK dan BaKTI). *Workshop* dilakukan pada bulan Juni 2021 di Makassar. Dalam *workshop* tersebut disepakati tiga area tema intervensi, yaitu: (1) Tata kelola dan regulasi seperti dukungan KOMPAK melalui kajian Otsus, advokasi Otsus dan Inpres, perlindungan afirmatif OAP; (2) Pendataan kampung seperti dukungan KOMPAK melalui SAIK+ dan SIO Papua; (3) Sinergi sektoral seperti dukungan KOMPAK dalam perencanaan dan pengawasan pada sektor pendidikan, Adminduk, dan kesehatan.
- C. **Perumusan dan ujicoba instrumen.** Instrumen penelitian disusun berdasarkan cerita perubahan yang disepakati di *workshop outcome harvesting* dan analisis dokumen program. Rancangan instrumen dipresentasikan kepada tim implementasi KOMPAK pada 16 September 2021. Setelah merevisi berdasarkan masukan dari tim implementasi, ujicoba instrumen dilakukan oleh 10 peneliti lapangan kualitatif dan enumerator di Kaimana pada 22–28 September 2021. Setelah itu, dilakukan kembali revisi instrumen berdasarkan masukan dan evaluasi dari tim peneliti ujicoba.
- D. **Pelatihan peneliti lapangan.** Karena pandemi COVID-19, pelatihan peneliti lapangan dilakukan secara daring selama lima hari pada bulan Oktober 2021. Pelatihan diikuti oleh 15 peneliti lapangan kualitatif dan 40 enumerator.

- E. Penggalian data primer di Tanah Papua.** Penggalian data primer dilakukan pada periode November-Desember 2021 dengan wawancara mendalam kepada total 367 informan dan diskusi kelompok dari level kampung hingga provinsi. Selain itu, studi ini juga melakukan survei kepada total 2.159 responden rumah tangga (kepala rumah tangga dan anggota rumah tangga), kepala kampung, kader kampung, kepala Puskesmas, kepala SD, dan kader Posyandu.
- F. *Workshop* pascalapangan.** *Workshop* ini dilakukan bersama peneliti lapangan langsung setelah mereka kembali dari Tanah Papua. *Workshop* ini bertujuan untuk menggali cerita dan informasi awal untuk merumuskan temuan awal penelitian dan sekaligus mengidentifikasi *gap* data lapangan yang perlu diklarifikasi oleh peneliti.
- G. Analisis.** Proses analisis dilakukan dengan menggunakan metode induktif, menggunakan data lapangan (berdasarkan catatan lapangan) yang dilengkapi dengan hasil-hasil diskusi dengan tim lapangan untuk merumuskan temuan studi. Tim peneliti juga beberapa kali berdiskusi dengan tim riset KOMPAK untuk mendapatkan masukan dan mempertajam temuan.

1.5. Pemilihan Lokasi Penelitian

Studi ini dilakukan di lima kabupaten terpilih, yaitu Manokwari Selatan dan Sorong di Provinsi Papua Barat serta Jayapura, Nabire, dan Asmat di Provinsi Papua. Pemilihan distrik⁵ dan kampung⁶ lokasi studi kualitatif dilakukan berdasarkan hasil diskusi dengan tim pelaksana KOMPAK sebagai lokasi *best practice*.

Tabel 1.2. Lokasi studi kualitatif

KABUPATEN	DISTRIK INTERVENSI	DISTRIK NON INTERVENSI
Jayapura	Demta	Waibu
Nabire	Moor	Makimi
Asmat	Akat	Sawaerma
Manokwari Selatan	Oransbari	Nenei
Sorong	Makbon	Aimas

⁵ Distrik adalah sebutan untuk kecamatan di Tanah Papua.

⁶ Kampung adalah sebutan untuk desa di Tanah Papua.

Sementara itu, survei dilakukan di kabupaten yang sama dengan lokasi pengambilan data kualitatif. Studi ini memilih empat distrik di setiap kabupaten, dengan dua distrik merupakan lokasi intervensi KOMPAK dan dua distrik pembanding di lokasi non-intervensi.

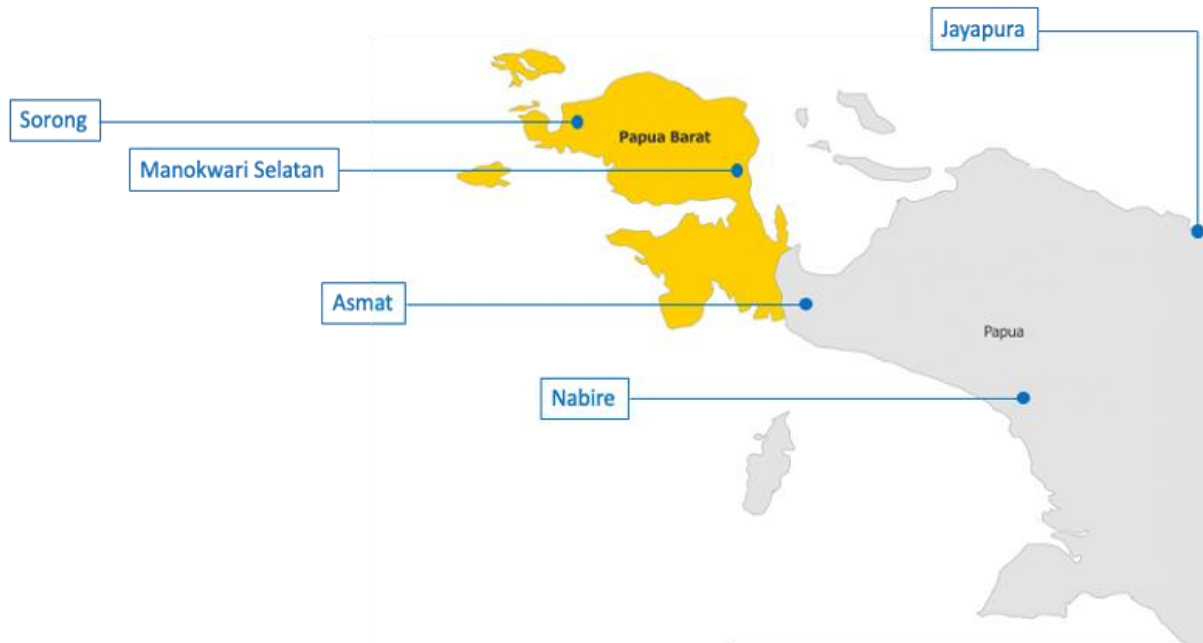
Satu distrik intervensi dipilih mengikuti lokasi penggalian data metode kualitatif, sementara distrik intervensi kedua dipilih secara acak. Distrik-distrik non-intervensi dipilih dengan mengikuti Skor Indeks Komposit yang dibentuk dari 27 indikator yang dikelompokkan ke dalam enam indikator (kebutuhan dasar, pelayanan dasar, ekonomi kampung, sarana transportasi dan komunikasi, pelayanan publik, dan pemerintahan kampung), berdasarkan data Podes 2018. Namun, pada pelaksanaan penggalian data, terdapat dua distrik yang harus diganti menjadi distrik Mariat dan Sorong (Kabupaten Sorong). Pergantian kedua distrik ini dilakukan dengan cepat oleh tim AKATIGA dan KOMPAK dengan pertimbangan keamanan dan aksesibilitas. Tabel 1.3 menyajikan lokasi survei di kelima kabupaten.

Tabel 1.3. Lokasi studi kuantitatif (survei)

KABUPATEN	DISTRIK INTERVENSI	DISTRIK NON-INTERVENSI
Asmat	Akats	Joerat
	Agats	Sawa Erma
Sorong	Makbon	Mariat
	Seget	Sorong
Jayapura	Sentani Timur	Waibu
	Demta	Namblong
Manokwari Selatan	Oransbari	Nenei
	Ransinki	Dataran Isim
Nabire	Moor	Makimi
	Teluk Kimi	Nabire Barat

Lokasi untuk studi ini juga dapat dilihat dalam bentuk peta pada gambar 1.4 berikut.

Gambar 1.4. Peta lokasi studi



1.6. Limitasi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya adalah sebagai berikut.

- A. Berdasarkan pemilihan lokasi studi di lima kabupaten, tujuan penelitian, dan jumlah *sampling* survei, maka perlu dicatat bahwa **studi ini bukan merupakan representasi dari seluruh wilayah intervensi KOMPAK.**
- B. **Penelitian ini bukan merupakan evaluasi setiap program KOMPAK di Tanah Papua dan bukan evaluasi pelayanan dasar.** Seperti yang dijelaskan pada bagian pendahuluan, bahwa program KOMPAK di Tanah Papua memiliki variasi intervensi di wilayah yang beragam, sehingga penelitian ini tidak bertujuan untuk mengevaluasi capaian dari masing–masing intervensi atau program KOMPAK di Tanah Papua. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keseluruhan perubahan yang terjadi dan merunut ke belakang bagaimana kontribusi KOMPAK serta faktor lain atas terjadinya perubahan tersebut. Terakhir, meskipun penelitian ini menggali informasi mengenai pengalaman warga dalam mengakses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan Adminduk), secara metodologis penelitian ini tidak bertujuan untuk menilai pelayanan dasar di lokasi studi.
- C. **Untuk menelusuri perubahan dan kontribusi KOMPAK, penelitian ini harus menelusuri ingatan informan di masa lalu, khususnya pada periode intervensi**

KOMPAK selama 2017-2021. Oleh karena itu, informan dari wawancara mendalam harus banyak mengingat detail dari interaksinya dengan program KOMPAK. Untuk mengantisipasi hal tersebut, peneliti lapangan sudah memiliki pengetahuan mengenai program dalam melakukan konfirmasi kepada informan. Di sisi lain, peneliti melakukan triangulasi dan berusaha mengonfirmasi temuan yang didapatkan dari satu informan kepada informan lainnya.

- D. Terkait survei, terdapat dua limitasi utama dalam studi ini. **Limitasi pertama terkait dengan ketiadaan studi awal (*baseline*) sehingga tidak ada data pembandingan antara kondisi sebelum intervensi dan kondisi sekarang.** Karenanya, respon dari pertanyaan survei hanya dapat menangkap kondisi sekarang. Meskipun penggalan data juga dilakukan di lokasi-lokasi non-intervensi, perbedaan kondisi/respon tidak serta merta dapat diatribusikan kepada intervensi KOMPAK. **Limitasi kedua terkait dengan kesulitan pada saat penggalan data di lapangan, khususnya dalam hal menemukan responden yang memenuhi kriteria untuk dapat menjawab pertanyaan.** Hal ini terutama terjadi pada responden KPMK. Di lokasi non-intervensi cenderung tidak terdapat KPMK. Strategi yang diterapkan studi ini adalah mencari posisi yang melakukan tugas mirip dengan KPMK (melakukan pendataan untuk sistem informasi kampung atau memfasilitasi pertemuan kampung). Sementara responden untuk unit layanan juga tidak mudah ditemukan karena cukup sering tidak berada di lokasi unit layanan saat tim lapangan melakukan penggalan data.
- E. **Perubahan lokasi kampung dan distrik (khususnya non KOMPAK) akibat kendala keamanan dan aksesibilitas.** Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pemilihan lokasi penelitian, tim peneliti telah merancang desain dan *sampling* dari lokasi yang dipilih sesuai kaidah metodologis. Akan tetapi, tim peneliti lapangan mengalami kendala keamanan dan aksesibilitas menuju beberapa distrik dan kampung yang sudah dipilih sebelumnya. Sehingga, terdapat beberapa lokasi penelitian level distrik dan kampung yang harus diganti dengan cepat dan mempertimbangkan keselamatan peneliti.
- F. **Pandemi COVID-19** mengakibatkan uji coba instrumen penelitian dan penggalan data lapangan harus diundur karena tingginya kasus COVID-19 varian delta di bulan Juli-Agustus 2021. Sedangkan opsi mengganti penggalan data primer dengan menggunakan telepon di Tanah Papua hampir tidak mungkin dilakukan mengingat akses internet dan koneksi serta sulitnya mencari informan.

1.6. Struktur Laporan

Laporan ini dibagi ke dalam enam bab. Bab pertama mendeskripsikan latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan, metodologi, dan limitasi penelitian.

Bab kedua sampai kelima membahas temuan penelitian. Pembagian pada keempat bab ini disusun berdasarkan *flagship* KOMPAK Papua, yaitu sistem informasi kampung (bab dua), sinergi sektoral (bab tiga), dan regulasi dan kebijakan (bab empat), serta partisipasi publik (bab lima). Sebagai catatan, perubahan yang diidentifikasi pada bagian partisipasi publik bukanlah merupakan perubahan yang berasal dari hasil intervensi KOMPAK secara langsung. Pada setiap bab temuan penelitian, penjelasan dibagi menjadi empat aspek, yaitu pengantar singkat dari setiap bab, deskripsi bentuk-bentuk perubahan yang terjadi, mekanisme perubahan atau bagaimana perubahan tersebut dapat terjadi atau tidak terjadi, serta pembelajaran apa yang dapat dipetik dari setiap *flagship* yang diteliti.

Bab enam berisi simpulan dan pembelajaran untuk perbaikan desain program pembangunan yang akan dilakukan di Tanah Papua di masa depan.

Selain itu, laporan ini berupaya menunjukkan temuan perubahan pada aspek GEDSI (*Gender Equality, Disability and Social Inclusion*) dengan mengintegrasikannya pada masing-masing bab dan tidak ditempatkan pada topik bahasan tersendiri dalam laporan.

Seluruh nama kampung dan nama informan dalam laporan ini sudah disamarkan.

2. SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI KAMPUNG

Studi ini menemukan dua perubahan sebagai hasil dari intervensi KOMPAK pada aspek Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK). Pertama, tersedianya sistem informasi kampung yang dilengkapi dengan data terbaru tingkat kampung yang inklusif dan relevan dengan konteks Tanah Papua. Kedua, terbangunnya kapasitas teknis pelaksana terutama kader kampung.

Pada tahun 2017 KOMPAK melaksanakan intervensi pada aspek Sistem Administrasi Informasi Kampung (SAIK) di Tanah Papua.⁷ SAIK adalah *platform database digital* untuk menyimpan dan memutakhirkan data kependudukan, sosial, ekonomi setiap rumah tangga di kampung. Intervensi KOMPAK pada aspek SAIK adalah melakukan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kader kampung untuk pendataan. Selain itu KOMPAK juga membangun model dan komitmen pemerintah kabupaten dan provinsi. Dalam perjalanannya, SAIK yang didorong KOMPAK mengalami beberapa kali perkembangan. Pada awal program, SAIK yang dikembangkan masih berbasis luring (*SAIK offline*). Kemudian pada tahun 2020 mulai diperkenalkan SAIK *online* dengan nama SAIK+ di Provinsi Papua Barat dan SIO Papua di Provinsi Papua. Sistem *online* memungkinkan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan data SAIK dengan sistem informasi lainnya. Pada akhir tahun 2021, untuk mengatasi persoalan jaringan internet, SAIK kemudian dibuat untuk versi *offline*.

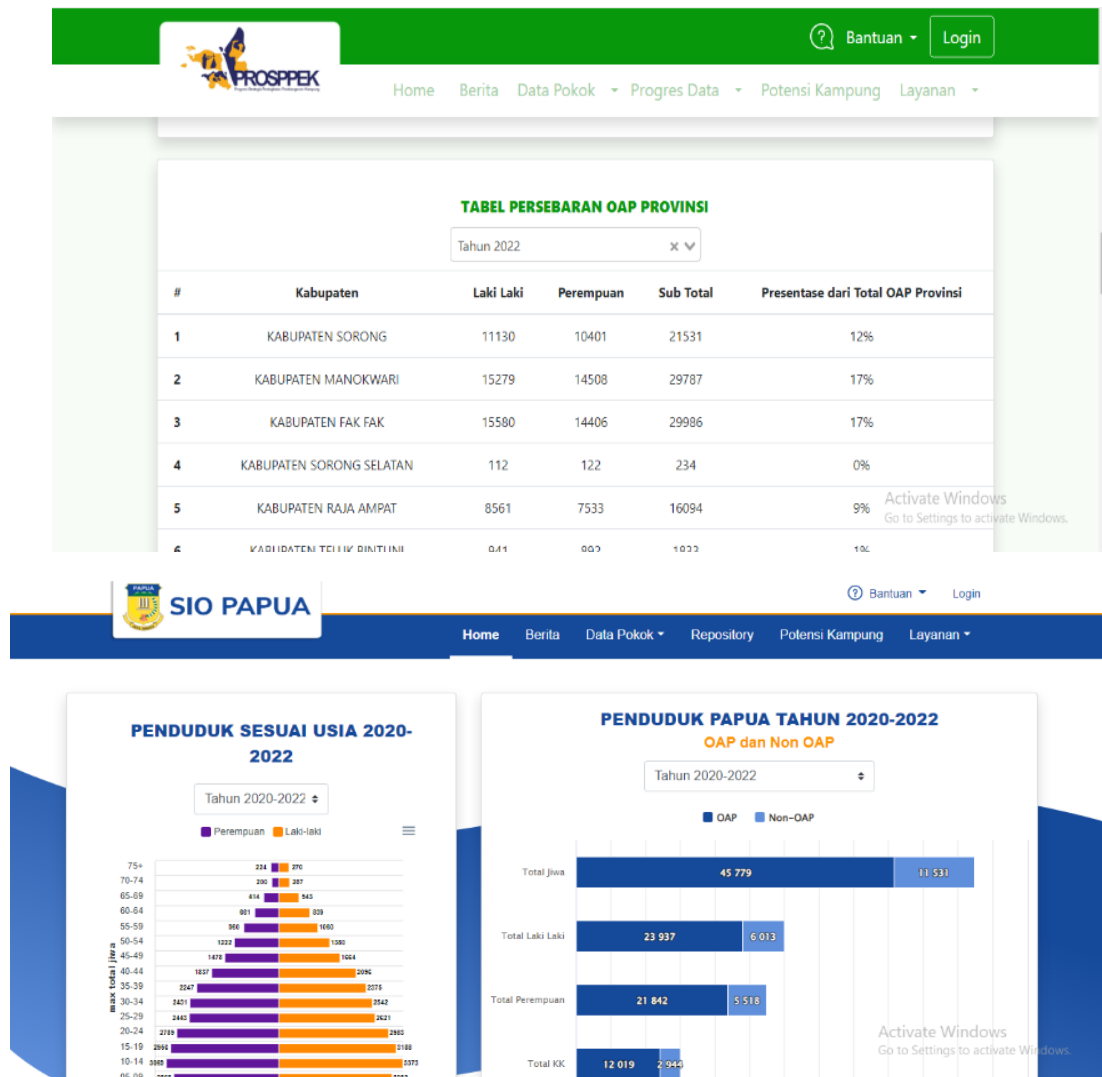
Intervensi program KOMPAK terkait SAIK bertujuan untuk mendukung perencanaan yang berbasis data. Harapannya, pembangunan di kampung menjadi lebih transparan dan tepat sasaran dengan dukungan data yang komprehensif dan aktual. Data SAIK dapat membantu kampung dan masyarakat untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan Orang Asli Papua (OAP) dan kelompok rentan. Di Provinsi Papua Barat, data SAIK+ didorong sebagai basis perencanaan untuk program PROSPPEK OTSUS.

Dalam konteks Otsus, data terpilah antara OAP dan non-OAP menjadi salah satu basis untuk merumuskan berbagai kebijakan di Tanah Papua baik kebijakan perencanaan pembangunan, persyaratan pemekaran, maupun program bantuan pendanaan lainnya. Sebagai kelompok dengan sejarah marginalisasi, OAP adalah kelompok marjinal yang menjadi fokus/target pembangunan di Tanah Papua. Namun, target ini masih menemui tantangan karena statistik

⁷ Istilah SAIK dalam hal ini menggambarkan ketiga *platform* pendataan yang diintervensi oleh program KOMPAK di Tanah Papua yaitu SAIK *offline*, SAIK+ dan SIO Papua

OAP masih terbatas. Keterbatasan statistik OAP ini yang kemudian bisa diatasi dengan tersedianya data SAIK di tingkat kampung.

Gambar 2.1. Tampilan *website* SAIK+ dan SIO Papua



Sumber: *website* SAIK+ dan SIO Papua (diakses pada 12/05/2022)

Studi ini menemukan dua perubahan sebagai hasil dari intervensi KOMPAK pada aspek SAIK. Pertama, tersedianya sistem informasi kampung yang dilengkapi dengan data terbaru tingkat kampung yang inklusif dan relevan dengan konteks Tanah Papua. Kedua, terbangunnya kapasitas teknis pelaksana terutama kader kampung, misalnya dalam pengoperasian *laptop* serta pengambilan dan cara input data. Lebih lanjut, data pada SAIK tersebut telah digunakan oleh pemerintah kampung untuk memperbaiki distribusi bantuan dan membantu administrasi di kampung. Meski demikian, studi ini juga menemukan bahwa data yang sudah ada belum digunakan dalam perencanaan kampung dan perencanaan unit layanan. Karenanya, dibutuhkan langkah penguatan aktor-aktor kunci di tingkat kampung khususnya pengetahuan tentang literasi data dan bagaimana cara menggunakan data secara praktis dalam perencanaan pembangunan di kampung dan unit layanan.

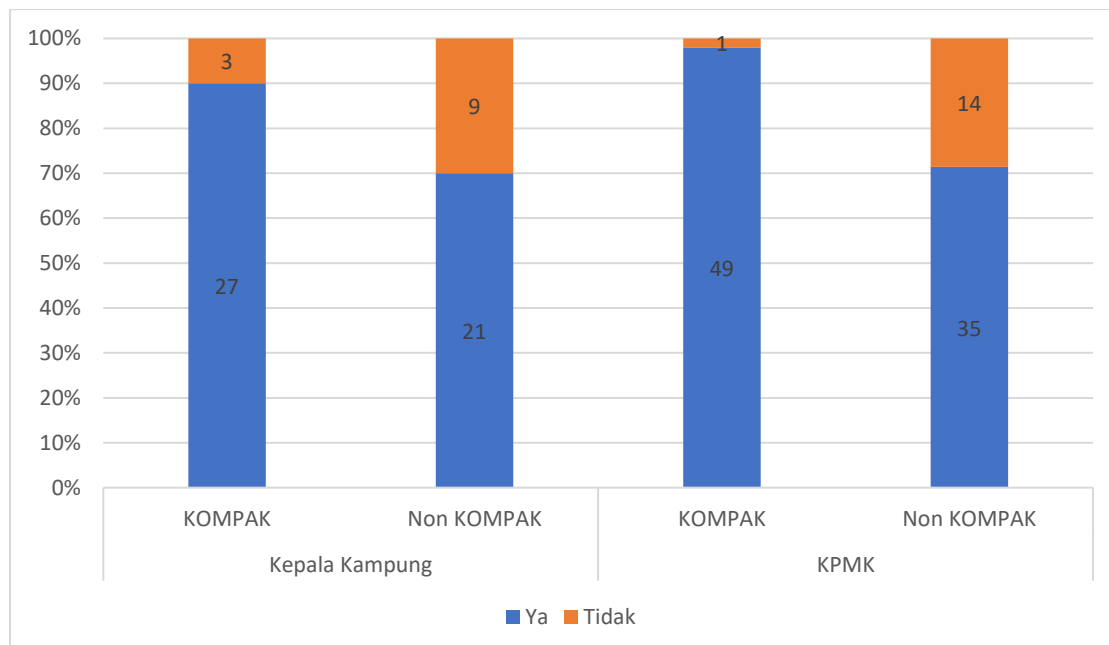
Bab ini akan membahas mengenai perubahan, mekanisme serta pembelajaran terkait dengan intervensi Sistem Administrasi dan Informasi kampung.

2.1. Temuan Perubahan

2.1.1 Tersedianya basis data kampung yang inklusif, relevan, dan terbaru

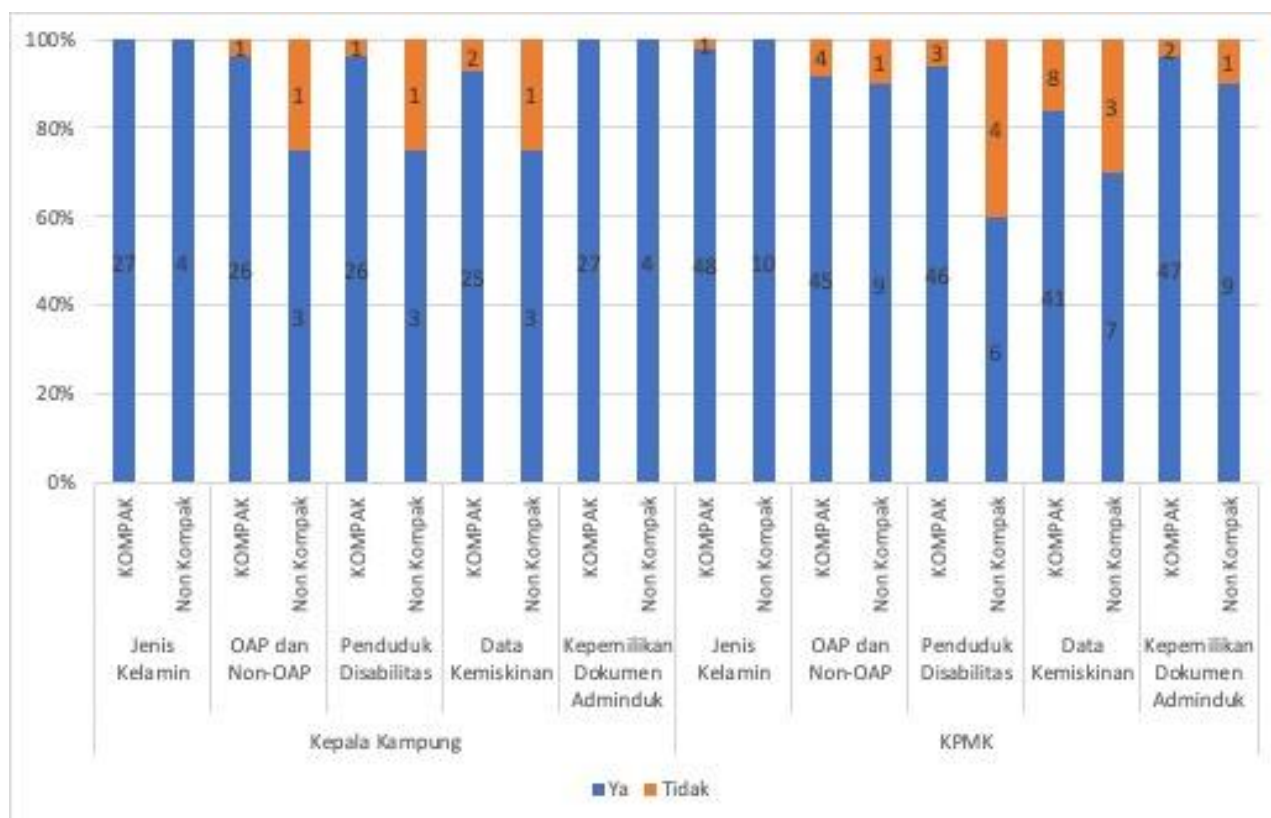
Studi ini menemukan bahwa **intervensi KOMPAK telah berhasil mendorong tersedianya data SAIK yang dilengkapi dengan data tingkat kampung yang inklusif dan relevan dengan konteks Tanah Papua dengan memasukkan identitas OAP/non-OAP, pilah gender dan disabilitas.** Hasil survei menunjukkan bahwa 90% responden kepala kampung dan 98% responden Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPMK)⁸ di kampung intervensi menyatakan telah memiliki SAIK, angka tersebut lebih banyak dibandingkan dengan angka di kampung non-intervensi KOMPAK (Gambar 2.2). Hasil survei juga menunjukkan bahwa baik di kampung intervensi maupun non-intervensi yang telah memiliki SAIK, semua responden kepala kampung dan hampir seluruh responden KPMK menyatakan mengumpulkan data terpilah gender dan data kepemilikan dokumen kependudukan. Di kampung intervensi yang telah memiliki SAIK, rata-rata lebih dari 90% responden kepala kampung dan KPMK yang menjawab telah mengumpulkan data terpilah OAP dan non-OAP, data penduduk dengan disabilitas, dan data kemiskinan, terutama yang melalui pendataan SAIK. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan angka di kampung non-intervensi (Gambar 2.3).

Gambar 2.2. Kepemilikan sistem informasi kampung (SAIK) di kampung intervensi dan non-intervensi (n-kepala kampung=60; n-KPMK=99)



⁸ Mayoritas kader pendataan KOMPAK adalah KPMK (kader kampung) yang mendapatkan serangkaian peningkatan kapasitas dari KOMPAK.

Gambar 2.3. Data yang dikumpulkan dalam Sistem Informasi Kampung (SAIK)
(n-kepala kampung=31; n-KPMK=59)



Selain itu, studi ini juga menemukan bahwa data SAIK merupakan data kampung yang lebih diperbaharui atau aktual. Data SAIK dapat lebih mudah untuk diperbaharui karena orang yang berperan sebagai pendata tinggal dan memang menetap di kampung. Sehingga, jika ada perubahan terkait demografi (kelahiran, kematian) informasi cepat didapat dan proses pembaharuan data bisa lebih cepat dilakukan. Hasil survei menunjukkan sebanyak 88,9% responden kepala kampung dan 79,6% responden KPMK di kampung intervensi yang sudah mempunyai SAIK, menyatakan sudah menyelesaikan proses pendataan SAIK+/SIO Papua. Sedangkan level input data ke sistem/aplikasi SAIK+/SIO Papua bervariasi antar kampung, antara yang sudah diinput sebagian dan yang sudah diinput lengkap. Walaupun terdapat variasi tahap proses penginputan data yang diselesaikan di tingkat kampung, ketersediaan data SAIK menjadikan kampung-kampung di lokasi intervensi memiliki profil kampung yang terkini dan akurat. Sekitar 64,1% responden KPMK di kampung intervensi menyatakan bahwa data SAIK sudah mulai diperbaharui secara rutin, sedangkan di kampung non-intervensi KOMPAK hanya 50% responden KPMK yang menyatakan bahwa data SAIK mereka sudah diperbaharui.

Selain menjadi aktual, data SAIK di kampung intervensi dilakukan dengan metode sensus oleh kader kampung yang merupakan warga lokal, sehingga lebih mendekati realita yang

sebenarnya. Sebelum ada data SAIK, di beberapa lokasi studi kualitatif proses pengambilan data penduduk kampung tidak dilakukan dengan cara sensus, tetapi hanya menunggu laporan dari masyarakat kemudian dicatat di buku profil kampung. Masalahnya, tidak semua masyarakat taat melapor kepada pemerintah kampung. Sehingga biasanya pemerintah kampung hanya mengira-ngira seperti yang diceritakan dua informan berikut.

Sebelum ada KOMPAK, itu dari kampung sendiri yang mendata tapi pendataan kampung itu kadang malas-malas, artinya data itu tidak valid. Mungkin karena mereka malas mendata, setelah ada KOMPAK kita bantu kampung untuk mendata.

—Kader SIO, Asmat

Pemerintah kampung sekarang memiliki data penduduk yang lebih akurat, karena sebelumnya data hanya ditulis di atas meja, ketika ada kelahiran dan kematian bisa dicatat, namun penduduk yang datang dan tinggal tidak terdata. Data hanya sekitar estimasi. Di Kampung Soma misalnya data penduduk dari 20 RT awalnya estimasinya 5000 KK namun ketika ada kunjungan ke rumah-rumah hanya ada sekitar 1000 KK. Di Kampung Kawa awalnya jumlah data estimasi 800 KK namun ketika ada kunjungan pendataan hanya ditemukan 500 KK saja

—Kordis, Papua

Data SAIK yang lebih aktual dapat dijadikan rujukan dalam menyusun profil dan data demografi oleh pemerintah kampung.

dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak diperbaharui. Seperti di Kampung Wakasa (Asmat), sebelum ada data SIO Papua, data penduduk di kampung tidak pernah dimutakhirkan dan masih menggunakan data yang sama dengan pendataan yang dilakukan 10 tahun lalu. Padahal data profil dan demografi kampung biasanya menjadi acuan bagi Disdukcapil untuk melakukan *update* data SIAK (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan).

Data SAIK yang lebih aktual dijadikan rujukan dalam menyusun profil dan data demografi oleh pemerintah kampung. Sebelumnya, kampung cenderung menggunakan data profil dan demografi

Tidak hanya membantu pemerintah kampung untuk memiliki data yang lebih baru, **adanya data SAIK juga mempermudah pekerjaan administrasi pemerintah kampung.** Format SAIK menyediakan *template* untuk berbagai jenis surat pengantar yang dibutuhkan dari kampung seperti surat domisili dan surat pindah datang. Dengan tersedianya *form* ini, proses surat menyurat dinilai lebih efisien oleh kader dan pemerintah kampung. Masyarakat tinggal datang ke kader dan surat bisa langsung dicetak saat itu juga. Kader juga tidak perlu meminta

banyak data lagi kepada masyarakat, cukup memberikan NIK dan saat diinput pada aplikasi maka semua informasi sudah dapat diperoleh.

Dengan tersedianya data SAIK, pemerintah kampung juga bisa lebih cepat menyerahkan laporan data penduduk kepada distrik. Setiap bulan biasanya distrik selalu meminta pembaharuan data kependudukan kepada pemerintah kampung. Namun, selama ini seringkali pemerintah-pemerintah kampung terlambat mengirimkan data kependudukan bahkan ada juga kampung yang menyerahkan data lama. Dengan adanya data SAIK, proses pelaporan data dari kampung ke distrik bisa menjadi lebih cepat. Seperti yang terjadi di Sorong, misalnya, pemerintah kampung cukup meminta kader mencetak data kependudukan SAIK. Data ini yang kemudian diserahkan ke pemerintah distrik. Dengan begitu, tidak hanya lebih cepat pelaporannya, data yang diterima oleh pemerintah distrik juga merupakan data yang terbaru.

Tidak hanya bermanfaat secara administratif, **di mayoritas lokasi studi kualitatif, data SAIK sudah digunakan sebagai rujukan dalam proses distribusi bantuan agar lebih tepat sasaran.** Dari survei responden kepala kampung dan KPMK, mayoritas dari 30 responden kepala kampung (87%) dan 50 responden KPMK (96,8%) di kampung intervensi menyatakan sudah menggunakan data SAIK Papua untuk memperbaiki target distribusi bantuan sehingga lebih tepat sasaran. Sebagai contoh, Pemerintah Kampung Kaso (Sorong) meminta kader kampung memberikan data warga yang belum memiliki jamban dari data SAIK sebagai dasar pemberian bantuan jamban (lihat kotak 2.1). Contoh lain terjadi pada distribusi bantuan mesin perahu di Kampung Wura (Nabire). Bagi pemerintah kampung, adanya basis data yang dapat digunakan langsung oleh mereka untuk distribusi bantuan merupakan langkah yang sangat baik. Karena selama ini banyak bantuan yang masuk ke kampung tetapi pemerintah kampung tidak tahu sumber datanya dari mana. Sehingga seringkali bantuan tidak tepat sasaran dan pemerintah kampung diprotes oleh warga.

Data kependudukan yang diminta distrik biasanya diisi manual sesuai form yang diberikan distrik. Data ini biasa diisi oleh pemerintah kampung, khususnya sekretaris kampung. Namun, karena kesibukan misal seringkali data diminta bertepatan dengan harus masuknya LPJ dana kampung data ini sering telat diterima oleh distrik. Sementara mereka juga harus setor ke Disdukcapil tepat waktu. Akhirnya distrik mengakali dengan memberikan data lama, ini kan jadi tidak baru ya datanya dan sama-sama lagi tiap tahun.

—Sekretaris Distrik, Sorong

Tidak hanya bermanfaat secara administratif, di mayoritas lokasi studi kualitatif (Nabire, Asmat, Sorong) data SAIK sudah digunakan sebagai rujukan dalam proses distribusi bantuan agar lebih tepat sasaran.

KOTAK 2.1 | Penggunaan data SAIK sebagai rujukan distribusi bantuan di Kaso (Sorong) dan Wura (Nabire)

Pada tahun 2019 Kampung Kaso mendapat informasi mengenai program bantuan Jamban Sehat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong. Pemerintah kampung waktu itu diminta oleh dinas menyiapkan informasi berapa kebutuhan dan nama-nama rumah tangga yang belum memiliki jamban permanen. Berangkat dari hal itu, kepala kampung Kaso kemudian menanyakan kepada kader SAIK soal data rumah yang belum memiliki jamban sesuai hasil pendataan. Dalam *form* survei data SAIK memang menanyakan soal kepemilikan jamban dan jenis jamban yang digunakan oleh warga. Sementara, data lain seperti profil kampung tidak ada informasi yang terbaru soal kepemilikan jamban.

Menurut kepala kampung Kaso, ia meminta data dari SAIK karena tidak ingin bantuan asal diterima oleh pemerintah kampung dan diberikan ke warga yang salah. Pengalamannya sejak menjabat jadi kepala kampung (dari akhir 2018), ada banyak bantuan-bantuan yang masuk ke kampung tetapi tidak tepat sasaran. Sehingga, sering warga protes kenapa bantuan tidak merata seperti bantuan PKH dan bantuan *longboat*. Sementara pemerintah kampung juga tidak tahu darimana data-data itu diambil oleh pemerintah kabupaten. Jadi, ketika ada kesempatan bisa memberikan informasi yang sesuai, ia memanfaatkan agar bantuan yang masuk bisa terdistribusi dengan adil.

Saya tanya kader SAIK soal yang punya jamban ini biar ini bantuan benar yang dapat memang yang butuh dan tepat. Jangan sampai lain-lain kaya PKH itu yang dapat hanya 5 KK, saya ditanya sama warga lain kenapa yang dapat hanya sedikit? saya juga tidak tahu itu data datang darimana. Kan banyak tidak jelas ambil data pakai data 10 tahun lalu.

—Kepala Kampung Kaso.

Soal permintaan data ini juga dibenarkan oleh Maruna (kader kampung Kaso) bahwa pada tahun 2019 ia dan Obi (kader SAIK kampung Kaso) diminta oleh pemerintah kampung untuk memberikan nama rumah tangga yang tidak memiliki jamban di rumahnya. Dari data SAIK waktu itu tercatat ada enam rumah di Kampung Kaso yang belum memiliki jamban dan masih menggunakan jamban umum atau menumpang ke rumah lain. Data ini kemudian diberikan kepada Dinas Kesehatan dan saat studi dilakukan seluruh rumah di Kampung Kaso sudah memiliki jamban.

Terkait pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan di kampung, studi ini menemukan bahwa di semua lokasi studi data SAIK baru digunakan untuk mengisi ataupun memperbaharui bab profil dalam dokumen RPJMK. Belum ditemukan adanya pemerintah kampung yang menggunakan data SAIK sebagai sumber data untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan di kampung, menganalisis isu/masalah utama di kampung. Hal ini terkait juga dengan intervensi program yang belum sampai pada membangun kapasitas literasi data aktor kunci di kampung. Pembahasan mengenai isu literasi data akan dibahas pada bagian mekanisme (lihat sub bab faktor penghambat).

Hal yang sama juga ditemukan terkait pemanfaatan data SAIK kampung pada perencanaan di unit layanan. Data yang tersedia belum sepenuhnya digunakan untuk perencanaan Sekolah Dasar (SD) dan Puskesmas. Bagi responden kepala SD yang mengetahui SAIK+/SIO Papua di kampung intervensi (33,3%), baru 20% dari proporsi tersebut yang memanfaatkan data SAIK+/SIO Papua.⁹ Data tersebut dimanfaatkan untuk membuat perencanaan sekolah dan mengidentifikasi anak putus sekolah. Data SAIK memang menyediakan kolom isian untuk informasi jumlah anak usia sekolah dan jumlah anak putus sekolah.

Dari hasil survei di atas bisa terlihat bahwa masih sedikit unit layanan (SD dan Puskesmas) yang bahkan mengetahui soal data SAIK yang dimiliki oleh kampung (33,3%). Tentunya ketidaktahuan unit layanan juga berdampak terhadap tidak digunakannya data SAIK untuk perencanaan unit layanan. Hal ini bisa disebabkan karena tidak dilibatkannya unit layanan dalam proses-proses pendampingan dan pelatihan SAIK.

2.1.1.1. Adopsi program SAIK+ di Provinsi Papua Barat

Studi ini menemukan perubahan khusus di Papua Barat di mana program SAIK+ sudah dimanfaatkan sebagai salah satu komponen dalam Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK) untuk direplikasi di lokasi-lokasi non-intervensi KOMPAK.

Studi ini menemukan perubahan khusus di Papua Barat di mana program SAIK+ sudah dimanfaatkan sebagai salah satu komponen dalam Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK) untuk direplikasi di lokasi-lokasi non-intervensi KOMPAK. Bahkan dalam PROSPPEK juga dimasukkan prioritas isu pendampingan bagi kader kampung. Hal ini merupakan satu bentuk keberhasilan advokasi dan lobi tim KOMPAK yang dapat menyelaraskan program dengan *interest* pemerintah daerah.

⁹ Catatan: Pemanfaatan data SAIK/SAIK+/SIO oleh pihak sekolah terjadi di dua kampung intervensi KOMPAK namun bukan lokasi studi kualitatif. Tim studi tidak bisa mengelaborasi mengapa di dua lokasi itu data dimanfaatkan oleh unit layanan.

Diadopsinya program SAIK+ ke dalam PROSPPEK memberi pengaruh positif dalam pelaksanaan program di level kampung. Pengaruh pertama adalah terkait dengan insentif kader kampung. Di lokasi studi kualitatif di Sorong misalnya ada rencana untuk menaikkan insentif kader menggunakan dana Otsus. Sebelumnya di Sorong, insentif kader masuk dalam skema dana kampung (ADD Operasional) sehingga harus mengurangi jumlah insentif karena harus dibagi dengan insentif untuk aparat dan perangkat kampung lain. Kedua, adopsi ini juga mendorong adanya dukungan distrik untuk membantu percepatan proses pendataan. Dalam hal ini, distrik menggunakan dana Otsus yang mereka dapat untuk membantu transportasi kader, seperti yang terjadi di Kabupaten Sorong. Penjelasan tentang inisiatif dukungan distrik akan dibahas lebih mendalam pada bagian mekanisme.¹⁰

Selain itu, **diadopsinya SAIK+ oleh PROSPPEK juga menjadi potensi untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan SAIK+ ke depan.** PROSPPEK mengamanatkan agar di kabupaten dibentuk Sekretariat Bersama PROSPPEK OTSUS (selanjutnya disebut Sekber PROSPPEK). Sekber PROSPPEK adalah forum kerja yang berisikan beberapa OPD seperti BAPPEDA, Dinsos, Disdukcapil, Diskominfo, DPMK yang dibentuk untuk bertanggung jawab melakukan sosialisasi dan pendampingan program PROSPPEK. Sekber di Papua Barat baru dibentuk di empat kabupaten yaitu Sorong, Manokwari Selatan, Kaimana dan Fak-Fak. Salah satu peran yang akan dilakukan oleh Sekber adalah melakukan pendampingan dan monitoring data SAIK+. Pendanaan Sekber ini akan berasal dari APBD, pada saat studi ini dilakukan, BAPPEDA sudah mengajukan anggaran sebesar Rp300.000.000 untuk kegiatan Sekber di tahun 2022. Anggaran ini akan digunakan untuk operasional tim Sekber, salah satunya kegiatan pendampingan dan sosialisasi soal pendataan SAIK+ ke kampung-kampung.

Terkait adopsi SAIK+ ini, hasil survei menunjukkan baru 55,5% responden KPMK dari kampung non-intervensi yang sudah memiliki SAIK menyatakan bahwa kampung tersebut sudah mengadopsi SAIK+. **Masih ada indikasi kampung-kampung di Papua Barat yang belum mereplikasi sistem informasi SAIK+.** Padahal, pada tingkat pemerintah provinsi, SAIK+ direncanakan sebagai salah satu syarat pemerintah kampung untuk mengajukan usulan dana Otsus. Hal ini mengacu pada Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bahwa salah satu indikator utama pembagian penerimaan dana Otsus adalah jumlah Orang Asli Papua (OAP). Sehingga, pemerintah provinsi Papua Barat merasa penting untuk kampung memiliki data OAP yang akurat agar pemanfaatan dana Otsus tepat sasaran. Hal ini tentunya ini bisa merugikan kampung-kampung yang belum mengadopsi SAIK+. Alasan belum masifnya adopsi SAIK+ di kampung non-intervensi karena pemerintah kabupaten belum melakukan kegiatan pelatihan bagi kader-kader di lokasi yang belum mendapatkan intervensi program KOMPAK. Di sisi lain,

¹⁰ Lihat sub bab faktor pendukung perubahan – Kotak 2.2.

tingkat adopsi yang masih relatif rendah ini dapat dipahami karena memang proses adopsi SAIK+ belum berlangsung lama¹¹.

2.1.2. Peningkatan kapasitas kader

Studi ini menemukan perubahan pada aspek peningkatan kapasitas aktor di kampung, terutama penguatan kapasitas kader kampung (kader SAIK) pada aspek teknis. Intervensi KOMPAK lewat pelatihan dan pendampingan langsung berhasil meningkatkan kemampuan kader dalam hal pengoperasian *laptop* dan aplikasi pendataan, pengambilan data, dan cara input data dalam sistem pendataan berbasis digital yang tergolong kompleks. Apalagi, di lokasi studi kualitatif ada beberapa kader kampung yang tidak memiliki pengetahuan dasar pengoperasian komputer.

KOMPAK ini luar biasa, apa yang saya tidak bisa ini menjadi bisa karena KOMPAK, saya datang dari kaum awam, lulus SMA, kerja sebelumnya sensor kayu, tidak tahu ketik-ketik pakai laptop. Akhirnya diajari oleh Kordis untuk membaca koran dan ketik, ketik mulai dengan 11 jari bisa menghidupkan dan mematikan serta bagaimana tahapan input data bisa dilakukan. Sekarang mau bicara aplikasi apa saja hajar sudah. Bahkan teman-teman yang belajar IT pernah juga meminta belajar.

—Mantan kader kampung, Nabire

Selain kemampuan teknis, kader SAIK sudah mulai menyadari nilai strategis pemanfaatan SAIK dalam proses perencanaan pembangunan kampung. **Pengetahuan didapat tidak hanya dari pelatihan tetapi juga interaksi-interaksi informal dengan pelaksana program.** Perubahan juga terjadi di pemerintah kampung yang menyadari bahwa data dapat digunakan menjadi rujukan distribusi bantuan yang lebih tepat. **Akan tetapi data tersebut belum dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan kampung. Kesadaran kader soal nilai strategis data tidak menjamin bahwa data yang tersedia digunakan sebagai dasar melakukan perencanaan pembangunan di kampung.** Salah satu tantangannya adalah masalah literasi data dari kader kampung. Pendalaman soal hal ini akan dibahas dalam sub bab mekanisme.

Lebih lanjut, studi ini menemukan terjadinya perubahan kapasitas kader dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak aparat kampung dan unit layanan. Di seluruh kampung intervensi yang menjadi lokasi studi kualitatif, peningkatan kapasitas ini juga berhasil mendorong/menstimulasi kader untuk terlibat lebih lanjut dalam musyawarah kampung dan mengetahui lebih banyak informasi mengenai kebijakan dan perkembangan kampung. Bahkan, sudah terbangun kepercayaan antara pemerintah kampung kepada kader

¹¹ Lihat juga penjelasan tentang ini di Bab 4 tentang Regulasi dan Kebijakan.

untuk bisa mendapatkan tanggung jawab atas kerja-kerja pembangunan kampung terutama membantu dalam administrasi kampung (surat-menyurat). Salah satu bentuk kepercayaan itu, misalnya, terjadi di Sorong, di mana seorang kader diangkat menjadi sekretaris kampung.

Sayangnya kemampuan fasilitasi kader belum sampai pada tahap bisa mendorong perencanaan kampung yang lebih baik. Kader lebih banyak dilibatkan untuk membantu hal-hal yang bersifat administratif daripada substansi perencanaan. Berkaca dari kasus kader kampung di Sorong, hal ini terjadi karena adanya faktor ketimpangan relasi kuasa antara pemerintah kampung dan kader. Kebanyakan kader kampung di lokasi studi kualitatif berasal dari generasi muda. Ini membuat kader lebih dilihat sebagai sumber daya yang bisa dimintai bantuan untuk melakukan banyak tugas teknis, seperti mendampingi tamu, menjadi panitia acara, mengurus surat menyurat dibanding dimintai masukan dalam proses-proses perencanaan di kampung.

Meski demikian, dalam konteks Papua dan Papua Barat, **tambahan pengetahuan dan keahlian kapasitas individu pada aspek tata kelola pemerintahan modern merupakan capaian yang besar,** terutama untuk menciptakan aktor-aktor yang bisa membangun perubahan di masa akan datang. Oleh karena itu, keahlian dan kapasitas individu, khususnya kader kampung, dapat dimaksimalkan ke depan dengan terus memberikan pengembangan kapasitas, praktik, tukar menukar informasi dan pengalaman sesama kader. **Di sisi lain, penggunaan teknologi informasi yang tepat guna sangatlah penting. Tepat guna dalam arti bahwa teknologi yang dimaksud harus sesuai dengan konteks di Tanah Papua seperti aksesibilitas, geografis, dan pembangunan infrastruktur penunjang.**

2.2. Mekanisme Perubahan

Bagian ini membahas faktor pendukung dan penghambat perubahan intervensi program SAIK/SIO. Faktor-faktor tersebut ada yang dipengaruhi oleh program KOMPAK (internal), ada pula yang dipengaruhi oleh konteks di luar program KOMPAK.

2.2.1 Faktor pendukung perubahan

Faktor pendorong perubahan pertama dalam intervensi program SAIK adalah mekanisme pendataan KOMPAK yang bersifat *bottom up*. Maksudnya, program KOMPAK menggunakan pengetahuan aktor kunci yang memang menetap dan tinggal di kampung untuk menjadi kader-kader pendataan. Selain itu, program juga mendorong adanya mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh kepala kampung untuk memeriksa apakah data yang dikumpulkan oleh kader sudah benar atau tidak. Sebelum diinput ke dalam aplikasi, kader harus mendapatkan tanda tangan kepala kampung/sekretaris kampung terlebih dahulu. Dengan mekanisme yang dibangun oleh program KOMPAK, data yang dikumpulkan bisa akurat dan aktual.

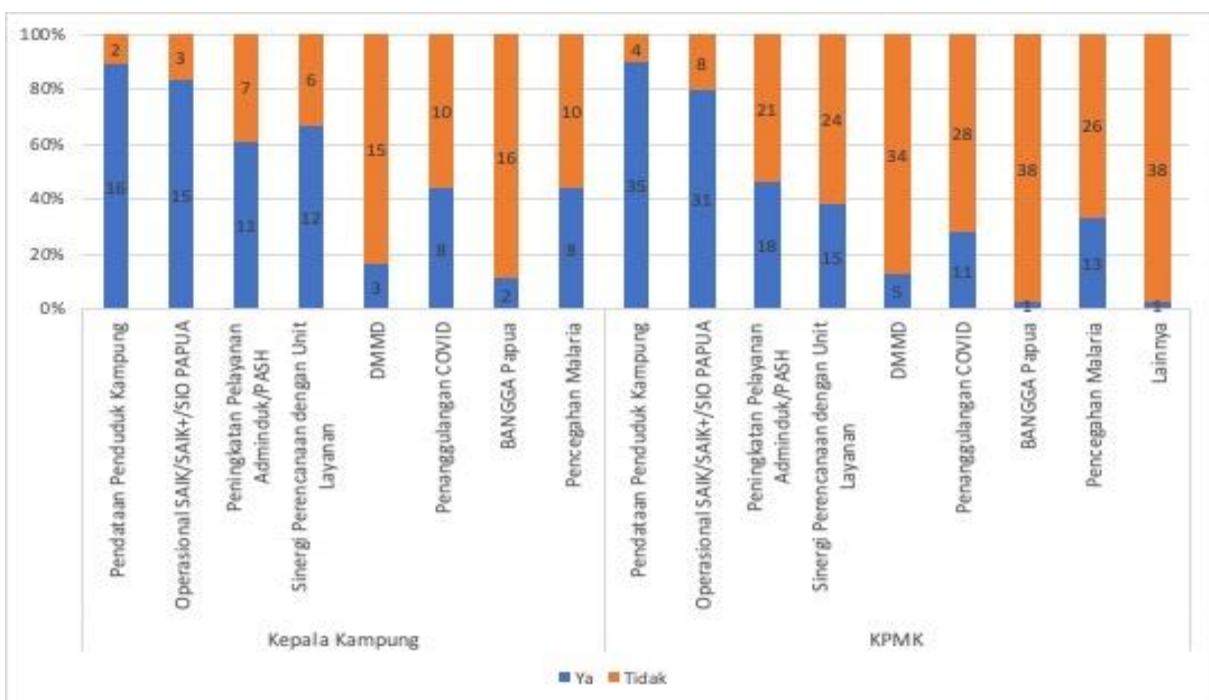
Data penduduk semacam SIO itu kan kita bisa tahu segala hal di situ. Saya sedikit yakin dengan data yang akurat di kampung tentang jumlah penduduk itu data dari LANDASAN KOMPAK. Kenapa saya mengatakan ini karena kader itu, mereka jalan dari rumah ke rumah. Jadi ketika melihat di balai kampung atau distrik terpampang jumlah penduduk itu bukan data terkini, mungkin data 10 tahun yang lalu.

—Pastor, Asmat

Pemanfaatan aktor lokal sebagai kader berpotensi untuk dapat mengatasi keterbatasan model-model program nasional yang sering memakai pendamping/kader dari luar kampung. Dengan aktor lokal, maka kader akan selalu tersedia di kampung dan lebih mudah diakses ketika ada kebutuhan dari pihak kampung. Kemudian, kader dari warga lokal akan memudahkan proses komunikasi dengan warga ketika melakukan pendataan. Kader juga sudah memahami bagaimana dinamika dan konteks kampung sehingga bisa lebih mempermudah proses pendataan.

KOMPAK juga melakukan intervensi khusus kepada kader kampung dengan memberikan pelatihan dan pendampingan teknis terkait program SAIK. Dari hasil survei, sebesar 58,6% responden kepala kampung dan 78% KPMK di kampung intervensi menyatakan mendapatkan pelatihan dari program LANDASAN selama setahun terakhir (2020-2021). Kegiatan pelatihan yang paling banyak diikuti oleh kepala kampung adalah pendataan penduduk kampung (88,9%), operasional SAIK/SAIK+/SIO Papua (83,3%), dan sinergi perencanaan dengan unit layanan (66,7%). Sedangkan kegiatan pelatihan yang paling banyak diikuti oleh KPMK (kader kampung) adalah pelatihan pendataan penduduk kampung (89,7%) dan operasional SAIK/SAIK+/SIO Papua (79,5%), sementara untuk pelatihan sinergi perencanaan dengan unit layanan hanya berkisar 38,5%.

Gambar 2.4. Pelatihan LANDASAN yang diikuti kepala kampung dan KPMK (n-kepala kampung=18; n-KPMK=39)



Faktor pendukung selanjutnya adalah metode pelatihan KOMPAK terkait pendataan yang menggunakan metode praktik langsung. Pada saat pelatihan, kader diminta untuk mengoperasikan langsung di *laptop*/komputer yang tersedia. Metode ini dinilai oleh kader kampung sangat membantu meningkatkan keterampilan secara langsung, bagaimana mengoperasikan komputer, mengoperasikan aplikasi SAIK/SIO, dan tata cara pendataan. Lewat pelatihan-pelatihan yang diberikan, program sudah berhasil memberikan pengetahuan khususnya mengenai aspek teknis pendataan SAIK/SIO kepada para kader kampung.

Perubahan dalam intervensi program SAIK juga dipengaruhi konteks di luar program. Dalam hal ini, konteks Otsus dan insentif dana kampung menjadi dorongan kuat bagi pemangku kepentingan di tingkat kampung untuk antusias terlibat dalam perbaikan dan penyediaan data terpilah. Hal ini karena data terpilah OAP/non-OAP sangat penting untuk proses pencairan dana Otsus. Sehingga, ada kepentingan dari pemerintah kampung untuk mendorong kader mempercepat proses pendataan. Untuk membantu kader di lokasi-lokasi studi, pemerintah kampung mengalokasikan dana kampung dan atau dana Otsus sebagai insentif membayar kader kampung, operasional dan alat penunjang pendataan seperti *laptop* dan *smartphone*.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden kepala kampung dan KPMK, baik di kampung intervensi dan non-intervensi yang memiliki SAIK menyatakan telah mengalokasikan anggaran kampung untuk SAIK¹². Sebagian besar responden kepala kampung dan KPMK menyatakan anggaran kampung yang paling banyak dialokasikan untuk pendanaan SAIK adalah dari dana kampung. Sebagian kecil anggaran tersebut berasal dari dana Otsus, bantuan keuangan dari kabupaten dan atau provinsi, dan sumber dana lainnya. Dukungan dana kampung ini memengaruhi kinerja kader dalam melakukan pendataan. Misalnya yang terjadi di kampung intervensi KOMPAK yang bukan menjadi lokasi studi di distrik Akat (Asmat), bahwa belum adanya kejelasan insentif kader pendataan kampung berdampak pada ketidakseriusan kader dalam melakukan pendataan sehingga proses penyelesaian data menjadi lebih lambat.

2.2.2. Faktor penghambat perubahan

Walau sudah terjadi perubahan, studi ini menemukan faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan yang lebih signifikan terkait intervensi pada aspek SAIK. Faktor penghambat ini ada yang dipengaruhi oleh intervensi program dan ada pula yang dipengaruhi oleh konteks di luar intervensi program.

Faktor penghambat pertama adalah pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh program yang belum sampai pada tahap peningkatan literasi data. Literasi yang dimaksud meliputi kemampuan untuk memahami variabel-variabel data, menggunakan data yang

¹² Bukan hanya SAIK/SAIK+/SIO Papua tetapi juga SAIK lainnya seperti Profil Desa dan Kelurahan [Prodeskel], SAIK Kemendes, dan SDGs desa.

tepat, menganalisis data, dan menggunakannya untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran kampung serta unit layanan. Kemampuan literasi ini menjadi sangat penting dimiliki oleh kader maupun pemerintah kampung dan unit layanan. Ini terutama karena data yang dikumpulkan merupakan data dasar, sehingga diperlukan kapasitas tertentu untuk menurunkan ke dalam rencana-rencana kampung yang bersifat teknis.

Terkait literasi data, studi ini juga menemukan kasus yang mengindikasikan **kader kampung tidak mengetahui definisi variabel yang tersedia di dalam form survei**, sehingga mengisi jawaban secara acak. Seperti yang terjadi di Sorong, kader tidak mengetahui bedanya BPJS PBI dan Mandiri, dan perbedaan antara istilah-istilah bantuan yang diterima masyarakat seperti BLT, tangan kasih, dan lainnya. Hal ini tentunya dapat mengurangi tingkat akurasi dari data SAIK/SIO.

Ya saya terbuka saja, mohon maaf ini saya juga kurang paham ini artinya apa, tapi ya isi saja dengan iya atau tidak...mungkin dulu diajarkan pas pelatihan mungkin saya ngantuk...

—Kader Kampung, Sorong

Untuk mendorong kapasitas literasi data dibutuhkan proses pendampingan yang lebih sering dan konsisten kepada kader kampung, pemerintah kampung dan unit layanan. Sayangnya, di luar pelatihan formal (*workshop*), **studi ini tidak menemukan bukti adanya pendampingan setelah workshop yang secara khusus dilakukan program untuk membangun literasi data; bagaimana cara mengolah, analisis, menginterpretasikan dan memanfaatkan data yang sudah tersedia untuk perencanaan di kampung**. Pendampingan paska-pelatihan lebih banyak dilakukan pada aspek administratif seperti pengecekan *form* kuesioner, sejauh mana data sudah diambil dan diinput oleh kader kampung.

Pemanfaatan data SAIK di beberapa lokasi studi masih belum optimal karena adanya relasi kuasa di tingkat kampung.

Kedua, pemanfaatan data SAIK di beberapa lokasi studi masih belum optimal karena adanya relasi kuasa di tingkat kampung. Di tingkat komunitas, upaya kerja kader kampung sendiri masih menghadapi beberapa tantangan. Di beberapa lokasi studi, dominasi dari kelompok elite kampung membuat orang-orang muda yang menjadi kader kampung belum dapat memiliki posisi yang setara dengan kepala kampung, aparat kampung atau kelompok elite kampung lainnya. Hal ini berdampak pada sungkannya kader kampung melakukan pendataan kepada kelompok elite di kampung. Selain itu, relasi kuasa ini juga menjadi

tantangan kader untuk bisa menekan pemerintah kampung untuk mau menggunakan data SAIK minimal untuk memperbaiki distribusi bantuan. Hal ini misalnya dialami oleh seorang kader kampung Alo di Sorong. Ia tidak berani meminta kepala kampung untuk menggunakan data SAIK karena merasa masih muda dan bukan marga asli seperti halnya kepala kampung. Kepala kampung sendiri berasal dari marga yang membuka tanah kampung.

Peningkatan kapasitas aktor-aktor yang itu-itu saja membuat banyak pelimpahan kerja kepada kader kampung yang bahkan lebih banyak dibandingkan yang diberikan kepada aparat kampung. Kondisi ini berdampak pada banyaknya peran kader kampung dan membuat pengetahuan dan keahlian tidak menyebar. Di lokasi-lokasi kualitatif, ditemukan bahwa kader tidak hanya diberi tugas mengerjakan pendataan SAIK – tetapi juga banyak kader yang ditunjuk membantu pendataan SDGs, Siskeudes, data kesehatan, dan surat menyurat. Bagi kader, multiperan ini menjadi hambatan untuk bisa memfokuskan diri dalam satu peran. Sedangkan bagi kampung, ketergantungan yang besar kepada kader bisa melemahkan peran dan posisi aparat kampung.

Dalam konteks Tanah Papua, banyaknya wilayah dengan keterbatasan akses jaringan internet dan listrik tentu menjadi tantangan tersendiri bagi program-program digitalisasi, seperti program SAIK yang didorong oleh KOMPAK. Dalam konteks program, keterbatasan akses internet dan listrik sangat menghambat proses input dan pembaharuan data oleh kader kampung. Jikapun harus pergi ke lokasi yang tersedia akses internet dan listrik, tentu membutuhkan biaya—terlebih di Tanah Papua masih banyak lokasi-lokasi kampung yang akses jalannya sulit. Namun, kendala ini bisa diatasi jika ada aktor yang membantu operasional untuk kader pergi ke wilayah yang memiliki akses internet. Sebagai contoh, studi ini menemukan inisiatif yang dilakukan oleh Kepala Distrik Makbon, Sorong (Lihat Kotak 2.2).

Peningkatan kapasitas aktor-aktor yang itu-itu saja membuat banyak pelimpahan kerja kepada kader kampung yang bahkan lebih banyak dibandingkan yang diberikan kepada aparat kampung. Kondisi ini berdampak pada banyaknya peran kader kampung dan membuat pengetahuan dan keahlian tidak menyebar. Di lokasi-lokasi kualitatif, ditemukan bahwa kader tidak hanya diberi tugas mengerjakan pendataan SAIK – tetapi juga banyak kader yang ditunjuk membantu pendataan SDGs, Siskeudes, data kesehatan, dan surat menyurat.

KOTAK 2.2. | Inisiatif Kepala Distrik Makbon pada pendataan

Seluruh kampung (14 kampung) di distrik Makbon belum terkoneksi dengan jaringan internet. Bahkan wilayah di ibukota kecamatan juga belum terkoneksi dengan jaringan internet. Hal ini menjadi kendala bagi para kader SAIK untuk melakukan penginputan dan *update* data SAIK+. Akses internet terdekat bisa didapat dengan pergi ke wilayah kota Sorong dengan waktu tempuh satu jam. Tantangan lain adalah belum ada transportasi angkutan umum atau ojek yang rutin setiap saat dari kampung-kampung di Makbon menuju kota Sorong. Sementara itu, tidak semua kader memiliki kendaraan pribadi. Karenanya, untuk pergi ke kota ada kader yang harus meminjam motor kepada warga lain atau aparat kampung.

Untuk menjawab tantangan tersebut, kepala distrik Makbon berinisiatif untuk menjemput seluruh perwakilan kader di 14 kampung dengan kendaraan dinas kemudian diantar ke Kota Sorong untuk melakukan proses penginputan data. Kepala distrik juga ikut menemani para kader melakukan input data sampai selesai. Mereka akan menginap di kota selama dua hari di salah satu rumah kerabat kader SAIK. Kegiatan ini dilakukan rutin setiap hari jumat tiap minggunya sampai target data SAIK+ di Makbon tercapai 100%. Menurut koordinator kabupaten, dengan inisiatif tersebut, saat ini capaian data SAIK+ di distrik Makbon sudah mencapai 97% dengan sedikit perubahan data di beberapa kampung.

Menurut pemerintah distrik, anggaran untuk kegiatan ini diambil dari dana Otsus yang turun ke pemerintah distrik (untuk biaya transportasi dan pembelian konsumsi di kota). Pemerintah Distrik Makbon pada tahun 2020 mendapatkan dana Otsus senilai Rp100.000.000. Dana ini memang ditujukan salah satunya untuk membantu mempercepat proses pendataan SAIK+. Pemerintah distrik sendiri menyebutkan inisiatif ini memang dilakukan agar data di distrik Makbon bisa cepat selesai. Selain bisa cepat digunakan dengan capaian data 100%, selesainya data ini juga akan mempercepat kampung-kampung untuk menerima dana Otsus ke depan.

Menurut kader kampung Kaso dan Alo, hal ini memang rutin dilakukan sejak kepala distrik baru terpilih. Dengan kepala distrik lama tidak ada kegiatan seperti ini. Bagi kader kampung, apa yang dilakukan oleh kepala distrik sangatlah membantu mereka. Sebelum ada inisiatif ini, para kader kampung biasanya berangkat sendiri-sendiri ke kota dan untuk operasional (biaya transportasi) akan meminta kepada pemerintah kampung. Sayangnya, meminta ke pemerintah kampung kadang tidak langsung ada, kadang kader kampung harus menunggu saat uang cair.

Bapak distrik yang baru ini (kepala distrik baru menjabat sekitar empat bulanan) saya akui top, dia jemput kader kampung terus antar dan tunggu di kota untuk input data, semua pakai dana dari distrik.

—Kordinator Kabupaten Sorong

Faktor penghambat perubahan selanjutnya adalah pandemi COVID-19. Pandemi membuat proses-proses pendampingan baik dari koordinator kabupaten (Korkab) dan koordinator distrik (Kordis) menjadi terhambat. Pada awal diberlakukan pembatasan sosial hingga akhir 2020, hampir tidak ada kunjungan langsung yang dilakukan oleh Korkab dan Kordis. Komunikasi menggunakan seluler juga tidak efektif karena banyak wilayah kampung yang tidak mendapat akses jaringan seluler dan internet. Tidak hanya menghambat proses pendampingan, pandemi juga menghambat proses pendataan SAIK online (SAIK+ dan SIO Papua). Pada awalnya proses pendataan akan dimulai pada akhir 2020 atau awal tahun 2021. Tetapi karena masih ada aturan pembatasan kegiatan tatap muka, maka rencana tersebut pun ditunda. Proses pendataan untuk SAIK *online* akhirnya baru dimulai pada pertengahan tahun 2021. Penundaan ini juga mengakibatkan data SAIK *online* belum bisa digunakan dalam perencanaan kampung tahun 2022, karena masih dalam proses penyelesaian data.

Hambatan terakhir, studi ini menemukan bahwa belum jelasnya mekanisme pengawasan rutin untuk memastikan kualitas dan verifikasi data di level kampung. Mekanisme ini diperlukan mengingat studi ini menemukan beberapa tantangan yang dapat mengurangi kualitas data. Tantangan tersebut di antaranya terkait dengan pemahaman definisi variabel data. **Di samping itu, ada indikasi risiko manipulasi data untuk kepentingan pemekaran kampung/akses dana kampung ataupun agar mendapatkan dana Otsus yang lebih besar.** Sebagai contoh, indikasi risiko manipulasi terjadi di Nabire, di mana di salah satu kampung bersiasat untuk menambah jumlah KK (hingga 60 KK baru) dengan membuat KK bagi anak di bawah 17 tahun. Tentunya kondisi-kondisi ini mengurangi kualitas basis data yang sebenarnya jika dimanfaatkan dengan baik bisa memperbaiki tata kelola di kampung.

2.3. Pembelajaran

Penyediaan dan pembangunan data terpilah OAP dan non-OAP di Tanah Papua menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut meliputi sensitivitas politik pemerintah pusat untuk membedakan OAP dan non-OAP dan kendala dalam membangun metode sensus yang akurat dan mutakhir untuk mengidentifikasi OAP. Kendala ini muncul mengingat aksesibilitas yang sulit dan adanya keragaman/perubahan etnis/suku untuk mendefinisikan OAP dan non-OAP. BPS sendiri baru melakukan sensus OAP di tahun 2010 dan dipublikasikan di Statistik Papua Barat dan Papua Asli Dalam Angka 2013. Dalam konteks keterbatasan statistik OAP, temuan studi menunjukkan bahwa intervensi KOMPAK dalam sistem informasi kampung melalui sistem pendataan SAIK mampu membangun basis data terpilah antara OAP dan non-OAP. **Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengumpulan data yang didasarkan pada pengetahuan dari aktor kunci di tingkat kampung cukup efektif untuk membangun basis data terpilah OAP dan non-OAP.**

Lebih lanjut, temuan studi menunjukkan adanya dukungan berbagai pemangku kepentingan di tingkat administrasi kampung, distrik, kabupaten, maupun provinsi. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk komitmen kebijakan dan peran aktif aktor-

aktor di setiap level untuk membangun dan menggunakan data terpilah untuk kebijakan. Temuan studi mengangkat berbagai contoh dukungan aktor kunci seperti kemauan dan peran aktif kepala kampung untuk memverifikasi data, termasuk memberikan input terhadap akurasi data, peran kepala distrik dalam mengalokasikan anggaran distrik untuk mempermudah input data, dan bagaimana data terpilah digunakan untuk memperbaiki penyaluran bantuan sosial. Dukungan aktor kunci terhadap sistem informasi kampung yang dikembangkan KOMPAK sangat terkait dengan relevansi program dalam konteks Otsus yang mensyaratkan data OAP untuk penyaluran kebijakan dan berbagai program pendanaan. Hal ini mengindikasikan bahwa **sistem pendataan yang menjadi basis penentuan penerima manfaat program dan berbagai bantuan pendanaan lainnya akan menjadi insentif bagi pemangku kepentingan.** Karenanya, intervensi KOMPAK pada pendataan untuk SAIK lebih mudah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan.

Studi juga menemukan bahwa meskipun belum konsisten dan sistematis, sistem data terpilah yang dibangun KOMPAK dipandang mutakhir. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pendataan berdasarkan pengetahuan aktor kunci dalam konteks tingginya kebutuhan data OAP untuk mengakses berbagai program pendanaan ternyata bisa digunakan untuk memperbaharui data yang lebih sesuai dengan kondisi. Namun, adanya insentif signifikan untuk penyediaan data terpilah OAP dan non-OAP juga berpotensi membuka peluang manipulasi data seperti yang menjadi catatan di temuan studi. **Untuk memitigasi kemungkinan manipulasi data, sistem verifikasi informasi kampung perlu diperbaiki. Ini misalnya dapat dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat/individu sebagai tim verifikasi data yang memiliki relasi dan jaringan kuat ke komunitas sekaligus, jika memungkinkan, memiliki posisi relatif setara dengan kepala kampung.** Sebagai contoh adalah kelompok kader Posyandu.

Dalam konteks Tanah Papua, kendala aksesibilitas secara geografis dan transportasi serta keterbatasan akses terhadap teknologi informasi seringkali menjadi faktor penghambat program-program pendataan, terutama yang berbasis digital. Temuan studi ini mengangkat praktik baik inisiatif yang dilakukan di tingkat kampung dan distrik untuk memfasilitasi pelaksana program di tingkat kampung menuju kota terdekat untuk melakukan input data. Selain itu, temuan studi ini juga mengangkat refleksi yang dilakukan oleh KOMPAK untuk mengombinasikan metode input data berbasis luring dan daring untuk mengatasi persoalan aksesibilitas dan kendala teknologi informasi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa **kendala aksesibilitas dan keterbatasan teknologi informasi sebagai faktor penghambat program bisa dimitigasi melalui mekanisme penyediaan anggaran transportasi dan komunikasi, dengan berbagai sumber pendanaan.**

Secara khusus, terkait program sistem informasi kampung di Tanah Papua, selain mendorong kampung untuk memfasilitasi anggaran transportasi dan komunikasi, distrik juga berpotensi untuk dapat memfasilitasi dan mendampingi pelaksana kampung untuk melakukan input data kolektif dalam sistem pendataan daring. Hal yang juga penting dilakukan di setiap program

pendataan atau program digitalisasi lainnya adalah mengeksplorasi berbagai bentuk dan mekanisme kombinasi antara data daring dan luring. Ini ditujukan untuk menemukan formula yang tepat dalam konteks wilayah dengan kendala aksesibilitas dan akses teknologi informasi.

Dalam konteks Tanah Papua, salah satu persoalan yang sering diangkat program adalah kapasitas sumber daya manusia yang dianggap kurang ‘cocok/sesuai’ dengan pendekatan program yang mensyaratkan kemampuan penggunaan teknologi informasi dan keterampilan serta pengetahuan tata kelola ‘modern’. **Temuan studi ini mengindikasikan bahwa pendekatan pelatihan formal pendataan KOMPAK dengan metode praktik langsung terhadap kader yang umumnya berasal dari kelompok muda telah berhasil membangun kapasitas dan keterampilan teknis pendataan, seperti input data dalam sistem pendataan daring yang cukup kompleks. Namun, studi juga menemukan bahwa metode tersebut bukan cara yang efektif untuk membangun literasi data—apalagi jika variabel data cukup kompleks dan bervariasi—dan keterampilan menggunakan data untuk kebijakan.** Untuk memenuhi harapan program dalam membangun data untuk perbaikan kebijakan (*evidence-based policy making*), desain program perlu mengembangkan strategi, insentif, dan mekanisme yang lebih spesifik untuk membangun literasi data dan penggunaan data untuk kebijakan.

Untuk itu, program perlu membangun mekanisme di luar pelatihan formal, khususnya melalui proses pendampingan yang berkala dan sistematis terhadap pelaksana di tingkat kampung. Dengan mekanisme ini, ada waktu yang cukup untuk membangun literasi dan bagaimana menggunakan data untuk kebijakan. Dengan mempertimbangkan kesibukan pelaksana program di tingkat kabupaten, program perlu mempertimbangkan untuk melatih dan membangun insentif bagi staf/aparat distrik yang berpotensi membantu koordinator kabupaten untuk mendampingi proses penggunaan data untuk perencanaan di level kampung. Program juga dapat berkolaborasi dan bekerjasama dengan lembaga yang membangun literasi data (seperti BPS) dan penggunaan data untuk kebijakan (*evidence-based policy making*) di tingkat pelaksana kampung dan kabupaten. Selain itu, program dapat membangun mekanisme monitoring evaluasi (*reward* dan *punishment*) yang berfokus pada proses pendampingan dan penggunaan data untuk kebijakan, dengan harapan menjadi insentif bagi pelaksana untuk meningkatkan kualitas penggunaan data.

Keberhasilan program biasanya dipengaruhi oleh dukungan pemangku kepentingan di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, seperti kabupaten, provinsi, dan pusat. Dukungan tersebut bisa diberikan dalam bentuk kebijakan atau komitmen anggaran dan sumber daya. Studi ini menemukan bahwa pemerintah provinsi, khususnya di Papua Barat, secara konkret telah mengadopsi program pendataan SAIK. Di Papua Barat, skala pendataan SAIK diperbesar sehingga mencakup seluruh kampung sehingga dapat menjadi data terpilah sebagai basis data yang tepat sasaran dalam konteks Otsus. Meski demikian, studi ini juga mencatat tidak semua kampung non-intervensi KOMPAK berhasil membangun data terpilah seperti di

kampung intervensi KOMPAK. Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan provinsi penting untuk keberlanjutan dan pengembangan skala program. Tetapi hal ini tetap perlu didukung dengan kolaborasi dan koordinasi lembaga seperti KOMPAK untuk mendampingi pemerintah provinsi melaksanakan dan memastikan program tersebut dijalankan secara efektif.

3. SINERGI SEKTORAL

Studi ini menemukan tiga perubahan sebagai hasil intervensi KOMPAK pada aspek sinergi sektoral yang merupakan bagian dari program LANDASAN di Tanah Papua. Pertama, meningkatnya komunikasi antara pemerintah kampung dengan dengan unit layanan. Kedua, terbukanya akses dana bagi unit layanan dasar terhadap dana yang dikelola oleh kampung. Ketiga, meningkatnya kapasitas kepala kampung dan aktor-aktor di unit layanan dasar (kepala Puskesmas dan kepala SD) dalam melakukan perencanaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.

Dalam kerangka program, sinergi sektoral pada dasarnya merupakan inisiatif untuk memadukan upaya dan sumber daya yang dimiliki antara kampung dan unit layanan dasar kesehatan dan pendidikan untuk menjawab permasalahan yang dialami bersama dan mencapai tujuan bersama.¹³ Pihak-pihak seperti aparat kampung dan aktor dalam unit layanan pendidikan dan kesehatan yang telah memperoleh peningkatan kapasitas diyakini dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada layanan dasar.

Pelatihan dan pendampingan (*workshop*) sinergi sektoral (atau sinergi perencanaan kampung) oleh KOMPAK diujicobakan di kampung secara beragam pada tahun 2019, 2020, 2021. Proses ini bertujuan mendorong perubahan tata kelola kampung menjadi lebih transparan. Selain itu dengan adanya kegiatan sinergi perencanaan, pemerintah kampung didorong untuk membuat RPJMK secara mandiri dengan membentuk tim perencana kampung yang terdiri dari perwakilan unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan unit layanan dasar yang berada di kampung. Sebelum ada KOMPAK LANDASAN, proses perencanaan kampung tidak melibatkan banyak pihak dan hanya menjadi urusan aparat kampung saja. Pada saat itu, keputusan penentuan kegiatan lebih ditentukan oleh pemerintah kampung bersama pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Pelatihan dan pendampingan KOMPAK pada aspek sinergi sektoral di kampung ujicoba menghasilkan dokumen perencanaan kampung (RPJMK/RKPK/matriks perencanaan) yang sinergis dengan unit layanan dasar. Penyusunan dokumen tersebut diawali dengan pembentukan tim perencana kampung atau tim 11 yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Bamuskam

¹³ Memahami Sinergi Perencanaan Kampung dan Unit Layanan dalam Program LANDASAN (KOMPAK, 2020).

termasuk aparaturnya pemerintahan. Dalam prosesnya, mereka didampingi oleh tim LANDASAN dalam menjalankan setiap tahapan kegiatan, mulai dari lokakarya dengan sistem *learning by doing*, identifikasi permasalahan di kampung, sampai tahapan pengusulan kegiatan, termasuk mengakomodir kebutuhan unit layanan dasar.

Studi ini menemukan tiga perubahan sebagai hasil intervensi KOMPAK pada aspek sinergi sektoral yang merupakan bagian dari program LANDASAN di Tanah Papua. Pertama, meningkatnya komunikasi antara pemerintah kampung dengan unit layanan. Kedua, terbukanya akses dana bagi unit layanan dasar terhadap dana yang dikelola oleh kampung. Ketiga, meningkatnya kapasitas kepala kampung dan aktor-aktor di unit layanan dasar (kepala Puskesmas dan kepala SD) dalam melakukan perencanaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Meski begitu, studi ini menemukan bahwa peningkatan kapasitas ini belum berhasil ditransfer secara sistematis kepada aktor lain di masing-masing unit layanan dan belum sampai mencapai tujuan sinergi sektoral. Selain karena alasan seringnya pergantian aktor kunci di unit layanan, hal lain juga dikarenakan pada masing-masing unit layanan belum memiliki mekanisme transfer pengetahuan kepada staf lain.

Secara rinci, bab ini akan membahas perubahan pada aspek sinergi sektoral, mekanisme perubahan yang terdiri dari faktor-faktor yang memengaruhi perubahan baik dari sisi KOMPAK dan di luar KOMPAK, dan pembelajaran dari pendekatan sinergi sektoral.

3.1. Temuan Perubahan

3.1.1. Terbukanya ruang komunikasi antara unit layanan dan pemerintah kampung

Studi ini menemukan bahwa dalam aspek sinergi sektoral KOMPAK telah berhasil mempertemukan dan memperbaiki komunikasi antara unit layanan dan pemerintah kampung dalam satu forum perencanaan bersama yang sebelumnya belum atau jarang terjadi. Proses ini telah membuka ruang komunikasi antara kepala kampung, kepala sekolah, dan kepala Puskesmas. Hubungan di antara ketiga aktor tersebut pun menjadi lebih terbuka. Sebelum adanya fasilitasi pertemuan, kepala sekolah merasa segan berkomunikasi dengan kepala kampung (yang sebagian juga merupakan kepala suku), terlebih lagi mempertanyakan dana kampung. Namun, dengan adanya pengetahuan akses dana kampung bagi unit layanan, hubungan antara keduanya pun menjadi lebih cair. Misalnya, kepala sekolah dan guru-guru di SD di Kampung Beta di Jayapura turut hadir dalam musyawarah kampung-kampung sekitar SD untuk bisa mengakses dana kampung.

Sekolah jadi tahu kalau bisa bekerjasama dengan kampung dalam pembangunan sekolah. Bahkan sekolah juga bisa mengingatkan kepala kampung untuk berkontribusi, mengingat sekolah ada di wilayahnya dan mendidik masyarakat dari kampungnya. Pentingnya koordinasi ini, kami berbagi tugas hadir agar tidak absen dalam musyawarah kampung

—Kepala Sekolah di Kabupaten Jayapura

Sebelum adanya intervensi sinergi sektoral dari KOMPAK, perencanaan pembangunan kampung lebih banyak dilakukan oleh aparat kampung dengan tidak melibatkan perwakilan kelompok dan warga kampung serta unit layanan. Unit layanan dasar baik SD maupun Puskesmas jarang atau tidak pernah diundang/dilibatkan dalam proses perencanaan di kampung. Kepala SD dan kepala Puskesmas juga merasa enggan untuk mencampuri urusan ‘dapur’ pemerintah kampung karena mereka dianggap sebagai elite kampung atau bahkan kepala suku. Selama ini kepala SD dan kepala Puskesmas lebih memilih pasif dalam urusan pembangunan di kampung. Intervensi KOMPAK melalui sinergi perencanaan mulai membuka ruang komunikasi dan koordinasi antara pemerintah kampung dengan unit layanan dasar. Pelatihan dan pendampingan sinergi perencanaan dari KOMPAK memfasilitasi proses komunikasi dan koordinasi ini. Terbukanya komunikasi antara pemerintah kampung dengan unit layanan mendorong pemecahan bersama masalah layanan dasar di kampung. Perubahan ini sangat dirasakan di Asmat dengan konteks pemerintah kampung yang tertutup seperti tergambar dalam kotak 3.1 di bawah ini.

KOTAK 3.1 | Sinergi Sektoral meningkatkan Komunikasi antara Pemerintah Kampung dan Unit Layanan di Asmat

Upaya sinergi sektoral di Kampung Wakasa yang didorong oleh KOMPAK telah membuka ruang komunikasi dan koordinasi antara kepala kampung dengan SD dan Puskesmas. Fasilitator sinergi sektoral untuk Distrik Akat merupakan tokoh agama (Pastor). Pastor ini merupakan tokoh agama yang disegani dan telah lebih dari 25 tahun tinggal di kampung sehingga dekat dan mengerti permasalahan yang dihadapi warga kampung, termasuk masalah pendidikan dan kesehatan. Di sisi pendidikan dasar, banyak anak-anak di Kampung Wakasa yang belum bisa membaca meski sudah duduk di bangku kelas empat atau lima SD. Hal ini turut dipengaruhi oleh seringnya anak tidak pergi ke sekolah pada jam belajar karena ikut bersama orang tua pergi ke dusun—kebun tempat mencari bahan makanan dan menebang sagu—dan menginap beberapa hari di sana. Pelatihan dan pendampingan sinergi sektoral yang lebih intensif di kampung ini turut mendorong kepala kampung untuk mengeluarkan peraturan kampung tentang wajib sekolah dan melarang orang tua membawa anak pergi ke dusun. Dengan adanya peraturan kampung ini, pihak sekolah lebih berani turun langsung ke permukiman warga untuk ‘jemput bola’ agar anak-anak masuk sekolah.

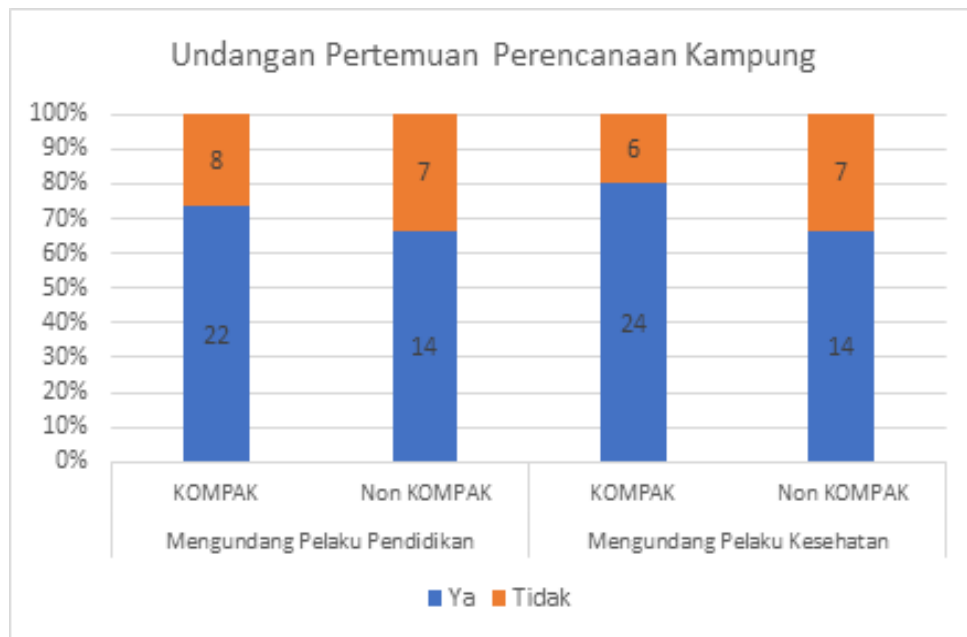
Program LANDASAN itu bagus karena melibatkan aparat kampung, supaya ada kerjasama dengan pemerintah kampung. Permasalahan sekolah jadi bisa diketahui oleh kampung dan kampung jadi bisa membantu. Kalau sebelumnya hanya masing-masing saja. —Kepala Sekolah SD, Asmat

Sementara itu, di Kampung Onao sinergi sektoral telah berhasil membangun proses diskusi dan menghasilkan RKP Kampung. Proses ini salah satunya mengakomodasi usulan pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) untuk meningkatkan persalinan yang dibantu tenaga kesehatan dan menyediakan fasilitas bersalin yang lebih dekat dengan tempat tinggal warga. Selain jarak yang jauh, kondisi jalan dan jembatan menuju Puskesmas rusak dan lebih sulit diakses pada malam hari karena penerangan yang terbatas. Rencana ini disambut pihak Puskesmas dengan memberikan dukungan berupa penempatan petugas kesehatan di Pustu.

Komunikasi dan hubungan antara kepala kampung dan unit layanan, khususnya dengan layanan kesehatan, lebih terlihat di lokasi intervensi KOMPAK dibandingkan dengan non-intervensi KOMPAK. Temuan kuantitatif menunjukkan bahwa lebih banyak responden kepala kampung KOMPAK yang mengatakan bahwa mereka mengundang pelaku pendidikan (73% responden KOMPAK, sedangkan responden non-KOMPAK hanya 67%) dan pelaku kesehatan (80% responden KOMPAK, sedangkan responden non-KOMPAK hanya 67%) dalam pertemuan tingkat kampung (Gambar 3.1).

Respon kepala kampung ini sejalan dengan respon kepala Puskesmas di lokasi KOMPAK, di mana 70% responden kepala Puskesmas yang menyatakan bahwa mereka diundang dalam pertemuan kampung (di lokasi non—intervensi KOMPAK, sekitar 67%). Tingkat kehadiran pihak Puskesmas yang menyatakan diundang juga lebih tinggi di lokasi KOMPAK dibandingkan dengan lokasi non-intervensi KOMPAK.

Gambar 3.1. Jumlah dan persentase responden kepala kampung yang mengundang pelaku kesehatan dan pendidikan dalam pertemuan perencanaan kampung (n = 51)



Namun demikian, respon kepala kampung berbeda dengan respon dari responden pelaku pendidikan. Hanya 30% responden kepala SD di lokasi intervensi menyatakan diundang ke pertemuan kampung, sedikit lebih kecil daripada persentase responden kepala SD di lokasi non-intervensi (44%). Meski begitu, tingkat kehadiran responden kepala SD di kampung intervensi yang diundang ke pertemuan kampung lebih tinggi dibandingkan responden kepala SD di kampung non-intervensi.

3.1.2. Terbukanya akses dana kampung untuk unit layanan dasar

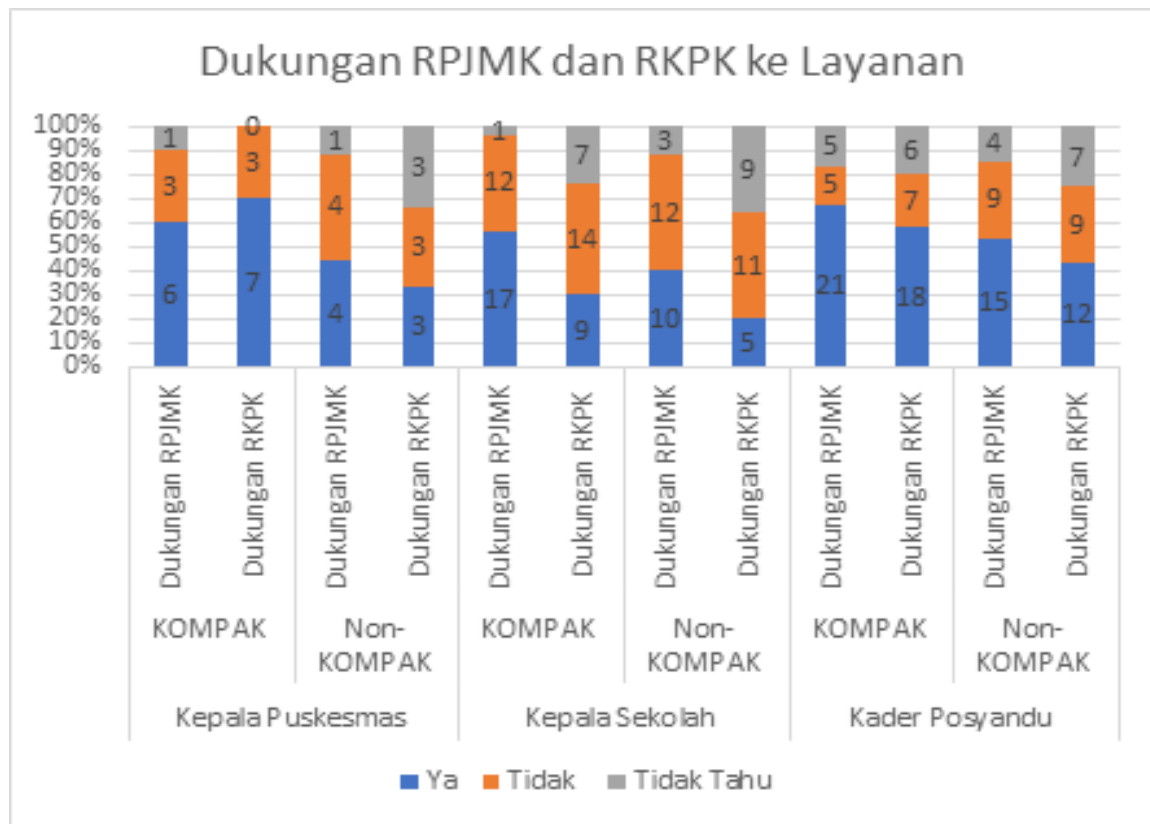
Salah satu perubahan yang paling signifikan di seluruh lokasi studi intervensi KOMPAK dengan adanya sinergi perencanaan adalah adanya dukungan anggaran dana kampung kepada unit layanan pendidikan dan kesehatan di kampung. Sinergi sektoral masih dipahami oleh aktor unit layanan dan pemerintah kampung sebagai akses dana kampung oleh SD dan Puskesmas. Namun pemahaman tersebut belum sampai pada upaya sinkronisasi peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di kampung yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Proses sinergi sektoral ini (dalam hal ini berupa sinergi perencanaan di tingkat kampung) menghasilkan kesepakatan-kesepakatan mengenai kontribusi masing-masing pihak dalam mengatasi persoalan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, seperti rencana program dan alokasi anggaran dari kegiatan yang direncanakan.

Salah satu perubahan yang paling signifikan di seluruh lokasi studi intervensi KOMPAK dengan adanya sinergi perencanaan adalah adanya dukungan anggaran dana kampung kepada unit layanan pendidikan dan kesehatan di kampung.

Pada unit layanan dasar yang mendapat dukungan dana dari pemerintah kampung, dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti honor bidan desa, pemberian makanan tambahan (PMT) bagi anak/ibu hamil, pembelian alat medis bagi Puskesmas, insentif tenaga kesehatan atau kader, kegiatan PMT untuk kegiatan Posyandu, dan beasiswa kampung bagi unit pendidikan. Hal ini juga tercermin dari hasil survei kepada pelaku unit layanan kesehatan (responden kepala Puskesmas dan kader Posyandu) di kampung intervensi. Sebanyak 60% responden kepala Puskesmas dan 68% responden kader Posyandu menyatakan kegiatan pendukung untuk sektor kesehatan ada dalam RPJMK pada kegiatan kampung. Lebih jauh, 70% responden kepala Puskesmas dan 58% responden kader Posyandu menyatakan ada dukungan RPKK pada layanan kesehatan. Dukungan dari kampung dalam RPKK lebih konkret karena menunjukkan adanya anggaran dari kampung yang turun ke layanan kesehatan.

Sementara itu, kegiatan pendukung layanan pendidikan lebih sedikit tercantum dalam dokumen RPJMK dan RPKK. Sebanyak 57% responden kepala SD di kampung intervensi menyatakan ada dukungan RPJMK dan hanya 30% yang menyatakan ada dukungan RPKK. Meski begitu, persentase keduanya masih lebih tinggi dibandingkan dengan responden di kampung non intervensi. Respon kepala SD, kepala Puskesmas dan kader Posyandu terkait dukungan RPJMK dan RPKK terhadap layanan kesehatan dan pendidikan tergambar pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2. Dukungan RPJMK dan RKPK terhadap layanan pendidikan, Puskesmas, dan Posyandu (n-kepala puskesmas=19; n-kepala sekolah=55; n-kader posyandu=59)



Mengacu pada aturan formal seperti UU Desa 2014, PP 43/2014, PP 60/2014, Permendes 19/2017 tentang penggunaan dana kampung, kampung telah mengalokasikan dana kampung (dana kampung (dari APBN), alokasi dana kampung (dari kabupaten), Otsus) untuk mendukung layanan pendidikan dan kesehatan sejak sebelum adanya intervensi dari KOMPAK. Tetapi saat itu proses perencanaan anggarannya masih dilakukan terbatas oleh internal pemerintah kampung. Di sisi lain, meskipun dapat menjadi acuan alokasi untuk layanan dasar pendidikan dan kesehatan, regulasi-regulasi tersebut tidak sepenuhnya bersifat terbuka untuk pembiayaan berbagai kegiatan atau pembelian barang/jasa. Karenanya, dukungan dana dari kampung lebih banyak bersifat *top-up* untuk variabel kebutuhan yang sudah dianggarkan oleh unit layanan. Misalnya, untuk penambahan makanan tambahan untuk balita atau anak sekolah (PMT/PMT Anak Sekolah - PMTAS) baik di Puskesmas maupun SD, masing-masing unit layanan telah memiliki anggaran sendiri, namun besarnya belum proporsional dengan jumlah balita/anak yang dilayani. Dalam hal ini dana kampung memberi tambahan dukungan dana agar cakupan dan kualitas PMT/PMTAS menjadi lebih luas dan lebih baik. Hal ini sejalan dengan dukungan KOMPAK dalam mendorong kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan di unit layanan dapat terfasilitasi dari dana kampung.

Lebih lanjut, akses dana oleh unit layanan pendidikan dan kesehatan ini berpotensi meningkatkan transparansi penggunaan dana kampung. Kepala SD dan kepala Puskesmas mulai mempertanyakan dan mengetahui besaran anggaran kampung dan mekanisme mengaksesnya, namun tidak terjadi sebaliknya. Sebagai contoh, kepala SD dan guru SD di distrik Demta, Jayapura menjadi aktif hadir dalam musyawarah kampung untuk mengetahui proses perencanaan dan alokasi dana kampung yang bisa diakses oleh SD untuk mendukung layanan dasar pendidikan. Sementara itu, transparansi pengelolaan dana unit layanan dasar kepada pemerintah kampung belum terjadi. Di sisi lain, akses dana kampung oleh unit layanan dasar tetap berlanjut karena selaras dengan insentif dan motivasi pelaku unit layanan dasar untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan pemerintah kampung. Meski demikian, di kabupaten lain, keaktifan unit layanan dasar (SD dan Puskesmas) setelah tidak ada pendampingan sinergi perencanaan tidak lagi berlanjut. Proses perencanaan kampung pada tahun berikutnya kembali ke pola lama dan lebih menyesuaikan dengan pendamping P3MD dengan alasan kepraktisan. **Pelaporan penggunaan dana oleh unit layanan lebih bersifat vertikal ke atas kepada masing-masing dinas terkait dan di sisi lain belum ada mekanisme pengawasan yang efektif dari pemerintah kampung kepada unit layanan dasar.** Belum adanya transparansi tambahan dana kampung untuk unit layanan dasar tergambar pada kotak 3.2 di bawah ini.

KOTAK 3.2. | Belum ada Pengawasan atas Dana Kampung untuk Unit Layanan

Salah satu bentuk sinergi perencanaan antara Pemerintah Kampung Onao dengan SD Persiapan Negeri Onao muncul dalam bentuk dukungan untuk Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS). Alokasi dana kampung untuk PMTAS ini sesuai dengan yang ditetapkan oleh P3MD. Pada konteks Asmat, pemberian PMTAS menjadi sangat penting karena dapat menarik anak-anak untuk pergi ke sekolah. Jika tidak ada PMTAS, siswa yang hadir ke sekolah bisa sangat sedikit. PMTAS ini biasanya diberikan dalam bentuk susu dan biskuit. Jika tidak ada susu, sekolah mengganti dengan teh atau bahkan kopi. Anak sekolah di SD ini juga sangat menyukai kopi.

Kampung memberikan tambahan dana untuk PMTAS di SD ini sebesar Rp15.000.000 dan langsung diberikan melalui kepala sekolah. Namun, tambahan dana tersebut digunakan untuk membiayai beberapa kebutuhan sekolah yang bukan sebagai tambahan kebutuhan PMTAS. Sebesar Rp7.000.000 digunakan untuk membangun ruang guru dan jembatan penghubung kampung dengan sekolah. Sebesar Rp5.000.000 dibagi kepada sepuluh guru yang membantu pembangunan ruang guru. Masing-masing guru mendapatkan uang sebesar Rp500.000. Sisanya, sebesar Rp3.000.000 digunakan untuk membiayai kegiatan rapat dengan orang tua dan dewan guru. Diakui sendiri oleh kepala sekolah, tambahan dana dari kampung ini tidak digunakan sebagai penunjang PMTAS agar tidak tumpang tindih karena sudah ada alokasinya dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ia berkata, *Untuk kebutuhan LPJ ke kampung, foto-foto pembagian tambahan makanan untuk siswa bisa dari foto-foto pelaksanaan PMTAS dari BOS.*



Foto 3.1. Jalan jembatan yang dibangun menggunakan dana PMT dari kampung (Foto oleh Nurkumala Dewi)

Program LANDASAN KOMPAK tidak langsung memberikan intervensi pada hal-hal peningkatan kualitas layanan dasar seperti menyediakan guru tambahan atau mempercepat pengadaan obat-obatan di Puskesmas. Akan tetapi, intervensi KOMPAK ada pada perbaikan teknis dan administratif tata kelola unit layanan sebagai upaya peningkatan akreditasi. Upaya peningkatan akreditasi dilakukan oleh KOMPAK dari sisi perbaikan dokumen rencana anggaran masing-masing unit layanan. **Meski sudah terdapat dokumen rencana anggaran yang lebih sistematis dan terdapat dukungan dana dari kampung yang menunjang pemenuhan syarat akreditasi, baik SD maupun Puskesmas belum sepenuhnya mampu meningkatkan akreditasi.** Beberapa syarat akreditasi masih sulit dipenuhi oleh pihak unit layanan meskipun telah tersedia dukungan tambahan dana dari kampung. Syarat-syarat tersebut meliputi ketersediaan dokter di Puskesmas atau penambahan ruang belajar di SD. Pemenuhan aspek-aspek akreditasi ini sangat bergantung pada dinas yang menaunginya. Status akreditasi unit layanan pendidikan (SD) dan kesehatan (Puskesmas) di lokasi studi yang mendapatkan intervensi KOMPAK tergambar pada tabel 3.1 di bawah.

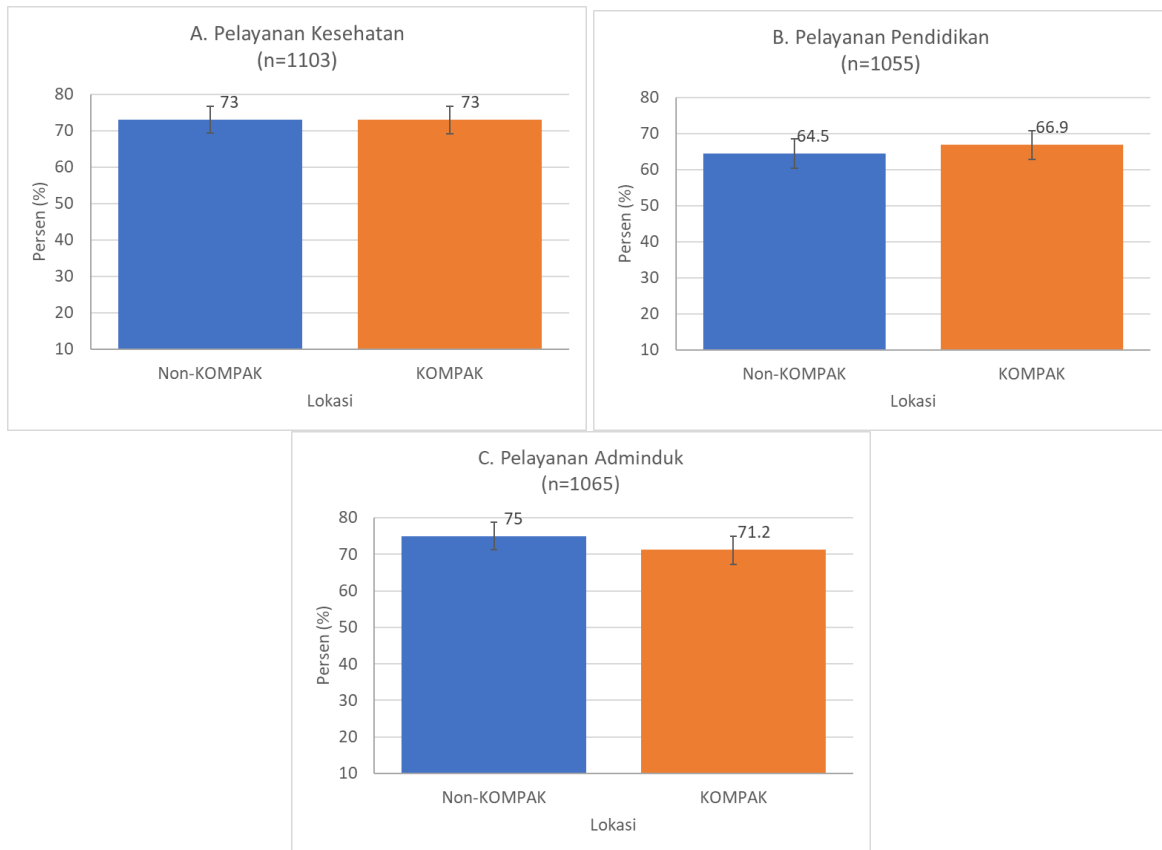
Tabel 3.1. Tabel akreditasi SD dan Puskesmas di lokasi intervensi KOMPAK

KABUPATEN	UNIT LAYANAN PENDIDIKAN		UNIT LAYANAN KESEHATAN	
	Nama Sekolah Dasar	Status Akreditasi	Nama Puskesmas	Status Akreditasi
Jayapura	SD A	C	Puskesmas Demta	Dasar
	SD B	B		
Nabire	SD A	C	Puskesmas Moor	Belum terakreditasi
	SD B	C	Puskesmas Mambor	Belum terakreditasi
Asmat	SD A	C	Puskesmas Akat	Belum terakreditasi
	SD B	C		
Sorong	SD A	B	Puskesmas Makbon	Belum terakreditasi
Manokwari Selatan	SD A	B	Puskesmas Oransbari	Madya
	SD B	B		

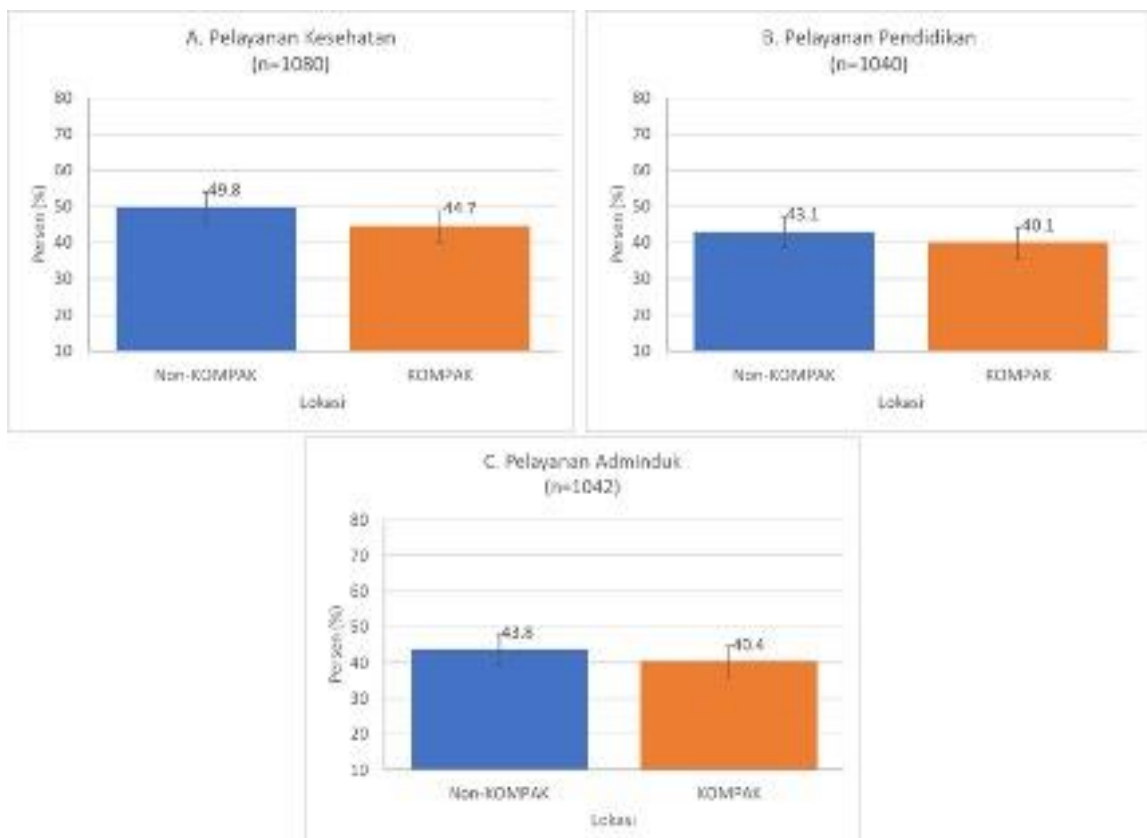
Intervensi KOMPAK pada perbaikan tata kelola unit layanan belum dapat dirasakan di tingkat masyarakat. Intervensi yang dilakukan KOMPAK tidak secara langsung pada hal teknis peningkatan layanan namun lebih mendorong perbaikan perencanaan unit layanan termasuk dokumen perencanaan. Dukungan KOMPAK ini telah berhasil mendorong ketersediaan dokumen perencanaan yang lebih sesuai standar. Melalui sinergi perencanaan, dukungan dana dari pemerintah kampung tidak menasar kepada penyediaan fasilitas unit layanan karena dukungan tersebut masih sangat ditentukan oleh dinas-dinas yang menaungi. Hasil survei terhadap anggota rumah tangga menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam hal tingkat kepuasan (Gambar 3.3.-A) serta persepsi terhadap perubahan kualitas (Gambar 3.3.-B) dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan di antara lokasi KOMPAK dan non-KOMPAK. Selain itu, survei juga menemukan tidak terdapat perbedaan yang signifikan berdasarkan gender dalam hal kepuasan terhadap layanan dan kualitas layanan dibandingkan dengan dua tahun sebelum survei (Gambar 3.3-C dan Gambar 3.4-D).

Intervensi KOMPAK pada perbaikan tata kelola unit layanan belum dapat dirasakan di tingkat masyarakat. Intervensi yang dilakukan KOMPAK tidak secara langsung pada hal teknis peningkatan layanan namun lebih mendorong perbaikan perencanaan unit layanan termasuk dokumen perencanaan.

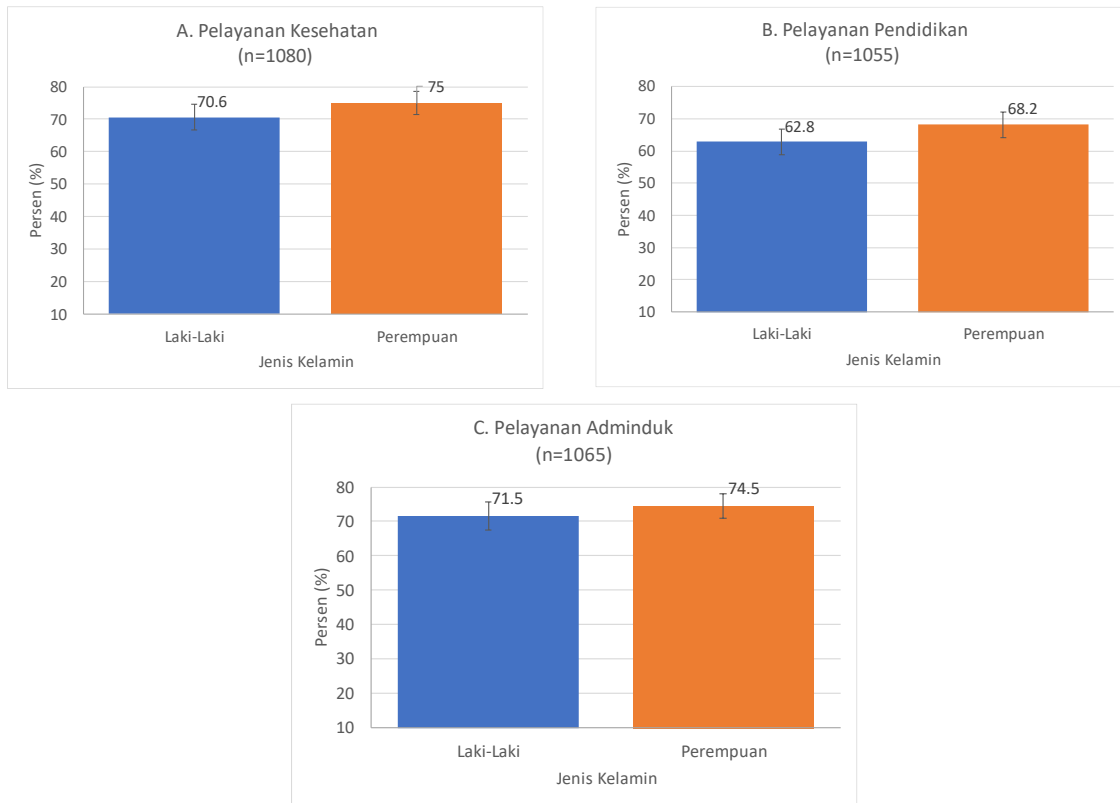
Gambar 3.3.-A. Persepsi kepuasan responden terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan adminduk berdasarkan lokasi



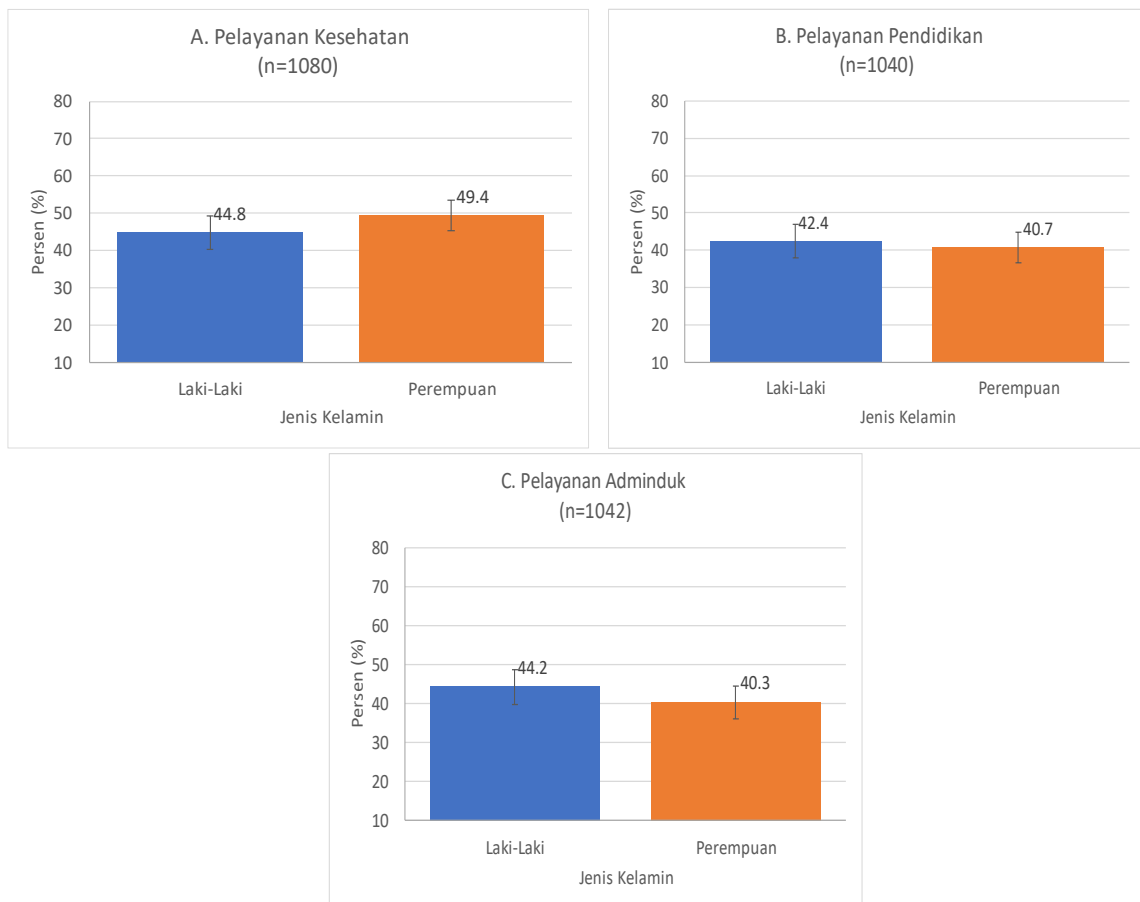
Gambar 3.3-B. Persepsi responden terhadap kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan Adminduk sekarang dan dua tahun lalu berdasarkan lokasi



Gambar 3.3.-C. Persepsi kepuasan responden terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan Adminduk berdasarkan jenis Kelamin



Gambar 3.3-D. Persepsi responden anggota rumah tangga terhadap kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan adminduk sekarang dan dua tahun yang lalu berdasarkan jenis kelamin



3.1.3. Peningkatan kapasitas perencanaan pada aktor unit layanan

Studi ini menemukan bahwa intervensi KOMPAK pada proses sinergi sektoral yang didorong di tingkat kampung dan unit layanan telah meningkatkan kapasitas kepala kampung dan aktor-aktor di unit layanan (Kepala Puskesmas dan Kepala SD) dalam penyusunan dokumen perencanaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Pelatihan yang diberikan KOMPAK-LANDASAN kepada pemerintah kampung memberikan pengalaman dan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah mereka dapatkan. Penguatan kapasitas dalam perencanaan memberikan banyak pengetahuan baru, khususnya dalam pembuatan dokumen RPJMK. Sebelumnya, belum pernah ada pendampingan serupa dari P3MD, semua penyusunan dokumen perencanaan di kampung dilakukan tanpa melibatkan pemerintah kampung. Selain itu, peningkatan pengetahuan dan kapasitas juga terjadi pada Bamuskam. Di Kampung Onao, Asmat, ketua Bamuskam baru menyadari peranan penting Bamuskam dalam kegiatan musyawarah kampung sebagai inisiator kegiatan, yang mengundang pemerintah kampung dan masyarakat untuk menghadiri kegiatan musyawarah kampung¹⁴.

Dia (KOMPAK LANDASAN, ed) membantu kami punya wawasan, apa yang kami belum tahu, jadi tahu.

—Kepala Kampung, Asmat

Kepala kampung meningkat pengetahuan dan keterampilannya dalam proses penyusunan dokumen perencanaan yang sistematis dan sinergis dengan unit layanan dasar. Prosesnya dimulai dengan membuat matriks RPJMK/RKPK. Secara konsisten, lebih besar persentase responden unit layanan di lokasi KOMPAK yang menyatakan ada dukungan dari kampung—terutama dalam RPJMK—terhadap kegiatan unit layanan¹⁵. Sementara untuk dukungan dana yang tertuang dalam RKPK, persentase responden kepala SD yang menyatakan ada dukungan RKPK tahun anggaran 2021 lebih sedikit dari responden kepala Puskesmas dan kader Posyandu.

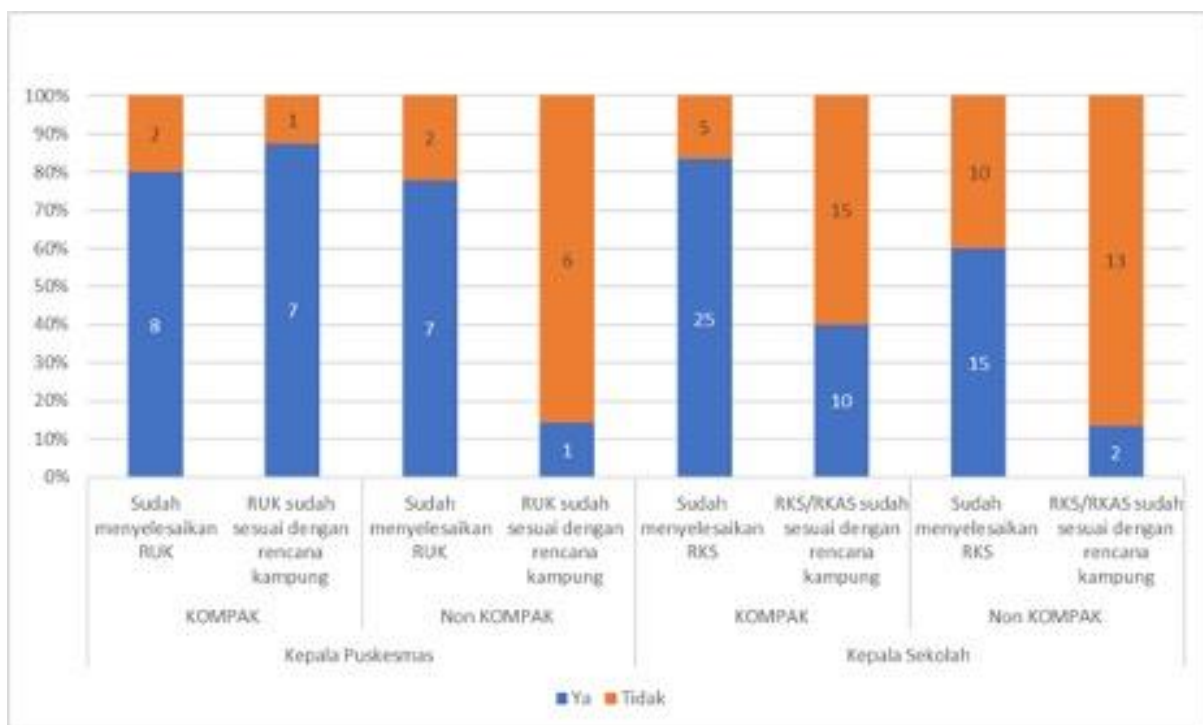
Di kampung non-intervensi, sekitar 44% responden kepala Puskesmas, 40% responden kepala SD, dan 54% responden kader Posyandu menyatakan ada dukungan dari RPJMK. Dukungan dari RKPK untuk kegiatan unit layanan di kampung non-intervensi juga lebih kecil yaitu 33% responden kepala Puskesmas, 20% responden kepala SD, dan 43% responden kader Posyandu.

¹⁴ Peningkatan kapasitas Bamuskam dijelaskan lebih lanjut di Bab 5 tentang Partisipasi Publik.

¹⁵ Dukungan RPJMK/RKPK lebih detail pada bagian sub bab peningkatan komunikasi antara unit layanan dan pemerintah kampung dalam proses perencanaan kampung).

Peningkatan kapasitas ini juga tercermin dalam upaya untuk mendorong sinergi dokumen perencanaan. Secara konsisten, kepala kampung, kepala Puskesmas, dan kepala SD di kampung KOMPAK menyatakan sudah menyesuaikan dokumen perencanaan kampung dan perencanaan unit layanan. Di lokasi intervensi KOMPAK, persentase kepala Puskesmas dan kepala SD yang sudah menyelesaikan rencana unit layanan lebih tinggi dibandingkan dengan di lokasi kampung non-intervensi. Sekitar 80% responden kepala Puskesmas di kampung intervensi menyatakan sudah menyelesaikan RUK tetapi baru 46% dari persentase tersebut menyatakan dokumen RUK sudah disinergikan dengan perencanaan kampung. Sementara untuk responden kepala SD di kampung non-intervensi KOMPAK, sekitar 83% responden sudah menyelesaikan RKS tetapi baru sekitar 40% dari persentase tersebut yang menyatakan dokumen RKS sudah disinergikan dengan perencanaan kampung (Gambar 3.4).

Gambar 3.4. Sinergi dokumen rencana unit layanan dengan rencana kampung (n-kepala Puskesmas=19; n-kepala sekolah=55)



Manfaatnya cukup bagus karena memang sebetulnya itu yang dibutuhkan oleh Puskesmas. Seperti contoh mereka (Tim KOMPAK-LANDASAN) mendampingi kita untuk penyusunan RUK dan RPK. Jadi disitukan kita akan mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh Puskesmas. Tidak hanya kita mengerjakan yang sudah dilimpahkan oleh program Dinas Kesehatan misalnya.”

Kepala Puskesmas, Asmat

Selain itu, **terjadi peningkatan pengetahuan mengenai tata kelola unit layanan terkait syarat dan proses akreditasi di masing-masing unit layanan, khususnya pada Kepala Puskesmas dan Kepala SD.** Tersedianya dokumen perencanaan unit layanan menjadi salah satu syarat akreditasi. Seperti halnya di kampung, unit layanan dasar juga mendapatkan intervensi KOMPAK dalam penyusunan dokumen perencanaan yang lebih sistematis sesuai dengan standar format baku yang ada.

Namun demikian, pemenuhan standar akreditasi ini sulit dipenuhi, tidak hanya terkait ketersediaan guru yang mencukupi dan infrastruktur pendukung yang memadai, tetapi juga persoalan penyesuaian standar kurikulum. Sebagai contoh, SD di Kampung Wura dan Yaur (Nabire) memilih tetap menggunakan standar kurikulum-13 dan tidak mengikuti standar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) karena dianggap lebih sesuai konteks murid-murid di sana. Pada kurikulum-13 kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa tidak sebanyak pada KTSP dan tidak ada mata pelajaran Bahasa Inggris (dihapus) untuk kelas satu sampai kelas empat. Terbatasnya jumlah guru di masing-masing SD juga menjadi alasan kurikulum yang dipilih oleh pihak sekolah untuk lebih mengutamakan kompetensi dasar.

Meski demikian, peningkatan kapasitas di atas belum berhasil ditularkan secara sistematis kepada aktor lain di masing-masing unit layanan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa, setelah pelatihan tidak ada proses berbagi pengetahuan tentang apa yang mereka dapatkan dari KOMPAK. Hal ini, diperburuk dengan seringnya terjadi rotasi (seperti pergantian pimpinan pada unit layanan) pada unit-unit layanan sehingga proses perbaikan tata kelola unit layanan berjalan lebih lama.

Studi ini juga menemukan bahwa peningkatan kapasitas aktor-aktor kunci pada pemerintah kampung dan unit layanan dasar belum sampai pada peningkatan kapasitas dan pengetahuan mengenai esensi/tujuan sinergi. Meskipun pemahaman dan kapasitas terkait sinergi sektoral pada aktor-aktor kunci di unit layanan yang mendapatkan intervensi langsung dari KOMPAK meningkat, pelaksanaannya masih belum sinergis dan berkelanjutan. Seperti yang terjadi di Sorong, upaya sinergi perencanaan memang sudah menghasilkan matriks perencanaan kampung. Namun, karena dukungan data dari Puskesmas (data anak stunting)

tidak diberikan kepada pemerintah kampung, maka dukungan dana untuk layanan kesehatan dari kampung pun menjadi tertunda. Contoh lain terjadi di Nabire dan Asmat yang kembali ke cara lama dalam menyusun dokumen perencanaan dengan mengikuti format dari P3MD. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketidaksesuaian format pada saat sinkronisasi dengan prioritas pembangunan kabupaten.

3.2. Mekanisme Perubahan pada Sinergi Sektoral

3.2.1. Faktor pendukung perubahan

Faktor pendukung perubahan pada aspek sinergi sektoral dapat berasal dari internal program KOMPAK maupun dari luar KOMPAK. Dari internal KOMPAK, studi ini menemukan empat faktor pendukung yang membuat beberapa perubahan dalam aspek sinergi sektoral terjadi.

Pertama, pengetahuan dan pelatihan sinergi sektor yang diberikan KOMPAK, terutama pendanaan kampung untuk unit layanan dasar, telah berhasil mendorong perencanaan bersama yang lebih sinergis. Melalui pelatihan-pelatihan, KOMPAK memperkenalkan prosedur dan mekanisme baru perencanaan yang bersinergi yang mampu membangun motivasi dari kepala SD dan kepala Puskesmas untuk mendapatkan dana tambahan. Ini memberikan dorongan kepada unit layanan untuk mengakses dana kampung untuk mendukung layanan dasar pendidikan dan kesehatan yang lebih sesuai dengan konteks kebutuhan di kampung. Karenanya, *pasca-workshop* dan pendampingan yang dilakukan KOMPAK, kepala SD dan kepala Puskesmas melanjutkan komunikasi kepada kepala kampung mengenai kebutuhan-kebutuhan atau rencana kegiatan unit layanan dan melihat potensi kegiatan yang dapat dibayarkan oleh dana kampung.

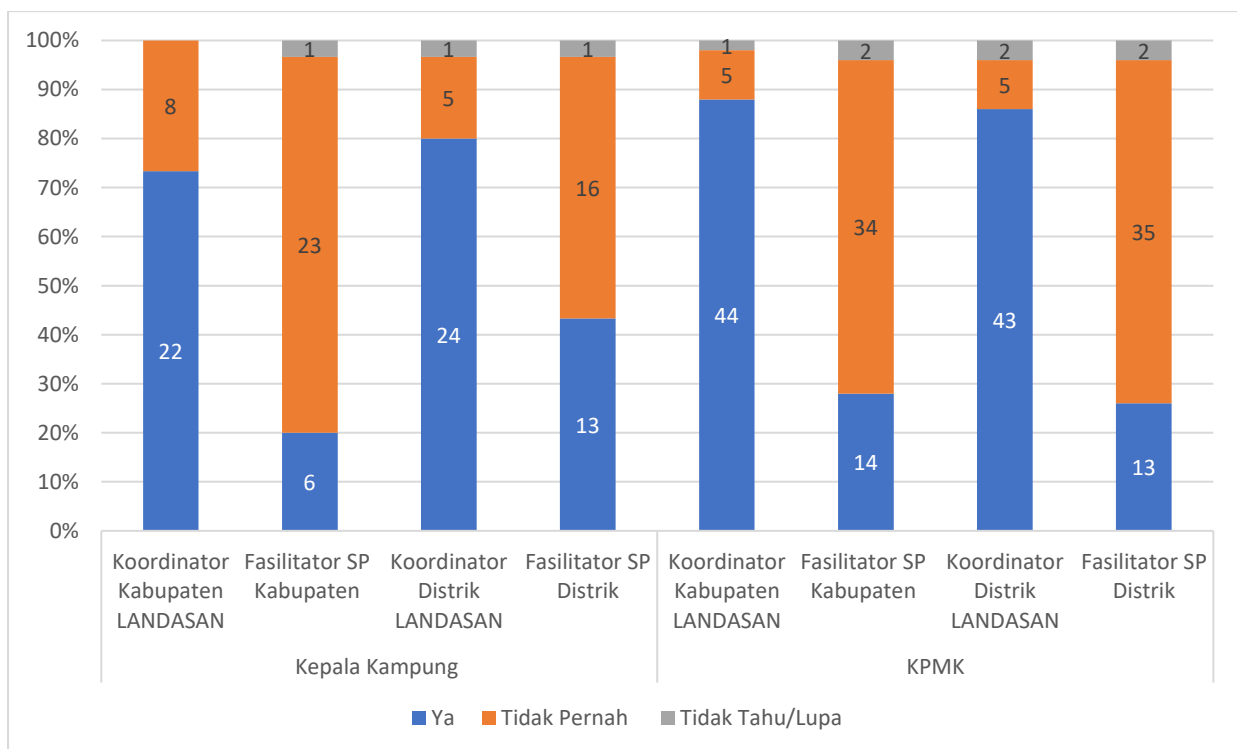
Kedua, fasilitator sinergi perencanaan yang berasal dari komunitas lokal yang berada di level kampung/distrik. Dibandingkan dengan fasilitator yang berasal dari OPD, fasilitator sinergi perencanaan yang langsung berasal baik dari kampung maupun distrik memiliki komunikasi yang lebih baik dengan aparat kampung. Komunikasi yang terjalin di antara kedua pihak ini cenderung berlanjut dan terjadi tindak lanjut karena intensitas komunikasi dan pertemuan yang sering. Hal ini dikarenakan fasilitasi dari aktor tingkat kabupaten hanya terjadi saat acara/kegiatan formal seperti *workshop* yang diselenggarakan KOMPAK sehingga hubungan dengan antara aparat kampung dan unit layanan tidak dijaga secara menerus. Hasil survei responden kepala kampung dan responden KPMK di kampung intervensi menunjukkan mayoritas responden bertemu dengan perangkat program (koordinator kabupaten dan distrik) dalam satu tahun terakhir (2020-2021) (Gambar 3.5.). Sebanyak 73% responden kepala kampung dan 88% responden KPMK menyatakan bertemu dengan koordinator kabupaten LANDASAN serta sebanyak 80% responden kepala kampung dan 86% responden KPMK menyatakan bertemu dengan koordinator distrik LANDASAN. Respon ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase responden yang menyatakan bertemu dengan

fasilitator sinergi perencanaan (PNS atau staf OPD - pemerintah distrik dan pemerintah kabupaten).



Pengetahuan dan pelatihan sinergi sektoral yang diberikan KOMPAK, terutama pendanaan kampung untuk unit layanan dasar, telah berhasil mendorong perencanaan bersama yang lebih sinergis.

Gambar 3.5. Pertemuan kepala kampung & KPMK dengan aktor LANDASAN dalam satu tahun terakhir (2020-2021) (n-kepala kampung=30; n-KPMK=50)



Ketiga, dukungan pemerintah distrik dalam proses perencanaan kampung yang sinergi dengan unit layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Intervensi KOMPAK dalam mendorong pelibatan pemerintah distrik pada sinergi sektoral juga merupakan faktor pendukung berhasilnya sinergi sektoral di tingkat kampung. Peran pembinaan dan pengawasan pemerintah distrik pada proses pembangunan di kampung dianggap sebagai perhatian nyata pemerintah distrik kepada pemerintah kampung.

Di distrik Oransbari (Manokwari Selatan), intervensi KOMPAK terhadap pemerintah distrik mampu meningkatkan dukungan dan keterlibatan dalam proses perencanaan pembangunan kampung. Model sinergi sektoral dianggap sebagai proses perencanaan yang lebih mendekati dengan konteks kebutuhan kampung utamanya pada kebutuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, Pemerintah Distrik Oransbari mendukung adanya pelatihan

sinergi perencanaan bagi kampung-kampung lain yang bukan menjadi lokasi ujicoba sinergi perencanaan oleh KOMPAK. Dukungan dan peran kepala distrik dalam melakukan pembinaan juga menjadi penting dalam upaya replikasi ini seperti dijelaskan dalam kotak 3.3 di bawah ini.

KOTAK 3.3 | Replikasi Sinergi Perencanaan pada Kampung-kampung Non-intervensi KOMPAK di Distrik Oransbari

Ujicoba Sinergi Sektoral di Distrik Oransbari dilakukan di Kampung Waran sejak tahun 2019. Pelatihan penyusunan RPJMK dilakukan selama lima hari di Kampung Waran yang melibatkan seluruh aparat kampung, kader, serta perwakilan tokoh masyarakat dan perempuan. Penyusunan dokumen RPJMK yang dirumuskan melalui proses sinergi sektoral antara pemerintah kampung, SD, dan Puskesmas berhasil diselesaikan pada tahun 2020.

Model pelatihan dan pendampingan Sinergi Sektoral dari KOMPAK ini mendapatkan respon positif dari pihak Kepala Distrik Oransbari. Bersama dengan KOMPAK, kepala distrik menindaklanjuti dengan membentuk Tim 11 yang terdiri dari aparat kampung, Bamuskam, tokoh masyarakat, dan pendamping distrik untuk menyiapkan program kerja kampung. Selain itu, kepala distrik juga melakukan pendampingan pelaksanaan musyawarah kampung hingga penyelesaian dokumen RPJMK.

Kepala Distrik Oransbari juga menyebarkan gagasan untuk program sinergi sektoral ke seluruh kampung di Distrik Oransbari baik yang bukan menjadi intervensi KOMPAK maupun kampung intervensi KOMPAK tetapi bukan lokasi *piloting* Sinergi Sektoral. Upaya ini berhasil mengajak 13 kampung lain di Distrik Oransbari untuk mengadakan pelatihan sinergi sektoral dengan pembiayaan sendiri, bukan dari KOMPAK. Masing-masing kampung mengupayakan dana secara mandiri sebesar Rp10.000.000 sedangkan Pemerintah Distrik Oransbari memberikan dukungan tambahan dana sebesar Rp20.000.000. Total dana yang terkumpul digunakan sebagai pembiayaan pelatihan sinergi sektoral.

Pelatihan sinergi sektoral di Distrik Oransbari baik dari pembiayaan KOMPAK maupun mandiri telah menghasilkan total 14 Dokumen RPJMK. Hanya RPJMK Kampung Waran saja yang sudah disahkan, sementara RPJMK 13 kampung lainnya belum disahkan karena bertepatan pada ujung pergantian kepala kampung.

Keempat, peran koordinator distrik penting dalam mendorong perubahan di tingkat kampung meskipun masih terkendala dengan intensitas pendampingan yang belum optimal. Meski demikian, dibandingkan dengan fasilitator kabupaten, koordinator distrik merupakan aktor kunci yang signifikan yang lebih banyak berkomunikasi dan mendampingi pemerintah kampung dan unit layanan. Koordinator distrik menjadi tempat bertanya dan berdiskusi bagi pemerintah kampung dan unit layanan yang paling mudah ditemui dan paling cepat memberikan respon dibandingkan dengan fasilitator yang lain. Di sisi lain, koordinator distrik juga memiliki keterbatasan sumber daya terlebih bagi koordinator distrik yang harus memberikan pendampingan pada kampung-kampung yang tidak berada dalam satu daratan (misalnya di Nabire dan Asmat). Pendampingan pada kampung-kampung yang demikian membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar sementara tidak ada dukungan pendanaan yang lebih. Sementara itu, peran fasilitator kabupaten dalam peningkatan kapasitas di kampung lebih banyak sebagai pendamping bagi kampung untuk menyusun perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prinsip kebutuhan bersama. Studi ini menunjukkan bahwa pendampingan antara fasilitator kabupaten dengan kampung lebih banyak dilakukan pada ruang formal seperti workshop yang diselenggarakan KOMPAK. Beberapa alasannya adalah keterbatasan anggaran bagi fasilitator untuk melakukan pendampingan secara rutin atau sudah memiliki tanggung jawab rutinitas dinas yang banyak.

Selain dari sisi KOMPAK, perubahan yang terjadi terkait sinergi perencanaan juga dipengaruhi oleh faktor yang bersifat eksternal. Studi ini menemukan tiga faktor pendukung eksternal yang berpengaruh terhadap terjadinya perubahan pada aspek sinergi sektoral.

Pertama, perencanaan pembangunan yang sinergi yang didorong oleh KOMPAK selaras dengan insentif kepala Puskesmas dan kepala SD dalam mendapatkan dana tambahan sebagai *top-up* atau tambahan kuantitas untuk kegiatan layanan kesehatan dan pendidikan. Meskipun tambahan dana dari kampung tidak secara langsung dapat meningkatkan akreditasi unit layanan, tetapi ia cukup membantu memberikan dukungan pada tambahan kuantitas layanan dasar. Misalnya, dukungan dana kampung untuk PMT atau PMTAS turut menambah jumlah dan jenis makanan tambahan yang diberikan untuk ibu hamil, anak balita, dan anak sekolah.

Kedua, sinergi sektoral di tingkat kampung juga sinkron dengan tata cara atau juknis alokasi anggaran yang dimandatkan oleh regulasi-regulasi yang berlaku. Upaya sinergi sektoral yang didorong oleh KOMPAK sejalan dengan aturan penggunaan dana kampung yang diprioritaskan untuk mendukung layanan dasar di kampung, termasuk kesehatan dan pendidikan. UU Desa dan aturan turunannya seperti PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tentang Desa mengamanatkan desa (kampung) untuk melaksanakan tugas peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kesejahteraan keluarga yang meliputi peningkatan kesehatan, pendidikan, usaha keluarga, dan ketenagakerjaan. Selain itu, PP 60/2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN juga mengatur penggunaannya yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Lebih lanjut, Permendes, PDT dan Transmigrasi No.19/2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa juga menyebutkan bahwa berdasarkan kemanfaatan prioritas Dana Desa digunakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan. Meskipun dalam peraturan ini secara spesifik menyebutkan pendidikan yang dimaksud adalah fokus pada pendidikan usia dini dan balita namun penggunaan dana kampung (yang bukan bersumber dari APBN) masih bisa digunakan untuk mendukung pendidikan dasar seperti dukungan dana bagi SD.

Faktor ketiga yang mendukung perubahan sinergi sektoral di tingkat kampung adalah kehadiran lembaga/program lain yang mempunyai perhatian pada perbaikan layanan dasar dan tata kelola unit layanan dasar. Di Sorong misalnya, pada 2015 UNICEF melakukan intervensi pada peningkatan pengetahuan mengenai perencanaan dan penganggaran Puskesmas dan mendorong tersedianya dokumen-dokumen perencanaan di Puskesmas yang lebih berkualitas. Peningkatan tata kelola SD juga menjadi perhatian Universitas Muhammadiyah di Sorong melalui program peningkatan angka literasi siswa dan pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SD lokasi studi di Sorong. Contoh lain terjadi di Asmat, di mana Wahana Visi mendukung peningkatan literasi dan kesadaran kesehatan reproduksi bekerja sama dengan Puskesmas Akat. Dukungan untuk layanan kesehatan juga terjadi di Nabire dengan hadirnya program Nusantara Sehat dari Kementerian Kesehatan untuk peningkatan layanan kesehatan di kepulauan bersama Puskesmas di kampung Wura dan Yaur.

3.2.2 Faktor penghambat perubahan

Sinergi sektoral yang telah dilakukan di berbagai kampung intervensi KOMPAK juga menghadapi kendala sinergitas di tingkat kabupaten. Kendala yang dihadapi bisa berasal dari internal maupun eksternal KOMPAK.

Dari sisi internal KOMPAK, studi ini menemukan bahwa pendampingan oleh fasilitator sinergi perencanaan dari OPD kurang efektif memberikan fasilitasi pada pemerintah kampung dan unit layanan. Pendampingan lebih banyak dilakukan pada ruang-ruang formal seperti pada saat *workshop* sinergi perencanaan yang diselenggarakan bersama dengan KOMPAK. Bagi kampung-kampung yang memiliki isu geografis seperti kampung-kampung di kepulauan (Nabire) dan rawa-rawa (Asmat), tidak ada pendampingan oleh fasilitator kabupaten pascaworkshop. Peran ini lebih banyak digantikan oleh koordinator distrik namun tidak maksimal karena tanggung jawab lain koordinator distrik untuk program KOMPAK juga banyak yang harus diselesaikan. Selain itu, dari sisi fasilitator kabupaten masih menganggap bahwa pendampingan ke kampung-kampung merupakan pekerjaan tambahan dan tidak ada sumber daya (dana) untuk melakukan pendampingan tersebut.

Faktor lain dari sisi internal KOMPAK adalah intervensi yang dilakukan terlalu fokus pada prosedur administratif. Pendampingan lebih mengutamakan produk perubahan berupa dokumen perencanaan kampung (RPJMK/RKPK) dan unit layanan (RKS/RKAS/RUK) namun belum berhasil memperkuat koneksi dengan OPD terkait seperti DPMK, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Dalam konteks perencanaan, memperkuat hubungan kampung dan unit layanan dengan OPD sangat penting karena proses perencanaan akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan kabupaten. Penyelarasan rencana di tingkat kabupaten dengan tingkat kampung perlu didukung dengan koordinasi yang efektif. Sayangnya, hal ini belum dilakukan secara optimal. Konsultasi terkait kendala yang dihadapi oleh pemerintah kampung dan unit layanan masih belum terjalin secara komunikatif. Misalnya, pada mayoritas Puskesmas di lokasi studi yang belum terakreditasi, perencanaan kegiatan dan anggaran masih sangat dipengaruhi/ditentukan oleh pihak Dinas Kesehatan. Contoh lain setelah proses sinergi perencanaan dilakukan di tingkat kampung, koordinasi dengan pemerintah kampung di Sorong dengan DPMK dan P3MD belum terjalin dengan optimal sehingga masih ada beberapa perencanaan yang diubah dan disesuaikan lagi.

Sementara di sisi eksternal KOMPAK, faktor penghambat pertama yang ditemukan dalam studi ini adalah faktor mutasi dan rotasi aktor kunci di unit layanan memengaruhi keberlanjutan sinergi perencanaan. Di Nabire, pergantian Kepala Sekolah Dasar Wura sangat berpengaruh kepada proses sinergi perencanaan bahkan perencanaan di internal sekolah karena tidak adanya penyebaran kapasitas kepala sekolah kepada guru-guru lain. Investasi peningkatan kapasitas yang sudah diberikan oleh KOMPAK menjadi kurang berkelanjutan. Selain itu, dari sisi unit layanan dasar baik SD maupun Puskesmas meskipun sudah dapat mengakses dana kampung melalui sinergi perencanaan namun belum ada transparansi penggunaan dana kepada pemerintah kampung. Hal ini disebabkan karena tanggung jawab pelaporan anggaran unit layanan dasar bersifat vertikal ke atas kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Faktor penghambat kedua dari sisi eksternal adalah kurang optimalnya dukungan dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) dalam upaya bersama mendorong sinergi sektoral di tingkat kampung. Model perencanaan yang sinergi antara pemerintah kampung dengan unit layanan kesehatan dan pendidikan yang didorong oleh KOMPAK sebenarnya menjadi bagian dari kerja pendampingan yang harus dilakukan oleh pihak DPMK. Selama ini, pendampingan yang dilakukan oleh DPMK belum dilaksanakan secara maksimal. Bahkan terdapat aktor dari dinas yang memberikan jasa pembuatan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan kampung dengan imbalan yang diambil dari dana kampung yang cair.

Situasi inilah yang kemudian “dipotong” oleh KOMPAK dalam berbagai program pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan RPJMK, APBK, dan RPKK kepada aparat kampung. Sebelumnya, dokumen tersebut (RPJMK) tetap ada namun tidak pernah dibicarakan secara terbuka oleh masyarakat. Situasi inilah (dugaan) yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum di DPMK untuk membuat dokumen yang sudah jadi di beberapa kampung untuk ‘membantu’ pencairan dana tersebut.

—Kepala Distrik, Kabupaten Manokwari Selatan

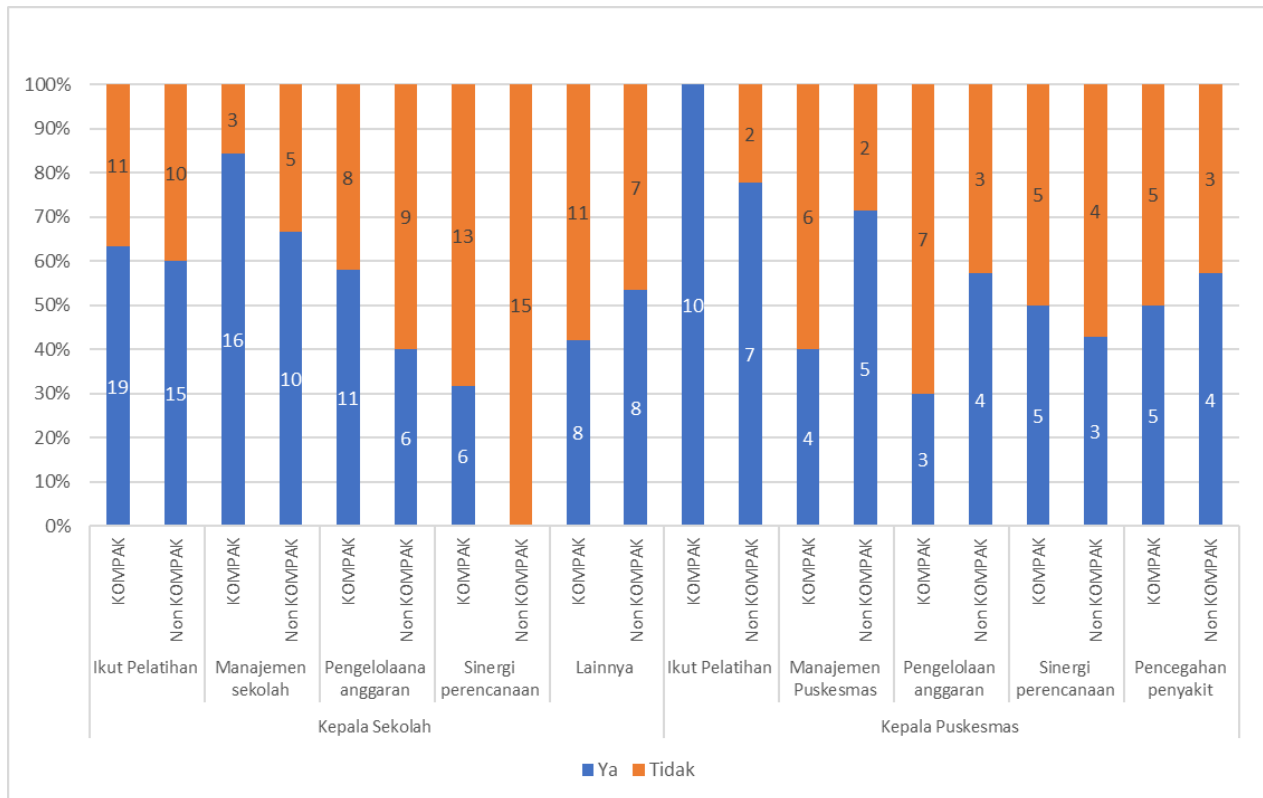
Studi juga menemukan bahwa faktor penghambat ketiga terkait dengan konteks periode pencairan dana kampung yang tidak menentu dan cenderung terlambat sangat memengaruhi keberlanjutan sinergi perencanaan yang sudah terbangun. Di Kabupaten Nabire contohnya, sampai bulan November 2021 mayoritas kampung baru menerima satu kali pencairan dana kampung (ADK dari pemerintah kabupaten) dikarenakan pemerintah kabupaten sedang dalam masa transisi kepemimpinan. Bahkan masih ada kampung yang belum menerima pencairan dana ADK untuk tahun 2021 hingga bulan November 2021. Keterlambatan ini menghambat perencanaan di kampung. Kampung tidak/belum mau membahas perencanaan dana kampung di tahun selanjutnya karena masih menyelesaikan pekerjaan kampung untuk tahun anggaran sebelumnya yang belum selesai periode pencairannya. Dengan demikian, sinergi sektoral yang sudah didorong oleh KOMPAK masih menghadapi kendala eksternal yang sangat berpengaruh pada proses perencanaan pembangunan kampung yang sinergi.

Pada situasi pencairan dana yang tidak menentu dan peran DPMK yang kurang maksimal, proses perencanaan pembangunan kampung juga sangat dipengaruhi oleh peran pendamping P3MD. Pendamping P3MD yang selama ini seharusnya menjembatani prioritas pembangunan kabupaten dengan kampung termasuk kebutuhan dasar kesehatan dan pendidikan, namun lebih sering bertindak sepihak menentukan perencanaan pembangunan kampung yang dianggap lebih praktis dan sesuai dengan prioritas kabupaten. Koordinasi P3MD dengan pemerintah distrik juga lebih sering sebatas permintaan tanda tangan pencairan dana kampung. Di Nabire, tahapan penyusunan dokumen hasil sinergi tidak dikawal dengan baik sehingga selepas kegiatan hasil akhir masih berupa matriks dan tabel. Aparat kampung masih menunggu format dari P3MD agar dokumen perencanaan sesuai dengan format yang dibutuhkan. Aparat kampung melihat bahwa tidak ada koordinasi efektif antara KOMPAK dengan P3MD sehingga dokumen tidak segera diselesaikan.

Faktor penghambat yang berasal dari eksternal yang juga sangat berpengaruh adalah pandemi COVID-19. Pandemi menyebabkan program pendampingan program terutama yang selama ini dilakukan oleh koordinator distrik menjadi terhambat. Kebijakan pembatasan perjalanan dinas dari KOMPAK telah membatasi ruang gerak pendampingan. Dengan demikian, beberapa kegiatan di kampung pun menjadi vakum. Selain itu, pandemi juga memengaruhi periode implementasi sinergi perencanaan di kampung. Pelatihan dan pendampingan dari KOMPAK untuk sinergi perencanaan di beberapa kampung studi baru dimulai pada tahun 2020 atau bahkan di awal tahun 2021. Hal ini tercermin pula dari hasil survei yang menunjukkan bahwa baru 50% dari 10 responden kepala Puskesmas di lokasi intervensi dan 23% dari 7 responden kepala Puskesmas di lokasi non-intervensi yang menyatakan mengikuti pelatihan sinergi perencanaan. Lalu, tidak ada responden kepala SD di lokasi non-intervensi KOMPAK dan hanya sekitar 31% dari 19 responden kepala SD di lokasi intervensi yang mengikuti pelatihan sinergi perencanaan sekolah dengan kampung (Gambar 3.6.). Sementara itu, pendampingan *pasca-workshop* dari fasilitator sinergi sektoral dari kabupaten (DPMK, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan) tidak banyak dilakukan. Karenanya, jika ada kendala yang dihadapi di tingkat kampung terkait perencanaan penganggaran, maka tidak mudah untuk mendapatkan respon dari fasilitator.

Faktor penghambat yang berasal dari eksternal yang juga sangat berpengaruh adalah pandemi COVID-19. Pandemi menyebabkan program pendampingan program terutama yang selama ini dilakukan oleh koordinator distrik menjadi terhambat.

Gambar 3.6. Keikutsertaan serta jenis pelatihan yang diikuti oleh kepala sekolah dasar dan kepala Puskesmas dalam satu tahun terakhir (n-kepala sekolah=55; n-kepala puskesmas=19)



3.3. Pembelajaran

Isu sinergi antar sektor, termasuk antara unit layanan dan pemerintah, selalu dipandang sebagai salah satu persoalan krusial tata kelola yang memengaruhi kualitas layanan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Tanah Papua. Untuk mengatasi masalah tersebut, berbagai lembaga menargetkan perbaikan koordinasi sebagai salah satu program strategis mereka. Namun, masalah-masalah koordinasi tetap menjadi salah satu ‘misteri’ tata kelola dan tidak mudah menemukan inovasi dan program yang berhasil memperbaiki persoalan koordinasi/komunikasi dan sinergi antar sektor dan atau institusi, apalagi dalam konteks di Tanah Papua. **Kombinasi berbagai faktor seperti ego sektoral atau mentalitas silo¹⁶, kuatnya kekuasaan pemimpin lokal seperti kepala kampung dan tokoh adat, mutasi dan rotasi aparatur sipil negara (ASN) yang dipengaruhi kuatnya praktik klientelisme, ketidakjelasan dan atau tumpang tindih kewenangan antar institusi, dan mahalannya aksesibilitas memengaruhi kompleksitas memperbaiki koordinasi/komunikasi dan sinergi di Tanah Papua.**

Di balik kompleksitas tersebut, studi menemukan bahwa **intervensi KOMPAK melalui mekanisme formal telah meningkatkan komunikasi antara unit layanan pendidikan dan kesehatan dengan pemerintah kampung, tetapi diperlukan pendampingan lebih lanjut**

¹⁶ Enggan berbagi informasi atau pengetahuan dengan individu lain dalam tim.

untuk optimalisasi esensi sinergi sektoral untuk perbaikan layanan. Temuan studi menunjukkan bahwa proses pelatihan formal yang dilakukan KOMPAK untuk mempertemukan aktor kunci di tiga sektor (pendidikan, kesehatan, kampung) dan secara spesifik memperkenalkan prosedur dan mekanisme unit layanan untuk mengakses dana kampung telah efektif mendorong kepala Puskesmas dan kepala SD, terutama kepala Puskesmas, untuk melakukan upaya konkret mengakses dana kampung. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme formal untuk mempertemukan aktor kunci di tiga sektor yang disertai dengan pemberian pengetahuan, keterampilan, atau tata cara yang konkret untuk bersinergi bisa menjadi langkah awal untuk memengaruhi komunikasi dan memperbaiki sinergi antar sektor. Tetapi, studi ini juga mencatat bahwa mekanisme yang sudah dilakukan tersebut belum optimal untuk mencapai harapan terjadinya esensi sinergi sektoral yaitu untuk perbaikan layanan. Selain itu, sinergi sektoral ini juga belum optimal melibatkan komunikasi berbagai aktor kunci di luar tiga aktor kunci tersebut, seperti pelibatan aktor dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), fasilitator dan tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), dan masyarakat. **Untuk mencapai sinergi yang diharapkan, studi ini merekomendasikan pendampingan yang kontinu setelah *workshop* untuk membangun komunikasi dan ruang diskusi antar aktor kunci di ketiga sektor tersebut.** Proses pendampingan akan memberikan ruang interaksi yang lebih besar untuk membangun kepercayaan antar aktor kunci, membangun proses deliberasi mendiskusikan dan menyepakati isu layanan, dan menemukan cara mensinergikan sumber daya antar tiga sektor untuk perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan.

Keberhasilan pendampingan untuk mencapai esensi program dipengaruhi oleh seberapa jauh fasilitator memiliki dorongan/insentif dan komitmen untuk melakukan pendampingan yang berkualitas dan karenanya diperlukan perbaikan mekanisme insentif bagi fasilitator. Lebih jauh lagi, peran serta fasilitator sangat tergantung dari seberapa besar dukungan institusi untuk memberikan ruang dan menghargai proses pendampingan yang dilakukan fasilitator. Studi ini menemukan bahwa program intervensi yang menggunakan aktor pemerintah (OPD) sebagai fasilitator, seperti intervensi KOMPAK dalam sinergi sektoral, penting untuk membangun kapasitas OPD dan keberlanjutan program di Tanah Papua. Namun, studi ini juga mencatat berbagai tantangan untuk membangun intensitas pendampingan yang dilakukan fasilitator dari OPD yaitu mutasi dan rotasi serta anggapan pendampingan sebagai beban tambahan, tidak termasuk tupoksi yang bersangkutan. **Di masa yang akan datang, program di Tanah Papua yang melibatkan aktor pemerintah daerah perlu untuk mengantisipasi persoalan pergantian (mutasi dan rotasi) kepala dan staf di Tanah Papua serta memberikan insentif yang jelas bagi staf yang ditugaskan (misalnya melalui dukungan pendanaan dan bagian dari tupoksi) untuk memastikan berjalannya pendampingan setelah lokakarya.**

Lebih lanjut lagi, studi ini merekomendasikan untuk memperkuat proses pendampingan yang berkualitas, fungsi koordinator distrik perlu diperkuat untuk memfasilitasi proses sinergi sektoral yang tidak terbatas pada akses dana sekaligus menjaga keberlanjutan program. Kelompok aktivis yang menetap di lokasi setempat dan memiliki pengetahuan mengenai perencanaan kampung dan pengalaman berelasi serta pengaruh di masyarakat—sebagai contoh adalah kelompok aktivis gereja dan kader Posyandu—berpotensi menjadi aktor yang mampu menjadi fasilitator yang bisa memfasilitasi proses membangun komunikasi formal dan informal antar Puskesmas, sekolah, dan pemerintah kampung secara berkesinambungan untuk menghasilkan sinergi sektoral di tingkat kampung/distrik. Selain pendampingan untuk mendiskusikan aspek isu, kebutuhan dan kerjasama lintas sektor, perlu dibangun pertemuan-pertemuan antar unit layanan dan pemerintah kampung untuk pelaporan keuangan Puskesmas, SD, dan pemerintah kampung. Dalam hal ini, pemerintah kampung juga diberikan ruang untuk mengetahui penggunaan dana unit layanan kesehatan dan pendidikan. Upaya untuk membangun proses pendampingan ini perlu disertai dengan penyederhanaan tugas-tugas administrasi pelaporan koordinator dan membangun alat monitoring koordinator yang lebih mencerminkan proses dan kualitas fasilitasi.

Studi ini menunjukkan contoh peran penting pembinaan dan pengawasan pemerintah distrik, sehingga ke depan, penguatan distrik diperlukan untuk meningkatkan sinergi perencanaan kampung dengan unit layanan. Proses perencanaan kampung yang sinergis dengan unit layanan juga tidak dapat dilepaskan dari peran pembinaan dan pengawasan pemerintah distrik. Sebagai koordinator kewilayahan distrik yang mencakup pemerintah kampung dan unit layanan dasar, peran pemerintah distrik yang optimal dapat mendorong perencanaan pembangunan kampung yang sinergis. Selama ini peran pemerintah distrik dalam proses perencanaan lebih pada penandatanganan dokumen perencanaan sebagai syarat pencairan dana kampung. Sementara itu, studi ini mengidentifikasi contoh pemerintah distrik yang secara efektif menjalankan peran pembinaan dan pengawasan seperti yang terjadi di Distrik Oransbari, Manokwari Selatan yang mendukung sinergi perencanaan di kampung dan bahkan model pendekatan sinergi sektoral ini direplikasikan ke kampung-kampung yang tidak mendapatkan intervensi langsung dari KOMPAK (Kotak 3.3 di 3.2.1). **Studi ini merekomendasikan pentingnya penguatan aktor di tingkat distrik yang berpotensi menjadi aktor yang mampu membangun komunikasi antara pemerintah kampung dan unit layanan, terutama unit layanan kesehatan.**

Studi ini mengindikasikan pentingnya peran faktor insentif, bagaimana sebuah program berhasil memberikan insentif mengakses sumber daya, yang menjadi motivasi aktor kunci untuk bergerak, bahkan tanpa pendampingan intensif. Temuan studi juga memperlihatkan bahwa sinergi sektoral dimaknai sebagai upaya mengakses dana tambahan bagi sekolah dan Puskesmas dari dana kampung. Setelah pelatihan selesai, kepala Puskesmas dan kepala SD mengaplikasikan pengetahuan tata cara mengakses dana kampung untuk membangun komunikasi dengan kepala kampung dan mendapatkan dana kampung tersebut. Namun,

ketika insentif sudah didapatkan (adanya dana tambahan), diperlukan upaya untuk memberikan insentif baru (materiil dan non materiil) disertai pendampingan yang mendorong aktor kunci memanfaatkan lebih jauh komunikasi antar aktor untuk meningkatkan kualitas layanan. **Studi ini merekomendasikan pentingnya membangun insentif baru yang bisa berupa penghargaan dan pengakuan atas kualitas sinergi dan perbaikan indikator unit layanan (seperti penghargaan atas akreditasi Puskesmas dan SD) untuk mendorong aktor bertindak lebih optimal ke arah kualitas sinergi untuk perbaikan layanan.**

Studi ini menemukan bahwa intervensi KOMPAK di aspek administratif untuk memperbaiki sinergi sektoral bisa lebih berhasil di lokasi intervensi yang juga menjadi target intervensi lembaga yang bergerak khusus pada peningkatan standar layanan seperti Wahana Visi Indonesia dan UNICEF. Selain KOMPAK, berbagai organisasi non-pemerintah baik lembaga nasional maupun internasional juga bergerak di isu pendidikan dan kesehatan di Tanah Papua dengan tujuan untuk perbaikan dan pemerataan akses OAP terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Intervensi KOMPAK sendiri memfokuskan pada penguatan prosedur dan mekanisme administrasi untuk persiapan akreditasi dan peningkatan standar pelayanan minimum (SPM) di SD dan Puskesmas. Temuan studi menunjukkan bahwa penguatan aspek administrasi seringkali tidak berhasil mencapai tujuan akreditasi karena pemenuhan berbagai persyaratan lainnya di luar kendali program. Temuan studi ini juga menemukan bahwa intervensi KOMPAK di aspek administratif bisa lebih berhasil di lokasi intervensi yang juga menjadi target intervensi lembaga yang bergerak khusus pada peningkatan standar layanan seperti Wahana Visi Indonesia dan UNICEF. **Hal ini mengindikasikan bahwa ke depannya, penguatan aspek administrasi unit layanan pendidikan dan kesehatan seperti untuk mendapatkan status akreditasi akan optimal dilakukan di lokasi yang juga menjadi target organisasi lain yang bergerak di aspek pemenuhan syarat akreditasi.**

4. REGULASI DAN KEBIJAKAN

Studi ini menemukan bahwa dari seluruh regulasi/kebijakan yang didorong oleh KOMPAK, terdapat dua regulasi yang sudah terimplementasi sampai masyarakat tingkat kampung, yaitu PROSPPEK Papua Barat dan BANGGA di Papua. Studi ini juga menemukan bahwa sudah terdapat peningkatan kapasitas aktor OPD di lokasi studi pada level individu, namun perubahan tersebut belum menjadi perubahan pada level organisasi.

Selain melakukan intervensi pada penguatan aktor lokal di level kampung dan distrik, KOMPAK juga melakukan penguatan pada level kabupaten dan provinsi. Intervensi KOMPAK pada level kabupaten dan provinsi terbagi menjadi dua aspek. Pertama, mendorong terbitnya berbagai regulasi di tingkat provinsi dan kabupaten terkait Otsus dan perbaikan layanan dasar seperti peraturan gubernur, peraturan bupati, surat keputusan bupati, dan *Memorandum of Understanding* (MoU) antar OPD. Spektrum perubahan yang terjadi meliputi adopsi dalam bentuk replikasi pendekatan KOMPAK di kabupaten dan provinsi seperti dalam hal perencanaan daerah yang bersinergi pada penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan Adminduk. Kedua, intervensi pada penguatan kapasitas OPD.

Perubahan pada bab ini terbagi menjadi dua aspek. Pertama, perubahan di tingkat regulasi dan kebijakan dalam bentuk adopsi program KOMPAK oleh pemerintah daerah dan terbitnya peraturan yang mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan serta layanan dasar. Kedua, perubahan kapasitas dari aktor-aktor level kabupaten dan provinsi yang dilatih KOMPAK. Studi ini menemukan bahwa dari seluruh regulasi/kebijakan yang didorong oleh KOMPAK, terdapat dua regulasi yang sudah terimplementasi sampai masyarakat tingkat kampung, yaitu PROSPPEK Papua Barat dan BANGGA di Papua. Studi ini juga menemukan bahwa sudah terdapat peningkatan kapasitas OPD di lokasi studi pada level individu, namun perubahan tersebut belum menjadi perubahan pada level organisasi.

Bab ini akan membahas perubahan-perubahan yang terjadi pada level provinsi dan kabupaten, mekanisme bagaimana perubahan tersebut terjadi atau tidak terjadi, serta pembelajaran mengenai intervensi KOMPAK di level provinsi dan kabupaten.

4.1. Temuan Perubahan

4.1.1 Perubahan di tingkat regulasi dan kebijakan

KOMPAK telah mendorong pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan provinsi untuk mengeluarkan/mengadopsi kebijakan/regulasi yang mendukung perbaikan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan. Payung hukum ini membantu praktik-praktik yang sudah diupayakan KOMPAK untuk direplikasi ke wilayah non-intervensi, seperti mendorong pendataan dan sinergi sektoral di wilayah kampung. Beberapa kebijakan yang didorong oleh KOMPAK di lokasi studi, antara lain adalah:

1. Adopsi Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung-Otonomi Khusus (PROSPPEK-OTSUS) di Provinsi Papua Barat tahun 2020.
2. Bersama MAHKOTA, mendukung pelaksanaan program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA) di Provinsi Papua tahun 2018.
3. Mendorong Peraturan Bupati untuk Percepatan Peningkatan Pelayanan Adminduk (Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati) di seluruh kabupaten lokasi studi.
4. Distrik Membangun Membangun Distrik (DMMD) yang dituangkan pada Peraturan Bupati Jayapura No. 68 tahun 2020.
5. Mendorong terbitnya regulasi/kebijakan sebagai bentuk pelembagaan atau keberlanjutan program di masing-masing kabupaten lokasi studi, seperti Peraturan Bupati mengenai SIO Papua (Asmat Satu Data, Jayapura Satu Data, Nabire Satu Data).

Tabel 4.1. di bawah meringkas perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek regulasi dan kebijakan level kabupaten dan provinsi.

KOMPAK telah mendorong pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan provinsi untuk mengeluarkan/mengadopsi kebijakan/regulasi yang mendukung perbaikan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan. Payung hukum ini membantu praktik-praktik yang sudah diupayakan KOMPAK untuk direplikasi ke wilayah non-intervensi, seperti mendorong pendataan dan sinergi sektoral di wilayah kampung.

Tabel 4.1. Rangkuman perubahan tingkat regulasi dan kebijakan

PERUBAHAN	REGULASI & INTERVENSI KOMPAK	KETERANGAN
Tersedianya payung hukum yang mendukung perbaikan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan.	(PROSPPEK OTSUS) Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penerimaan dan Pembagian Dana Otonomi Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan anggaran untuk mengadopsi/mereplikasi program pendataan dan sinergi sektoral ke lokasi non intervensi KOMPAK. • Hal ini dilanjutkan dengan terbitnya peraturan bupati di lokasi-lokasi studi di Papua Barat untuk memperluas pendataan di distrik-distrik non intervensi. Selain itu, pemerintah kampung di distrik-distrik non intervensi mengeluarkan peraturan kampung untuk membiayai kader kampung dengan dana Otsus.
	BANGGA Papua (Peraturan Gubernur No. 23/2018 tentang Program BANGGA Papua)	Terhenti karena alokasi anggaran digunakan untuk membiayai Pekan Olahraga Nasional. Meski terhenti, Sekber BANGGA Papua saat ini konkret digunakan OPD sebagai sarana koordinasi informal dan formal.
	DMMD di Jayapura (Peraturan Bupati Jayapura No. 68 tahun 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi masih dalam tahap <i>masterplan</i> (rencana induk), yang disertai sosialisasi kepada OPD dan distrik pada tahun 2021. • Belum dapat ditemukan perubahan peran distrik dalam mendekatkan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan Adminduk.
	Peraturan Bupati untuk Percepatan Peningkatan Pelayanan Adminduk	Regulasi ini masih berada di tahap sosialisasi mekanisme dan pelatihan kader/fasilitator Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati.

	Asmat Satu Data, Jayapura Satu Data, Nabire Satu Data	Pada tahapan <i>legal drafting</i> dan pengkajian.
--	---	--

Tabel di atas menunjukkan, dari seluruh regulasi yang didorong oleh KOMPAK, terdapat dua regulasi yang sudah terimplementasi sampai masyarakat tingkat kampung, yaitu PROSPPEK Papua Barat (replikasi) dan BANGGA di Papua. Berikut adalah penjelasan untuk setiap regulasi di atas.

4.1.1.1. Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung-Otonomi Khusus (PROSPPEK-OTSUS) Papua Barat

Pada tahun 2019, KOMPAK memiliki kesempatan untuk mempresentasikan programnya kepada Gubernur Papua Barat di acara Musyawarah Rencana Pembangunan Otsus. Salah satu yang dipresentasikan adalah program SAIK+ yang bertujuan untuk memperbaiki sistem informasi kampung serta capaian dari program yang telah diraih selama ini. Presentasi tersebut mendapat respon yang baik dari Gubernur, sehingga secara resmi PROSPPEK-OTSUS diadopsi oleh Pemerintah Papua Barat seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penerimaan Dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.¹⁷ **PROSPPEK OTSUS bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kampung dan Distrik dalam bidang ekonomi maupun pelayanan dasar, khususnya bagi (OAP).** Hal ini merupakan hasil dari perjalanan panjang upaya advokasi yang dilakukan tim KOMPAK seperti fasilitasi antara pemerintah pusat dan daerah, melakukan uji coba yang menjadi basis kerangka program, hingga melakukan pendampingan pada penganggaran Otsus dan kerangka Peraturan Gubernur.

PROSPPEK OTSUS menaungi empat komponen yang juga selaras dengan inisiatif yang dilakukan oleh KOMPAK di Tanah Papua. Empat komponen tersebut yakni 1) memperkuat Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK), 2) meningkatkan kapasitas kader dan aparatur kampung, 3) memperkuat Distrik dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan, dan 4) memperkuat kemampuan kampung dalam mendanai pelayanan dasar di tingkat kampung. Hal ini menunjukkan komitmen dan keseriusan Pemerintah Papua Barat dalam mengadopsi intervensi-intervensi KOMPAK.

Temuan studi menunjukkan bahwa adopsi PROSPPEK OTSUS di Papua Barat ini berkontribusi pada perluasan program-program KOMPAK khususnya di lokasi non-

¹⁷ Wawancara dengan Koordinator Provinsi Papua Barat, 7 Desember 2021.

intervensi KOMPAK dengan menggunakan dana Otsus¹⁸. Berdasarkan Pergub di atas, bupati dari lokasi-lokasi perluasan program mengeluarkan aturan pendukung PROSPPEK berupa peraturan bupati sebagai landasan untuk membiayai empat komponen PROSPPEK tersebut. Kemudian, kepala kampung di lokasi perluasan program juga menerbitkan peraturan kampung untuk mendukung pelaksanaan PROSPPEK OTSUS, khususnya membiayai honor kader kampung. Dengan adanya aturan tersebut, dana Otsus dapat digunakan untuk membiayai kegiatan fasilitasi dan pelatihan sinergi sektoral dan perluasan cakupan pendataan (SAIK+) untuk distrik-distrik non intervensi KOMPAK di kabupaten intervensi KOMPAK (seperti Sorong dan Manokwari Selatan). Oleh karena itu, pada saat penggalan data, beberapa distrik non-KOMPAK di lokasi studi juga sudah memulai proses pelatihan kader kampung dan pendataan SAIK+. **Hal ini juga sekaligus menunjukkan keberlanjutan dari inisiatif yang sudah dibangun oleh KOMPAK selama ini.**

4.1.1.2. Bangun Generasi dan Keluarga Papua yang Sejahtera (BANGGA) Papua

Program BANGGA Papua pertama kali diluncurkan tanggal 21 November 2017 dan diimplementasikan di tahun 2018. Bentuk programnya adalah pemberian bantuan kepada ibu atau wali yang memiliki anak (OAP) berumur 0 – 4 tahun sebesar Rp400.000 per bulan. Selama dua tahun berjalan, kegiatan pencairan sudah dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu satu kali di tahun 2018 dan dua kali di tahun 2019.¹⁹ Pada pelaksanaannya, Kabupaten Asmat terpilih menjadi salah satu dari tiga kabupaten yang ditetapkan menjadi wilayah uji coba BANGGA Papua.²⁰ Pertimbangan terpilihnya Kabupaten Asmat berdasarkan indikator tingkat kemiskinan dan keterwakilan di masing-masing wilayah adat. Kabupaten Asmat sendiri mewakili wilayah adat yaitu *Anim Ha*. Untuk pelaksanaan program ini, KOMPAK bersama Pemda Provinsi Papua dan masing-masing kabupaten membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) yang berasal dari lintas sektor dan multi pihak di tingkat kabupaten seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan BAPPEDA.

Untuk mendukung pencairan dana BANGGA Papua, Pemerintah Kabupaten Asmat mengeluarkan aturan untuk mengalokasikan dana kampung yang dapat membantu transportasi bagi penerima manfaat. Pada tahun 2018, Bupati Asmat menginstruksikan DPMK agar mengalokasikan anggaran dana kampung untuk biaya transportasi ke titik pembayaran. Mengingat kendala aksesibilitas dan keterbatasan sarana perbankan di Provinsi Papua, titik pembayaran hanya bisa dilakukan di sepuluh titik, yaitu enam titik pembayaran yang memiliki kantor Bank Papua dan empat titik pembayaran tambahan yang dibuka oleh Sekber untuk menjangkau wilayah sulit yang tidak bisa dijangkau oleh Bank Papua. Setidaknya

¹⁸ Contoh mengenai perubahan pendataan level kampung yang didukung dengan PROSPPEK OTSUS dijelaskan pada Bab II tentang Sistem Informasi Kampung.

¹⁹ Untuk detail program BANGGA Papua dapat dilihat pada website <https://info.bangga.papua.go.id/>.

²⁰ Selain Kabupaten Asmat, BANGGA Papua juga diterapkan di Kabupaten Paniai dan Kabupaten Lanny Jaya.

dengan bantuan dana tersebut, penerima manfaat tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi. Lebih lanjut, pemerintah kampung juga mengalokasikan dana tersebut untuk bahan bakar *longboat* yang mengantar penerima manfaat ke titik pembayaran.

Perubahan yang muncul dari masifnya sosialisasi dan manfaat dari program BANGGA Papua adalah perubahan pengetahuan di level masyarakat dalam pentingnya mengurus dokumen kependudukan untuk mendapatkan dana bantuan. KOMPAK memberikan fasilitasi dan bahan-bahan sosialisasi yang digunakan oleh OPD dan unit layanan pada saat bertemu dan berdiskusi dengan masyarakat mengenai BANGGA Papua. Bupati Asmat pun mewajibkan setiap OPD untuk memberikan sosialisasi Program BANGGA Papua di setiap kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat agar masyarakat segera mengurus syarat penerima manfaat. Syarat administratif untuk menjadi penerima manfaat BANGGA Papua adalah memiliki KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran. Bagi OAP, pengurusan dokumen-dokumen kependudukan ini memberikan insentif yang jelas berupa bantuan BANGGA Papua. Tidak mengherankan, terdapat kenaikan pengurusan dokumen-dokumen tersebut di Disdukcapil. Menurut Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Asmat, selama periode pelaksanaan program BANGGA Papua telah mendorong terbitnya 11.083 akta kelahiran dan 2.018 Kartu Keluarga dari perekaman Adminduk yang dilakukan oleh Disdukcapil. Meskipun peningkatan cakupan Adminduk lebih banyak didorong karena keinginan untuk mendapatkan manfaat dari program, namun hal ini bisa menumbuhkan kesadaran dari masyarakat terkait pentingnya memiliki dokumen Adminduk.

Jadi, penguatan informasi itu ada di kepala OPD, stakeholder di kampung, distrik, guru-guru, unit layanan kita ini gencar. Baik secara tertulis dan lisan. Informasi BANGGA Papua itu banyak yang tahu karena sosialisasinya gencar dan didukung dengan anggaran. Ini jadi salah satu pemantik masyarakat untuk segera mengurus dokumen-dokumen untuk memenuhi syarat administrasi sebagai penerima manfaat bantuan

—Kabid BAPPEDA, Kabupaten Asmat

Akan tetapi, peningkatan cakupan Adminduk di Kabupaten Asmat pada periode BANGGA Papua ini belum menunjukkan perubahan mekanisme percepatan layanan kepengurusan Adminduk. Untuk mendukung percepatan persyaratan administrasi BANGGA Papua, Bupati Asmat memberikan instruksi pelimpahan wewenang dan anggaran kepada distrik. Distrik diminta bekerjasama dengan Disdukcapil untuk mencatat jumlah kepala keluarga dan melakukan pemutakhiran dari pecahan keluarga. Selain distrik, OPD lain juga diminta untuk membantu pendataan penerima BANGGA Papua seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Akan tetapi, menurut salah satu Kepala Seksi di Disdukcapil Asmat, hal ini tidak berjalan dengan baik karena dua hal, yaitu (1) rotasi pegawai yang tinggi, khususnya mereka yang sudah diberikan tanggung jawab, (2) laporan yang diberikan kepada Disdukcapil biasanya bukan data terbaru namun *copy paste* dari data lama. Jikapun ada data baru yang diberikan, jumlahnya terlalu besar dibandingkan dengan data lama. Oleh karena itu, untuk

menjaga target pencatatan dan akurasi data penerima manfaat, Disdukcapil harus tetap melakukan pencatatan, perekaman, dan verifikasi data kependudukan. Hal ini dirasakan terlalu berat dan Disdukcapil merasa kewalahan, khususnya pada saat menjelang pencairan dana.

Masalahnya ketika pencairan, ada orang-orang yang membawa anak dan anak-anak yang dibawa ke kantor menangis terus (dan staf Disdukcapil harus memverifikasi dengan cepat kejelasan status keluarganya, apakah anak yang dibawa benar anak dari orang tersebut atau anak orang lain, ed). Orang-orang tersebut tetap mendapatkan pencairan karena kita harus menghindari keributan. Staf juga saat memvalidasi sudah capek.

—Salah satu Kepala Seksi Disdukcapil Kabupaten Asmat

BANGGA Papua juga bersinergi dengan Program Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu sama-sama turut mendorong ibu-ibu untuk memeriksakan anak dan kehamilannya melalui unit layanan seperti Posyandu dan Puskesmas. Masalah kesehatan Ibu dan anak masih menjadi salah satu persoalan utama di Kabupaten Asmat dan Tanah Papua pada umumnya. Program Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) sudah berlangsung dari 2017 sampai sekarang. Program ini merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan gizi bayi dan balita dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada ibu dan balita selama lima hari dalam satu minggu. Sementara itu, salah satu syarat menjadi penerima manfaat BANGGA Papua adalah memiliki akta kelahiran. Hal ini mendorong para ibu untuk melahirkan di Puskesmas agar segera tercatat dan dapat membuat akta kelahiran. **Ini menunjukkan bahwa pemberian insentif berupa akses dana terhadap bantuan berpengaruh pada perubahan perilaku ibu-ibu untuk lebih banyak mengakses fasilitas kesehatan negara.** Di sisi lain, tenaga kesehatan di level Puskesmas juga sudah melakukan kordinasi pencatatan dengan Disdukcapil untuk pembuatan akta kelahiran. Selain itu, pada saat pencairan dana, OPD berkumpul membuka layanan kesehatan sehingga mendorong Ibu-ibu penerima dana untuk memeriksakan kesehatan dan anak-anaknya.

Dengan hadirnya BANGGA Papua semakin melengkapi program 1000 HPK karena sasarannya sama yaitu ibu dan anak. Dengan adanya dua program tersebut muncul peningkatan persalinan yang ditangani tenaga kesehatan dan peningkatan jumlah imunisasi dasar.

—Kabid Penanggulangan Penyakit, Dinas Kesehatan, Kabupaten Asmat

Setelah pencairan ketiga di tahun 2019, BANGGA Papua terhenti karena Pemerintah Provinsi Papua merelokasi anggaran untuk persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 di Provinsi Papua. Hal ini mengindikasikan program bisa terkendala oleh perubahan prioritas dari pemerintah daerah. Kendala keberlanjutan program dapat diartikan sebagai konsekuensi dari tidak adanya anggaran bantuan pemerintah daerah untuk transportasi bagi penerima manfaat, biaya operasional untuk OPD dan distrik dalam mempersiapkan proses pencairan dana, bahkan dana bantuan yang turun untuk penerima manfaat. Kepala Disdukcapil Kabupaten Asmat merasa biaya operasional persiapan dan pencairan dana BANGGA Papua memang besar.

Untuk pencairan BANGGA Papua, Disdukcapil dan Sekber turun langsung ke beberapa wilayah, beberapa di antaranya; Korowai, Sawa Erma, Fayit. Biaya transportasi dari kegiatan tersebut besar. Untuk ke Korowai kami semua harus menyewa lima speed boat dengan harga sewa dua belas juta rupiah per boat hanya untuk satu kali perjalanan. Itu artinya butuh biaya Rp120.000.000 untuk menyewa lima boat untuk perjalanan pergi dan pulang.

—Kepala Disdukcapil, Kabupaten Asmat

Meskipun BANGGA Papua sudah tidak berjalan lagi, Sekber BANGGA Papua yang menjadi wadah informasi lintas sektor masih berjalan dan dimanfaatkan untuk koordinasi antar OPD yang menyangkut urusan pemerintahan. Sebelumnya, hubungan lintas sektor antar OPD sangatlah formal, hanya terjalin dalam lingkup rapat kerja di tingkat kabupaten dan provinsi. Sekber merupakan sebuah wadah yang melibatkan unsur pemerintah (OPD lintas sektoral) dan non pemerintah (kader kesehatan, LSM, tokoh agama, tokoh adat, dan seterusnya) yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan Program BANGGA Papua.

Adanya Sekber secara perlahan mendekatkan hubungan antar-OPD yang terlibat dalam program KOMPAK seperti mempermudah permintaan data kepada OPD, tidak perlu menggunakan jalur birokrasi seperti menyurat terlebih dahulu, tapi langsung meminta secara informal. Contohnya, Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Asmat bisa meminta penambahan anggaran dengan relatif mudah kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Asmat yang dulunya menjabat sebagai mantan ketua Sekber untuk pengadaan alat perekaman KTP untuk di luar ruangan yang terhubung dengan satelit. Padahal, lazimnya penambahan anggaran sangat sulit dilakukan mengingat anggaran yang dimiliki kabupaten sangat terbatas. Namun berkat relasi yang sudah terbangun semenjak bergabung dalam Sekber, hal itu bisa diusahakan oleh BKAD melalui pendekatan secara informal. Di sisi lain, adanya alat perekaman tersebut membantu kinerja Disdukcapil dalam pelayanan jemput bola pembuatan KTP sehingga bisa langsung dicetak di tempat karena datanya terhubung langsung dengan satelit.

Di luar BANGGA Papua dan PROSPPEK Papua Barat, regulasi lain masih berada pada tahapan aturan tertulis, sosialisasi, dan ujicoba, sehingga belum ditemukan perubahan pada mekanisme yang kontinu akibat aturan yang terbit. Tiga regulasi yang didorong KOMPAK lainnya seperti DMMD di Jayapura, Percepatan Peningkatan Pelayanan Adminduk di seluruh kabupaten studi, Peraturan Bupati mengenai SIO Papua (Asmat Satu Data, Jayapura Satu Data, Nabire Satu Data) masih berada di tahap aturan tertulis. *Masterplan* (rencana induk) sudah disusun oleh KOMPAK dan Pemda, namun dokumen tersebut belum diturunkan dalam kebijakan turunan dan mekanisme kesepakatan bersama yang bisa menjadi panduan/arahan implementasi.

4.1.1.3. Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH)

Seluruh kabupaten lokasi studi telah menerbitkan Peraturan Bupati untuk Percepatan Peningkatan Pelayanan Adminduk yang mendukung *flagship* Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH) di Tanah Papua. Penguatan pada aspek ini difasilitasi oleh Yayasan BaKTI dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia. Aturan tersebut berisi tata cara pengurusan dokumen kependudukan yang bisa melalui jalur pendidikan, jalur kesehatan, dan jalur distrik atau kampung. Aturan tersebut juga mengatur tentang penyediaan anggaran dan biaya operasional dari Disdukcapil, perangkat daerah, dan dari anggaran belanja kampung. Adapun jenis dokumen kependudukan yang merupakan bagian dari program ini adalah KK, KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan maupun Perceraian, Akta Pengakuan/Pengesahan Anak dan Akta Kematian.²¹

Salah satu tujuan dari penerbitan peraturan bupati di atas ini adalah untuk meningkatkan kapasitas fasilitator percepatan layanan adminduk dan kapasitas Pemda (Disdukcapil, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan) dalam mengidentifikasi dan membantu masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Nabire, misalnya, menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan. Dari regulasi ini, kabupaten bersama KOMPAK menyusun MoU lintas OPD untuk bekerjasama dalam mempercepat layanan kepengurusan Adminduk.

Studi menemukan bahwa intervensi KOMPAK pada aspek PASH baru sampai pada pembuatan MoU antar-OPD dan dimulainya pelatihan kader PASH. Peraturan Bupati tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan di lokasi studi terbit baru terbit, yaitu antara tahun 2020 dan 2021. Oleh karena itu, sosialisasi dari mekanisme percepatan layanan adminduk yang baru ini belum banyak didengar kecuali oleh Disdukcapil. Lebih lanjut lagi, di seluruh lokasi studi kualitatif pada daerah intervensi KOMPAK, aparat maupun masyarakat kampung mengatakan bahwa mereka belum mendengar peran kader atau fasilitator percepatan layanan adminduk ataupun mengetahui

²¹ Berdasarkan berita di website Bakti, diunduh dari <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/mendekatkan-layanan-adminduk-dengan-masyarakat> (diakses pada 9 Maret 2022).

adanya mekanisme baru untuk mempercepat pengurusan adminduk. Mayoritas masyarakat kampung yang diwawancarai masih mengurus dokumen kependudukan secara individu dengan dana pribadi atau menunggu program jemput bola dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang frekuensinya terbatas sesuai anggaran.

Meski begitu, intervensi KOMPAK pada aspek PASH telah berkontribusi pada penguatan program-program dinas yang sebelumnya sudah ada. Sebelum KOMPAK melakukan intervensi pada aspek PASH, Disdukcapil di seluruh kabupaten studi sudah memiliki aturan, target, dan program untuk mempercepat layanan kependudukan. Misalnya, sejak 2021 Disdukcapil di Sorong telah memiliki program bernama 'Kios Capil' yang bertujuan mempercepat layanan pencetakan e-KTP, KK, surat pindah datang dan surat pindah keluar yang berpusat di level kampung. Program ini memberikan wewenang kepada kampung untuk melakukan pencatatan kependudukan untuk direkam dan diverifikasi oleh Disdukcapil. Contoh lain, Disdukcapil di Manokwari Selatan memiliki aturan dan struktur mekanisme percepatan layanan Adminduk sejak tahun 2016 yang disebut sebagai Masyarakat Sadar Urus Akta (Masdarusta).²² Dengan program tersebut Disdukcapil memiliki kesempatan lebih banyak untuk duduk bersama dengan berbagai pemangku kepentingan lain seperti staf distrik, kader kampung, BAPPEDA dalam mendiskusikan masalah pada layanan adminduk sekaligus menemukan penyelesaiannya.

Kalau menurut saya, ketika KOMPAK hadir ya itu positif, tetapi sebelum KOMPAK hadir, kita di Disdukcapil juga sudah melakukan beberapa inovasi untuk menciptakan bagaimana (masalah) kepemilikan dokumen itu bisa secara tahap demi tahap kami selesaikan. Setelah KOMPAK ada, kerja sama untuk menyelesaikan masalah semakin terbangun.

—Kepala Disdukcapil, Manokwari Selatan

4.1.1.4. Distrik Membangun Membangun Distrik (DMMD) di Jayapura

DMMD bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melimpahkan sebagian kewenangan OPD kepada distrik seperti sektor kesehatan, pendidikan, layanan Adminduk, dan ekonomi. Kewenangan diberikan kepada distrik berdasarkan pada kapasitas, anggaran, dan sumber daya manusia yang ada di masing-masing distrik. KOMPAK turut terlibat dalam mendorong diterbitkannya Peraturan Bupati Jayapura No. 68 tahun 2020 tentang DMMD. Meski demikian, sebenarnya upaya awal advokasi DMMD sudah dilakukan setidaknya lebih dari tiga tahun sebelumnya. Kabupaten yang menjadi ujicoba DMMD adalah Jayapura di Provinsi Papua. Pada kabupaten tersebut terdapat 10 distrik yang dipilih untuk

²² Program ini merupakan kerjasama antara Disdukcapil Manokwari Selatan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta DPRD sehingga mempercepat pengurusan dokumen-dokumen kependudukan.

ujicoba program DMMD. Tim peneliti melakukan studi di distrik Demta (kualitatif dan kuantitatif) dan Sentani Timur (kuantitatif) yang termasuk ke dalam dua dari 10 distrik ujicoba DMMD.

Pada saat penggalan data dilakukan, kebijakan tentang DMMD baru masuk tahapan pembuatan *masterplan* (rencana induk) yang berisi penjelasan tentang sektor dan wewenang yang akan diberikan kepada distrik. Ke depan, *masterplan* ini akan menjadi panduan yang mengatur peran distrik serta mekanisme penguatan distrik baik dari sumber daya manusia, anggaran, output, monitoring, infrastruktur, dan lainnya. Menurut Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, *masterplan* ini masih berupa tabel dan matriks sektor atau tema yang dapat diberikan pada enam distrik (masih ada empat distrik yang perlu dibahas), namun belum disandingkan dan dinarasikan dengan potensi wilayah distrik masing-masing. Oleh karena itu, *masterplan* ini masih perlu didiskusikan dan disepakati bersama OPD. Sayangnya, perkembangan DMMD terkendala oleh pandemi COVID-19 dan kesibukan OPD sehingga pembahasan terkait DMMD yang dilakukan KOMPAK dengan OPD sempat terhenti. Selain *masterplan*, di tahun 2021 KOMPAK membantu Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk membuat draf peraturan daerah tentang penguatan distrik. Namun, saat penelitian dilakukan proses tersebut sampai pada tahapan fasilitasi dengan pemerintah Provinsi Papua.

Belum ada kesepakatan antar-OPD terkait wewenang dan anggaran yang dapat diberikan kepada distrik dalam kerangka program DMMD. Pelimpahan sebagian wewenang dinas kepada distrik membutuhkan komitmen mengenai distribusi anggaran, tanggungjawab, wewenang, serta penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur. BAPPEDA merupakan aktor kunci yang memetakan pembagian wewenang dan program yang dapat diturunkan kepada distrik berikut anggarannya. Akan tetapi, hal ini bisa menjadi isu sangat sensitif khususnya bagi OPD. Salah satu Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura mengatakan bahwa meski sudah ada pemetaan mengenai pemberian wewenang, namun anggaran dan mekanisme penganggaran serta outputnya tetap berada pada dinas. Dinas masih enggan melimpahkan sebagian anggaran dan wewenang pada distrik karena program dan anggaran dinas telah ditetapkan dalam RPJMD. Senada dengan BAPPEDA, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura juga menegaskan bahwa saat ini tahapan DMMD masih dalam “memberikan sebagian tugas” kepada distrik, belum pada “pemberian sebagian wewenang”.

Untuk Adminduk, sebelum program berjalan harus ada penguatan kapasitas di distrik. Nanti dinas akan memberikan alat-alat untuk distrik melakukan perekaman, pencetakan, dan penerbitan adminduk. Ini bisa dilakukan di distrik, namun kepala distrik dan kepala kampung tidak bisa menandatangani dokumen kependudukan apapun. Juga (pengadaan) blanko dokumen kependudukan dan tanda tangan masih dipegang oleh Kepala Disdukcapil.

—Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura

Dengan kondisi di atas, studi ini belum menemukan turunan kebijakan ataupun perubahan peran distrik yang terjadi di lokasi studi dalam rangka mendekatkan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan Adminduk. Saat ini, DMMD masih dalam proses membangun kesepakatan antar-OPD, sementara distrik belum mendapat mandat, anggaran, atau wewenang apapun. Ini senada dengan pernyataan dari kepala distrik Demta yang mengatakan bahwa saat ini *masterplan* DMMD belum selesai ditetapkan dan dirinya masih menunggu diskusi-diskusi lanjutan mengenai *masterplan* DMMD.

4.1.1.5. SIO Papua

Regulasi integrasi satu data merupakan penguatan sistem informasi kampung di Provinsi Papua yang akan diintegrasikan di dalam *database* kabupaten masing-masing. Ini misalnya muncul dalam bentuk program Jayapura Satu Data, Asmat Satu Data, dan Nabire Satu Data. Mekanisme SIO Papua serupa dengan SAIK+ namun lebih menekankan aspek integrasi pendataan di masing-masing kabupaten, belum sampai ke provinsi. SAIK+ sendiri saat ini sudah diadopsi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat²³.

Saat penelitian ini dilakukan, SIO Papua masih berada pada tahapan pengkajian dan legal *drafting* dari aturan-aturan yang mendukung integrasi data. Program ini masih terkendala pada proses membangun kesepakatan antar OPD terkait perihal poin-poin turunan seperti tanggung jawab dan anggaran. Meskipun BAPPEDA kabupaten merupakan *leading actor* dalam SIO Papua, namun peranan penting sebagai wali data SIO Papua berada di tangan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo). Selama ini, Diskominfo di lokasi studi di Papua sudah menjalankan tugas menyediakan layanan dan jaringan untuk kampung dan distrik. Penyediaan jaringan ini diharapkan bisa dimanfaatkan jika distrik dan kampung memulai integrasi satu data. Hanya saja, peran Diskominfo dalam integrasi satu data dirasa belum jelas. Ketidakjelasan ini disampaikan oleh salah satu Kepala Seksi dari Diskominfo di Jayapura seperti dikutip di bawah ini.

Saya berharap ada penjelasan lebih lanjut terkait Jayapura Satu Data, khususnya wali data sebagai corong publik. Masih bingung, tugas kami melakukan pemilihan data yang ingin dipublikasikan agar tidak melanggar data pribadi. Namun kami tidak tahu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan oleh BAPPEDA, bahkan kami belum tahu data apa saja yang akan dipublikasikan di dalam Satu Data ini.

—Salah satu Kepala Seksi Diskominfo Jayapura

²³ Untuk melihat perubahan sistem informasi kampung dari lokasi studi di Provinsi Papua dapat dilihat pada Bab II mengenai Sistem Informasi Kampung)

Begitu juga di Nabire, staf dari Diskominfo yang sering mendapatkan pelatihan dari KOMPAK mengatakan bahwa Rancangan Peraturan Bupati mengenai SIO Papua masih terus didiskusikan di BAPPEDA dengan bantuan KOMPAK. Diskominfo sudah memberikan masukan dari substansi rancangan peraturan bupati tersebut. SIO Papua di Nabire baru dilaksanakan di dua distrik, yaitu Kepulauan Wura dan Kawa. Akan ada empat distrik yang menjadi lokasi replikasi SIO Papua yang akan dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Bupati. Namun, belum ada informasi mengenai pemanfaatan data SIO Papua. Misalnya, mengenai kelanjutan SIO Papua yang akan diarahkan masuk dalam portal Satu Data Nabire, sampai saat ini portal tersebut belum tersedia. Informan dari Diskominfo Nabire juga belum mengetahui perkembangan dari SIO Papua karena merasa KOMPAK tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan ke Diskominfo, namun lebih mengkoordinasikannya kepada BAPPEDA.

Sementara itu, di Asmat, SIO Papua yang akan diintegrasikan pada Asmat Satu Data, saat ini baru masuk dalam tahap draf peraturan bupati dan perumusan alokasi anggaran. Draft ini ditujukan untuk pelaksanaan program serta regulasi yang nantinya bisa mendorong OPD untuk menyiapkan anggaran. Akan tetapi, BAPPEDA Asmat masih memetakan anggaran untuk melanjutkan SIO Papua.

Dukungan pertama (KOMPAK) di kampung itu SIO Papua, kalau Asmat Satu Data itu baru terkait dengan regulasinya. Bentuk dukungan berikutnya peningkatan kapasitas, ada perwakilan tiga orang dari Asmat untuk ikut pelatihan Asmat Satu Data. Kalau dari Kominfo kemarin, mereka mungkin bisa menganggarkan yang terkait dengan pemeliharaan jaringan atau aplikasinya. Tapi untuk pengambilan data yang dilakukan kader, kami juga harus menyiapkan laptop, transportasi, biaya operasional, semuanya akan dibebankan kepada kabupaten. Kalau biaya satu kampung bisa ratusan juta, saya tidak menjamin apakah OPD bisa mengakomodir atau tidak.

— BAPPEDA Asmat

4.1.2 Perubahan di tingkat kapasitas

Intervensi KOMPAK telah meningkatkan pengetahuan dan kapasitas staf OPD dalam tiga hal. Pertama, peningkatan pengetahuan mengenai peran pendampingan dan teknik fasilitasi kepada kampung dan distrik. Kedua, peningkatan kapasitas dalam memetakan permasalahan daerah serta menyusun perencanaan dan penganggaran daerah. Ketiga, perubahan komunikasi dan relasi antar-OPD

Selain mendorong regulasi dan kebijakan di level kabupaten dan provinsi, KOMPAK juga memberikan serangkaian program peningkatan kapasitas bagi staf OPD. Peningkatan

kapasitas staf OPD yang dilakukan KOMPAK sangat terkait dengan dukungan KOMPAK pada aspek lain yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Dari sisi perubahan pada peningkatan kapasitas, intervensi KOMPAK telah meningkatkan pengetahuan dan kapasitas staf OPD dalam tiga hal. Pertama, peningkatan pengetahuan mengenai peran pendampingan dan kapasitas teknik fasilitasi kepada kampung dan distrik. Kedua, peningkatan kapasitas dalam memetakan permasalahan daerah serta menyusun perencanaan dan penganggaran daerah. Ketiga, perubahan komunikasi dan relasi antar-OPD. **Sebagai catatan, pelatihan-pelatihan KOMPAK yang diikuti oleh staf OPD bervariasi. Pelatihan dan bimbingan teknis diselenggarakan tergantung dari kebutuhan masing-masing dinas di setiap kabupaten. Sehingga, tidak semua staf OPD dalam satu kabupaten mendapatkan pelatihan yang sama dan tidak semua kabupaten mendapatkan intervensi peningkatan kapasitas yang sama pula.**

4.2.2.1. Peningkatan pengetahuan mengenai peran pendampingan dan kapasitas teknik fasilitasi kepada kampung dan distrik

Melalui intervensi di aspek sinergi sektoral dan Sistem Informasi Kampung, KOMPAK telah meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan individu OPD yang dilatih. Misalnya, intervensi sinergi sektoral (seperti *Training of Trainer*) yang dilakukan KOMPAK mampu mengumpulkan dan membuka ruang diskusi antara pejabat pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan, pemerintahan kampung dan data penduduk. Biasanya staf Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikanlah yang dilatih untuk menjadi fasilitator kabupaten agar aktor-aktor dalam dinas tersebut bisa memfasilitasi Puskesmas dan Sekolah Dasar dalam proses merancang dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan dan kebutuhan kampung.

Pelatihan fasilitator kabupaten yang diberikan oleh KOMPAK telah meningkatkan pengetahuan staf OPD yang dilatih mengenai pentingnya menyatukan program dan anggaran antara unit layanan dan aparat kampung. Selama ini staf OPD yang dilatih merasa bahwa tanggung jawab pendidikan di kampung adalah tugas dari sekolah dan Dinas Pendidikan. Upaya menyatukan program sekolah dengan rencana kampung memberikan nuansa kolaborasi yang akan memberikan manfaat bagi sekolah.

Bagaimana kita bisa menyatukan program sekolah ini kepada pemerintah kampung? Sementara selama ini tidak terpikir, bahkan Dinas sendiri tidak berpikir ke arah situ. Tapi dengan hadirnya KOMPAK bisa menyatukan Dinas Pendidikan dengan Pemerintah Kampung. Selama ini mungkin memikirkan apa yang dilakukan sekolah itu adalah tanggung jawab sekolah dan dinas Pendidikan. Tapi sebetulnya sekolah itu ada di masyarakat, harus turut bertanggung jawab.

—Fasilitator perencanaan dari Dinas Pendidikan Jayapura

Pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh KOMPAK bahkan membuat staf OPD menjadi lebih percaya diri dan dapat tampil di depan banyak orang. Hal ini penting bagi OPD dan fasilitator perencanaan agar dapat melakukan fasilitasi dengan baik di depan Puskesmas, aparat

kampung, dan pihak lainnya. Menjadi fasilitator perencanaan juga berdampak pada pengembangan diri individu. Misalnya salah satu fasilitator perencanaan dari Dinas Kesehatan di Sorong mengatakan bahwa sejak mendapatkan pelatihan dari KOMPAK, dirinya semakin sering diminta untuk berbicara di depan publik. Bahkan dirinya mendapatkan pengalaman berharga dengan menjadi pembicara dalam kegiatan pelatihan perencanaan Puskesmas untuk lokasi intervensi di Provinsi Papua.

Akan tetapi, peningkatan kapasitas staf OPD pada peran pendampingan dan teknik fasilitasi belum sampai pada perubahan perilaku yang konsisten sehingga belum menjadi perubahan di level organisasi. Temuan studi menunjukkan bahwa interaksi antara fasilitator perencanaan (aktor OPD yang dilatih KOMPAK) dengan aparat kampung dan unit layanan lebih banyak terjadi di ruang formal, misalnya *workshop* yang dilakukan KOMPAK. Belum terjadi proses pendampingan pascaworkshop agar aparat kampung mendapatkan *feedback* dari proses perencanaan dan penganggaran kampung berbasis kebutuhan. Sebagai contoh, salah satu fasilitator sinergi perencanaan di Jayapura mengatakan bahwa kegiatan yang dia lakukan dengan distrik dan kampung banyak dia ikuti dengan undangan dari KOMPAK dan dia belum pernah menghubungi atau mengunjungi unit layanan dan aparat kampung untuk melakukan pendampingan setelahnya.

Memang dinas belum intens menyampaikan hal-hal yang didapatkan dari pelatihan, rencananya memang harus ke lapangan setelah pelatihan di tahun 2020, hanya sampai saat ini saya belum kembali mengecek finalisasi dokumen, apalagi ditambah dengan COVID-19.

—Salah satu fasilitator perencanaan di Jayapura

Selain itu, salah satu fasilitator perencanaan di Sorong juga menyatakan hal yang sama. Ia memang telah bertemu dengan sekolah dan aparat kampung untuk berdiskusi terkait program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan pengoptimalan Standar Pelayanan Pendidikan di tahun 2021. Namun setelah itu dirinya tidak memeriksa dan memastikan apakah RAB dari sekolah sudah rampung dan apakah sekolah sudah mendapatkan BOSDA. Ini menunjukkan bahwa **belum adanya inisiatif dari organisasi/institusi untuk mengubah mekanisme pengawasan dan pendampingan untuk kampung tanpa pendampingan dari KOMPAK.**

4.2.2.2. Peningkatan pengetahuan dalam memetakan permasalahan daerah serta menyusun perencanaan dan penganggaran daerah

Pelatihan-pelatihan mengenai penguatan manajemen keuangan publik telah memberikan pengetahuan baru bagi staf OPD. Pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan KOMPAK antara lain adalah perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan revisinya; Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); dan bimbingan teknis menghitung kebutuhan anggaran untuk layanan dasar dan Otsus; penanganan COVID-19 (seperti di

BANGGA Papua dan PROSPPEK), dan sebagainya. Peningkatan pengetahuan dan kapasitas dinas dalam merumuskan masalah, prioritas, strategi, dan menyusun anggaran bertujuan agar OPD dapat merumuskan perencanaan dan penganggaran secara mandiri. Akan tetapi, **tidak semua lokasi studi mendapatkan pelatihan yang sama. Jenis atau tema pelatihanpun disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan Pemda setempat.**

KOMPAK memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai pelaksanaan aturan sehingga staf OPD dapat lebih memahami dan mendetailkan rencana kerja dan anggaran daerah. Selama ini staf OPD memang mengetahui tanggung jawab dan peran mereka berdasarkan aturan tertulis. Dalam hal ini, intervensi KOMPAK membantu memberikan penjelasan dan contoh konkret mengenai peran dan tanggung jawab OPD sehingga lebih bisa dimengerti dan diaplikasikan pada saat bekerja. Sebagai contoh, Sekretaris Disdukcapil Nabire beberapa kali mendapatkan informasi dari KOMPAK mengenai aturan-aturan pusat seperti Peraturan Kementrian Dalam Negeri yang seharusnya diimplementasikan oleh dinas-dinasnya. Kemendagri selalu memberikan sosialisasi aturan kepada seluruh Disdukcapil, namun bentuknya sebatas pemberitahuan. Intervensi KOMPAK memberikan penjelasan yang lebih baik dan membantu Sekretaris Disdukcapil Nabire mendetailkan rencana kerja serta penganggaran untuk mendukung aturan Permendagri. Senada dengan Disdukcapil di Nabire, aktor-aktor BAPPEDA dari seluruh lokasi studi yang diwawancarai pun menyatakan bahwa program KOMPAK memberikan pengetahuan baru dalam menjalankan dan menurunkan aturan birokrasi keuangan dan program daerah. Hal yang paling mereka rasakan adalah peningkatan pengetahuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif untuk sasaran program, khususnya yang terkait dengan Otsus (misalnya replikasi SAIK+, sinergi sektoral).

Perubahan kapasitas dan pengetahuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah belum berlanjut menjadi perubahan level organisasi. Terdapat kasus keberhasilan seperti suksesnya kabupaten dalam mengaplikasikan SIPD setelah mendapatkan pelatihan dan menyusun perumusan Dana Alokasi Khusus. Namun itu terjadi pada saat itu KOMPAK memberikan pendampingan intensif dan berkomunikasi dengan staf OPD serta memberikan umpan balik ketika mereka menghadapi kesulitan. **Di sisi lain, studi ini masih menemukan praktik-praktik penggunaan jasa konsultan dalam merumuskan revisi RPJMD yang diturunkan dalam rencana strategis tahunan daerah.** Hal ini merupakan hal yang sensitif dibicarakan pada saat penggalan data sehingga jarang diutarakan secara eksplisit oleh staf OPD yang diwawancarai. Salah satu staf OPD di Manokwari Selatan yang mendapatkan pelatihan perumusan RPJMD menyatakan bahwa setelah pelatihan, seluruh dokumen perencanaan diserahkan kepada konsultan untuk diselesaikan dan dirinya tidak terlibat lagi dalam proses penyusunannya. Sebagai catatan, studi ini tidak menilai perbedaan kualitas perumusan RPJMD dan Renstra (Rencana Strategis) tahunan kabupaten baik yang dibuat oleh OPD dan konsultan.

4.2.2.3. Peningkatan intensitas komunikasi dan relasi antar-OPD

Seperti telah dijelaskan di atas, program KOMPAK telah membuka ruang komunikasi antara OPD dengan aktor kunci pembangunan lainnya. Perubahan pada aspek komunikasi juga dirasakan sebagai dampak dukungan KOMPAK pada peningkatan kapasitas OPD. Para staf OPD yang mendapatkan pelatihan biasanya menceritakan secara informal apa yang mereka dapatkan dari pelatihan kepada atasan dan kolega di kantor. Hal ini memantik diskusi-diskusi informal di dalam instansi mereka dan membuat mereka memiliki lebih banyak bahan pembicaraan dengan atasan. Ditambah lagi, setelah mendapatkan pelatihan biasanya terdapat *Whatsapp group* yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antar-aktor. Hal ini menambah kedekatan antar-OPD yang sebelumnya hanya saling tahu nama saja.

KOTAK 4.1. | Penguatan Relasi antar-OPD di Manokwari Selatan

Studi ini menemukan **dua praktik baik di Manokwari Selatan yang menunjukkan peningkatan relasi antar-OPD** sebagai akibat dari program peningkatan kapasitas yang dilakukan KOMPAK. Yang pertama adalah pelatihan kader PASH dan staf Disdukcapil tentang percepatan layanan kependudukan di tahun 2021. Pelatihan ini mendorong Kepala Disdukcapil Manokwari Selatan untuk menyediakan ruangan di kantor dinas agar kader PASH bisa duduk bersama petugas Disdukcapil untuk melakukan validasi data. **Dengan kata lain, kader PASH yang dilatih KOMPAK bisa berkontribusi sebagai tenaga tambahan bagi Disdukcapil untuk menjalankan tugasnya, yaitu memenuhi kebutuhan dokumen adminduk masyarakat.**

Kasus kedua adalah fasilitator sinergi perencanaan yang dilatih KOMPAK mendapatkan kepercayaan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Manokwari Selatan untuk menjadi tim implementasi SIPD. Tim SIPD ini bertugas mengordinir seluruh OPD untuk menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan dan mengintegrasikannya ke dalam aplikasi SIPD. Pada tahun 2020, Sekda memberikan ruangan dan mengundang langsung fasilitator dari KOMPAK untuk mengawal dan mengoperasikan SIPD hingga rampung. Sekda merasa fasilitator KOMPAK memiliki kapasitas lebih dibandingkan staf OPD lain. Salah satu fasilitator menyatakan kepuasannya dalam proses menyelesaikan SIPD yang banyak dibantu oleh KOMPAK serta kepercayaan dari Sekda kepada dirinya. Lebih lanjut lagi, ia menyatakan,

Sebelumnya mempelajari sendiri pakai youtube, tapi belum terlalu paham. Kemudian tim SIPD berkonsultasi dengan Koordinator Kabupaten KOMPAK, dan beliau pun memfasilitasi komunikasi dengan pihak Kemendagri sampai datang ke Manokwari Selatan melakukan pelatihan langsung dengan biaya APBD Kabupaten.

Pengawasan SIPD ini sukses dilakukan, sehingga pada awal 2021, Kabupaten Manokwari Selatan mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat karena menyelesaikan program dan penganggaran daerah yang terintegrasi pada sistem aplikasi SIPD tepat waktu dari yang dijanjikan.

Peningkatan kapasitas di level kabupaten berhasil mendorong ketertarikan/motivasi pejabat daerah untuk berinovasi dan mendapatkan pengakuan dari pusat seperti yang terjadi di Manokwari Selatan (lihat kotak 4.1). Terbukanya ruang diskusi dan saling sinergi antar pemegang kebijakan memperbesar dimensi peluang keberlanjutan program KOMPAK. Komunikasi dan ruang diskusi lintas sektor dan sektoral ini sebelumnya sulit dilakukan, terutama terkait dengan penguatan peran pemerintah daerah kabupaten dalam pengelolaan dana-dana yang masuk ke kampung sinergis dengan target dan capaian pembangunan kabupaten.

4.2. Mekanisme Perubahan

4.2.1. Faktor pendukung perubahan

Perubahan-perubahan yang telah dijabarkan di atas dipengaruhi oleh faktor-faktor dari internal KOMPAK dan luar KOMPAK. Dalam upaya mendorong terjadinya perubahan pada regulasi dan kebijakan serta peningkatan kapasitas level kabupaten dan provinsi, KOMPAK memberikan beragam dukungan.

Pertama, KOMPAK memiliki strategi yang komprehensif dalam membangun *evidence-based policy making*. Strategi ini dilakukan dalam berbagai aspek di bawah ini.

- Melakukan kajian, analisis kebijakan, desain program yang disampaikan kepada Pemda sebagai basis bukti terkait kebijakan-kebijakan Pemda. Berbagai kajian seperti asesmen awal dan evaluasi terhadap suatu kebijakan dan aturan dilakukan oleh KOMPAK dan disampaikan kepada pemerintah kabupaten dan provinsi. Dari berbagai kajian tersebut, Pemda dapat mengambil pembelajaran untuk merumuskan kebijakan selanjutnya.

Sebagai contoh, BANGGA Papua merupakan satu program perlindungan sosial universal untuk anak OAP dengan perempuan (ibu) dan anak sebagai target utama penerima manfaat. KOMPAK telah melakukan analisis dan memberikan rekomendasi dari tahapan awal desain program, implementasi program, hingga evaluasi pascaprogram berjalan. Upaya yang dilakukan antara lain adalah (1) Kajian pada kebijakan Provinsi Papua yang lalu seperti Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung (PROSPEK) serta Gerakan Bangkit, Mandiri Sejahtera (GERBANGMAS) untuk memperkuat desain dan struktur proyek BANGGA Papua, (2) Pembelajaran implementasi prinsip-prinsip GEDSI pada proses pelaksanaan BANGGA Papua²⁴. Kajian semacam ini dapat menjadi pembelajaran dan saran perbaikan bagi Pemda dan mitra

²⁴ Untuk melihat analisa lebih lengkap implementasi GEDSI pada program BANGGA Papua dapat dilihat di: <https://kompak.or.id/id/article/laporan-perkembangan-memperkuat-kesetaraan-gender-dan-inklusi-sosial-dalam-program-bangga-papua>

pembangunan lainnya dalam melanjutkan program atau merumuskan program baru yang serupa dengan BANGGA Papua.

Selain itu, aspek GEDSI juga hadir pada modul-modul penguatan level kampung, distrik, unit layanan, kabupaten/provinsi yang dikeluarkan oleh KOMPAK. Sebagai contoh, dalam modul sinergi sektoral dinyatakan secara jelas bahwa kelompok perempuan dan disabilitas merupakan kelompok yang wajib diundang pada musyawarah kampung. Contoh lainnya adalah masukan teknis GEDSI untuk membuka kesempatan bagi perempuan untuk menjadi kader kampung dan terlibat dalam upaya-upaya pengembangan kapasitas. Integrasi prinsip GEDSI yang dilakukan oleh KOMPAK sangat penting khususnya pada perumusan kebijakan dan implementasi program yang dilakukan Pemda.

- KOMPAK memiliki kapasitas dalam menyediakan anggaran untuk melakukan uji coba suatu program/inovasi sehingga Pemda dapat melihat langsung perubahan yang dihasilkan. Dari intervensi KOMPAK, Pemda melihat inovasi tersebut layak dan penting untuk dilanjutkan karena sesuai dengan visi misi pembangunan daerah, khususnya pada perbaikan tata kelola layanan dasar. Pada bagian ini, KOMPAK juga berkolaborasi dengan institusi/aktor lain seperti MAHKOTA (untuk BANGGA Papua) dan Puskapa UI (Percepatan Layanan Adminduk).
- Upaya di atas lalu dilanjutkan dengan memberikan Pemda serangkaian bantuan teknis dan fasilitasi seperti buku panduan, *legal drafting* aturan-aturan yang dibutuhkan Pemda, asistensi MoU antar-OPD dan aktor lain, pendampingan pada proses penyusunan anggaran, penyediaan tenaga ahli/pendamping/narasumber yang kompeten, tenaga ahli dalam membangun strategi komunikasi program, mengembangkan materi-materi regulasi, serta memastikan materi-materi tersebut tersirkulasi kepada setiap OPD terkait.

Kedua, KOMPAK berperan sebagai ‘klinik’ untuk berkonsultasi mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemda dalam melaksanakan program yang sedang dijalankan. Meskipun Pemda selalu memiliki alokasi anggaran rutin untuk peningkatan kapasitas, namun **pelatihan KOMPAK memberikan nilai tambah dibandingkan dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan Pemda sendiri.** Pelatihan dan bimbingan yang diberikan oleh KOMPAK sesuai dengan kebutuhan Pemda yang spesifik dan terkini. Lebih lanjut, KOMPAK juga dapat mendatangkan narasumber atau ahli sesuai dengan pengembangan kapasitas yang dibutuhkan Pemda. Di Asmat, KOMPAK melakukan satu fasilitasi dengan mengundang narasumber seperti staf ahli menteri sebagai pemateri tentang peningkatan kapasitas kepala sekolah, Standar Pelayanan Minimal SD, dan pembelajaran kontekstual. Bagi aktor di Dinas Pendidikan, tidak mudah untuk mendatangkan ahli yang kompeten terutama yang berada pada level pembuat kebijakan nasional. Hal ini karena dinas tidak memiliki

jaringan luas dan model pelatihan seperti yang didesain KOMPAK tidak terbayang sebelumnya.

Ketiga, faktor dari tingkat aktor kunci pelaksana program KOMPAK yang memiliki relasi dan jaringan luas di Tanah Papua. KOMPAK memiliki kelebihan pada jaringan yang dimiliki oleh aktor-aktor tim pelaksana KOMPAK (misalnya kordinator kabupaten dan kordinator provinsi) yang relatif dikenal baik oleh berbagai OPD di masing-masing lokasi. Di samping itu, tim kunci pelaksana KOMPAK di Tanah Papua juga memiliki keahlian, kecakapan, dan keterampilan dalam melakukan lobi dan komunikasi intensif kepada pemerintah pusat terkait dengan kebijakan Otsus. Lobi kepada pemerintah pusat dilakukan ketika mendorong kebijakan dan regulasi level nasional (seperti nomenklatur Kemenkeu dan Peraturan Presiden) yang khusus menasar pada pembangunan di Tanah Papua. Misalnya adalah UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dimana terdapat pasal 34 tentang jaminan pembiayaan Otsus dan perlindungan sosial bagi OAP.

Di samping faktor internal KOMPAK, perubahan-perubahan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya juga dipengaruhi faktor dari luar KOMPAK. Tujuan utama program KOMPAK untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan layanan dasar di Tanah Papua selaras dengan kepentingan para pemimpin di level provinsi dan kabupaten yang memiliki sikap keberpihakan kepada OAP. Di sisi lain, beragam upaya yang dilakukan oleh KOMPAK di Tanah Papua pun mampu mengelaborasi dan mengangkat narasi OAP yang kuat dalam rumusan kebijakan. Sebagai contoh, KOMPAK mendorong identifikasi OAP dalam sistem informasi kampung (SAIK/SAIK+/SIO) sebagai penerima manfaat dari Otsus; KOMPAK juga mendorong perlindungan sosial bagi OAP dalam BANGGA Papua. Selain itu, yang juga sangat penting adalah upaya-upaya pengembangan kapasitas bagi aktor-aktor lokal yang berada di Tanah Papua.

4.2.2. Faktor penghambat perubahan

Intervensi KOMPAK pada level kabupaten dan provinsi menghadapi kendala baik dari dalam KOMPAK maupun faktor dari luar KOMPAK. Dari dalam KOMPAK, **faktor penghambat pertama adalah belum adanya pertimbangan rencana/mitigasi dari upaya pendampingan dan penguatan kapasitas yang sesuai dengan konteks birokrasi di Tanah Papua.** Isu birokrasi yang muncul sebagai kendala dari perjalanan program antara lain adalah mutasi dan rotasi aktor yang sudah dekat dengan KOMPAK, kompetensi OPD, serta hubungan antaraktor kunci yang berbasis kekerabatan dan wilayah dukungan gunung/pantai. Isu-isu tersebut tidak mudah ditangani dan dalam proses implementasi program, KOMPAK harus berhadapan dan merespon cepat situasi tersebut. Sebagai contoh, KOMPAK harus berhadapan dengan birokrasi kekuasaan dengan komposisi yang berbeda. Di Papua Barat, komposisinya dianggap lebih egaliter dibandingkan dengan komposisi kekuasaan di Papua. Gubernur Papua Barat merupakan “orang gunung” dan Wakil Gubernur Papua Barat berasal dari wilayah pantai dan beragama Islam. Sedangkan di Papua, mayoritas jajaran pemerintahnya adalah “orang

gunung”. Perbedaan komposisi ini membuat KOMPAK harus menyesuaikan pendekatan, strategi, dan proses lobi di kedua provinsi tersebut. Hal ini pun pada akhirnya memengaruhi perbedaan capaian program. Misalnya, replikasi Sistem Informasi Kampung di Papua Barat sudah bisa dilakukan sampai tahap provinsi, sementara itu SIO Papua difokuskan pada replikasi di tingkat kabupaten.

Kedua, beberapa kebijakan, aturan, dan modul yang sudah diterbitkan belum memiliki rumusan yang dapat menjadi arahan/panduan implementasi kebijakan yang lebih jelas. Beberapa regulasi/kebijakan/modul yang didorong oleh KOMPAK masih membutuhkan turunan aturan yang jelas dan disepakati bersama. Ketiadaan aturan turunan ini mengakibatkan OPD teknis belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tanggung jawab dan perannya masing-masing. Begitupun dengan aspek GEDSI dalam desain program. Prinsip GEDSI sebenarnya sudah masuk dalam modul-modul yang dibuat oleh KOMPAK. Akan tetapi, pelaksana program dan juga aktor-aktor yang diintervensi perlu mendapatkan pendampingan dan *feedback* yang berkesinambungan mengenai upaya-upaya konkret yang dapat dilakukan agar target/capaian program dapat selaras dengan prinsip GEDSI.

Ketiga, belum terlihat upaya sistematis dalam advokasi yang memastikan pemegang keputusan di daerah mendukung mekanisme kebijakan turunan yang disepakati bersama. KOMPAK tidak memiliki daya paksa terhadap Pemda yang tidak menjalankan perannya atau tidak melanjutkan komitmennya. Kekuatan daya paksa ini berada pada pemimpin daerah, kepala dinas, dan para pemegang keputusan di level kabupaten dan provinsi. Sehingga, pengembangan kapasitas, perumusan kebijakan, dan bahkan kelanjutan program terkendala jika aktor-aktor pemegang keputusan tidak memberikan dukungannya.

Selain faktor internal yang masih menjadi kendala, terbatasnya perubahan-perubahan pada level kabupaten dan provinsi juga disebabkan oleh faktor eksternal sebagai berikut.

Faktor eksternal pertama, perubahan kapasitas aktor OPD belum berkembang menjadi perubahan level organisasi karena belum ada mekanisme insentif dan disinsentif bagi OPD yang berhasil mengembangkan kampung dan distrik yang dibina. Beberapa alasan tidak terjadinya pendampingan oleh fasilitator kabupaten kepada kampung adalah kesibukan dalam mengerjakan tugas-tugas rutin dan keterbatasan anggaran untuk mendampingi kampung secara berkesinambungan. Koordinator distrik yang merupakan pelaksana program KOMPAK adalah aktor yang lebih banyak mengambil peran komunikasi dan pendampingan bagi aktor level kampung dan unit layanan dibandingkan fasilitator kabupaten. Mekanisme insentif bagi fasilitator perencanaan hanya ditemukan di Kabupaten Asmat. Fasilitator perencanaan di Kabupaten Asmat tidak berada di level OPD tapi ada di level kampung atau distrik—seperti kepala SD, kepala Puskesmas, dan pastor. Aktor unit layanan yang menjadi

fasilitator memiliki motivasi untuk mendapatkan insentif tambahan dana untuk organisasinya dari dana kampung.²⁵

Kedua, aktor-aktor yang dilatih KOMPAK bukan orang yang memiliki wewenang dalam melakukan inovasi dan mendorong perubahan menyeluruh di organisasi. Perwakilan OPD yang terlibat pada intervensi KOMPAK seringkali bukan orang-orang yang memiliki posisi strategis seperti kepala dinas atau kepala bidang yang strategis. Karenanya, meskipun setelah mengikuti kegiatan mereka menyadari pentingnya inisiatif yang didorong KOMPAK, mereka tidak dapat mengambil kebijakan di instansi masing-masing karena tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Misalnya, setelah seluruh perwakilan (staf) OPD mendapatkan pelatihan perumusan RPJMD di Manokwari Selatan, keputusan bagaimana merumuskan perencanaan dan penganggaran tahunan pada akhirnya tetap berada di tangan kepala dinas, BAPPEDA, dan Bupati. Staf OPD hanya mengikuti keputusan yang diambil. Salah satu informan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Nabire juga merasakan hal yang sama.

Kita (DPMK) tidak mau terlibat aktif dalam kegiatan KOMPAK karena biasanya Kasubid yang terlibat. Jika Kepala Dinas ikut, dia bisa ambil kebijakan, ambil keputusan karena tahu lebih banyak. Kalau kita yang di bawah ini selesai kegiatan, kita biasanya diam-diam saja”.

—Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Nabire

Ketiga, belum ada mekanisme *transfer knowledge* yang sistematis dalam setiap organisasi apalagi antar-OPD, sehingga pemahaman aktor-aktor yang mendapatkan intervensi KOMPAK menjadi tidak utuh dan tidak menyebar. Isu mutasi dan rotasi pada aktor OPD membuat KOMPAK harus mengulang kembali pendekatan dan peningkatan kapasitas kepada aktor-aktor yang baru. Jikapun ada inisiatif individu dalam melanjutkan pendampingan paska-pelatihan, aktor-aktor yang dilatih KOMPAK belum memiliki kapasitas untuk mendorong pembuat kebijakan untuk berubah. Sebagai contoh, setelah mendapat beberapa kali pelatihan, salah satu fasilitator perencanaan di Sorong berupaya menceritakan pengalamannya dalam program KOMPAK kepada kolega di kantor. Dirinya juga sekaligus menanyakan kepala dinas dan kepala bidang mengenai alokasi dana yang dapat digunakan untuk melakukan pendampingan menerus bagi unit layanan dan aparat kampung, tetapi tidak mendapatkan tanggapan positif.

Keempat, perubahan prioritas pembangunan Pemda yang bisa berdampak pada keberlanjutan program. Setidaknya terdapat dua perubahan prioritas pembangunan yang memengaruhi keberlanjutan program dan menghambat capaian program, yaitu (1) alokasi anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai Pekan Olahraga Nasional

²⁵ Penjelasan lebih detail mengenai peran fasilitator sinergi di Kabupaten Asmat ada pada Bab III Sinergi Sektoral

(PON) dan (2) prioritas penanganan COVID-19 sejak tahun 2020. Alokasi dana untuk PON membuat program BANGGA Papua harus terhenti di tahun 2019. Sedangkan pandemi COVID-19 mengharuskan seluruh OPD berfokus pada alokasi anggaran dan SDM untuk penanganan COVID-19. Meskipun KOMPAK juga membantu Pemda dalam merumuskan alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, namun proses komunikasi dan pendampingan pada aspek sistem informasi kampung dan sinergi sektoral sempat terhenti.

4.3. Pembelajaran dan Rekomendasi

Di area regulasi dan kebijakan, studi ini **menunjukkan bahwa program KOMPAK yang bergerak lintas skala administratif pemerintahan, dengan menciptakan lingkungan kebijakan yang kondusif di tingkat kabupaten dan provinsi, telah memberikan dampak pada implementasi dan perluasan program ke seluruh kampung serta krusial untuk menjaga keberlanjutan program.** Studi ini mengidentifikasi menemukan bahwa aktivitas KOMPAK di tingkat kabupaten dan provinsi telah berhasil membuat program KOMPAK diadopsi oleh pemerintah daerah, seperti adopsi program pendataan di Provinsi Papua Barat, yang berdampak positif pada implementasi program sampai tingkat kampung. Lebih jauh, sebagian program juga telah direplikasi di wilayah non-intervensi melalui pembiayaan pemerintah daerah. Keberhasilan program di tingkat provinsi secara spesifik dipengaruhi oleh lobi dan advokasi yang dilakukan oleh aktor-aktor KOMPAK dengan pengalaman panjang dan relasi yang baik dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan di Papua dan Papua Barat. Hal ini dikombinasikan dengan fokus dan pendekatan program yang sangat relevan dengan konteks Otsus –penekanan pada data terpilah OAP dan perlindungan sosial OAP. **Ke depannya, model pendekatan program yang komprehensif melalui kombinasi perbaikan lingkungan kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten dengan penyelenggaraan aktivitas program di tingkat kampung perlu dipertahankan.**

Namun, studi juga menemukan bahwa tidak semua payung hukum dan regulasi yang didorong KOMPAK dari berbagai inisiatif berhasil diimplementasikan sampai ke tingkat kampung, sehingga ke depannya diperlukan keberlanjutan program untuk fokus pada pendampingan penyusunan kebijakan turunan dan implementasinya. Studi ini mengidentifikasi tidak ada kebijakan turunan, terutama pada program-program yang tidak begitu jelas insentifnya bagi pemangku kepentingan yang menghambat implementasi kebijakan. Karenanya, **studi ini merekomendasikan keberlanjutan program KOMPAK dalam mendorong perbaikan tata kelola melalui regulasi untuk melakukan upaya-upaya sistematis merumuskan mekanisme kebijakan turunan yang dapat menjadi arahan/panduan implementasi yang lebih jelas.** Untuk itu, program perlu membangun dukungan dan kesepakatan dari pemimpin daerah, kepala dinas, dan pemangku kepentingan yang lebih luas sehingga program ini akan didukung dengan komitmen yang jelas dari mereka yang menjadi pengambil keputusan di Tanah Papua. Hal ini perlu disertai upaya pendampingan dan fasilitasi dari program yang tidak berhenti sampai terbitnya regulasi, tapi dilakukan sampai pendampingan untuk merumuskan kebijakan turunan, sosialisasi, dan

advokasi untuk mendapatkan komitmen yang lebih serius dari pemangku kepentingan. Adanya dukungan dan pendampingan teknis pascaregulasi akan membuat program peningkatan kapasitas OPD lebih berpotensi untuk menjadi peningkatan kapasitas yang melembaga.

Selain itu, studi ini juga mengidentifikasi bahwa salah satu upaya untuk memastikan konsistensi dan dukungan kelembagaan adalah melalui insentif dan disinsentif yang tepat yang bisa menjadi motivasi bagi pemangku kepentingan seperti gubernur, bupati, atau kepala dinas untuk mendukung program tersebut. Di Kabupaten Manokwari Selatan, studi menemukan bahwa insentif program yang dirasakan pejabat daerah untuk mendukung program KOMPAK adalah relevansi program KOMPAK dengan program pemerintah pusat seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Di Kabupaten Manokwari Selatan, insentif yang terintegrasi dengan program pemerintah pusat dapat menjadi pembelajaran mengenai bentuk insentif yang bisa didorong KOMPAK untuk membangun kelembagaan di tingkat kabupaten. Sementara itu, perlu dikembangkan bentuk insentif yang berbeda untuk mendapatkan dukungan pejabat daerah di wilayah lain di Provinsi Papua. **Untuk itu, studi ini merekomendasikan pentingnya memberikan insentif kepada aktor OPD yang terbukti mampu berinovasi dalam mendampingi kampung atau menunjukkan kualitas pendampingan, tidak hanya terbatas pada pemberian insentif dalam bentuk biaya operasional.**

Di aspek GEDSI, studi ini mengindikasikan bahwa aspek implementasi GEDSI yang paling nampak dari program KOMPAK ada pada program BANGGA Papua dan Sistem Informasi Kampung (SIK). BANGGA Papua adalah program yang bersinggungan dengan Ibu (perempuan) dan anak OAP, sementara SAIK menerapkan pendataan terpilah gender, OAP dan non-OAP, serta kelompok disabilitas. Di tingkat OAP, temuan studi juga menunjukkan pengaruh program BANGGA Papua terhadap perbaikan kesehatan ibu dan anak serta akses OAP terhadap dokumen kependudukan. Hal ini mengindikasikan insentif materiil yaitu menjadi pemanfaat program dan mendapatkan dana tunai Rp400.000 per bulan dapat mendorong kelompok OAP melakukan pengecekan kehamilan dan persalinan di Puskesmas dan memproses dokumen kelahiran. **Belajar dari pengalaman BANGGA Papua, studi ini merekomendasikan bagi program yang fokus pada aspek kesehatan ibu dan anak untuk menggunakan akses terhadap bantuan program sebagai upaya untuk mendorong perbaikan kualitas layanan, seperti layanan pendidikan dan kesehatan.**

Namun, di aspek GEDSI, studi ini juga mengindikasikan sulitnya mengimplementasikan prinsip GEDSI melalui berbagai lokakarya yang dilakukan. Mengimplementasikan program dengan prinsip GEDSI tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan cakupannya luas dan bersinggungan dengan kelompok-kelompok yang membutuhkan perlakuan (*treatment*) khusus dalam kerangka program. KOMPAK sudah memberikan masukan-masukan teknis pada prinsip GEDSI di setiap program yang dilakukan bersama Pemda. Untuk itu, ke depannya tahapan untuk

pengarusutamaan GEDSI ini perlu dilakukan secara hati-hati dan diiringi dengan target dan capaian spesifik, kelompok sasaran yang spesifik, serta panduan implementasi praktis yang berdasarkan konteks dari wilayah program.

Studi ini juga mengidentifikasi tantangan program KOMPAK untuk memitigasi isu birokrasi di Tanah Papua dan karenanya studi ini merekomendasikan perlunya upaya sistematis program untuk menjaga konsisten dukungan ASN dalam pelaksanaan program. Dalam konteks Tanah Papua, berbagai program kerap 'terkendala' isu-isu birokrasi seperti mutasi dan rotasi ASN, klientelisme,²⁶ dan kompetensi ASN yang dianggap tidak cocok dengan tata kelola modern. Konteks tersebut kurang dipertimbangkan dalam perencanaan dan implementasi program, sehingga menjadi kendala ketika program berjalan. Padahal, konteks ini seharusnya perlu diantisipasi sejak awal dan menjadi aspek yang dipertimbangkan untuk perumusan strategi program. Tentunya isu birokrasi yang dinamis dan pergantian ASN dan pejabat tidak mudah diatasi. **Meski begitu, program yang dilakukan bersama pemerintah perlu mengeksplorasi dan menemukan cara-cara yang dapat mendorong ASN untuk konsisten dalam pelaksanaan program-program.** Sebagai contoh, sebuah program biasanya bekerja dengan lembaga/instansi melalui kerjasama dan peningkatan kapasitas dengan satu atau beberapa individu di posisi strategis yang dianggap *champion*. Implikasinya, program akan terkendala jika individu tersebut tidak lagi bekerja di lembaga tersebut atau pun ada pergantian kepala dinas yang menyebabkan individu tersebut berganti posisi ke posisi yang lebih rendah. Program perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan kapasitas kelompok individu, dalam tim kecil misalnya dari berbagai instansi, yang muda dan berpotensi menjadi penggerak perubahan, dengan fokus peningkatan kapasitas, keterampilan, dan etika tim terlepas di instansi manapun mereka berada. Tujuan atau fokus di individu, sejauh disertai kontrak bekerja di Tanah Papua, akan berkontribusi pada perbaikan tata kelola mengingat aktor-aktor tersebut berpotensi memegang posisi-posisi strategis di masa yang akan datang.

²⁶ Hubungan pemimpin daerah dengan pendukungnya yang berbasis kekerabatan atau wilayah dukungan gunung dan pantai yang memengaruhi rekrutmen pejabat elite.

5. PARTISIPASI PUBLIK

Meski tidak menjadi fokus langsung, studi ini menemukan bahwa intervensi KOMPAK telah memunculkan perubahan pada empat aspek yang berkaitan dengan partisipasi publik. Pertama, peningkatan pengetahuan dan kapasitas individu kepala kampung dan Bamuskam mengenai fungsi dan prosedur pengawasan pembangunan kampung. Kedua, mendorong keterwakilan berbagai unsur dalam masyarakat pada proses perencanaan pembangunan kampung. Ketiga, turut mendorong pemanfaatan jalur-jalur penyampaian keluhan terkait pembangunan di kampung. Keempat, mendorong kader kampung dalam mengaksentuasi peran dan aktivisme kader (yang mayoritas generasi muda) dalam pembangunan kampung dan lebih dari sekedar persoalan administrasi kampung.

Pada Bab 3 tentang Sinergi Sektoral, telah dijelaskan intervensi KOMPAK terhadap aparat kampung dan unit layanan dasar (SD dan Puskesmas), seperti pelatihan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berbasis kebutuhan bersama. Melalui intervensi ini, KOMPAK memberikan materi, pelatihan, dan panduan bagi aparat kampung dan Bamuskam dalam menjaring partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan layanan dasar di kampung. Partisipasi publik didefinisikan secara luas sebagai berbagai bentuk keterlibatan individu, kelompok, atau organisasi secara langsung atau tidak langsung –melalui perwakilan pemangku kepentingan terkait—dalam proses pengambilan keputusan tentang kebijakan, perencanaan atau program (Quick & Bryson, 2016).

Intervensi KOMPAK di Tanah Papua tidak secara langsung menyorot aspek peningkatan partisipasi publik, beda halnya dengan *flagship* KOMPAK pada Akuntabilitas Sosial yang banyak dilakukan di luar Tanah Papua. Meski tidak menjadi fokus langsung, studi ini menemukan bahwa intervensi KOMPAK telah memunculkan perubahan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan partisipasi publik. Secara khusus, program sinergi sektoral yang dilakukan di kampung-kampung intervensi²⁷ telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan

²⁷Baik yang dilakukan secara formal melalui pelatihan dan pendampingan maupun melalui komunikasi informal antara aparat kampung dengan pelaku program.

kapasitas individu kepala kampung dan Bamuskam mengenai fungsi dan prosedur pengawasan pembangunan kampung.

Program yang membuka interaksi antara pelaksana program (seperti kordinator kabupaten dan distrik), aparat kampung, Bamuskam dengan warga telah mendorong keterwakilan berbagai unsur dalam masyarakat pada proses perencanaan pembangunan kampung. Kelompok perempuan banyak diwakili oleh kader Posyandu dan PKK dan belum dapat mendorong keterlibatan kelompok disabilitas. Studi ini juga melihat bahwa masyarakat telah dapat menyampaikan berbagai keluhan terkait pembangunan di kampung melalui berbagai media meskipun belum melalui Bamuskam sebagai lembaga yang mewakili kepentingan warga di kampung.

Lebih lanjut, intervensi KOMPAK secara spesifik juga memengaruhi peningkatan kapasitas kader kampung. KOMPAK berhasil mendorong kader kampung dalam mengaksentuasi peran dan aktivisme kader (yang mayoritas generasi muda) dalam pembangunan kampung dan lebih dari sekedar persoalan administrasi kampung.

Bab ini menjelaskan berbagai bentuk keterlibatan maupun peningkatan kapasitas individu, kelompok, atau lembaga dalam proses perencanaan pembangunan di kampung yang terjadi secara tidak langsung sebagai akibat adanya intervensi KOMPAK selama di Tanah Papua. Sebagai catatan, perubahan yang terjadi pada aspek ini bukan merupakan hasil asesmen dari intervensi langsung KOMPAK yang spesifik ditujukan pada aspek partisipasi namun lebih pada perubahan partisipasi publik yang terjadi dari berbagai intervensi KOMPAK di Tanah Papua. Lebih lanjut, bagian ini menyajikan temuan studi terkait perubahan pada aspek partisipasi publik baik dari sisi Bamuskam, (kelompok) masyarakat, dan kader kampung.

5.1. Temuan Perubahan

5.1.1. Peningkatan pengetahuan dan peran Bamuskam dalam pengawasan pembangunan

Studi ini menemukan bahwa intervensi yang dilakukan KOMPAK melalui pelatihan telah memberikan pengetahuan baru dan memperkuat tugas dan fungsi Bamuskam dalam prosedur-prosedur pengawasan pembangunan di kampung. Hal ini terjadi khususnya pada peran Bamuskam dalam menginisiasi musyawarah kampung dan keterlibatan dalam pembuatan dokumen RPJMK. Ketua Bamuskam menjadi tahu bahwa peran Bamuskam sangat penting dalam proses perencanaan sebagai inisiator perencanaan kampung—mengundang pemerintah dan masyarakat untuk terlibat dalam musyawarah kampung. Intervensi program juga mampu meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan individu ketua Bamuskam dalam berbicara di depan umum. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan dari KOMPAK-LANDASAN, ketua Bamuskam mulai dilibatkan dalam kegiatan pemerintahan atau kegiatan keuskupan. Undangan untuk terlibat dalam berbagai pertemuan di kampung dan gereja ini

dirasakan sebagai bentuk apresiasi kepada Bamuskam untuk lebih bisa memerankan fungsinya. Meski terlihat sebagai perubahan kecil, dalam konteks Tanah Papua, peningkatan pengetahuan patut diapresiasi mengingat keterbatasan-keterbatasan kapasitas aparat kampung di Tanah Papua.

Dari saya yang belum pernah tampilan saya punya kemampuan, dengan cara atau dengan dukungan atau bimbingan (Tim LANDASAN), saya mulai bisa berbicara dan bertanggungjawab. Pada saat itu saya belum bisa berbicara, saya rasakan bahwa ada rasa percaya diri dan saya merasa memiliki apa yang sudah saya ikuti.

—Ketua Bamuskam, Asmat

Studi ini menemukan bahwa intervensi yang dilakukan KOMPAK melalui pelatihan telah memberikan pengetahuan baru dan memperkuat tugas dan fungsi Bamuskam dalam prosedur-prosedur pengawasan pembangunan di kampung.

Selain peran-peran administratif seperti inisiator proses perencanaan di kampung, peran penting Bamuskam di kampung adalah menjadi jembatan antara warga dan pemerintah kampung. Bamuskam bertugas menampung, mengelola, dan menyampaikan aspirasi warga kepada pemerintah kampung. Sebaliknya, Bamuskam juga menyampaikan program-program pemerintah kampung kepada masyarakat. Sebagai lembaga yang menjembatani, Bamuskam harus aktif dan berinisiatif mencari tahu persoalan-persoalan dan keluhan di tingkat warga. Meski perannya begitu penting, **studi ini menemukan di kampung lokasi studi baik ketua dan anggota Bamuskam secara umum belum berinisiatif menjadi jembatan antara warga dengan pemerintah kampung.**

Belum adanya inisiatif Bamuskam dipengaruhi oleh konteks relasi kuasa. Di mayoritas lokasi studi, ketua Bamuskam biasanya memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala kampung, misalnya berasal dari satu marga yang sama. Adanya relasi personal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan, hingga berpengaruh terhadap proses-proses akuntabilitas dan transparansi pembangunan di kampung. Di lokasi studi (Nabire, Sorong, Jayapura), pengelolaan anggaran kampung masih belum terbuka. Informasi anggaran masih diketahui secara terbatas oleh kepala kampung, bendahara kampung, dan ketua Bamuskam. Bahkan, di

salah satu kampung di Sorong, Kepala Kampung dan Bamuskam juga tertutup kepada aparat kampung yang lain.

Dominasi ini membuat masyarakat semakin tidak berani menyampaikan keluhan ke Bamuskam. Tidak hanya masyarakat, bahkan sesama anggota Bamuskam juga segan untuk menanyakan secara langsung terkait persoalan-persoalan pembangunan kampung kepada ketua Bamuskam.

Dalam konteks Tanah Papua, Kepala Kampung dan Bamuskam biasanya berasal dari kelompok elite tradisional seperti dari keturunan pembuka lahan/desa, pemilik tanah ulayat, dan suku asli. Karenanya, masyarakat cenderung segan untuk berbicara secara terbuka dan langsung. Seharusnya, Bamuskam dibutuhkan dalam konteks masyarakat seperti ini untuk bisa menjadi pen jembatan antara warga dan pemerintah kampung. Namun, alih-alih muncul proses komunikasi yang dijembatani Bamuskam, dengan relasi kekerabatan antara Kepala Kampung dan Ketua Bamuskam yang muncul adalah kecenderungan terjadinya dominasi kekuasaan kelompok tertentu di kampung tersebut. Dominasi ini membuat masyarakat semakin tidak berani menyampaikan keluhan ke Bamuskam. Tidak hanya masyarakat, bahkan sesama anggota Bamuskam juga segan untuk menanyakan secara langsung terkait persoalan-persoalan pembangunan Kampung kepada ketua Bamuskam.

Gambaran tentang dominasi ini misanya terjadi di salah satu kampung di distrik Demta (Jayapura). Meskipun di sana pemerintah kampung telah mendapat pelatihan dari KOMPAK-LANDASAN, namun sekretaris Bamuskam menyatakan bahwa penggunaan dana kampung masih belum transparan dan akuntabel. Musyawarah perencanaan selalu dilakukan setiap tahun dengan mengundang aparat kampung, Bamuskam, kader Posyandu dan PKK, serta perwakilan dari masyarakat seperti tokoh agama. Namun demikian, belum ada mekanisme transparansi mengenai realisasi penggunaan anggaran kampung setelah musyawarah terjadi. Ketua Bamuskam juga tidak pernah menginisiasi pertemuan-pertemuan lanjutan untuk membahas perkembangan dari pembangunan yang ada di kampung. Kondisi ini terjadi karena dominasi kuat dari kepala kampung dan ketua Bamuskam—misalnya Ondoafi—sehingga anggota Bamuskam lain merasa segan atau tidak berani bertanya perihal realisasi anggaran kampung.

Meski demikian, studi ini menemukan adanya praktik baik di Sorong (Kampung Alo). Di Kampung Alo, karena belum berani bicara secara langsung, Sekretaris Bamuskam (perempuan) berinisiatif mencari alternatif untuk membuat keterbukaan informasi dari kepala kampung dan Bamuskam (lihat kotak 5.1.). Sekretaris Bamuskam ini berkoordinasi dengan berbagai pihak baik dari sisi warga kampung, pemerintah distrik bahkan dinas terkait, dalam upaya untuk mewujudkan keterbukaan informasi. Praktik baik ini bisa terjadi karena

pengetahuan baru dari KOMPAK diberikan kepada aktor dengan profil yang 'tepat'. Sekretaris Bamuskam Kampung Alo berpendidikan S1, berlatarbelakang aktivis, dan berasal dari elit kampung, sehingga memiliki akses ke aktor-aktor di distrik maupun kabupaten.

Pelatihan formal yang dilakukan program memang sudah berhasil memberikan pengetahuan baru kepada Bamuskam. Namun, mengingat tidak efektifnya peran Bamuskam karena faktor relasi kuasa, maka pendampingan sangat diperlukan. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan pengetahuan pengetahuan yang didapat dari pelatihan formal diterapkan secara nyata.

KOTAK 5.1 | Peningkatan Kapasitas Sekretaris Bamuskam Perempuan Kampung Alo, Sorong

Margareth adalah Sekretaris Bamuskam di Kampung Alo sejak tahun 2016. Ia berpendidikan sarjana dan suaminya bekerja sebagai PNS di salah satu distrik di Sorong. Pada tahun 2017, bersama dengan ketua Bamuskam, Margareth mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilaksanakan oleh KOMPAK mengenai peran dan fungsi Bamuskam dalam pembangunan di kampung. Pelatihan ini juga menekankan peran Bamuskam dalam membantu dan memastikan pemerintah kampung untuk melakukan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebelumnya ia tidak begitu mengetahui apa sebenarnya tugas Bamuskam. Setelah mengikuti pelatihan, ia mulai memperhatikan kinerja pemerintah kampung dalam menggunakan dana kampung.

Margareth menilai tata kelola di kampung Alo tidak berjalan dengan baik. Selama ini, Margareth melihat bahwa perencanaan pembangunan di kampung dilakukan berbasis keluarga saja. Kepala kampung hanya mendengar masukan dari keluarganya. Pemanfaatan dana pun diutamakan untuk keluarga kepala dan bendahara kampung yang merupakan keluarga ketua Bamuskam. Misalnya, bantuan pembangunan rumah dari Dana Kampung 2021 malah diberikan kepada saudara kepala kampung yang tidak memenuhi kriteria penerima. Padahal ada warga lain yang lebih membutuhkan, misalnya warga dari 3-4 keluarga yang tinggal di satu rumah. Melihat ini, Margareth tidak berani bicara secara langsung kepada pemerintah kampung karena relasi dengan pemerintah kampung yang lebih menganggap dirinya sebagai orang muda. Terlebih lagi ia adalah seorang perempuan.

Jangankan untuk memaksa pemerintah bikin program, kita menemukan beberapa kejanggalan saja terpaksa diam, jadi hanya baku bicara di belakang pemerintah kampung. Kita mau sampaikan bagaimana, ini mereka semua tua kampung, kita baru masih muda sudah sok-sok ikut campur ...

Margareth mengaku sudah mengetahui peran Bamuskam dalam pembangunan kampung setelah mengikuti pelatihan dari KOMPAK tetapi ia masih merasa Bimtek dari KOMPAK kurang memberikan pendampingan pada penyelesaian masalah seperti yang dia hadapi. Namun demikian, intervensi KOMPAK telah berhasil membangun kepercayaan dirinya untuk mulai mengumpulkan pendapat warga mengenai penggunaan dana kampung. Setelah itu, Margaret menyampaikan masalah ini kepada kepala distrik. Kepala distrik mencoba membantu dengan melakukan pendekatan personal kepada kepala kampung namun tidak berhasil. Kepala distrik kemudian menyarankan Margareth untuk melapor kepada DPMK. Ia memanfaatkan momen pertemuan Bamuskam dengan DPMK dengan meminta pendapat kepada aparat DPMK secara informal untuk membantu dalam menyelesaikan masalah kampungnya. Sayangnya, Margareth belum mendapatkan respon yang serius dari pihak DPMK.

Meski belum sampai memengaruhi respon aparat kampung terkait transparansi anggaran, upaya Margareth merupakan satu perubahan yang berarti dari tingkat kampung dan hal ini tidak ditemukan pada Bamuskam di lokasi studi lain.

5.1.2. Keterwakilan kelompok masyarakat dalam proses perencanaan kampung

Proses perencanaan kampung yang baik yang sesuai dengan kebutuhan warga mensyaratkan keterwakilan warga baik dari berbagai kelompok yang ada di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, kelompok rentan, dan kelompok-kelompok lainnya. Studi ini menemukan bahwa **intervensi KOMPAK di Tanah Papua telah meningkatkan kehadiran dan keterlibatan kelompok masyarakat (khususnya perempuan yang diwakili oleh kader Posyandu dan PKK) dalam musyawarah perencanaan di kampung sehingga proses perencanaan pembangunan menjadi lebih terbuka**. Pendekatan “satu tungku tiga batu” sebagai bentuk akomodasi tiga aspek kemasyarakatan yaitu adat, pemerintah, dan agama dalam proses perencanaan sudah diterapkan di beberapa lokasi studi. Pendekatan ini sudah digunakan secara formal dalam musyawarah kampung dengan mengundang tokoh agama (pendeta, pastor, anggota majelis gereja atau masjid yang aktif), aparat kampung, dan tokoh adat (Ondoafi).

Studi ini mengindikasikan peran tokoh agama atau kader Posyandu dalam musyawarah kampung. Di salah satu kampung di Manokwari Selatan, tokoh agama (seperti imam masjid) selalu dilibatkan dalam proses perencanaan kampung mulai dari pra-musyawarah kampung dan pada saat musyawarah kampung. Tokoh agama yang terlibat mengaku menjadi penyambung warga untuk menyampaikan usulan atau aspirasi yang belum terlaksana. Misalnya, ia menyampaikan usulan mayoritas warga RT di kampungnya terkait pembangunan jalan menuju pemakaman. Usulan ini disetujui oleh pemerintah kampung. Pembangunan jalan ini pernah dijanjikan oleh Bupati pada saat kampanye, namun tidak ada realisasinya sehingga warga mengusulkan ke pemerintah kampung melalui imam masjid yang diundang dalam musyawarah kampung. Contoh lain, satu kampung di Asmat, selain tokoh agama, tokoh adat, aparat kampung, dan Bamuskam, saat ini musyawarah kampung juga melibatkan unit layanan dan kelompok perempuan dari kelompok PKK dan kader Posyandu. Meski keterwakilan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa masih terbatas pada kelompok elite perempuan (PKK) dan kader Posyandu, namun pelibatan perempuan pada level ini pun merupakan langkah awal yang patut diapresiasi.

Meski sudah melibatkan perwakilan dari berbagai masyarakat, **studi ini menemukan pertemuan tersebut belum menunjukkan keterwakilan dari kelompok kelompok disabilitas**. Wawancara dengan warga kampung di seluruh lokasi studi mengindikasikan bahwa warga kampung dengan disabilitas seperti yang terjadi di Jayapura dan Nabire belum pernah dilibatkan dalam musyawarah kampung. Di sisi lain ada perasaan sungkan dan malu dari kelompok disabilitas untuk hadir ke pertemuan di kampung karena keterbatasan yang mereka miliki. Seorang ibu penyandang disabilitas di Jayapura mengaku tidak pernah

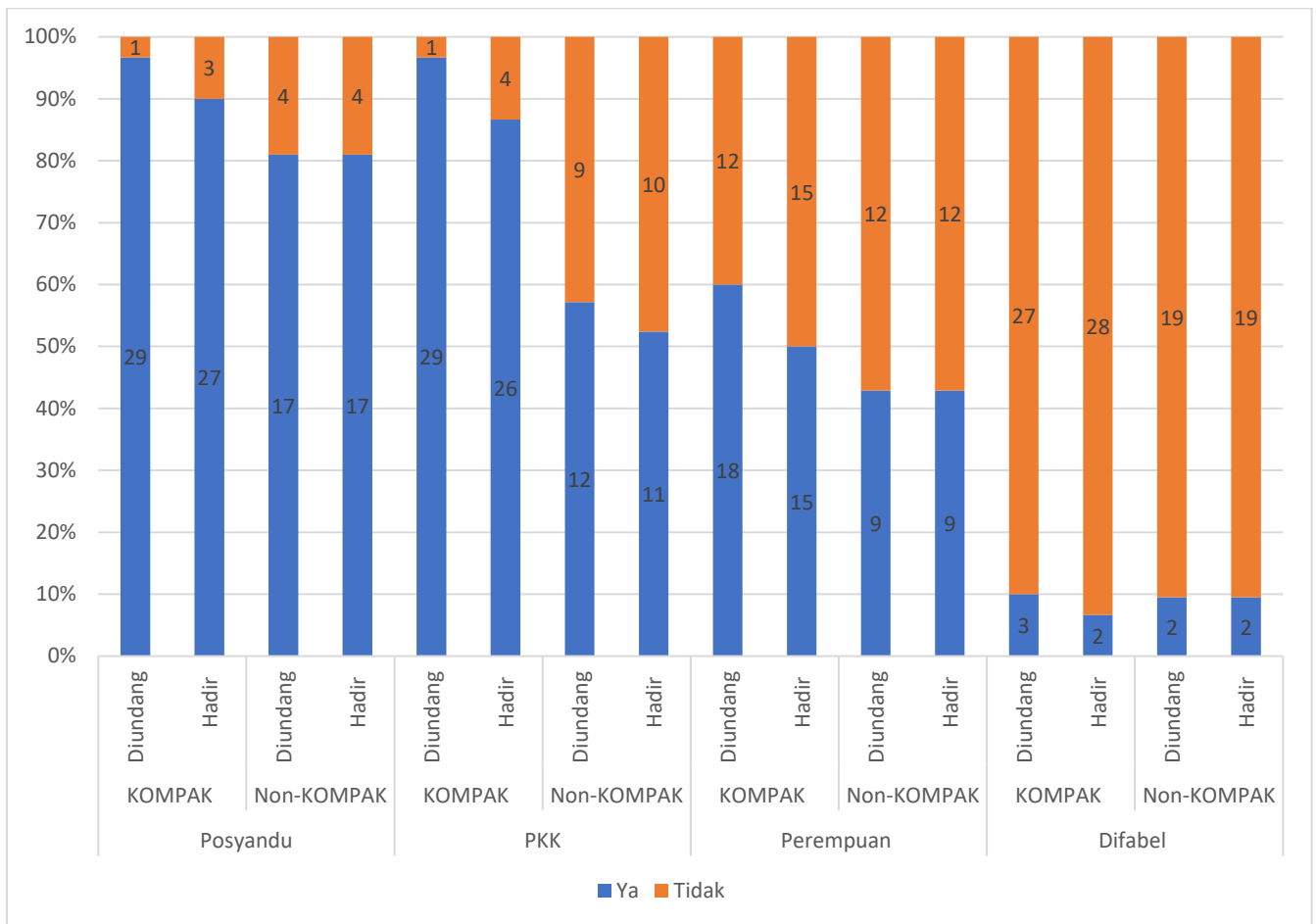
mendapat undangan khusus untuk menghadiri pertemuan di kampung. Undangan selalu ditujukan kepada suaminya. Sementara itu, wawancara dengan warga kampung mengindikasikan bahwa pertemuan kampung sudah mengundang warga biasa (kecuali di Asmat). Namun mereka baru bisa hadir dalam pertemuan dan belum berani menyampaikan pendapat atau usulan di dalam pertemuan tersebut.

Studi ini juga mengindikasikan adanya pertemuan-pertemuan untuk menjaring usulan sebelum musyawarah kampung. Hanya di satu kampung di Jayapura dan satu kampung di Manokwari Selatan sudah melakukan musyawarah di tingkat RW/RT sebagai proses menjaring usulan kebutuhan warga. Di Manokwari Selatan, sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan kampung dilaksanakan, masing-masing RT mengadakan pertemuan untuk menjaring usulan dari warga. Seperti contoh yang sudah disebutkan di atas, dalam pertemuan RT tersebut warga menyampaikan usulan pembangunan di wilayah mereka. Usulan ini akan diteruskan oleh perwakilan tokoh agama dan disampaikan dalam musyawarah kampung. Sementara di Jayapura, tiap unit RW melakukan pertemuan warga untuk membahas usulan sebelum musyawarah kampung dilakukan. Pada pertemuan RW ini, warga dikumpulkan di balai kampung lama atau di kantor kampung. Pertemuan masing-masing RW ini juga mengundang perwakilan dari Bamuskam. Usulan yang sudah terjaring dari pertemuan RW kemudian disampaikan oleh perwakilan RW dan Bamuskam dalam musyawarah perencanaan kampung seperti usulan pembangunan dinding penahan (talud) di sekitar sungai di salah satu wilayah RW. Sebagai catatan, studi ini tidak menelaah sejauh mana kesesuaian usulan yang dikemukakan oleh wakil-wakil tersebut pada musyawarah kampung dengan usulan yang ada di pertemuan tingkat RW dan RT.

Senada dengan temuan studi kualitatif, temuan dari survei menunjukkan bahwa mayoritas responden kepala kampung menyatakan pertemuan di tingkat kampung sudah mengundang dan dihadiri oleh jajaran pemerintahan kampung (kepala kampung, aparat kampung), Bamuskam, tokoh masyarakat, kader kampung/KPMK, perangkat distrik, pelaku pendidikan, pelaku kesehatan, kader Posyandu, dan Tim Penggerak PKK. **Survei juga menemukan bahwa mayoritas responden kepala kampung menyatakan bahwa pertemuan kampung telah mengundang dan dihadiri oleh warga biasa, meskipun respon tersebut tidak mengindikasikan sejauh mana keterlibatan warga biasa dari sisi kuantitas seperti berapa banyak warga yang ikut pertemuan.**

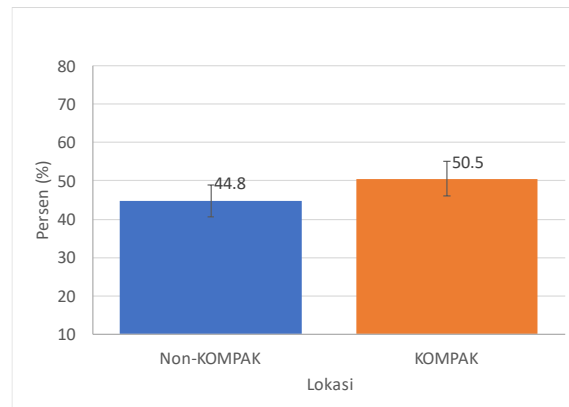
Terkait dengan keterlibatan kelompok masyarakat difabel atau penyandang disabilitas, persentase responden kepala kampung yang menyebutkan bahwa pertemuan tingkat kampung telah mengundang dan dan dihadiri oleh kelompok difabel/penyandang disabilitas adalah kurang dari 10%. Sebagian responden kepala kampung juga menyebutkan bahwa pertemuan di tingkat kampung mengundang perwakilan perempuan, meskipun mayoritas diwakili oleh Tim Penggerak PKK dan Kader Posyandu (Gambar 5.1.).

Gambar 5.1. Undangan dan Kehadiran Kelompok Masyarakat menurut Kepala Kampung (n = 51)

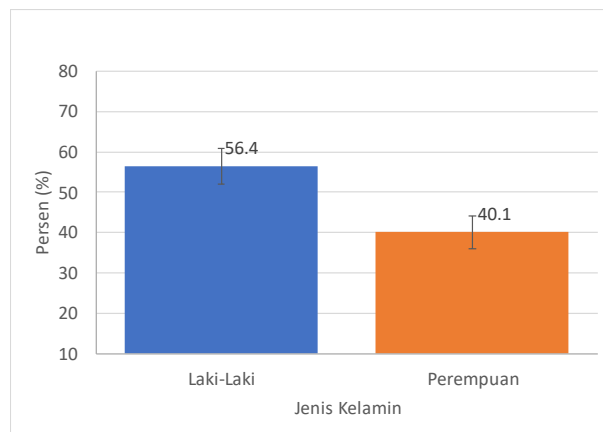


Meski demikian, respon dari kepala kampung ini tidak terlalu sejalan dengan respon dari responden warga. Pada survei rumah tangga, studi ini tidak menemukan perbedaan yang signifikan dalam hal kehadiran di pertemuan kampung di antara lokasi intervensi KOMPAK dan non-intervensi KOMPAK (Gambar 5.2-A). Hasil survei juga menemukan bahwa baik di lokasi intervensi KOMPAK maupun non-intervensi KOMPAK, laki-laki cenderung berpartisipasi dalam pertemuan kampung dalam setahun terakhir (Gambar 5.2-B). Di Asmat misalnya, pemerintah kampung sudah mulai mengundang perwakilan perempuan (PKK) dalam musyawarah kampung. Hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya karena pertemuan dilakukan di rumah adat (Jew) yang didominasi laki-laki. Meskipun keterwakilan perempuan dalam pertemuan tersebut belum sampai memengaruhi keputusan perencanaan namun ruang penyampaian usulan bagi perempuan mulai terbuka. Pada contoh ini, ketua PKK menyampaikan usulan perlunya pembangunan rumah/sanggar seni untuk menyimpan kerajinan noken dari mama-mama di kampung sehingga pengunjung dari luar distrik dapat melihat-lihat dan membeli kerajinan tersebut. Usulan tersebut tidak disetujui dalam musyawarah kampung dan pada kesempatan lain ketua PKK menyampaikan usulan tersebut kepada orang Dinas Pariwisata pada saat berkunjung ke kampung.

Gambar 5.2-A Kehadiran Responden Rumah Tangga dalam Pertemuan Kampung dalam Setahun Terakhir berdasarkan Lokasi (n = 1120)



Gambar 5.2-B Persentase Responden berdasarkan Kehadiran pada Pertemuan Kampung Terakhir berdasarkan Jenis Kelamin (n=1120)



5.1.3. Memperbesar pemanfaat saluran penyampaian keluhan atau komplain warga kampung



Studi ini menemukan bahwa intervensi KOMPAK turut memperbesar pemanfaatan saluran penyampaian keluhan atau komplain warga kampung melalui mekanisme formal dan informal yang sudah terbangun sebelumnya.

Saluran atau mekanisme penyampaian keluhan warga atas jalannya pemerintahan dan pembangunan kampung merupakan salah satu aspek penting dari partisipasi publik. Studi ini menemukan bahwa intervensi KOMPAK turut memperbesar pemanfaatan saluran penyampaian keluhan atau komplain warga kampung melalui mekanisme formal dan informal yang sudah terbangun sebelumnya. Pada mekanisme formal, keluhan warga disampaikan melalui perwakilan pada Musrenbang yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk jalur informal, penyampaian keluhan dari warga ini lebih banyak disampaikan secara personal

langsung kepada kepala kampung, tokoh agama, kader Posyandu, atau tokoh masyarakat (aparatur kampung) yang dianggap dekat dengan warga.

Di Sorong, intervensi KOMPAK baik melalui pertemuan formal seperti *workshop* maupun interaksi informal dengan pelaku program koordinator kabupaten telah memengaruhi sikap kepala kampung menjadi lebih terbuka dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu kepala kampung, misalnya, menjadi lebih sering menerima keluhan warga secara langsung di rumahnya. Dalam contoh ini, kepala kampung merupakan generasi muda yang sebelumnya sudah banyak mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dari lembaga lain seperti GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), Econusa (lembaga yang memiliki perhatian pada isu konservasi). Selain itu, ia pun aktif sebagai pembina dalam organisasi kepemudaan yang meliputi gabungan kampung di wilayah tersebut.

Selain melalui kepala kampung seperti kasus Sorong, **data kualitatif menunjukkan peran kader Posyandu dan tokoh agama sebagai media penyampaian keluhan warga kepada pemerintah kampung.** Di sebagian wilayah studi, kader Posyandu sering menjadi saluran keluhan warga terutama ibu-ibu supaya disampaikan kepada pihak Puskesmas. Kelompok ibu-ibu biasanya mengeluhkan layanan kesehatan di kampung seperti masalah stunting atau pemberian PMT. Contoh lain di Jayapura, masyarakat menyampaikan keluhan kepada kader Posyandu tentang penyediaan bidan yang tinggal di kampung untuk memudahkan pemeriksaan bayi/balita/ibu hamil dan akses berobat. Saat itu, sudah hampir satu tahun tidak ada bidan di kampung karena bidan yang bertugas sedang cuti melahirkan dan belum ada penggantinya. Keluhan ini disampaikan oleh ibu-ibu pada saat kegiatan penimbangan balita yang dilakukan setiap bulan. Selain kader Posyandu, tokoh agama seperti pastor termasuk aktor yang juga menjadi saluran keluhan warga. Di Asmat, keluhan terhadap layanan kesehatan seperti tidak tersedianya dokter di Puskesmas disampaikan melalui pastor dengan harapan pastor lebih didengar oleh pihak Puskesmas.

Saluran informal masih efektif dalam penyaluran keluhan dan komplain dari masyarakat tetapi masih perlu dipastikan bagaimana usulan-usulan yang disampaikan melalui jalur informal ini dapat diteruskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan kampung. Seperti disampaikan dalam contoh di atas, meskipun keluhan masyarakat sudah disampaikan melalui kader Posyandu atau pastor, keluhan tersebut belum ditanggapi sesuai dengan keinginan warga. Permintaan bidan kampung di Jayapura di atas ditindaklanjuti dengan adanya mantri kampung. Namun mantri ini belum dapat memenuhi pemeriksaan ibu hamil dengan optimal. Sementara itu, permintaan warga di Asmat yang disampaikan melalui pastor agar di kampungnya disediakan dokter di Puskesmas belum ditindaklanjuti.

Belum adanya mekanisme penyampaian keluhan atau masukan yang lebih sistematis di kampung juga disebabkan oleh situasi relasi kuasa di kampung yang masih kuat.

Belum adanya mekanisme penyampaian keluhan atau masukan yang lebih sistematis di kampung juga disebabkan oleh situasi relasi kuasa di kampung yang masih kuat. Masyarakat masih enggan menyampaikan keluhan atau komplain dalam pertemuan-pertemuan formal di kampung juga dipengaruhi oleh konteks *kinship* atau kekerabatan yang sangat kuat dan kekhawatiran akan mengganggu hubungan *fam*. Pada kampung dengan konteks relasi kuasa yang tersebar, penyampaian keluhan warga lebih mudah didengar dibandingkan dengan pada kampung dengan relasi kuasa yang terpusat. Contohnya, di Kaso, Sorong, keluhan warga bisa lebih mendapatkan ruang dan didengar bahkan oleh kepala kampung karena relasi kuasa di kampung tersebut tidak terlalu kuat. Sebaliknya, di kampung Beta, Jayapura, keluhan warga tidak mudah didengar karena relasi kuasa yang terpusat (kepala kampung juga merupakan Ondoafi). Prioritas pembangunan di kampung Beta tidak disusun berdasarkan kebutuhan yang sudah didokumentasikan dalam dokumen perencanaan (RKPK) melainkan berdasarkan keinginan kepala kampung.

Berbeda dengan penyelesaian masalah di pemerintah kampung yang lebih banyak disampaikan melalui jalur informal, studi ini menemukan bahwa penyampaian keluhan atau komplain dari warga kepada unit layanan pendidikan (SD) dapat dilakukan melalui jalur formal melalui komite sekolah. Komite sekolah bertugas menjembatani komunikasi dan menjadi wadah penyampaian keluhan atau komplain dari masyarakat kepada pihak sekolah. Di Asmat, KOMPAK-LANDASAN juga turut menginisiasi terbentuknya komite sekolah di salah satu SD. Intervensi ini berhasil menguatkan kapasitas, peran, dan tugas komite sekolah sebagai saluran formal penyampaian keluhan masyarakat terhadap layanan pendidikan. Upaya penyelesaian masalah yang terjadi di SD dengan fasilitasi dari komite sekolah dapat dibaca secara lengkap pada kotak di bawah.

Berbeda dengan penyelesaian masalah di pemerintah kampung yang lebih banyak disampaikan melalui jalur informal, studi ini menemukan bahwa penyampaian keluhan atau komplain dari warga kepada unit layanan pendidikan (SD) dapat dilakukan melalui jalur formal melalui komite sekolah.

KOTAK 5.2 | Peran Komite Sekolah dalam Penyelesaian masalah di SD Kasih Tuhan, Asmat

Pada tahun 2018 KOMPAK-LANDASAN menginisiasi pembentukan komite sekolah dan kepengurusannya di SD Kasih Tuhan, Asmat. Anggota komite ini terdiri dari perwakilan unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, kepala kampung, guru dan orang tua siswa. Dukungan KOMPAK ini telah berhasil memberikan pengetahuan mengenai peran dan fungsi komite serta telah meningkatkan kapasitas ketua komite untuk mampu membantu penyelesaian masalah di SD Kasih Tuhan.

Siswa yang bersekolah di SD Kasih Tuhan berasal dari dua kampung, yaitu Kampung Baya dan Kampung Wakasa. Pernah suatu ketika anak-anak dari kedua kampung tersebut saling berkelahi karena kenakalan siswanya di sekolah. Kejadian ini sampai membuat siswa yang berasal dari Kampung Wakasa tidak berani pergi ke sekolah karena selalu dihadang oleh siswa yang berasal dari Kampung Baya. Bangunan SD berada di Kampung Baya sehingga membuat siswa yang berasal dari kampung tersebut merasa lebih memiliki wilayah. Kejadian tersebut menimbulkan keluhan dari orang tua siswa yang tinggal di Kampung Wakasa karena anaknya menjadi tidak mau pergi ke sekolah. Komite sekolah berupaya menyelesaikan masalah ini dengan menjembatani pertemuan antara kedua kepala kampung, Baya dan Wakasa.

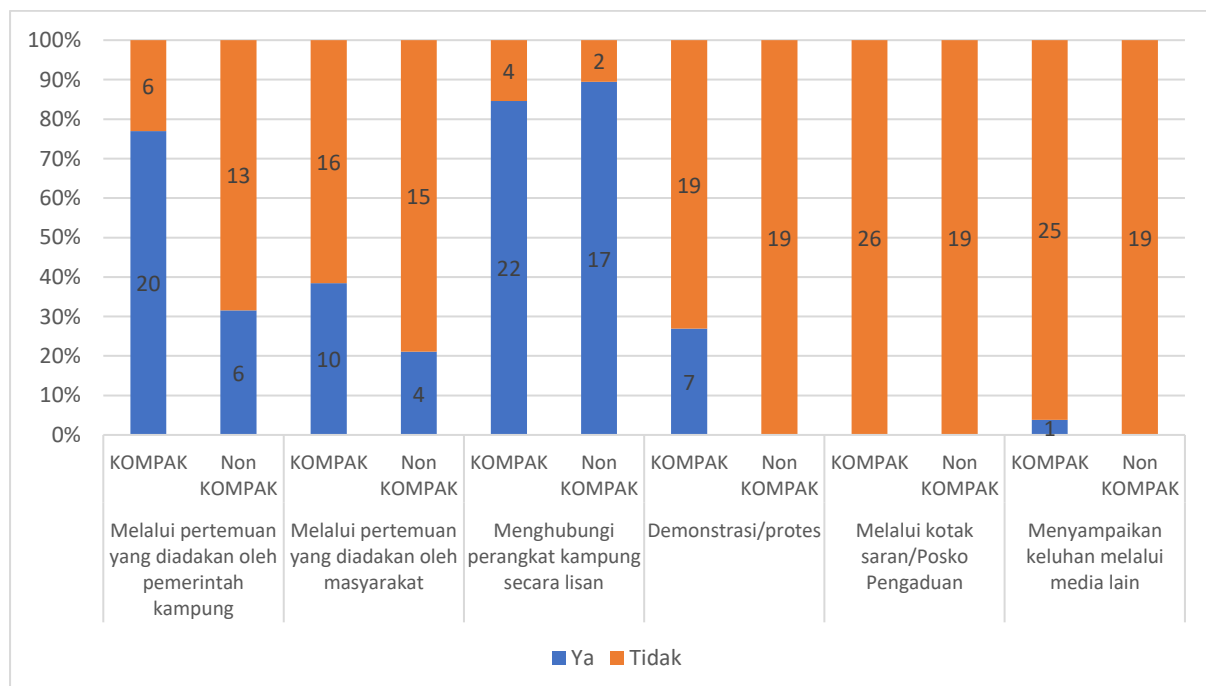
Sejak adanya komite sekolah, orang tua siswa sudah jarang langsung mendatangi sekolah dan marah kepada guru-guru jika ada permasalahan menyangkut anak mereka. Salah satu guru di sekolah tersebut mengatakan *“Dulu itu kalau ada orangtua tidak suka anaknya tidak naik kelas, dia akan ke sekolah marah bawa panah, dulu ada yang sampai seperti itu.”*

Sebagai perwakilan sekolah, komite sekolah menjadi jembatan penghubung antara sekolah dengan masyarakat, khususnya orang tua siswa. Seperti ketika menjelang ujian sekolah, komite sekolah bersama dengan guru membagi tugas untuk datang ke masing-masing titian untuk berkoordinasi dengan kepala kampung dan mendatangi orangtua siswa untuk memastikan siswanya mengikuti ujian. Pada saat pelaksanaan kegiatan adat pembuatan rumah *Jew* di Kampung Wakasa, banyak siswa yang berasal dari kampung tersebut tidak masuk sekolah karena dibawa orang tua pergi ke bevak untuk mencari bahan makanan. Mengetahui kondisi tersebut, komite sekolah bersama guru meminta kepada kepala kampung untuk menginformasikan kepada orang tua agar anak-anaknya diminta kembali ke rumah karena sebentar lagi ujian sekolah.

Terkait dengan penyampaian keluhan, persentase responden kepala kampung di kampung intervensi KOMPAK yang pernah menerima keluhan/permasalahan warga (sekitar 87%) lebih tinggi dibandingkan dengan responden kepala kampung non-intervensi KOMPAK (sekitar 63%). Pada responden kepala kampung yang pernah menerima keluhan, terlihat perbedaan cara penyampaian keluhan. Di kampung intervensi KOMPAK, terdapat lebih banyak variasi mekanisme penyampaian keluhan warga kepada kampung. Mekanisme yang dimaksud meliputi pertemuan yang diadakan kepala kampung, pertemuan yang diadakan masyarakat, melalui perangkat kampung secara lisan, atau demonstrasi. Sedangkan di kampung non-intervensi KOMPAK, tidak ada responden kepala kampung yang menjawab demonstrasi sebagai mekanisme penyampaian keluhan dari warga. Sekitar 70% kepala kampung baik di kampung intervensi KOMPAK maupun non-intervensi KOMPAK merespon keluhan warga dengan meneruskan keluhan tersebut ke unit layanan.

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas (77%) kepala kampung intervensi KOMPAK dan 32% responden kepala kampung non-intervensi KOMPAK juga menyatakan bahwa pertemuan yang diselenggarakan kepala kampung digunakan warga untuk menyampaikan keluhan. Hal ini mengindikasikan ada mekanisme formal untuk penyampaian keluhan. Selain itu, mekanisme penyampaian keluhan melalui aparat kampung secara lisan merupakan mekanisme yang paling banyak dipakai di kampung intervensi (84,6%) dan non-intervensi (89,5%). Grafik jenis mekanisme penyampaian keluhan dapat dilihat pada Gambar 5.3.

Gambar 5.3. Mekanisme penyampaian keluhan di kampung (n=45)



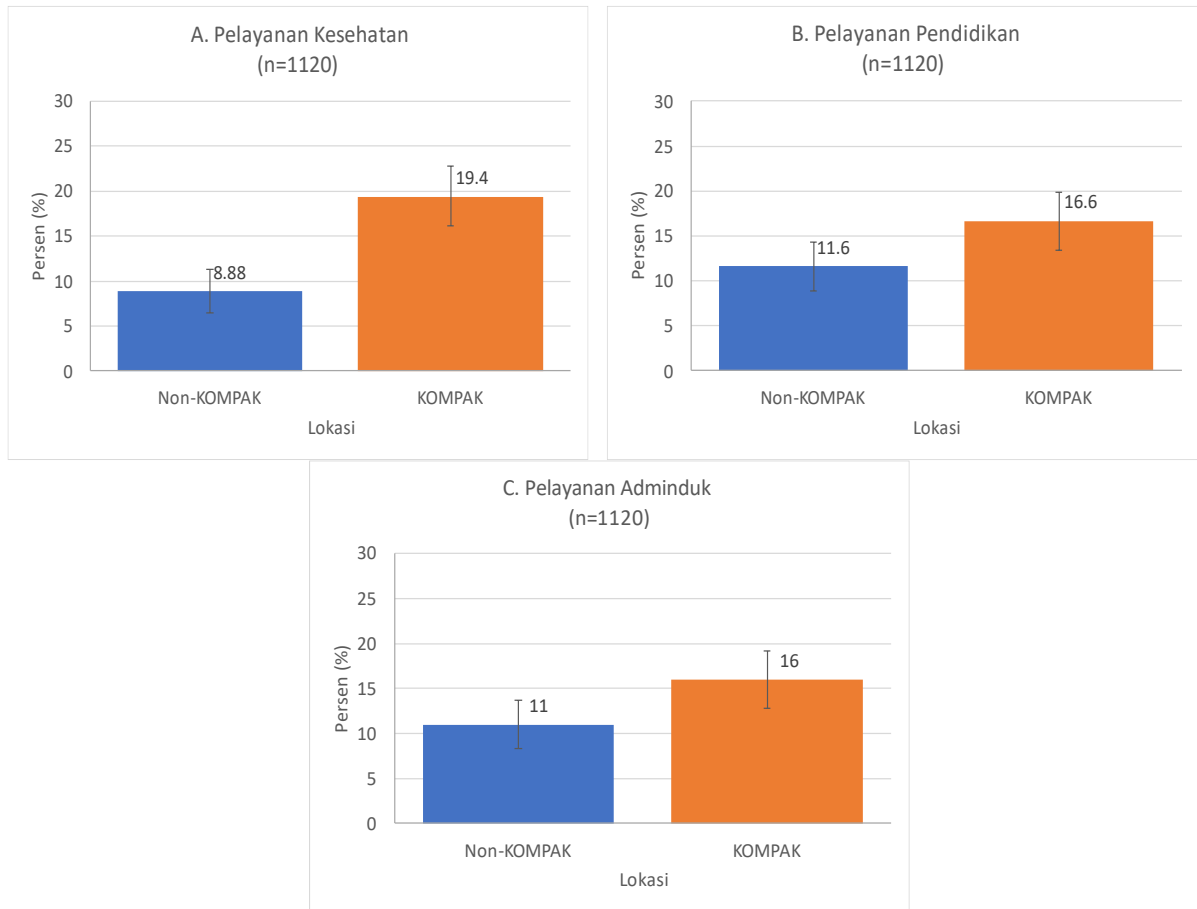
Selain itu, hasil survei terhadap responden anggota rumah tangga menunjukkan bahwa lebih banyak warga kampung intervensi KOMPAK yang menyampaikan keluhan/kritik/masukan kepada pemerintah terkait layanan, terutama layanan kesehatan (Gambar 5.4-A). Meskipun demikian, tampaknya penyampaian masukan/kritik/saran ini masih terbatas pada kelompok laki-laki dibandingkan dengan perempuan, baik di lokasi intervensi KOMPAK maupun non-intervensi KOMPAK (Gambar 5.4-B).

Lebih lanjut, Gambar 5.4-A dan Gambar 5.4-B menunjukkan bahwa secara umum persentase responden anggota rumah tangga yang menyampaikan keluhan, kritik, atau saran tentang pelayanan publik di kampungnya masih relatif rendah hanya berkisar kurang lebih antara 8% sampai 20%. Secara umum, persentase responden anggota rumah tangga di kampung intervensi KOMPAK cenderung lebih tinggi dibandingkan responden anggota rumah tangga di kampung non-intervensi KOMPAK. Namun demikian, dari ketiga pelayanan publik yang ditanyakan (layanan kesehatan, pendidikan, dan Adminduk) hanya layanan kesehatan saja yang terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik. Persentase responden anggota rumah tangga di lokasi intervensi KOMPAK yang menyampaikan keluhan, kritik, atau saran tentang pelayanan kesehatan adalah sebesar 19.4% dibandingkan persentase responden anggota rumah tangga di lokasi non-intervensi yang hanya sebesar 8.9%.

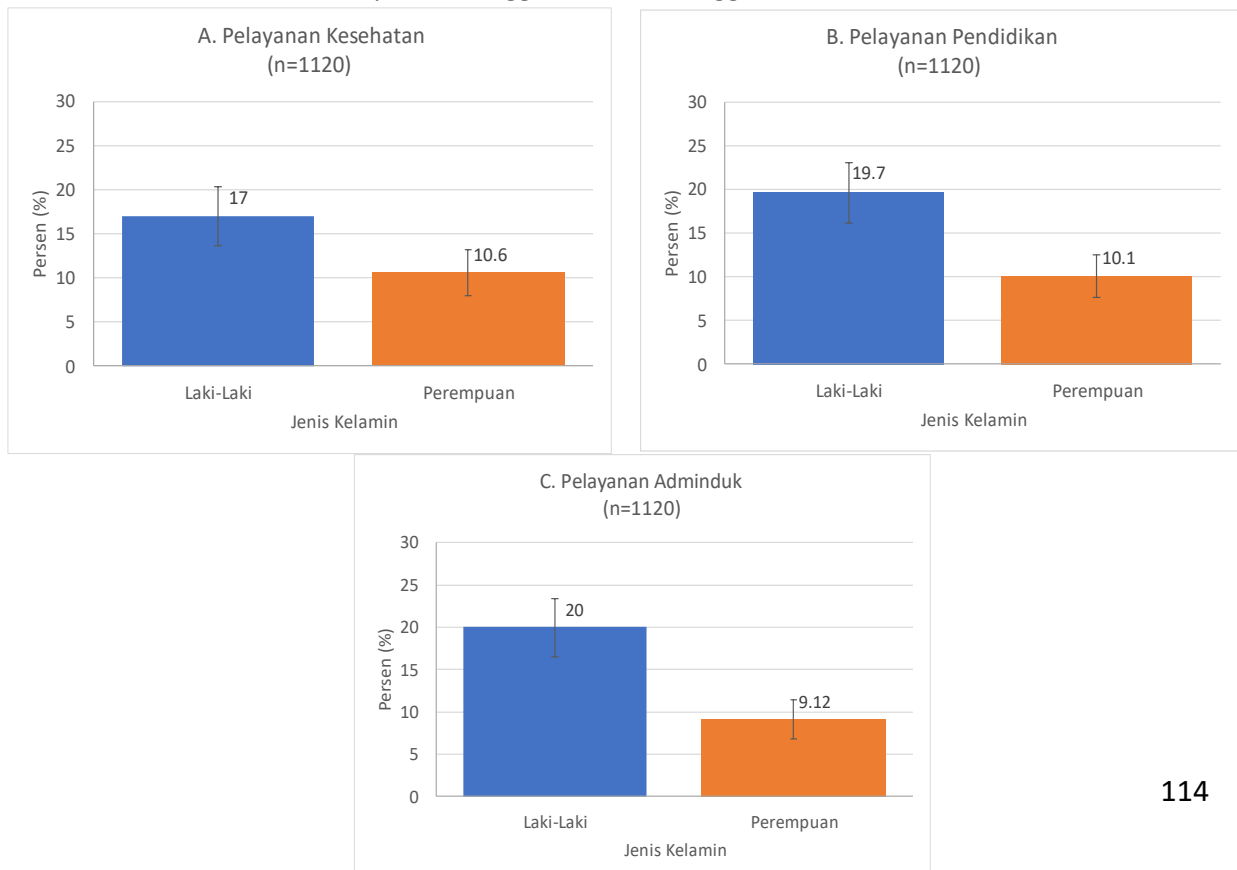
Dari sisi jenis kelamin, persentase responden laki-laki yang menyampaikan keluhan, kritik, atau saran tentang layanan publik juga cenderung lebih tinggi secara signifikan dibandingkan responden perempuan baik untuk layanan kesehatan, pendidikan, dan Adminduk. Untuk layanan kesehatan, persentase responden laki-laki yang menyampaikan keluhan, kritik, atau saran adalah sebesar 17% dibandingkan responden perempuan yang hanya 10.6%. Untuk layanan pendidikan dan Adminduk, persentase responden anggota rumah tangga laki-laki yang menyampaikan keluhan, kritik, atau saran adalah sebesar 19.7% dan 20% dibandingkan responden perempuan yang hanya sebesar 10.1% dan 9.12%

Hasil survei terhadap responden anggota rumah tangga menunjukkan bahwa lebih banyak warga kampung intervensi KOMPAK yang menyampaikan keluhan/kritik/masukan kepada pemerintah terkait layanan, terutama layanan kesehatan (Gambar 5.4-A). Meskipun demikian, tampaknya penyampaian masukan/kritik/saran ini masih terbatas pada kelompok laki-laki dibandingkan dengan perempuan, baik di lokasi intervensi KOMPAK maupun non-intervensi KOMPAK (Gambar 5.4-B).

Gambar 5.4-A Penyampaian Keluhan/Kritik/Saran terkait Layanan Kesehatan, Pendidikan, dan Admindak oleh Responden Anggota Rumah Tangga berdasarkan Lokasi



Gambar 5.4-B Penyampaian Keluhan/Kritik/Saran terkait Layanan Kesehatan, Pendidikan, dan Admindak oleh Responden Anggota Rumah Tangga berdasarkan Jenis Kelamin



5.1.4. Peningkatan peran aktivis kader kampung dalam pembangunan kampung

Dana desa menjadi potensi besar bagi pemerintah desa/kampung untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Agar pemanfaatan dana desa/kampung bisa sesuai dengan amanat UU Desa, desa/kampung harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Perencanaan dan pembangunan di desa/kampung harus lebih partisipatif, akuntabel, dan transparan. Sayangnya, dalam konteks Tanah Papua masih ditemukan keterbatasan pemerintah kampung untuk bisa menerapkan/melaksanakan prinsip tata kelola yang baik. Bukan hanya di Tanah Papua, jika berbicara tentang pembangunan di level desa/kampung, salah satu keterbatasan yang menjadi masalah klasik di Indonesia adalah soal kapasitas aparat desa/kampung. Masalah ini menjadi lebih kompleks di Tanah Papua yang memiliki akses terbatas pada informasi, pengetahuan, dan pendidikan formal. **Di tengah keterbatasan aparat kampung, diperlukan aktor-aktor lain di kampung yang bisa didorong menjadi agen perubahan untuk menjadi mitra pemerintah kampung membangun tata kelola yang lebih baik.**

Salah satu aktor kunci yang dapat berperan dalam proses perubahan di tingkat kampung adalah para kader kampung. Dalam konteks program KOMPAK, kader kampung memiliki peran besar dalam implementasi program SIK. Kader berperan sebagai orang yang melakukan survei dan menginput data ke aplikasi SIK. Seperti yang sudah dibahas pada Bab II, kader kampung dipilih dari orang yang tinggal dan menetap di kampung. Pemilihan kader kampung dilakukan berdasarkan kriteria prioritas seperti berpendidikan SMA. Program merekomendasikan kepada kampung-kampung untuk memprioritaskan kader dari generasi muda dan perwakilan perempuan. Menariknya, selain menggunakan orang lokal, kriteria pemilihan kader yang direkomendasikan program juga telah membuka kesempatan bagi kelompok-kelompok yang selama ini kurang dilibatkan dalam proses tata kelola pemerintahan kampung. Namun demikian, pemilihan kader kampung diserahkan kepada pemerintah kampung sehingga meskipun ada kriteria yang diajukan dari KOMPAK namun tidak jarang kader yang terpilih merupakan orang terdekat dari kepala kampung.

Seperti yang sudah disinggung juga pada Bab II tentang SIK, **intervensi KOMPAK sudah berhasil memberikan kapasitas/pengetahuan baru bagi kader kampung baik dari sisi teknis maupun non-teknis.** Dari sisi teknis, program sudah meningkatkan kapasitas kader seperti mengoperasikan komputer/laptop, melakukan penginputan data, dan cara melakukan pendataan/survei. Dalam konteks Tanah Papua, terbatasnya akses secara geografis, infrastruktur, dan sarana prasarana pendidikan menyebabkan banyak generasi muda di kampung-kampung tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan daerah lain untuk belajar pengoperasian laptop/komputer atau perangkat digital lain. Dengan demikian, apa yang sudah dilakukan program KOMPAK dalam melatih kader-kader kampung perlu diapresiasi karena membantu mengatasi keterbatasan tersebut.

Selain itu, pada aspek non-teknis, **interaksi kader dengan program secara formal dan informal telah meningkatkan pemahaman kader atas pendataan kampung, kebutuhan warga kampung, dan proses perencanaan yang lebih sesuai konteks kampung.** Kesadaran akan nilai strategis data ini juga memunculkan sisi aktivisme dari kader kampung yang mayoritas adalah generasi muda dalam memperbaiki proses perencanaan pembangunan kampung. Namun demikian, kesadaran ini belum secara langsung mampu meningkatkan kemampuan kader kampung untuk menekan atau mengkritik pemerintahan kampung yang tidak sesuai aturan dan kurang berpihak kepada masyarakat. Ini karena masih ada kendala relasi kuasa antara kelompok muda dan kelompok tua kampung.

(kepala kampung) tau ada data SAIK, tapi dia tidak pernah minta saya kasih tunjuk ini data, saya juga cuma bisa usul kasitau saja kalau tidak didengar ya sudah, sekarang yang penting data selesai dulu...Kepala kampung kan ingin bangunan terus dan kalau bangunan kaya rumah dibangun dari dana kampung yang dapat itu ya mereka-mereka lagi, sodaranya, kalau ada data SAIK ya mereka tidak kasih keluarganya kan.

—Kader kampung, Sorong

Meskipun kader terutama dilatih dan didampingi program untuk kegiatan SIK, **studi ini menemukan terjadi peningkatan kapasitas kader dalam hal administrasi kampung dan komunikasi.** Seperti yang dirasakan oleh kader di Kampung Onao di Asmat yang banyak terlibat dalam kegiatan di kampung setelah diangkat menjadi kader. Ketika ada kunjungan dari OPD, ia sering diminta untuk menjadi pendamping dan membantu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Bagi kader kampung sendiri, pelibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan di kampung juga meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik dengan masyarakat, pemerintah kampung maupun pemangku kepentingan (*stakeholder*) lain. Pada beberapa kasus, aktifnya kader membantu membangun kepercayaan pemerintah kampung dan masyarakat kepada para kader dan membuat mereka dipercaya untuk mengisi jabatan tertentu di kampung. Di Sorong, misalnya, terdapat kader kampung diangkat menjadi sekretaris kampung atau bahkan menjadi kepala kampung seperti kasus di Kabupaten Kaimana (namun Kaimana bukanlah lokasi studi melainkan lokasi ujicoba instrumen studi).

Tidak hanya memiliki peran penting di kampung, studi ini juga menemukan **menjadi kader kampung memberi kesempatan kepada kader untuk mengembangkan diri mereka secara profesional di luar kampung.** Kader memiliki kesempatan menjadi pelaku program dan diangkat menjadi koordinator distrik jika dinilai memiliki kapasitas yang baik dari sisi teknis, komunikasi, dan mampu mengenali masalah dengan cepat. Seperti yang terjadi di Asmat, koordinator distrik saat ini merupakan mantan kader kampung. Selain itu, seperti yang terjadi di Manokwari Selatan, terdapat pula kader-kader kampung dengan kapasitas pendataan yang lebih baik dibandingkan kader lain yang diminta untuk melatih kader dari kampung lain.

Lebih lanjut, **intervensi KOMPAK melalui sinergi perencanaan telah memfasilitasi kader sebagai bagian dari Tim Perencana Kampung**. Berbagai peningkatan kapasitas²⁸ telah mendorong kader kampung untuk menjadi penggerak di kampung yang lebih paham secara teknis mengenai administrasi perencanaan pembangunan dan lebih mengerti konteks kampung. Dengan kepercayaan diri yang meningkat dan jejaring yang lebih luas, kader juga berpotensi untuk dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan kampung. Di Asmat, kader kampung (kemudian menjadi koordinator distrik) telah berani mempertanyakan kesesuaian perencanaan anggaran kampung dengan kebutuhan dalam dokumen RPJMK. Pada contoh ini, dokumen RPJMK yang dibuat sebelumnya lebih bersifat *'copy-paste'* dan mencantumkan rencana anggaran pengadaan kostum untuk anak SD sementara pada kenyataannya kampung belum memiliki fasilitas pendidikan dasar.

Salah satu contoh yang paling konkret itu di Kampung Wakasa itu jelas-jelas tidak ada SD tapi di dalam RPJMK hasil P3MD ada muncul sekolah dan pernah diadakan kostum SD Wakasa. Itu yang membuat saya macam, 'aduh'. Saya waktu itu emosi juga. Saya banyak bicara dengan Korkab, mulai saya usulkan ke KOMPAK.

—Kordis, Asmat

Kader kampung yang mayoritas merupakan generasi muda, memiliki pengetahuan dan kapasitas dalam menjalankan peran, serta memiliki pemahaman mengenai konteks kampung sangat berpotensi untuk menjadi agen perubahan di tingkat kampung. Kader kampung bisa ditingkatkan kapasitasnya menjadi penyambung lidah antara masyarakat dan pemerintah kampung, tentunya dengan bekerjasama dengan kader-kader lain, seperti kader Posyandu. Pada satu sisi, kader bisa mendorong inisiatif, kesadaran dan partisipasi masyarakat kampung untuk aktif terlibat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di kampung. Sisi lain, kader juga bisa mendorong pemerintah kampung untuk menjadi lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam melakukan perencanaan dan pembangunan di kampung.

Oleh karena itu, kemampuan kader di kampung tidak lagi dapat dilihat hanya dalam hal administratif namun perlu memperhatikan aktivisme kader dalam keterlibatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak lagi menjadi dominasi elit kampung.

Berbagai peningkatan kapasitas telah mendorong kader kampung untuk menjadi penggerak di kampung yang lebih paham secara teknis mengenai administrasi perencanaan pembangunan dan lebih mengerti konteks kampung.

²⁸ Mencakup juga pelatihan terkait penyakit endemi misal Malaria di Jayapura, gizi buruk di Asmat.

5.2. Pembelajaran

Membangun partisipasi publik terkait erat dengan relasi kuasa antara aktor-aktor pemangku kepentingan di kampung, seperti antara kepala kampung, tokoh adat, Bamuskam. Karenanya, desain program sebaiknya memperhatikan distribusi kuasa dan pola relasi kuasa yang ada di kampung. Dalam konteks Tanah Papua, distribusi kuasa dan pola relasi kuasa biasanya terpusat kepada kelompok elite khususnya di kepala kampung dan tokoh adat. Ini mencirikan kuasa yang besar di tangan elite dengan perbedaan variasi kekuasaan dan kontestasi kekuasaan tergantung tipe kepemimpinan dan relasi kekerabatan. Secara historis, terdapat empat tipe kepemimpinan di Tanah Papua (Mansoben, 1995) yaitu pria berwibawa (*bigman*), kepala suku (*chieftancy*), raja (*kingdom*), dan campuran²⁹. Walaupun tipe kepemimpinan tersebut masih relevan ditemukan di berbagai wilayah di Tanah Papua, tetapi sumber dan tipe kepemimpinan saat ini relatif lebih kompleks. Di daerah pesisir seperti Sentani, tipe kekuasaan kepala suku tidak lagi bersumber hanya pada hierarki suku/klan tapi juga mulai ada percampuran klientelisme antar kelompok elit dengan kepentingan sama (partai politik dan keberpihakan tokoh yang sama) dan juga kelompok muda berpendidikan. Sumber-sumber kekuasaan *bigman* (pria berwibawa) tidak lagi bersumber pada kemampuan fisik/perang tapi juga mulai memasukkan unsur negosiasi dan artikulasi, serta kemampuan memperoleh pendanaan program ke kampung.

Terlepas dari berbagai sumber dan tipe kepemimpinan, pola kekuasaan elite (kepala kampung dan kepala suku) di Tanah Papua secara umum dapat dibagi dalam dua tipe. Tipe pertama adalah pola kekuasaan yang sangat terpusat pada satu kelompok tertentu yang menguasai berbagai aspek, menunjukkan relasi yang kuat antar elit. Pada tipe ini kepala suku, Bamuskam, dan tokoh agama saling mendukung. Tipe kedua adalah tipe kampung dengan kuasa yang tersebar di beberapa elite, diindikasikan melalui dinamika kontestasi dan konflik antar elite serta adanya variasi berbagai kelompok dengan keahlian yang diperlukan. Terlepas dari tipe distribusi kuasa, kelompok masyarakat dari klan minoritas (jumlah anggota kecil dan atau tidak memiliki sumber daya tanah yang besar) dan kelompok perempuan adalah kelompok yang termarjinalkan.

Terkait dengan konteks relasi kuasa tersebut, **studi ini mengindikasikan pengaruh tipe distribusi kuasa dengan ruang-ruang dan praktik partisipasi publik di kampung.** Ruang-

²⁹ Di daerah pegunungan, terutama Pegunungan Tengah, kepemimpinan berada di tangan pemimpin yang umum disebut *bigman*, disebut pria berwibawa, yang biasanya dipilih karena memiliki kekuatan seperti kemampuan perang (melindungi anggota klan dari ancaman suku lain), berdagang, dan kemampuan mendistribusikan pangan terhadap anggota klan. Dalam tipe kepemimpinan ini, kepemimpinan lebih bersifat kompetitif antar 'individu' yang kuat atau memiliki kelebihan di atas. Di wilayah pesisir seperti Sentani, tipe kepemimpinan disebut kepala suku berdasarkan hirarki adat (*chieftancy*) dengan kepala suku yang disebut *ondoafi* atau *ondofolo*, berbasis dari klan yang paling berkuasa (yang memiliki tanah atau memiliki anggota paling banyak). Dalam tipe ini kepemimpinan terpusat di elit klan tertentu, diturunkan kepada anak laki-laki atau saudara laki-laki tokoh klan. Tipe lain adalah raja (*kingdom*), dengan kekuasaan yang terpusat pada anggota kerajaan sebagai warisan Kerajaan Tidore di Tanah Papua dan sistem campuran berbagai tipe kepemimpinan.

ruang dan praktik partisipasi publik lebih banyak ditemukan pada konteks kampung dengan pola relasi kuasa tersebar, di kampung dengan dua atau lebih 'fam' yang kuat, kontestasi figur/elite, dan atau lebih banyak kelompok aktivis. Sebaliknya, ruang partisipasi sulit ditemukan di kampung dengan pola relasi yang terpusat di satu tokoh atau kelompok³⁰. Dengan demikian, di kampung dengan pola relasi kuasa yang tersebar, desain program perlu memperhatikan ruang kontestasi yang sudah ada, menggunakan ruang-ruang penyampaian kebutuhan dan keluhan yang sudah terbangun, serta bekerja sama dengan aktor kunci yang memiliki fungsi mediasi kontestasi kuasa. Dalam konteks ini, penting bagi program untuk meningkatkan fungsi ruang yang sudah terbangun sehingga kontestasi bisa diarahkan pada proses membangun partisipasi dan ruang penyampaian keluhan yang lebih melibatkan banyak pihak dan konstruktif.

Sementara itu, di kampung dengan pola relasi kuasa yang terpusat, mitra pembangunan dapat memulai menciptakan ruang-ruang dan saluran-saluran partisipasi melalui pelatihan, penguatan modalitas, dan pendampingan aktor kunci di level kampung yang dapat menjadi penggerak perubahan sekaligus memiliki jaringan ke kelompok masyarakat biasa. Dalam konteks ini, kader Posyandu dan kelompok muda gereja biasanya merupakan kelompok aktivis yang memiliki ikatan komunikasi yang kuat dengan kelompok masyarakat biasa seperti mama-mama OAP sekaligus memiliki relasi dan keberanian berkomunikasi dengan kelompok elite. **Fungsi kelompok kader Posyandu dan kelompok muda gereja ini dapat ditingkatkan untuk kader penggerak perubahan yang dapat menjadi jembatan antara kelompok marjinal dan biasa dengan kelompok elite. Kelompok ini berpotensi menjadi kader program dan karenanya perlu diberikan berbagai penguatan fasilitasi dan relasi (lihat bagian kader).**

Selain membangun kader sebagai penggerak perubahan, **partisipasi publik dapat dikembangkan melalui proses pendampingan dan fasilitasi yang berkualitas dari pendampingan program.** Pembelajaran dan rekomendasi untuk mengembangkan mekanisme program di luar mekanisme formal pelatihan ke arah pendampingan, baik program KOMPAK maupun program pendanaan lainnya, telah diangkat di bagian sistem informasi kampung (Bab II) dan sinergi sektoral (Bab III). Berbagai mekanisme untuk melibatkan kelompok-kelompok perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa yang didorong oleh berbagai lembaga mitra pembangunan, CSO, dan pemerintah setidaknya berhasil membangun mekanisme perencanaan khusus perempuan dan kemudian memunculkan individu-individu yang mendorong masuknya kebutuhan perempuan dalam perencanaan kampung.

Namun, **penguatan kapasitas dan kuasa kelompok marjinal, termasuk kelompok perempuan, di Tanah Papua dalam perencanaan kampung dan unit layanan juga perlu dikembangkan melalui mekanisme-mekanisme informal di luar Musrenbang dan pelatihan.**

³⁰ Temuan ini selaras dengan evaluasi PNPM RESPEK di Tanah Papua (AKATIGA, 2011)

Diperlukan pendampingan dan komunikasi antara fasilitator dari program dengan kader dan juga kelompok masyarakat melalui forum-forum informal —obrolan di honai perempuan, di ladang, di warung kopi, Posyandu. Selain itu seperti yang juga telah disampaikan di bagian sebelumnya, program perlu mulai merefleksikan proses monitoring yang selama ini dilakukan yang lebih memprioritaskan pada pengukuran yang memang lebih mudah diukur yaitu pada aspek administrasi (pelaporan dan *check list* kegiatan/aktivitas). Dalam hal ini, program bisa memulai memikirkan dan membangun proses dan indikator monitoring yang mengukur proses dan kualitas, memberikan penghargaan dan pengakuan atas proses yang dilakukan.

6. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Simpulan

Laporan studi evaluasi ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu (1) apakah model KOMPAK sudah mencapai sasaran yang diharapkan dan bagaimana potensi keberlanjutannya? (2) faktor apa saja yang memengaruhi capaian? (3) pembelajaran apa yang dapat dipetik dalam desain program pembangunan berikutnya? Dengan menggunakan kerangka analisis *outcome harvesting*, capaian program (atau dijabarkan sebagai perubahan), dibagi menjadi empat ruang lingkup, yaitu sistem informasi kampung, sinergi sektoral, regulasi/kebijakan, dan partisipasi publik. Dari empat ruang lingkup ini, kami juga menjabarkan perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi peningkatan kapasitas dari aktor-aktor yang mendapatkan intervensi program.

Untuk menjawab tiga pertanyaan di atas, studi ini mengombinasikan metode penggalan data kualitatif dan kuantitatif. Untuk metode kualitatif, teknik penggalan data yang digunakan antara lain adalah wawancara mendalam kepada 367 informan seperti pemerintah kampung-distrik-kabupaten-provinsi, kader kampung, unit layanan, dan masyarakat penerima manfaat. Wawancara mendalam ini diperkuat dengan teknik lain seperti pengamatan, transek, dan diskusi kelompok. Sedangkan untuk metode kuantitatif, studi ini mensurvei 2.159 responden yang tersebar dari rumah tangga, kepala kampung, kader kampung, dan unit layanan. Kedua metode ini diperkuat dengan analisis dokumen program dan *workshop* pemetaan perubahan dengan tim implementasi KOMPAK. Lokasi studi ini mencakup 60 kampung (kuantitatif) dan 15 kampung (kualitatif) yang tersebar di lima kabupaten yaitu Jayapura, Asmat, Nabire (Provinsi Papua), Sorong dan Manokwari Selatan (Papua Barat).

Studi ini menyimpulkan adanya keragaman kesuksesan atau perubahan yang dipengaruhi KOMPAK. Dengan kata lain, KOMPAK berhasil memengaruhi perubahan positif di empat ruang lingkup dengan skala yang bervariasi. Ruang lingkup sistem informasi kampung dan sinergi sektoral merupakan dua aspek yang menunjukkan perubahan yang paling terlihat, namun keduanya dapat berjalan akibat dukungan kegiatan unggulan KOMPAK lainnya, misalnya instrumen dan analisis pengelolaan keuangan publik.

Pada ruang lingkup Sistem Informasi Kampung, KOMPAK berhasil mendorong tersedianya SIK dengan melengkapi data tingkat kampung yang inklusif dan relevan dengan konteks Tanah Papua. Contoh baik yang ditemukan adalah di Papua Barat melalui pendataan SAIK+ yang sudah direplikasi di lokasi-lokasi non-intervensi KOMPAK dengan anggaran Otsus, sebagaimana tertuang pada Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK). Penyediaan data terpilah ini sudah digunakan oleh pemerintah kampung untuk

menyempurnakan distribusi bantuan. Akan tetapi, data ini belum digunakan sebagai dasar untuk keputusan-keputusan perencanaan dan penganggaran kampung serta mempercepat layanan adminduk. Di samping itu, terdapat indikasi risiko manipulasi data untuk kepentingan akses dana dengan pemekaran kampung ataupun agar mendapatkan dana Otsus yang lebih besar. Sehingga, memerlukan upaya mekanisme pengawasan rutin untuk memastikan kualitas dan verifikasi data.

Pada ruang lingkup Sinergi Sektoral, KOMPAK berhasil meningkatkan komunikasi antara pemerintah kampung dengan dengan unit layanan. Komunikasi yang lebih intensif ini membangun motivasi pelaku unit layanan untuk mendapatkan akses dana kampung untuk unit layanan. Akan tetapi, komunikasi yang terbangun dan akses dana kampung untuk unit layanan belum dapat memengaruhi peningkatan kualitas layanan dasar. Hal ini dikarenakan belum adanya mekanisme pengawasan yang efektif baik dari pemerintah kampung kepada unit layanan dan sebaliknya, sehingga belum tercipta esensi dari sinergi sektoral, yaitu bersama-sama berupaya menjawab permasalahan layanan dasar yang disepakati bersama.

Pada ruang lingkup Regulasi/Kebijakan, KOMPAK telah berhasil mendorong pemerintah daerah, baik kabupaten dan provinsi, dalam mengadopsi kebijakan/regulasi yang mendukung perbaikan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan. Dua program yang berhasil diadopsi Pemda dan manfaatnya mampu menyentuh masyarakat di kampung adalah PROSPPEK Papua Barat dan BANGGA di Papua. Sedangkan regulasi lainnya masih berada dalam proses lanjutan seperti membangun mekanisme aturan teknis dan kesepakatan antar-OPD.

Pada ruang lingkup Partisipasi Publik, studi ini menemukan peningkatan pengetahuan dan kapasitas Bamuskam akan perannya untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat dan mengawasi pembangunan kampung. Perubahan pengetahuan dan kapasitas ini disebabkan oleh intervensi KOMPAK pada ruang lingkup sinergi sektoral. Meskipun begitu, studi ini juga memperlihatkan bahwa perubahan ini belum menjadi perubahan perilaku karena ketua Bamuskam biasanya memiliki hubungan kekerabatan dan kedekatan dengan kepala kampung. Sehingga, masyarakat menyampaikan keluhan, aspirasi, dan pertanyaan terkait pembangunan kampung melalui media yang lain. Salah satu media yang muncul dalam menyampaikan aspirasi masyarakat adalah melalui kader Posyandu dan tokoh agama (Pastor). Keduanya dianggap memiliki kekuatan jaringan baik dengan masyarakat biasa dan ke kelompok elit.

Lebih lanjut lagi, studi ini memperlihatkan bahwa KOMPAK sudah melakukan pengarusutamaan GEDSI yang komprehensif khususnya pada program BANGGA Papua. Akan tetapi, sistemasi pengarusutamaan GEDSI belum terlihat pada ruang lingkup yang lain. Sebagai contoh, KOMPAK telah memberikan modul pelatihan sinergi sektoral agar aparat kampung mengundang kelompok perempuan dan disabilitas dalam musyawarah kampung. Namun, temuan studi menunjukkan bahwa kelompok perempuan yang diundang mayoritas

diwakili oleh Tim Penggerak PKK dan kader Posyandu. Sedangkan kelompok disabilitas belum diundang dan menghadiri musyawarah kampung. Begitupun dengan usulan kampung yang masuk ke dalam RPJMK belum memasukkan secara khusus kebutuhan-kebutuhan kelompok disabilitas.

Untuk melengkapi perubahan-perubahan yang telah dijelaskan sebelumnya, **studi ini juga menemukan perubahan pengetahuan dan kapasitas aktor-aktor yang diintervensi secara langsung oleh KOMPAK pada empat ruang lingkup di atas. Studi ini menyimpulkan bahwa kader kampung mengalami perubahan pengetahuan dan kapasitas yang paling terlihat dibandingkan dengan aparat kampung, pelaku unit layanan, dan staf OPD.** Lebih lanjut lagi, kader kampung berpotensi menjadi agen pembangunan yang signifikan di tingkat kampung. Perubahan kader kampung terdiri dari aspek teknis dan non teknis. Dari sisi teknis, kader telah mampu melakukan pendataan kependudukan dan mengaplikasikannya ke dalam sistem informasi kampung serta ketrampilan dalam administrasi surat-menyurat di kampung. Ketrampilan teknis ini diperkuat dengan perubahan dari sisi non teknis, yaitu kader mulai memahami kebutuhan warga kampung, kepercayaan diri yang meningkat dan jejaring yang lebih luas, serta kader dapat terlibat lebih pada proses perencanaan kampung. Skala dan derajat perubahan pengetahuan dan kapasitas kader di atas tentunya bervariasi, sehingga belum dapat secara langsung mengubah peran dan perilaku kader untuk memastikan kebijakan bahwa proses perencanaan dan penganggaran kampung sudah berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Kader kampung masih berhadapan dengan persoalan relasi kuasa dengan kelompok tua dan elite di kampung.

Sedangkan perubahan pengetahuan dan kapasitas pada level OPD yang diintervensi KOMPAK belum sampai pada pencapaian perubahan yang lebih tinggi seperti di level organisasi. Perubahan-perubahan ini antara lain terjadi pada aspek (1) pengetahuan akan peran pendampingan OPD dan kapasitas teknik fasilitasi terhadap kampung dan distrik, (2) memetakan permasalahan daerah serta menyusun perencanaan dan penganggaran daerah yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan daerah. Kedua aspek ini masih terkendala karena belum adanya mekanisme insentif yang tepat bagi OPD dalam mengaplikasikan materi-materi pengembangan kapasitas pelatihan, masalah kewenangan aktor OPD dalam mendorong perubahan dalam organisasinya, serta belum adanya mekanisme *transfer knowledge* yang sistematis dalam setiap organisasi apalagi antar-OPD. **Akan tetapi, program KOMPAK pada level kabupaten dan provinsi telah berhasil mendorong peningkatan komunikasi dan relasi antar-OPD.**

Variasi dari perubahan-perubahan diatas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. *Pertama*, mekanisme peningkatan kapasitas yang dilakukan KOMPAK sesuai dengan kebutuhan pemerintah dari berbagai level. KOMPAK juga berperan sebagai klinik bagi Pemda yang turut dapat memberikan solusi dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi Pemda. *Kedua*, KOMPAK memiliki strategi yang komprehensif dalam membangun *evidence-based policy making*.

Ketiga, aktor-aktor kunci KOMPAK memiliki pengalaman panjang dan jaringan kuat dalam melakukan lobi dan advokasi dari berbagai level di Tanah Papua. *Keempat*, dalam melaksanakan programnya, KOMPAK telah berkolaborasi dengan organisasi dan program yang memiliki kepentingan yang selaras. *Kelima*, program KOMPAK selaras dengan kepentingan aktor-aktor kunci di Tanah Papua, khususnya dalam membangun narasi OAP yang kuat di konteks Otsus. *Keenam*, periode program yang pendek yakni 2017-2021 menjadikan beberapa program KOMPAK masih berada dalam proses pengembangan untuk mencapai tujuan/esensi program. *Ketujuh*, berbagai implementasi program belum diimbangi dengan rencana mitigasi dalam menghadapi konteks dan kompleksitas birokrasi di Tanah Papua seperti kendala struktural dan relasi kuasa, mutasi dan rotasi aktor OPD, kendala aksesibilitas dan teknologi informasi, perubahan prioritas dan anggaran Pemda, ketidakjelasan kewenangan sistem informasi, kapasitas dinas dalam penyediaan layanan. *Kedelapan*, sejak 2020, COVID-19 juga mempengaruhi intensitas pendampingan yang dilakukan KOMPAK.

6.2 Rekomendasi

Beberapa pembelajaran yang dapat diambil dari program KOMPAK di Tanah Papua, antara lain adalah:

- ***Pertama*, melanjutkan dan mengembangkan sistem pendataan kampung (SAIK) yang menunjukkan perubahan dan relevansi program dalam konteks di Tanah Papua serta mendapatkan dukungan pemangku kepentingan di level kampung, kabupaten, dan provinsi terutama di Provinsi Papua Barat.** Hal ini mengindikasikan potensi keberlanjutan yang tinggi dari program ini. Untuk mencapai optimalisasi kualitas dan pemanfaatan data terpilah ini diperlukan pengembangan program melalui pendampingan yang sistematis untuk meningkatkan kemampuan literasi kader dan pemanfaatan data di tingkat kampung. Selain itu, di tingkat provinsi dan kabupaten di Papua Barat perlu membangun strategi untuk memastikan dan merumuskan implementasi program sesuai agar dapat berjalan pada kampung-kampung non intervensi KOMPAK dengan aksesibilitas dan jaringan komunikasi yang lebih menantang. Kolaborasi dan integrasi dengan lembaga yang membangun basis data kependudukan seperti BPS dapat mendukung optimalisasi program ini.
- ***Kedua*, melanjutkan upaya KOMPAK untuk membangun regulasi dan payung hukum perbaikan tata kelola di tingkat provinsi dan kabupaten melalui strategi pendampingan untuk merumuskan kebijakan turunan yang dapat menjadi panduan implementasi.** Regulasi yang telah terbit tetapi belum terimplementasikan sampai tingkat kampung perlu dilanjutkan melalui pendampingan untuk merumuskan

kebijakan turunan, sosialisasi, dan advokasi untuk mendapatkan komitmen yang lebih serius dari pemangku kepentingan.

- ***Ketiga, melanjutkan dan mengembangkan upaya awal KOMPAK yang berhasil meningkatkan komunikasi antara terutama antara unit layanan kesehatan dengan pemerintah kampung yang terjadi dalam bentuk akses dana bagi unit layanan.*** Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan komunikasi awal yang telah terjalin tersebut dengan fokus pada upaya meningkatkan komunikasi dan ruang diskusi untuk mengidentifikasi jenis kegiatan dari akses dana kampung yang penting bagi perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu diperlukan juga upaya untuk mengembangkan sinergi ke arah yang lebih luas dengan melibatkan aktor perencanaan kampung yaitu DPMK dan fasilitator serta tenaga ahli P3MD.
- ***Keempat, mengkombinasikan dan mempertahankan pelatihan dengan mekanisme aplikatif dan praktik langsung yang sudah dilakukan KOMPAK saat ini dengan pendampingan kelompok kecil namun menerus, serta menggunakan mekanisme informal untuk mengembangkan kapasitas dan dukungan aktor-aktor yang diintervensi ke arah tujuan program.*** Selain membangun ketrampilan teknis, kombinasi pendampingan ini di masa depan program berpotensi mengembangkan kapasitas dan kecakapan kader kampung dalam fasilitasi, berkomunikasi, dan memperluas jaringan dengan aktor-aktor pembangunan lainnya. Di masa yang akan datang, pengembangan modalitas kader ini akan mendorong kapasitas dan aktivitas kader menjadi penggerak perubahan di kampung dalam hal pemanfaatan data dan meningkatkan sinergi sektoral. Studi ini merekomendasikan penguatan kader Posyandu dan gereja sebagai penggerak perubahan yang terbukti berpotensi untuk menjembatani suara masyarakat dan kelompok aparat kampung.
- ***Kelima, menyederhanakan monitoring dan evaluasi administratif, dengan memperkuat sistem monitoring dan evaluasi yang mendorong kualitas partisipasi.*** Studi yang dilakukan pada program PNPM menunjukkan bahwa program monitoring dan evaluasi pada pembangunan berbasis komunitas seperti PNPM juga lebih fokus pada aspek administrasi dengan beban pelaporan yang besar (Sari, 2018; AKATIGA, 2011). Hal ini menyebabkan fasilitator berfungsi menjadi administrator dan mempengaruhi kualitas fasilitasi fasilitator (Sari, 2018). Upaya ini tentunya perlu disertai dengan pengakuan dan insentif serta penghargaan atas aktor-aktor lokal yang berhasil mencapai hasil yang baik dari sisi proses dan kualitas fasilitasi.
- ***Keenam, dengan kondisi dimana capaian program KOMPAK sangat bersinggungan dengan perubahan faktor eksternal (seperti kapasitas dan kepentingan Pemda), maka penting untuk membangun dukungan dan keterlibatan dengan aktor pemegang***

keputusan yang lebih luas, bukan hanya aktor dan lembaga yang menjadi target intervensi program. Hal ini bisa didorong melalui upaya untuk membangun dan menguji coba insentif yang tepat yang bisa menjadi motivasi bagi pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dan provinsi untuk mendukung program tersebut, seperti insentif bagi OPD yang terbukti mampu berinovasi dalam pemanfaatan data, layanan kesehatan dan pendidikan, serta berkoordinasi.

- *Ketujuh*, perlunya **merumuskan *roadmap* konkret, spesifik, dan jelas dari prinsip GEDSI yang diintegrasikan pada program**—yang berisi target dan capaian realistis namun spesifik, kelompok sasaran yang spesifik— ditambah dengan panduan implementasi praktis yang berdasarkan konteks dari wilayah program. Hal ini juga diperkuat dengan umpan balik yang kontinu bagi aktor-aktor lokal dan pelaksana program dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip GEDSI di implementasi program.

REFERENSI

- AKATIGA. (2011). Evaluasi PNPM RESPEK: Infrastruktur Pedesaan dan Kapasitas Kelembagaan. PNPM Support Facility (PSF): Jakarta
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/637191468268770307/pdf/934160B-AHASA0W0apasitas0Kelembagaan.pdf>
- Emmy dan Ratna F. (2022). Memperkuat Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Program BANGGA Papua. Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan: Jakarta. Diambil dari
https://kompak.or.id/id/download/557/20220302_GESI%20Bangga%20Papua.pdf
(diakses pada April 2022)
- KOMPAK. (2020). Kegiatan Unggulan KOMPAK. Diambil dari
https://www.kompak.or.id/id/download/283/Flagship%20Flyer%20ID_KOMPAK_FIN_AL_200330.pdf (diakses April 2022)
- KOMPAK. (2020). Tentang KOMPAK. Diambil dari
https://www.kompak.or.id/id/download/282/About%20KOMPAK%20Flyer%20ID_200331.pdf (diakses April 2022)
- KOMPAK. (2020). Memahami Sinergi Perencanaan Kampung dan Unit Layanan dalam Program LANDASAN. Diambil dari <https://www.kompak.or.id/id/article/panduan-menerapkan-sinergi-perencanaan-dalam-perencanaan-di-kampung> (diakses September 2021)
- KOMPAK Living Design Document 2015–2022 (Updated February 2019) dari
https://kompak.or.id/id/download/166/20190311_KOMPAK%20LDD%202019-2022-Updated%20Feb%202019.pdf (diakses Juni 2021)
- Mansoben, J.R. (1995). Sistem Politik Tradisional di Papua. Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Leiden University: Jakarta
- Mollet, J.A. (2007). Educational investment in conflict areas of Indonesia: The case of West Papua Province. *International Education Journal*, 2007, 8(2), 155-166.
- Quick, Kathryn S. and John M. Bryson. (2016). Theories of Public Participation in Governance. *Handbook of Theories of Governance* (pp.Chapter 12). Edward Elgar: Cheltenham.
- Sari, Y.I. (2018). The Building of “Monuments”: Power, Accountability and Community Driven Development in Papua Province, Indonesia. ANU College of Asia and the Pacific: Canberra.

Seri Laporan Tiga-Bulanan Program LANDASAN II dari
<https://kompak.or.id/id/publication/laporan-kegiatan> (diakses Juni 2021)

Wilson-Grau, R. (2015) Outcome Harvesting. Better Evaluation. Diambil dari
http://betterevaluation.org/plan/approach/outcome_harvesting (diakses pada Mei 2021)

LAMPIRAN: PROSEDUR ANALISIS DAN HASIL SURVEI

LAMPIRAN: PROSEDUR ANALISIS DAN HASIL SURVEI	129
1.1 Prosedur Analisis.....	130
1.2 Buku Kepala Kampung.....	131
1.2.1 Seksi LR (Latar Belakang Responden).....	131
1.2.2 Seksi KR (Kesejahteraan Responden).....	132
1.2.3 Seksi PM (Partisipasi Masyarakat).....	134
1.2.4 Seksi IK (Sistem Informasi Kampung)	139
1.2.5 Seksi CH (Penanganan Masalah)	144
1.2.6 Seksi PR (Program Bantuan)	146
1.2.7 Seksi PD (Pendampingan Distrik dan Kabupaten).....	148
1.2.8 Seksi PK (Peningkatan Kapasitas)	157
1.2.9 Seksi DG (Demografi Kampung)	162
1.2.10 Seksi AF (Akses ke Fasilitas).....	165
1.2.11 Seksi TD (Ketersediaan Dokumen)	178
1.3 Buku Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPMK)	180
1.3.1 Seksi LR (Latar Belakang Responden).....	180
1.3.2 Seksi KR (Kesejahteraan Responden).....	183
1.3.3 Seksi PM (Partisipasi Masyarakat).....	185
1.3.4 Seksi IK (Sistem Informasi Kampung)	187
1.3.5 Seksi PD (Pendampingan Distrik/Kecamatan dan Kabupaten)	192
1.3.6 Seksi PK (Peningkatan Kapasitas)	200
1.4 Buku Kepala Puskesmas.....	204
1.4.1 Seksi LR (Latar Belakang Responden).....	204
1.4.2 Seksi DP (Data Pelayanan Puskesmas)	206
1.4.3 Seksi PM (Partisipasi Masyarakat).....	209
1.4.4 Seksi PD (Pendampingan Distrik/Kecamatan dan Kabupaten)	211
1.4.5 Seksi PK (Peningkatan Kapasitas)	214
1.4.6 Seksi DK (Dukungan Pemerintah Kampung)	218
1.5 Buku Kader Posyandu.....	223
1.5.1 Seksi LR (Latar Belakang Responden).....	223
1.5.2 Seksi IP (Informasi Posyandu)	225
1.5.3 Seksi PM (Partisipasi Masyarakat).....	229
1.5.4 Seksi PD (Pendampingan Distrik/Kecamatan dan Kabupaten)	230
1.5.5 Seksi PK (Peningkatan Kapasitas)	232
1.5.6 Seksi DK (Dukungan Pemerintah Kampung)	234
1.6 Buku Kepala Sekolah	237
1.6.1 Seksi LR (Latar Belakang Responden).....	237
1.6.2 Seksi DS (Data Sekolah).....	238
1.6.3 Seksi PM (Partisipasi Masyarakat).....	240
1.6.4 Seksi PD (Pendampingan Distrik/Kecamatan dan Kabupaten)	242
1.6.6 Seksi DK (Dukungan Pemerintah Kampung)	250

1.1 Prosedur Analisis

Studi ini menganalisis hasil survei dengan dua cara, yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi. Analisis deskriptif dilakukan pada hampir semua variabel dari semua buku dengan menampilkan respon dari lokasi KOMPAK, lokasi non-KOMPAK, dan total. Untuk variabel-variabel kontinu (contoh: umur, luas lahan, jumlah pertemuan), analisis dilakukan dengan menampilkan nilai **rata-rata dan simpangan baku (standard deviation – s.d.)**. Untuk variabel kategorik (misalnya tingkat pendidikan terakhir) dan binary (variabel dengan jawaban ‘ya’ dan ‘tidak’), studi ini melaporkan jumlah respon dan persentase.

Studi ini juga melaporkan hasil regresi logistik untuk hasil survei kepada rumah tangga anggota rumah tangga untuk melihat hubungan antara lokasi responden (KOMPAK vs. non-KOMPAK) dan gender (laki-laki dan perempuan) terhadap sejumlah variabel tidak bebas. Analisis regresi logistik melaporkan perbedaan respon antara responden di lokasi KOMPAK dan non-KOMPAK. Khusus untuk responden rumah tangga, studi ini juga melaporkan perbedaan respon antara laki-laki dan perempuan.

Variabel tidak bebas (*dependent variable*) untuk responden tingkat rumah tangga mencakup variabel-variabel sebagai berikut:

- AR17 Kepemilikan BPJS Kesehatan/JKN-KIS
- AR18 Kepemilikan Kartu Papua Sehat
- PR01 Pernah mendapatkan program bantuan
- PR02 Program-program bantuan yang diterima rumah tangga dalam setahun terakhir
- KD01 Pemanfaatan layanan kesehatan (Puskesmas/Pustu, Polindes/Poskesdes, Posyandu) oleh rumah tangga

Sementara variabel tidak bebas untuk responden anggota rumah tangga mencakup variabel-variabel sebagai berikut:

- PM09 Partisipasi responden dalam kegiatan kemasyarakatan dalam setahun terakhir
- PM10 Kegiatan-kegiatan yang diikuti responden dalam setahun terakhir
- PM11 Menghadiri pertemuan di tingkat kampung dalam setahun terakhir
- PM12 Tema-tema yang dibahas dalam pertemuan tingkat kampung yang diikuti responden
- PM08 Bentuk partisipasi responden
- KD05 Tingkat kepuasan terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan
- KD06 Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan sekarang dibandingkan dua tahun yang lalu
- KD07 Pernah menyampaikan kritik/keluhan/saran kepada siapapun terkait layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan selama satu tahun terakhir
- KD08 Kepuasan responden yang menyampaikan keluhan terhadap tindak lanjut dari keluhan tersebut
- KD09 Persepsi responden terhadap kesesuaian pembangunan kampung dengan kebutuhan masyarakat kampung

1.2 Buku Kepala Kampung

1.2.1 Seksi LR (Latar Belakang Responden)

Tabel 1.2.1 Latar Belakang Kepala Kampung

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
LR02. Apa kedudukan I/B/S saat ini di pemerintahan kampung?						
Kepala kampung (n=48)	22	73,3	26	86,7	48	80,0
Sekretaris kampung (n=11)	8	26,7	3	10,0	11	18,3
Kasi Kesejahteraan (n=1)	0	0,0	1	3,3	1	1,7
LR06, Jenis kelamin kepala kampung						
Laki-laki (n=57)	28	93,3	29	96,7	57	95,0
Perempuan (n=3)	2	6,7	1	3,3	3	5,0
LR07, Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diikuti Kepala Kampung?						
SD/MI/Sederajat (n=12)	6	20,0	6	20,0	12	20,0
SMP/MTs/Sederajat (n=9)	8	26,7	1	3,3	9	15,0
SMA/MA/Sederajat (n=20)	8	26,7	12	40,0	20	33,3
Paket C (n=8)	5	16,7	3	10,0	8	13,3
D1/D2/D3 (n=1)	0	0,0	1	3,3	1	1,7
D4/Ya (n=9)	3	10,0	6	20,0	9	15,0
Lainnya (n=1)	0	0,0	1	3,3	1	1,7
LR10, Apakah agama yang dianut Kepala Kampung?						
Islam (n=4)	3	10,0	1	3,3	4	6,7
Kristen Protestan (n=46)	21	70,0	25	83,3	46	76,7
Katolik (n=10)	6	20,0	4	13,3	10	16,7
LR11, Apakah Kepala Kampung tinggal di kampung ini? (y/t)						
Ya (n=56)	26	86,7	30	100,0	56	93,3
Tidak (n=4)	4	13,3	0	0,0	4	6,7
LR14, Apakah Kepala Kampung punya KTP?						
Ya (n=60)	30	100,0	30	100,0	60	100,0
LR15, Apakah Kepala Kampung punya KK?						
Ya (n=59)	29	96,7	30	100,0	59	98,3
Tidak (n=1)	1	3,3	0	0,0	1	1,7

Buku Kepala Kampung LR

Tabel 1.2.1 Latar Belakang Kepala Kampung (Lanjutan)

Variabel	Lokasi			
	Non-KOMPAK		KOMPAK	
	Rerata	S.D.	Rerata	S.D.
LR04. Sejak kapan Kepala Kampung menjabat sebagai kepala kampung di kampung ini? (tahun)	6,1	4,9	6,2	5,7
LR05. Umur Kepala Kampung	49	11,2	49,9	10,8
LR12. Sudah berapa lama Kepala Kampung tinggal di kampung ini? (tahun)	23,7	13,1	30,7	13,5
LR13. Berapa orang yang tinggal di rumah Kepala Kampung? (jumlah)	6,2	3,1	7,4	4,9

1.2.2 Seksi KR (Kesejahteraan Responden)

Tabel 1.2.2 Kesejahteraan Responden Kepala Kampung

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
KR02. Apa status kepemilikan bangunan tempat tinggal I/B/S?						
Milik sendiri (n=52)	25	83,3	27	90,0	52	86,7
Bebas sewa (n=6)	4	13,3	2	6,7	6	10,0
Dinas (n=2)	1	3,3	1	3,3	2	3,3
KR03. Jenis material yang paling banyak digunakan untuk ATAP RUMAH I/B/S?						
Genteng (n=1)	1	3,3	0	0,0	1	1,7
Sirap (n=1)	1	3,3	0	0,0	1	1,7
Seng (n=57)	27	90,0	30	100,0	57	95,0
Ijuk/rumbia/alang-alang/gewang (n=1)	1	3,3	0	0,0	1	1,7
KR04. Jenis material yang paling banyak digunakan untuk DINDING RUMAH I/B/S?						
Tembok (n=30)	14	46,7	16	53,3	30	50,0
Kayu (n=8)	3	10,0	5	16,7	8	13,3
Papan/bambu (n=21)	12	40,0	9	30,0	21	35,0
Lainnya (n=1)	1	3,3	0	0,0	1	1,7
KR05. Jenis material yang paling banyak digunakan untuk LANTAI RUMAH I/B/S?						
Marmer/keramik (n=21)	11	36,7	10	33,3	21	35,0
Ubin/tegel/teraso (n=1)	0	0,0	1	3,3	1	1,7
Plester/semen (n=18)	9	30,0	9	30,0	18	30,0
Kayu (n=6)	4	13,3	2	6,7	6	10,0
Papan/bambu/gewang (n=14)	6	20,0	8	26,7	14	23,3

Buku Kepala Kampung Module KR

Tabel 1.2.2.1 Kesejahteraan Responden Kepala Kampung (Lanjutan)

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
KR06 Apakah HH I/B/S memiliki aset di bawah ini?						
KR06.1. MOBIL/MINI BUS/TRUK?						
Ya (n=10)	6	20,0	4	13,3	10	16,7
Tidak (n=50)	24	80,0	26	86,7	50	83,3
KR06.2. SEPEDA MOTOR/VESPA?						
Ya (n=36)	20	66,7	16	53,3	36	60,0
Tidak (n=24)	10	33,3	14	46,7	24	40,0
KR06.3. PERAHU BERMOTOR?						
Ya (n=21)	6	20,0	15	50,0	21	35,0
Tidak (n=39)	24	80,0	15	50,0	39	65,0
KR06.4. PERAHU TANPA MOTOR?						
Ya (n=16)	4	13,3	12	40,0	16	26,7
Tidak (n=44)	26	86,7	18	60,0	44	73,3
KR06.5. KERBAU?						
Ya (n=1)	0	0,0	1	3,3	1	1,7
Tidak (n=59)	30	100,0	29	96,7	59	98,3
KR06.6. SAPI?						
Ya (n=5)	5	16,7	0	0,0	5	8,3
Tidak (n=55)	25	83,3	30	100,0	55	91,7
KR06.7. BABI?						
Ya (n=9)	4	13,3	5	16,7	9	15,0
Tidak (n=51)	26	86,7	25	83,3	51	85,0
KR06.8. KAMBING?						
Ya (n=4)	3	10,0	1	3,3	4	6,7
Tidak (n=56)	27	90,0	29	96,7	56	93,3

Tabel 1.2.2 Kesejahteraan Responden Kepala Kampung (Lanjutan)

Variabel	Lokasi			
	Non-KOMPAK		KOMPAK	
	Rerata	S.D.	Rerata	S.D.
KR01. Berapa luas lantai dari bangunan tempat tinggal I/B/S?	88,9	64,9	94,3	93,7
KR6 Jumlah Ternak yang Dimiliki				
KR06.5. KERBAU	0	0	0,03	0,2
KR06.6. SAPI	1,4	4,7	0	0
KR06.7. BABI	0,8	2,9	0,5	1,6
KR06.8. KAMBING	1,1	5,5	0,03	0,2
Luas lahan pertanian dan/atau lahan non-pertanian yang dimiliki? (Ha)	1,7	2,9	7,3	25,4

1.2.3 Seksi PM (Partisipasi Masyarakat)

Tabel 1.2.3 Partisipasi Masyarakat Kampung

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
		Kolom		Kolom		Kolom
PM01, Selama setahun terakhir, apakah kampung mengadakan pertemuan kampung?						
Ya (n=51)	21	70,0	30	100,0	51	85,0
Tidak (n=9)	9	30,0	0	0,0	9	15,0
PM02, Tahu kapan terakhir kali pertemuan tersebut diadakan?(ya/tidak tahu)						
Ya (n=51)	21	100,0	30	100,0	51	100,0
Tidak (n = 0_	0	0	0	0	0	0
PM02a. Apakah aktor-aktor di bawah ini diundang?						
PM02a.a. KEPALA KAMPUNG						
Ya (n=50)	21	100,0	29	96,7	50	98,0
Tidak (n=1)	0	0,0	1	3,3	1	2,0
PM02a.b. PERANGKAT KAMPUNG						
Ya (n=50)	21	100,0	29	96,7	50	98,0
Tidak (n=1)	0	0,0	1	3,3	1	2,0
PM02a.c. BPD/BAMUSKAM						
Ya (n=50)	20	95,2	30	100,0	50	98,0
Tidak (n=1)	1	4,8	0	0,0	1	2,0
PM02a.d. LPMD/LKMD						
Ya (n=20)	6	28,6	14	46,7	20	39,2
Tidak (n=31)	15	71,4	16	53,3	31	60,8
PM02a.e. KEPALA DUSUN/KETUA RW/KETUA RT						
Ya (n=51)	21	100,0	30	100,0	51	100,0
Tidak (n = 0_	0	0	0	0	0	0
PM02a.f. TOKOH MASYARAKAT/AGAMA/ADAT/PEMUDA/PEREMPUAN						
Ya (n=50)	21	100,0	29	96,7	50	98,0
Tidak (n=1)	0	0,0	1	3,3	1	2,0
PM02a.g. KADER KAMPUNG/KPMK						
Ya (n=48)	18	85,7	30	100,0	48	94,1
Tidak (n=3)	3	14,3	0	0,0	3	5,9
PM02a.h. KADER POSYANDU						
Ya (n=46)	17	81,0	29	96,7	46	90,2
Tidak (n=5)	4	19,0	1	3,3	5	9,8

Buku Kepala Kampung Module PM

Tabel 1.2.3 Partisipasi Masyarakat Kampung (Lanjutan)

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PM02a. Apakah aktor-aktor di bawah ini diundang?						
PM02a.i. TIM PENGGERAK PKK						
Ya (n=41)	12	57,1	29	96,7	41	80,4
Tidak (n=10)	9	42,9	1	3,3	10	19,6
PM02a.j. KELOMPOK PEREMPUAN						
Ya (n=30)	12	57,1	18	60,0	30	58,8
Tidak (n=21)	9	42,9	12	40,0	21	41,2
PM02a.k. WARGA BIASA						
Ya (n=44)	19	90,5	25	83,3	44	86,3
Tidak (n=7)	2	9,5	5	16,7	7	13,7
PM02a.l. KELOMPOK DIFABEL/PENYANDANG DISABILITAS						
Ya (n=5)	2	9,5	3	10,0	5	9,8
Tidak (n=46)	19	90,5	27	90,0	46	90,2
PM02a.m. PENGUSAHA, KELOMPOK USAHA/ TANI/NELAYAN						
Ya (n=28)	10	47,6	18	60,0	28	54,9
Tidak (n=23)	11	52,4	12	40,0	23	45,1
PM02a.n. PELAKU PENDIDIKAN (KEPALA SEKOLAH, KOMITE SEKOLAH, GURU)						
Ya (n=36)	14	66,7	22	73,3	36	70,6
Tidak (n=15)	7	33,3	8	26,7	15	29,4
PM02a.p. PELAKU KESEHATAN (BIDAN KAMPUNG, PETUGAS KESEHATAN)						
Ya (n=38)	14	66,7	24	80,0	38	74,5
Tidak (n=13)	7	33,3	6	20,0	13	25,5
PM02a.q. LSM/ORGANISASI SOSIAL						
Ya (n=7)	3	14,3	4	13,3	7	13,7
Tidak (n=44)	18	85,7	26	86,7	44	86,3
PM02a.r. PERANGKAT DISTRIK						
Ya (n=36)	15	71,4	21	70,0	36	70,6
Tidak (n=15)	6	28,6	9	30,0	15	29,4
PM02a.s. PERANGKAT KABUPATEN						
Ya (n=16)	5	23,8	11	36,7	16	31,4
Tidak (n=35)	16	76,2	19	63,3	35	68,6
PM02a.v. LAINNYA						
Ya (n=10)	5	23,8	5	16,7	10	19,6
Tidak (n=41)	16	76,2	25	83,3	41	80,4

Buku Kepala Kampung Module PM

Tabel 1.2.3 Partisipasi Masyarakat Kampung (Lanjutan)

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PM03 Apakah pertemuan kampung dihadiri oleh pihak-pihak ini?						
PM03.a. KEPALA KAMPUNG						
Ya (n=50)	21	100,0	29	96,7	50	98,0
Tidak (n=1)	0	0,0	1	3,3	1	2,0
PM03.b. PERANGKAT KAMPUNG						
Ya (n=49)	21	100,0	28	93,3	49	96,1
Tidak (n=2)	0	0,0	2	6,7	2	3,9
PM03.c. BPD/BAMUSKAM						
Ya (n=50)	20	95,2	30	100,0	50	98,0
Tidak (n=1)	1	4,8	0	0,0	1	2,0
PM03.d. LPMD/LKMD						
Ya (n=18)	5	23,8	13	43,3	18	35,3
Tidak (n=33)	16	76,2	17	56,7	33	64,7
PM03.e. KEPALA DUSUN/KETUA RW/KETUA RT						
Ya (n=49)	21	70,0	28	93,3	49	81,7
Tidak (n=11)	9	30,0	2	6,7	11	18,3
PM03.f. TOKOH MASYARAKAT/AGAMA/ADAT/PEMUDA/PEREMPUAN						
Ya (n=48)	19	90,5	29	96,7	48	94,1
Tidak (n=3)	2	9,5	1	3,3	3	5,9
PM03.g. KADER KAMPUNG/KPMK						
Ya (n=46)	17	81,0	29	96,7	46	90,2
Tidak (n=5)	4	19,0	1	3,3	5	9,8
PM03.h. KADER POSYANDU						
Ya (n=44)	17	81,0	27	90,0	44	86,3
Tidak (n=7)	4	19,0	3	10,0	7	13,7
PM03.i. TIM PENGGERAK PKK						
Ya (n=37)	11	52,4	26	86,7	37	72,5
Tidak (n=14)	10	47,6	4	13,3	14	27,5
PM03.j. KELOMPOK PEREMPUAN						
Tidak (n=27)	12	57,1	15	50,0	27	52,9
Ya (n=24)	9	42,9	15	50,0	24	47,1
PM03.k. WARGA BIASA						
Ya (n=44)	20	95,2	24	80,0	44	86,3
Tidak (n=7)	1	4,8	6	20,0	7	13,7
PM03.l. KELOMPOK DIFABEL/PENYANDANG DISABILITAS?						
Ya (n=4)	2	9,5	2	6,7	4	7,8
Tidak (n=47)	19	90,5	28	93,3	47	92,2

Buku Kepala Kampung Module PM

Tabel 1.2.3 Partisipasi Masyarakat Kampung (Lanjutan)

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PM03 Apakah pertemuan kampung dihadiri oleh pihak-pihak ini?						
PM03.m. PENGUSAHA/KELOMPOK USAHA/ TANI/NELAYAN						
Ya (n=22)	7	33,3	15	50,0	22	43,1
Tidak (n=29)	14	66,7	15	50,0	29	56,9
PM03.n. PELAKU PENDIDIKAN (KEPALA SEKOLAH, KOMITE SEKOLAH, GURU)						
Ya (n=34)	13	61,9	21	70,0	34	66,7
Tidak (n=17)	8	38,1	9	30,0	17	33,3
PM03.p. PELAKU KESEHATAN (BIDAN KAMPUNG. PETUGAS KESEHATAN)						
Ya (n=36)	12	40,0	24	80,0	36	60,0
Tidak (n=24)	18	60,0	6	20,0	24	40,0
PM03.q. LSM/ORGANISASI SOSIAL						
Ya (n=7)	3	14,3	4	13,3	7	13,7
Tidak (n=44)	18	85,7	26	86,7	44	86,3
PM03.r. PERANGKAT DISTRIK						
Ya (n=33)	14	66,7	19	63,3	33	64,7
Tidak (n=18)	7	33,3	11	36,7	18	35,3
PM03.s. PERANGKAT KABUPATEN						
Ya (n=15)	4	19,0	11	36,7	15	29,4
Tidak (n=36)	17	81,0	19	63,3	36	70,6
PM03.v. Apakah ada pihak LAINNYA yang hadir						
Ya (n=10)	5	16,7	5	16,7	10	16,7
Tidak (n=50)	25	83,3	25	83,3	50	83,3

Buku Kepala Kampung Module PM

Tabel 1.2.3 Partisipasi Masyarakat Kampung (Lanjutan)

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
	Kolom		Kolom		Kolom	
PM03X, APAKAH ADA JAWABAN K (WARGA BIASA) di PM03?						
Ya (n=44)	20	95,2	24	80,0	44	86,3
Tidak (n=7)	1	4,8	6	20,0	7	13,7
PM04.a Usulan yang disampaikan warga biasa dalam pertemuan kampung terakhir						
PM04.a. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan kampung						
Ya (n=40)	19	95,0	21	87,5	40	90,9
Tidak (n=4)	1	5,0	3	12,5	4	9,1
PM04.b. Pembangunan sarana prasarana kesehatan						
Ya (n=30)	15	75,0	15	62,5	30	68,2
Tidak (n=14)	5	25,0	9	37,5	14	31,8
PM04.c. Pembangunan sarana prasarana pendidikan						
Ya (n=16)	10	50,0	6	25,0	16	36,4
Tidak (n=28)	10	50,0	18	75,0	28	63,6
PM04.d. Pengembangan usaha ekonomi dan sarana/prasarana ekonomi						
Ya (n=17)	7	35,0	10	41,7	17	38,6
Tidak (n=27)	13	65,0	14	58,3	27	61,4
PM04.e. Pelestarian lingkungan hidup						
Ya (n=11)	5	25,0	6	25,0	11	25,0
Tidak (n=33)	15	75,0	18	75,0	33	75,0
PM04.f. Pembinaan kemasyarakatan						
Ya (n=7)	4	20,0	3	12,5	7	15,9
Tidak (n=37)	16	80,0	21	87,5	37	84,1
PM04.g. Pemberdayaan masyarakat						
Ya (n=23)	10	33,3	13	43,3	23	38,3
Tidak (n=37)	20	66,7	17	56,7	37	61,7
PM04.h. Penyaluran bantuan dan informasi terkait COVID-19						
Ya (n=21)	10	50,0	11	45,8	21	47,7
Tidak (n=23)	10	50,0	13	54,2	23	52,3
PM04. Lainnya						
Ya (n=8)	5	25,0	3	12,5	8	18,2
Tidak (n=36)	15	75,0	21	87,5	36	81,8
PM04.w. TIDAK ADA USULAN						
Tidak (n=42)	20	100,0	22	91,7	42	95,5
Ya (n=2)	0	0,0	2	8,3	2	4,5

Buku Kepala Kampung Module PM

1.2.4 Seksi IK (Sistem Informasi Kampung)

Tabel 1.2.4 Sistem Informasi Kampung

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
IK01 Apakah kampung ini sudah memiliki Sistem Informasi Kampung/SIK?						
Ya (n=48)	21	70,0	27	90,0	48	80,0
Tidak (n=12)	9	30,0	3	10,0	12	20,0
IK02 Jenis Sistem Informasi Kampung yang Digunakan						
IK02.a SAIK MODEL LAMA						
Tidak (n=40)	21	100,0	19	70,4	40	83,3
Ya (n=8)	0	0,0	8	29,6	8	16,7
IK0.b. SAIK+						
Tidak (n=30)	17	81,0	13	48,1	30	62,5
Ya (n=18)	4	19,0	14	51,9	18	37,5
IK0.c. SIO PAPUA						
Tidak (n=36)	21	100,0	15	55,6	36	75,0
Ya (n=12)	0	0,0	12	44,4	12	25,0
IK0.d. PRODESKEL						
Tidak (n=43)	18	85,7	25	92,6	43	89,6
Ya (n=5)	3	14,3	2	7,4	5	10,4
IK0.e. SID/SIK KEMENDES						
Tidak (n=41)	20	95,2	21	77,8	41	85,4
Ya (n=7)	1	4,8	6	22,2	7	14,6
IK0.v. LAINNYA						
Tidak (n=32)	7	33,3	25	92,6	32	66,7
Ya (n=16)	14	66,7	2	7,4	16	33,3

Buku KK Module IK

Tabel 1.2.4 Sistem Informasi Kampung (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
IK03 Apakah SIK mengumpulkan data-data di bawah ini?						
IK03.a. PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN						
Ya (n=31)	4	100,0	27	100,0	31	100,0
Tidak	0	0,0	0	0,0	0	0,0
IK03.b. PENDUDUK OAP DAN NON-OAP						
Ya (n=29)	3	75,0	26	96,3	29	93,5
Tidak (n=2)	1	25,0	1	3,7	2	6,5
IK03.c. PENDUDUK DENGAN DISABILITAS						
Ya (n=29)	3	75,0	26	96,3	29	93,5
Tidak (n=2)	1	25,0	1	3,7	2	6,5
IK03.d. DATA KEMISKINAN						
Ya (n=28)	3	75,0	25	92,6	28	90,3
Tidak (n=3)	1	25,0	2	7,4	3	9,7
IK03.e. DATA KEPEMILIKAN DOKUMEN ADMINDUK						
Ya (n=31)	4	100,0	27	100,0	31	100,0
Tidak (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
IK03a, Sampai mana tahapan proses pendataan di kampung ini?						
Sedang dalam proses pendataan (n=4)	1	25,0	3	11,1	4	12,9
Sudah selesai pendataan tapi belum diinput (n=2)	0	0,0	2	7,4	2	6,5
Sudah selesai pendataan dan diinput sebagian (n=13)	2	50,0	11	40,7	13	41,9
Sudah selesai pendataan dan diinput lengkap (n=12)	1	25,0	11	40,7	12	38,7

Buku KK Module IK

Tabel 1.2.4 Sistem Informasi Kampung (Lanjutan)

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
IK04, Apakah kampung menggunakan data yang dikumpulkan?						
Ya (n=24)	1	33,3	23	95,8	24	88,9
Tidak (n=3)	2	66,7	1	4,2	3	11,1
IK05 Jenis data yang digunakan						
IK05.a. DATA BERDASARKAN JENIS KELAMIN?						
Ya (n=20)	1	100,0	19	82,6	20	83,3
Tidak (n=4)	0	0,0	4	17,4	4	16,7
IK05.b. DATA OAP?						
Ya (n=18)	1	100,0	17	73,9	18	75,0
Tidak (n=6)	0	0,0	6	26,1	6	25,0
IK05.c. DATA DISABILITAS?						
Ya (n=16)	1	100,0	15	65,2	16	66,7
Tidak (n=8)	0	0,0	8	34,8	8	33,3
IK05.d. DATA KEMISKINAN?						
Ya (n=19)	1	100,0	18	78,3	19	79,2
Tidak (n=5)	0	0,0	5	21,7	5	20,8
IK05.e. DATA ADMINDUK?						
Ya (n=22)	1	100,0	21	91,3	22	91,7
Tidak (n=2)	0	0,0	2	8,7	2	8,3
IK05.v. LAINNYA?						
Ya (n=1)	0	0,0	1	4,3	1	4,2
Tidak (n=23)	1	100,0	22	95,7	23	95,8

Buku KK Module IK

Tabel 1.2.5 Sistem Informasi Kampung (Lanjutan)

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
IK06 Penggunaan data-data SIK						
IK06.a. PENYUSUNAN PERENCANAAN KAMPUNG						
Tidak (n=4)	0	0,0	4	17,4	4	16,7
Ya (n=20)	1	100,0	19	82,6	20	83,3
IK06.b. PENYUSUNAN PENGANGGARAN APBK						
Tidak (n=5)	0	0,0	5	21,7	5	20,8
Ya (n=19)	1	100,0	18	78,3	19	79,2
IK06.c. KEPERLUAN PELAPORAN						
Tidak (n=5)	0	0,0	5	21,7	5	20,8
Ya (n=19)	1	100,0	18	78,3	19	79,2
IK06.d. [D] MENGIDENTIFIKASI PENERIMA BANTUAN						
Tidak (n=3)	0	0,0	3	13,0	3	12,5
Ya (n=21)	1	100,0	20	87,0	21	87,5
IK06.e. MENENTUKAN TARGET PROGRAM						
Tidak (n=2)	0	0,0	2	8,7	2	8,3
Ya (n=22)	1	100,0	21	91,3	22	91,7
IK06.f. Mendukung Pelayanan Dokumen AdmInduk						
Tidak (n=4)	0	0,0	4	17,4	4	16,7
Ya (n=20)	1	100,0	19	82,6	20	83,3
IK06.g. KOORDINASI DAN PERENCANAAN PENANGGULANGAN C19						
Tidak (n=8)	0	0,0	8	34,8	8	33,3
Ya (n=16)	1	100,0	15	65,2	16	66,7
IK06.v. LAINNYA?						
Tidak (n=23)	1	100,0	22	95,7	23	95,8
Ya (n=1)	0	0,0	1	4,3	1	4,2

Buku KK Module IK

Tabel 1.2.4 Sistem Informasi Kampung (Lanjutan)

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
IK10 Apakah terdapat alokasi anggaran kampung untuk SIK?						
Ya (n=46)	19	90,5	27	100,0	46	95,8
Tidak (n=1)	1	4,8	0	0,0	1	2,1
Tidak Tahu (n=1)	1	4,8	0	0,0	1	2,1
IK10a Sumber Pendanaan SIK						
IK10a.a. PROSPPEK						
Ya (n=10)	3	15,8	7	25,9	10	21,7
Tidak (n=36)	16	84,2	20	74,1	36	78,3
IK10a.b. OTSUS						
Ya (n=6)	3	15,8	3	11,1	6	13,0
Tidak (n=40)	16	84,2	24	88,9	40	87,0
IK10a.c. DANA KAMPUNG						
Ya (n=38)	15	78,9	23	85,2	38	82,6
Tidak (n=8)	4	21,1	4	14,8	8	17,4
IK10a.d. BANTUAN KEUANGAN DARI KABUPATEN						
Ya (n=3)	1	5,3	2	7,4	3	6,5
Tidak (n=43)	18	94,7	25	92,6	43	93,5
IK10a.e. BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI						
Ya (n=2)	0	0,0	2	7,4	2	4,3
Tidak (n=44)	19	100,0	25	92,6	44	95,7
IK10a.v. LAINNYA						
Ya (n=1)	1	5,3	0	0,0	1	2,2
Tidak (n=45)	18	94,7	27	100,0	45	97,8
IK10a.y. Apakah ANDA [Y] TIDAK TAHU sumber pendanaan SIK						
Ya (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tidak (n=46)	19	100,0	27	100,0	46	100,0
IK11. Selama setahun terakhir, apakah ada pendampingan dari pemerintah distrik?						
Ya (n=23)	2	50,0	21	77,8	23	74,2
Tidak (n=8)	2	50,0	6	22,2	8	25,8
IK12. Selama setahun terakhir, apakah ada pendampingan dari kabupaten?						
Ya (n=21)	3	75,0	18	66,7	21	67,7
Tidak (n=10)	1	25,0	9	33,3	10	32,3
IK13. Apakah ada panduan tertulis SIK (SAIK/SAIK+/SIO Papua)?						
Ya (n=28)	4	100,0	24	88,9	28	90,3
Tidak (n=3)	0	0,0	3	11,1	3	9,7

1.2.5 Seksi CH (Penanganan Masalah)

Tabel 1.2.5 Penanganan Masalah

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
CH01, Apakah kampung/kepala kampung pernah menerima keluhan permasalahan dari warga?						
Ya (n=45)	19	63,3	26	86,7	45	75,0
Tidak (n=15)	11	36,7	4	13,3	15	25,0
CH02. Mekanisme Penyampaian Keluhan						
CH02.a. MELALUI PERTEMUAN YANG DIADAKAN PEMERINTAH						
Ya (n=26)	6	31.6	20	76.9	26	57.8
Tidak (n=19)	13	68.4	6	23.1	19	42.2
CH02.b. MELALUI PERTEMUAN YANG DIADAKAN OLEH MASYARAKAT						
Ya (n=14)	4	21.1	10	38.5	14	31.1
Tidak (n=31)	15	78.9	16	61.5	31	68.9
CH02.c. MENGHUBUNGI PERANGKAT KAMPUNG SECARA LISAN						
Ya (n=39)	17	89.5	22	84.6	39	86.7
Tidak (n=6)	2	10.5	4	15.4	6	13.3
CH02.d. DEMONSTRASI/PROTES?						
Ya (n=7)	0	0.0	7	26.9	7	15.6
Tidak (n=38)	19	100.0	19	73.1	38	84.4
CH02.e. MELALUI KOTAK SARAN/POSKO PENGADUAN						
Ya	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Tidak (n=45)	19	100.0	26	100.0	45	100.0
CH02.v. [V] LAINNYA?						
Ya (n=1)	0	0,0	1	3,8	1	2,2
Tidak (n=44)	19	100,0	25	96,2	44	97,8

Buku KK Module IK

Tabel 1.2.5 Penanganan Masalah (Lanjutan)

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
CH03 Yang dilakukan pemerintah kampung untuk menanggapi keluhan warga						
CH03.a. MEMFASILITASI WARGA KE UNIT LAYANAN						
Ya (n=18)	5	26,3	13	50,0	18	40,0
Tidak (n=27)	14	73,7	13	50,0	27	60,0
CH03.b. MENYAMPAIKAN KELUHAN KE UNIT LAYANAN TERKAIT						
Ya (n=33)	14	73,7	19	73,1	33	73,3
Tidak (n=12)	5	26,3	7	26,9	12	26,7
CH03.c. MENYAMPAIKAN KELUHAN KE PEMERINTAH DISTRIK						
Ya (n=24)	9	47,4	15	57,7	24	53,3
Tidak (n=21)	10	52,6	11	42,3	21	46,7
CH03.d. MENYAMPAIKAN KELUHAN KE PEMERINTAH KABUPATEN						
Ya (n=18)	8	42,1	10	38,5	18	40,0
Tidak (n=27)	11	57,9	16	61,5	27	60,0
CH03.v. MELAKUKAN [V] LAINNYA						
Ya (n=4)	2	10,5	2	7,7	4	8,9
Tidak (n=41)	17	89,5	24	92,3	41	91,1

Buku KK Module IK

1.2.6 Seksi PR (Program Bantuan)

Tabel 1.2.6. Program Bantuan

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PR01. Selama setahun terakhir apakah kampung ini mendapatkan program bantuan?						
Ya (n=56)	28	93,3	28	93,3	56	93,3
Tidak (n=4)	2	6,7	2	6,7	4	6,7
PR02 Jenis bantuan yang diterima kampung						
PR02.a. LAYANAN KESEHATAN						
Ya (n=42)	19	67,9	23	82,1	42	75,0
Tidak (n=14)	9	32,1	5	17,9	14	25,0
PR02.b. LAYANAN PENDIDIKAN						
Ya (n=27)	11	39,3	16	57,1	27	48,2
Tidak (n=29)	17	60,7	12	42,9	29	51,8
PR02.c. LAYANAN ADMINISTRASI						
Ya (n=12)	3	10,7	9	32,1	12	21,4
Tidak (n=44)	25	89,3	19	67,9	44	78,6
PR02.d. INFRASTRUKTUR						
Ya (n=22)	8	28,6	14	50,0	22	39,3
Tidak (n=34)	20	71,4	14	50,0	34	60,7
PR02.e. BANTUAN SOSIAL EKONOMI						
Ya (n=52)	25	89,3	27	96,4	52	92,9
Tidak (n=4)	3	10,7	1	3,6	4	7,1
PR02.f. JARINGAN TELEKOMUNIKASI						
Ya (n=13)	4	14,3	9	32,1	13	23,2
Tidak (n=43)	24	85,7	19	67,9	43	76,8
PR02.v. LAINNYA						
Ya (n=10)	8	28,6	2	7,1	10	17,9
Tidak (n=46)	20	71,4	26	92,9	46	82,1

Buku KK Module PR

Tabel 1.2.6. Program Bantuan (Lanjutan)

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PR03 Sumber bantuan berasal dari						
PR03.a. PEMERINTAH PUSAT						
Ya (n=45)	23	82,1	22	78,6	45	80,4
Tidak (n=11)	5	17,9	6	21,4	11	19,6
PR03.b. PEMERINTAH PROVINSI						
Tidak (n=38)	22	78,6	16	57,1	38	67,9
Ya (n=18)	6	21,4	12	42,9	18	32,1
PR03.c. PEMERINTAH KABUPATEN						
Ya (n=32)	14	50,0	18	64,3	32	57,1
Tidak (n=24)	14	50,0	10	35,7	24	42,9
PR03.d. ORGANISASI/LEMBAGA (DAGRI/ASING)						
Ya (n=1)	0	0,0	1	3,6	1	1,8
Tidak (n=55)	28	100,0	27	96,4	55	98,2
PR03.e. PERUSAHAAN/SWASTA						
Tidak (n=53)	28	100,0	25	89,3	53	94,6
Ya (n=3)	0	0,0	3	10,7	3	5,4
PR03.f. INDIVIDU/PERORANGAN						
Ya (n=4)	1	3,6	3	10,7	4	7,1
Tidak (n=52)	27	96,4	25	89,3	52	92,9
PR03.g. LEMBAGA KEAGAMAAN						
Ya (n=9)	2	7,1	7	25,0	9	16,1
Tidak (n=47)	26	92,9	21	75,0	47	83,9
PR03.v. LAINNYA						
Tidak (n=52)	24	85,7	28	100,0	52	92,9
Ya (n=4)	4	14,3	0	0,0	4	7,1
PR03.y. Responden [Y] TIDAK TAHU						
Ya (n = 0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tidak (n=56)	28	100,0	28	100,0	56	100,0

Buku KK Module PR

1.2.7 Seksi PD (Pendampingan Distrik dan Kabupaten)

Tabel 1.2.7. Pendampingan Kabupaten/Distrik

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PD01, Dalam satu tahun terakhir, pernah bertemu dengan pemerintah kabupaten?						
Ya (n=51)	25	83,3	26	86,7	51	85,0
Tidak (n=9)	5	16,7	4	13,3	9	15,0
PD02, Bila dibandingkan dengan 2019, bagaimana frekuensi pertemuan dengan PEMKAB						
Lebih jarang (n=29)	17	68,0	12	46,2	29	56,9
SAMA SAJA (n=7)	3	12,0	4	15,4	7	13,7
Lebih sering (n=12)	5	20,0	7	26,9	12	23,5
TIDAK BERLAKU (n=3)	0	0,0	3	11,5	3	5,9
PD03 Pihak Pemerintah Kabupaten yang Ditemui						
PD03.a. [A] BUPATI/WAKIL BUPATI						
Ya (n=19)	8	32,0	11	42,3	19	37,3
Tidak (n=32)	17	68,0	15	57,7	32	62,7
PD03.b. [B] UNIT KEUANGAN DAERAH						
Ya (n=22)	10	40,0	12	46,2	22	43,1
Tidak (n=29)	15	60,0	14	53,8	29	56,9
PD03.c. [C] UNIT PENDAPATAN DAERAH						
Ya (n=8)	2	8,0	6	23,1	8	15,7
Tidak (n=43)	23	92,0	20	76,9	43	84,3
PD03.d. [D] UNIT PENGEMBANGAN KAMPUNG						
Ya (n=19)	5	20,0	14	53,8	19	37,3
Tidak (n=32)	20	80,0	12	46,2	32	62,7
PD03.e. [E] DINAS PENDIDIKAN						
Ya (n=16)	4	16,0	12	46,2	16	31,4
Tidak (n=35)	21	84,0	14	53,8	35	68,6
PD03,f, Apakah I/B/S bertemu dgn [F] DINAS KESEHATAN?						
Ya (n=19)	6	24,0	13	50,0	19	37,3
Tidak (n=32)	19	76,0	13	50,0	32	62,7
PD03,g, Apakah I/B/S bertemu dgn [G] BPMK?						
Ya (n=43)	19	76,0	24	92,3	43	84,3
Tidak (n=8)	6	24,0	2	7,7	8	15,7
PD03,h, Apakah I/B/S bertemu dgn [H] DPRD?						
Ya (n=9)	1	4,0	8	30,8	9	17,6
Tidak (n=42)	24	96,0	18	69,2	42	82,4
PD03,v, Apakah I/B/S bertemu dgn [V] LAINNYA?						
Ya (n=27)	16	64,0	11	42,3	27	52,9
Tidak (n=24)	9	36,0	15	57,7	24	47,1

Buku KK Module PD

Tabel 1.2.7. Pendampingan Kabupaten/Distrik (Lanjutan)

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PD04 Topik yang dibicarakan saat bertemu dengan pemerintah kabupaten						
PD04.a. [A] PROGRAM BANTUAN						
Ya (n=31)	12	48,0	19	73,1	31	60,8
Tidak (n=20)	13	52,0	7	26,9	20	39,2
PD04.b. [B] RPJMK						
Ya (n=26)	10	40,0	16	61,5	26	51,0
Tidak (n=25)	15	60,0	10	38,5	25	49,0
PD04.c. [C] APBK						
Ya (n=28)	13	52,0	15	57,7	28	54,9
Tidak (n=23)	12	48,0	11	42,3	23	45,1
PD04.d. [D] DANA KAMPUNG						
Ya (n=43)	19	76,0	24	92,3	43	84,3
Tidak (n=8)	6	24,0	2	7,7	8	15,7
PD04.e. [E] PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH						
Ya (n=11)	4	16,0	7	26,9	11	21,6
Tidak (n=40)	21	84,0	19	73,1	40	78,4
PD04.f. [F] KONDISI TERKINI TERKAIT COVID-19						
Ya (n=28)	10	40,0	18	69,2	28	54,9
Tidak (n=23)	15	60,0	8	30,8	23	45,1
PD04.g. [G] PERMASALAHAN YANG ADA DI KAMPUNG						
Ya (n=40)	17	68,0	23	88,5	40	78,4
Tidak (n=11)	8	32,0	3	11,5	11	21,6
PD04.v. [V] LAINNYA						
Ya (n=11)	8	32,0	3	11,5	11	21,6
Tidak (n=40)	17	68,0	23	88,5	40	78,4

Buku KK Module PD

Tabel 1.2.7. Pendampingan Kabupaten/Distrik (Lanjutan)

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PD05, Dalam satu tahun terakhir, pernah bertemu dengan pemerintah distrik?						
Ya (n=52)	25	83,3	27	90,0	52	86,7
Tidak (n=8)	5	16,7	3	10,0	8	13,3
PD06, Bila dibandingkan dengan 2019, bagaimana frekuensi pertemuan dengan DISTRIK						
Lebih jarang (n=23)	13	52,0	10	37,0	23	44,2
SAMA SAJA (n=10)	6	24,0	4	14,8	10	19,2
Lebih sering (n=16)	6	24,0	10	37,0	16	30,8
TIDAK BERLAKU (n=3)	0	0,0	3	11,1	3	5,8
PD07 Topik yang dibicarakan saat bertemu dengan pemerintah distrik						
PD07.a. PROGRAM BANTUAN						
Ya (n=33)	14	56,0	19	70,4	33	63,5
Tidak (n=19)	11	44,0	8	29,6	19	36,5
PD07.b. RPJMK						
Ya (n=31)	12	48,0	19	70,4	31	59,6
Tidak (n=21)	13	52,0	8	29,6	21	40,4
PD07.c. APBK						
Ya (n=34)	13	52,0	21	77,8	34	65,4
Tidak (n=18)	12	48,0	6	22,2	18	34,6
PD07.d. DANA KAMPUNG						
Ya (n=41)	17	68,0	24	88,9	41	78,8
Tidak (n=11)	8	32,0	3	11,1	11	21,2
PD07.e. PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH						
Ya (n=9)	2	8,0	7	25,9	9	17,3
Tidak (n=43)	23	92,0	20	74,1	43	82,7
PD07.f. Apakah membicarakan topik [F] KONDISI TERKINI TERKAIT COVID-19?						
Tidak (n=22)	12	48,0	10	37,0	22	42,3
Ya (n=30)	13	52,0	17	63,0	30	57,7
PD07,g, Apakah membicarakan topik [G] PERMASALAHAN YANG ADA DI KAMPUNG?						
Ya (n=36)	16	64,0	20	74,1	36	69,2
Tidak (n=16)	9	36,0	7	25,9	16	30,8
PD07.v. Apakah membicarakan topik [V] LAINNYA?						
Ya (n=11)	4	16,0	7	25,9	11	21,2
Tidak (n=41)	21	84,0	20	74,1	41	78,8

Tabel 1.2.7. Pendampingan Kabupaten/Distrik (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PD09, Dalam setahun terakhir, apakah pemerintah kampung BINWAS dari DISTRIK?						
Ya (n=21)	7	23,3	14	46,7	21	35,0
Tidak (n=39)	23	76,7	16	53,3	39	65,0
PD10 Jenis Pendampingan Teknis dari Distrik						
PD10.a. [A] PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KAMPUNG						
Ya (n=17)	6	85,7	11	78,6	17	81,0
Tidak (n=4)	1	14,3	3	21,4	4	19,0
PD10.b. [B] PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KAMPUNG YANG INKLUSIF						
Ya (n=12)	4	57,1	8	57,1	12	57,1
Tidak (n=9)	3	42,9	6	42,9	9	42,9
PD10.c. [C] PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KAMPUNG						
Ya (n=17)	4	57,1	13	92,9	17	81,0
Tidak (n=4)	3	42,9	1	7,1	4	19,0
PD10.d. [D] LAYANAN PENJANGKAUAN ADMINDUK						
Ya (n=15)	3	42,9	12	85,7	15	71,4
Tidak (n=6)	4	57,1	2	14,3	6	28,6
PD10.e. [E] SOSIALISASI DAN BIMTEK OTSUS						
Ya (n=15)	5	71,4	10	71,4	15	71,4
Tidak (n=6)	2	28,6	4	28,6	6	28,6
PD10.f. [F] PENANGGULANGAN COVID-19						
Ya (n=19)	7	100,0	12	85,7	19	90,5
Tidak (n=2)	0	0,0	2	14,3	2	9,5
PD10.g. [G] PELAKSANAAN BLT DD						
Ya (n=19)	7	100,0	12	85,7	19	90,5
Tidak (n=2)	0	0,0	2	14,3	2	9,5
PD10.h. [H] MEKANISME AKUNTABILITAS SOSIAL						
Ya (n=12)	3	42,9	9	64,3	12	57,1
Tidak (n=9)	4	57,1	5	35,7	9	42,9
PD10.i. [I] SOSIALISASI KEBIJAKAN SDG KAMPUNG						
Ya (n=16)	6	85,7	10	71,4	16	76,2
Tidak (n=5)	1	14,3	4	28,6	5	23,8
PD10.j. [J] PENINGKATAN KAPASTIAS KAMPUNG DLM PEMBELAJARAN MANDIRI						
Ya (n=13)	4	57,1	9	64,3	13	61,9
Tidak (n=8)	3	42,9	5	35,7	8	38,1

Buku KK Module PD

Tabel 1.2.7 Pendampingan Kabupaten/Distrik (Lanjutan)

Variabel	Lokasi			
	KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PD11,a Dalam satu tahun terakhir, I/B/S pernah bertemu dengan [A] KORKAB LANDASAN?				
Ya (n=22)	22	73,3	22	73,3
(n=8)	8	26,7	8	26,7
PD11a.a Bila dibandingkan dengan 2019. bagaimana frekuensi pertemuan dengan [A] KORKAB LANDASAN?				
Lebih jarang (n=9)	9	40,9	9	40,9
SAMA SAJA (n=4)	4	18,2	4	18,2
Lebih sering (n=4)	4	18,2	4	18,2
TIDAK TAHU (n=5)	5	22,7	5	22,7
PD12 Topik yang dibicarakan dengan Korkab Landasan				
PD12.a. [A] SINERGI PERENCANAAN KAMPUNG DGN UNIT LAYANAN?				
Ya (n=17)	17	77,3	17	77,3
Tidak (n=5)	5	22,7	5	22,7
PD12.a. [B] PENGUMPULAN DATA SAIK/SIO PAPUA?				
Ya (n=22)	22	100,0	22	100,0
Tidak(n=0)	0	0,0	0	0,0
PD12.a. [C] PENGINPUTAN DATA SAIK/SIO PAPUA?				
Ya (n=21)	21	95,5	21	95,5
Tidak (n=1)	1	4,5	1	4,5
PD12.a. [D] PENYUSUNAN DOKUMEN PEMBANGUNAN KAMPUNG?				
Ya (n=14)	14	63,6	14	63,6
Tidak (n=8)	8	36,4	8	36,4
PD12,a, [E] PENINGKATAN PELAYANAN ADMINDUK?				
Ya (n=14)	14	63,6	14	63,6
Tidak (n=8)	8	36,4	8	36,4
PD12,a, [F] PROGRAM PRIORITAS OTSUS?				
Ya (n=7)	7	31,8	7	31,8
Tidak (n=15)	15	68,2	15	68,2
PD12,a, [G] UPAYA PENANGGULANGAN COVID-19?				
Ya (n=10)	10	45,5	10	45,5
Tidak (n=12)	12	54,5	12	54,5
PD12,a, [V] LAINNYA?				
Ya (n=0)	0	0,0	0	0,0
Tidak (n=22)	22	100,0	22	100,0

Buku KK Module PD

Tabel 1.2.7 Pendampingan Kabupaten/Distrik (Lanjutan)

Variabel	Lokasi			
	KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PD11.b. Dalam satu tahun terakhir, I/B/S pernah bertemu dengan [B] FASILITATOR SINERGI PERENCANAAN KABUPATEN?				
Ya (n=6)	6	20,0	6	20,0
Tidak (n=23)	23	76,7	23	76,7
Tidak tahu (n=1)	1	3,3	1	3,3
PD12.b. Topik yang dibicarakan dengan Fasilitator Sinergi Perencanaan Kabupaten				
PD12.b. [A] SINERGI PERENCANAAN KAMPUNG DGN UNIT LAYANAN				
Ya (n=5)	5	71,4	5	71,4
Tidak (n=2)	2	28,6	2	28,6
PD12.b. [B] PENGUMPULAN DATA SAIK/SIO PAPUA				
Ya (n=5)	5	71,4	5	71,4
Tidak (n=2)	2	28,6	2	28,6
PD12.b. [C] PENGINPUTAN DATA SAIK/SIO PAPUA				
Ya (n=4)	4	57,1	4	57,1
Tidak (n=3)	3	42,9	3	42,9
PD12.b. [D] PENYUSUNAN DOKUMEN PEMBANGUNAN KAMPUNG				
Ya (n=6)	6	85,7	6	85,7
Tidak (n=1)	1	14,3	1	14,3
PD12.b. [E] PENINGKATAN PELAYANAN ADMINDUK				
Ya (n=5)	5	71,4	5	71,4
Tidak (n=2)	2	28,6	2	28,6
PD12.b. [F] PROGRAM PRIORITAS OTSUS				
Ya (n=3)	3	42,9	3	42,9
Tidak (n=4)	4	57,1	4	57,1
PD12.b. [G] UPAYA PENANGGULANGAN COVID-19				
Ya (n=4)	4	57,1	4	57,1
Tidak (n=3)	3	42,9	3	42,9
PD12.b. [V] LAINNYA				
Ya (n = 0)	0	0,0	0	0,0
Tidak (n=7)	7	100,0	7	100,0

Buku KK Module PD

Tabel 1.2.7. Pendampingan Kabupaten/Distrik (Lanjutan)

Variabel	Lokasi			
	KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PD11.c. Dalam satu tahun terakhir, I/B/S pernah bertemu dengan [C] KORCAM LANDASAN				
Ya (n=24)	24	80,0	24	80,0
Tidak (n=5)	5	16,7	5	16,7
Tidak tahu (n=1)	1	3,3	1	3,3
PD11a.c. Bila dibandingkan dengan 2019, bagaimana frekuensi pertemuan dengan [C] KORCAM LANDASAN				
Lebih jarang (n=7)	7	28,0	7	28,0
SAMA SAJA (n=6)	6	24,0	6	24,0
Lebih sering (n=7)	7	28,0	7	28,0
TIDAK TAHU (n=5)	5	20,0	5	20,0
PD12.c Topik yang dibicarakan dengan KORCAM Landasan				
PD12.c. [A] SINERGI PERENCANAAN KAMPUNG DGN UNIT LAYANAN				
Ya (n=19)	19	76,0	19	76,0
Tidak (n=6)	6	24,0	6	24,0
PD12.c. [B] PENGUMPULAN DATA SAIK/SIO PAPUA				
Ya (n=23)	23	92,0	23	92,0
Tidak (n=2)	2	8,0	2	8,0
PD12.c. [C] PENGINPUTAN DATA SAIK/SIO PAPUA				
Ya (n=23)	23	92,0	23	92,0
Tidak (n=2)	2	8,0	2	8,0
PD12.c. [D] PENYUSUNAN DOKUMEN PEMBANGUNAN KAMPUNG				
Ya (n=19)	19	76,0	19	76,0
Tidak (n=6)	6	24,0	6	24,0
PD12.c. [E] PENINGKATAN PELAYANAN ADMINDUK				
Ya (n=18)	18	72,0	18	72,0
Tidak (n=7)	7	28,0	7	28,0
PD12.c. [F] PROGRAM PRIORITAS OTSUS				
Ya (n=10)	10	40,0	10	40,0
Tidak (n=15)	15	60,0	15	60,0
PD12.c. [G] UPAYA PENANGGULANGAN COVID-19				
Ya (n=13)	13	52,0	13	52,0
Tidak (n=12)	12	48,0	12	48,0
PD12.c. [V] LAINNYA				
Ya (n=1)	1	4,0	1	4,0
Tidak (n=24)	24	96,0	24	96,0

Buku KK Module PD

Tabel 1.2.7 Pendampingan Kabupaten/Distrik (Lanjutan)

Variabel	Lokasi			
	KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PD11,d, Dalam satu tahun terakhir, I/B/S pernah bertemu dengan [B] FASILITATOR SINERGI PERENCANAAN DISTRIK				
Ya (n=13)	13	43,3	13	43,3
Tidak (n=16)	16	53,3	16	53,3
Tidak tahu (n=1)	1	3,3	1	3,3
PD12.d. Topik yang Dibicarakan dengan Fasilitator Sinergi				
PD12.d. [A] SINERGI PERENCANAAN KAMPUNG DGN UNIT LAYANAN				
Ya (n=11)	11	78,6	11	78,6
Tidak (n=3)	3	21,4	3	21,4
PD12.d. [B] PENGUMPULAN DATA SAIK/SIO PAPUA				
Ya (n=7)	7	50,0	7	50,0
Tidak (n=7)	7	50,0	7	50,0
PD12.d. [C] PENGINPUTAN DATA SAIK/SIO PAPUA				
Ya (n=6)	6	42,9	6	42,9
Tidak (n=8)	8	57,1	8	57,1
PD12.d. [D] PENYUSUNAN DOKUMEN PEMBANGUNAN KAMPUNG				
Ya (n=10)	10	71,4	10	71,4
Tidak (n=4)	4	28,6	4	28,6
PD12.d. [E] PENINGKATAN PELAYANAN ADMINDUK				
Ya (n=9)	9	64,3	9	64,3
Tidak (n=5)	5	35,7	5	35,7
PD12.d. [F] PROGRAM PRIORITAS OTSUS				
Ya (n=5)	5	35,7	5	35,7
Tidak (n=9)	9	64,3	9	64,3
PD12.d. [G] UPAYA PENANGGULANGAN COVID19				
Ya (n=5)	5	35,7	5	35,7
Tidak (n=9)	9	64,3	9	64,3
PD12.d. [V] LAINNYA				
Ya (n=1)	1	7,1	1	7,1
Tidak (n=13)	13	92,9	13	92,9

Buku KK Module PD

Tabel 1.2.7. Pendampingan Kabupaten/Distrik (Lanjutan)

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PD12a, Apakah kampung sudah melakukan penyesuaian dokumen sinergi perencanaan dengan unit layanan						
Ya (n=30)	8	26,7	22	75,9	30	50,8
Tidak (n=29)	22	73,3	7	24,1	29	49,2
PD13a Dokumen yang Disinergikan						
PD13.a. [A] RPJMK						
Ya (n=27)	6	75,0	21	91,3	27	87,1
Tidak (n=4)	2	25,0	2	8,7	4	12,9
PD13.b. [B] RKPK						
Ya (n=29)	8	100,0	21	91,3	29	93,5
Tidak (n=2)	0	0,0	2	8,7	2	6,5
PD13.c. [C] RUK PUSKESMAS						
Ya (n=23)	5	62,5	18	78,3	23	74,2
Tidak (n=8)	3	37,5	5	21,7	8	25,8
PD13.d. [D] RENCANA KERJA SEKOLAH						
Ya (n=16)	3	37,5	13	56,5	16	51,6
Tidak (n=15)	5	62,5	10	43,5	15	48,4
PD13.e. [E] RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH						
Ya (n=15)	4	50,0	11	47,8	15	48,4
Tidak (n=16)	4	50,0	12	52,2	16	51,6
PD13.f. [F] RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) SD						
Ya (n=10)	2	25,0	8	34,8	10	32,3
Tidak (n=21)	6	75,0	15	65,2	21	67,7
PD13.v. [V] LAINNYA						
Ya (n = 0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tidak (n=31)	8	100,0	23	100,0	31	100,0

Buku KK Module PD

Tabel 1.2.7 Pendampingan Kabupaten/Distrik (Lanjutan)

Variabel	Lokasi			
	Non-KOMPAK		KOMPAK	
	Rerata	S.D.	Rerata	S.D.
PD01. Jumlah pertemuan dengan PEMERINTAH KABUPATEN dalam setahun terakhir	7,800	9,341	18,62	46,46
PD05. Jumlah pertemuan dengan PEMERINTAH DISTRIK dalam setahun terakhir	5,840	5,928	22,70	45,49
PD11. Jumlah pertemuan dalam setahun terakhir dengan:				
PD11.a. KORKAB LANDASAN			20,73	75,88
PD11.b. FASILITATOR SINERGI PERENCANAAN KABUPATEN			4	4,290
PD11.c. KORCAM LANDASAN			39,50	99,45
PD11.d. FASILITATOR SINERGI PERENCANAAN DISTRIK			4,462	4,136

1.2.8 Seksi PK (Peningkatan Kapasitas)

Tabel 1.2.8 Peningkatan Kapasitas

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PK01, Selama 1 tahun terakhir, I/B/S atau perangkat kampung pernah mengikuti pelatihan						
Ya (n=36)	14	46,7	22	73,3	36	60,0
TIDAK PERNAH (n=23)	16	53,3	7	23,3	23	38,3
Tidak menjawab	0	0,0	1	3,3		3,3
PK02 Jenis pelatihan yang diikuti						
PK02.a. Pelatihan [A] PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG						
Ya (n=14)	4	28,6	10	43,5	14	37,8
Tidak (n=23)	10	71,4	13	56,5	23	62,2
PK02.b. Pelatihan [B] PENULISAN LAPORAN KAMPUNG						
Ya (n=14)	4	28,6	10	43,5	14	37,8
Tidak (n=23)	10	71,4	13	56,5	23	62,2
PK02.c. Pelatihan [C] PEMBUATAN PERATURAN KAMPUNG						
Ya (n=12)	4	28,6	8	34,8	12	32,4
Tidak (n=25)	10	71,4	15	65,2	25	67,6
PK02.d. Pelatihan [D] PENGELOLAAN DATA KAMPUNG						
Ya (n=20)	7	50,0	13	56,5	20	54,1
Tidak (n=17)	7	50,0	10	43,5	17	45,9
PK02.e. Pelatihan [E] PENANGANAN KONFLIK						
Ya (n=7)	4	28,6	3	13,0	7	18,9
Tidak (n=30)	10	71,4	20	87,0	30	81,1
PK02.f. Pelatihan [F] TATA KELOLA PEMERINTAHAN						
Ya (n=12)	4	28,6	8	34,8	12	32,4
Tidak (n=25)	10	71,4	15	65,2	25	67,6
PK02.g. Pelatihan [G] KESETARAAN GENDER						
Ya (n=6)	3	21,4	3	13,0	6	16,2
Tidak (n=31)	11	78,6	20	87,0	31	83,8
PK02.h. Pelatihan [H] PENGUMPULAN DATA						
Ya (n=20)	8	57,1	12	52,2	20	54,1
Tidak (n=17)	6	42,9	11	47,8	17	45,9
PK02.i. Pelatihan [V] LAINNYA						
Ya (n=14)	8	57,1	6	26,1	14	37,8
Tidak (n=23)	6	42,9	17	73,9	23	62,2

Buku KK Module PK

Tabel 1.2.8 Peningkatan Kapasitas (Lanjutan)

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PK03. Penyelenggara Pelatihan yang Diikuti Responden						
PK03.a PEMERINTAH KABUPATEN						
Ya (n=23)	11	78,6	12	52,2	23	62,2
Tidak (n=14)	3	21,4	11	47,8	14	37,8
PK03.b PEMERINTAH DISTRIK						
Ya (n=8)	3	21,4	5	21,7	8	21,6
Tidak (n=29)	11	78,6	18	78,3	29	78,4
PK03. PELAKU PROGRAM KOMPAK						
Ya (n=16)	1	7,1	15	65,2	16	43,2
Tidak (n=21)	13	92,9	8	34,8	21	56,8
PK03.d. AKADEMISI/UNIVERSITAS						
Ya (n=2)	1	7,1	1	4,3	2	5,4
Tidak (n=35)	13	92,9	22	95,7	35	94,6
PK03.e. ORGANISASI/LEMBAGA (LEVEL KABUPATEN-PUSAT)						
Ya (n=2)	0	0,0	2	8,7	2	5,4
Tidak (n=35)	14	100,0	21	91,3	35	94,6
PK03.v. LAINNYA						
Ya (n=9)	5	35,7	4	17,4	9	24,3
Tidak (n=28)	9	64,3	19	82,6	28	75,7

Buku KK Module PK

Tabel 1.2.8 Peningkatan Kapasitas (Lanjutan)

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PK04, Selama 1 tahun terakhir, apakah pernah mendapatkan pelatihan dari program LANDASAN						
Ya (n=19)	2	6,7	17	58,6	19	32,2
Tidak (n=39)	27	90,0	12	41,4	39	66,1
TIDAK TAHU (n=1)	1	3,3	0	0,0	1	1,7
PK06.a. PENDATAAN PENDUDUK KAMPUNG						
Ya (n=17)	1	50,0	16	88,9	17	85,0
Tidak (n=3)	1	50,0	2	11,1	3	15,0
PK06.b. OPERASIONAL SAIK/SAIK+/SIO PAPUA						
Ya (n=17)	2	100,0	15	83,3	17	85,0
Tidak (n=3)	0	0,0	3	16,7	3	15,0
PK06.c. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINDUK/PASH						
Ya (n=12)	1	50,0	11	61,1	12	60,0
Tidak (n=8)	1	50,0	7	38,9	8	40,0
PK06.d. SINERGI PERENCANAAN DENGAN UNIT PELAYANAN						
Ya (n=12)	0	0,0	12	66,7	12	60,0
Tidak (n=8)	2	100,0	6	33,3	8	40,0
PK06.e. DMMD						
Ya (n=3)	0	0,0	3	16,7	3	15,0
Tidak (n=17)	2	100,0	15	83,3	17	85,0
PK06.f. PENANGGULANGAN COVID19						
Ya (n=8)	0	0,0	8	44,4	8	40,0
Tidak (n=12)	2	100,0	10	55,6	12	60,0
PK06.g. G] BANGGA PAPUA						
Tidak (n=18)	2	100,0	16	88,9	18	90,0
Ya (n=2)	0	0,0	2	11,1	2	10,0
PK06.h. PENCEGAHAN MALARIA						
Ya (n=8)	0	0,0	8	44,4	8	40,0
Tidak (n=12)	2	100,0	10	55,6	12	60,0
PK06.v. [V] LAINNYA						
Ya	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tidak (n=20)	2	100,0	18	100,0	20	100,0

Buku KK Module PK

Tabel 1.2.8 Peningkatan Kapasitas (Lanjutan)

Variabel	LK_KOMP Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jml.	Kol %	Jml.	Kol %	Jml.	Kol %
PK07. Selama 1 tahun terakhir, apakah ada MASYARAKAT yang pernah mendapatkan pelatihan dari LANDASAN?						
Ya (n=16)	2	6.7	14	46.7	16	26.7
Tidak (n=40)	26	86.7	14	46.7	40	66.7
TIDAK TAHU (n=4)	2	6.7	2	6.7	4	6.7
PK08 Siapa MASYARAKAT yang mengikuti pelatihan tersebut?						
PK08.a. [A] KPMK/KADER PROGRAM?						
Ya (n=15)	2	100,0	13	92,9	15	93,8
Tidak (n=1)	0	0,0	1	7,1	1	6,3
PK08.b. [B] KEPALA SEKOLAH?						
Ya (n=2)	0	0,0	2	14,3	2	12,5
Tidak (n=14)	2	100,0	12	85,7	14	87,5
PK08.c. [C] GURU?						
Ya (n=2)	0	0,0	2	14,3	2	12,5
Tidak (n=14)	2	100,0	12	85,7	14	87,5
PK08.d. [D] KOMITE SEKOLAH?						
Ya (n=1)	0	0,0	1	7,1	1	6,3
Tidak (n=15)	2	100,0	13	92,9	15	93,8
PK08.e. [E] KADER POSYANDU?						
Ya (n=2)	0	0,0	2	14,3	2	12,5
Tidak (n=14)	2	100,0	12	85,7	14	87,5
PK08.f. [F] BIDAN KAMPUNG?						
Ya (n=2)	0	0,0	2	14,3	2	12,5
Tidak (n=14)	2	100,0	12	85,7	14	87,5
PK08.g. [G] TOKO MASYARAKAT/ADAT/AGAMA?						
Tidak (n=16)	2	100,0	14	100,0	16	100,0

Buku KK Module PK

Tabel 1.2.8 Peningkatan Kapasitas (Lanjutan)

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PK08 Siapa MASYARAKAT yang mengikuti pelatihan tersebut? (Lanjutan)						
PK08.h. [H] PKK						
Tidak (n=16)	2	100,0	14	100,0	16	100,0
PK08.i. [I] PERWAKILAN KELOMPOK PEREMPUAN						
Tidak (n=16)	2	100,0	14	100,0	16	100,0
PK08.j. [J] TOKOH PEMUDA/KARANG TARUNA						
Ya (n=1)	0	0,0	1	7,1	1	6,3
Tidak (n=15)	2	100,0	13	92,9	15	93,8
PK08.k. [K] PERWAKILAN KELOMPOK PENYANDANG DISABILITAS						
Tidak (n=16)	2	100,0	14	100,0	16	100,0
PK08.l. [L] PERWAKILAN OAP						
Tidak (n=16)	2	100,0	14	100,0	16	100,0
PK08.v. [V] LAINNYA						
Ya (n=2)	0	0,0	2	14,3	2	12,5
Tidak (n=14)	2	100,0	12	85,7	14	87,5
PK10. Menurut I/B/S. apakah pelatihan dari Program LANDASAN bermanfaat						
Tidak Bermanfaat (n=1)	0	0,0	1	3,4	1	1,7
Bermanfaat (n=9)	3	10,0	6	20,7	9	15,3
Sangat bermanfaat (n=20)	1	3,3	19	65,5	20	33,9
TIDAK BERLAKU (n=29)	26	86,7	3	10,3	29	49,2

Buku KK Module PK

1.2.9 Seksi DG (Demografi Kampung)

Tabel 1.2.9. Demografi Kampung

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
DG15, Apakah kampung memiliki KPMK						
Ya (n=48)	19	63,3	29	96,7	48	80,0
Tidak (n=12)	11	36,7	1	3,3	12	20,0
DG16, Apakah kampung menganggarkan insentif/biaya operasional untuk KPMK						
Ya (n=41)	15	78,9	26	89,7	41	85,4
Tidak (n=7)	4	21,1	3	10,3	7	14,6
DG17. Sumber dana untuk insentif/biaya operasional KPMK						
DG17.a. PROSPEK						
Tidak (n=36)	14	93,3	22	84,6	36	87,8
Ya (n=5)	1	6,7	4	15,4	5	12,2
DG17.b. OTSUS						
Tidak (n=34)	12	80,0	22	84,6	34	82,9
Ya (n=7)	3	20,0	4	15,4	7	17,1
DG17.c. DANA KAMPUNG						
Tidak (n=10)	5	33,3	5	19,2	10	24,4
Ya (n=31)	10	66,7	21	80,8	31	75,6
DG17.d. BANTUAN KEUANGAN DARI KABUPATEN						
Tidak (n=40)	15	100,0	25	96,2	40	97,6
Ya (n=1)	0	0,0	1	3,8	1	2,4
DG17.e. BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI						
Tidak (n=40)	15	100,0	25	96,2	40	97,6
Ya (n=1)	0	0,0	1	3,8	1	2,4
DG17.v. LAINNYA						
Tidak (n=39)	13	86,7	26	100,0	39	95,1
Ya (n=2)	2	13,3	0	0,0	2	4,9
DG17.y. TIDAK TAHU sumber pembiayaan insentif/operasional KPMK						
Tidak (n=41)	15	100,0	26	100,0	41	100,0

Buku KK Module DG

Table 1.2.9. Demografi Kampung

Variabel	LK_KOMP Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jml.	Kol %	Jml.	Kol %	Jml.	Kol %
DG09. Apakah kampung melakukan update data kependudukan?						
Ya, rutin (n=25)	12	40.0	13	43.3	25	41.7
Ya, tidak rutin (n=29)	12	40.0	17	56.7	29	48.3
Tidak (n=6)	6	20.0	0	0.0	6	10.0
DG11 Pihak yang melakukan update rutin						
DG11.a. [A] KPMK?						
Ya (n=31)	5	20.8	26	86.7	31	57.4
Tidak (n=23)	19	79.2	4	13.3	23	42.6
DG11.b. [B] OPERATOR DATA DI KAMPUNG?						
Ya (n=18)	6	25.0	12	40.0	18	33.3
Tidak (n=36)	18	75.0	18	60.0	36	66.7
DG11.c. [C] SEKRETARIS KAMPUNG?						
Ya (n=30)	15	62.5	15	50.0	30	55.6
Tidak (n=24)	9	37.5	15	50.0	24	44.4
DG11.d. [D] KAUR PERENCANAAN?						
Ya (n=5)	1	4.2	4	13.3	5	9.3
Tidak (n=49)	23	95.8	26	86.7	49	90.7
DG11.e. [E] KAUR TU/UMUM?						
Ya (n=4)	1	4.2	3	10.0	4	7.4
Tidak (n=50)	23	95.8	27	90.0	50	92.6
DG11.f. [F] KASI PEMERINTAHAN?						
Ya (n=9)	1	4.2	8	26.7	9	16.7
Tidak (n=45)	23	95.8	22	73.3	45	83.3
DG11.g. [G] KASI PELAYANAN?						
Ya (n=2)	0	0.0	2	6.7	2	3.7
Tidak (n=52)	24	100.0	28	93.3	52	96.3
DG11.v. ada pihak [V] LAINNYA?						
Ya (n=8)	6	25.0	2	6.7	8	14.8
Tidak (n=46)	18	75.0	28	93.3	46	85.2

Buku KK Module DG

Tabel 1.2.9 Demografi Kampung (Lanjutan)

Variabel	Lokasi			
	Non-KOMPAK		KOMPAK	
	Rerata	S.D.	Rerata	S.D.
DG10. Frekuensi update data kependudukan (kali dalam setahun)	1,5	1,7	2,4	1,2

Tabel 1.2.9 Demografi Kampung (Lanjutan)

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
DG12 Data-data yang di-update						
DG12.a. KELAHIRAN						
Ya (n=53)	23	95,8	30	100,0	53	98,1
Tidak (n=1)	1	4,2	0	0,0	1	1,9
DG12.n. KEMATIAN						
Ya (n=50)	22	91,7	28	93,3	50	92,6
Tidak (n=4)	2	8,3	2	6,7	4	7,4
DG12.c. PERPINDAHAN						
Ya (n=46)	20	83,3	26	86,7	46	85,2
Tidak (n=8)	4	16,7	4	13,3	8	14,8
DG12.v. LAINNYA						
Ya (n=5)	4	16,7	1	3,3	5	9,3
Tidak (n=49)	20	83,3	29	96,7	49	90,7

Buku KK Module DG

Tabel 1.2.9 Demografi Kampung (Lanjutan)

Variabel	Lokasi			
	Non-KOMPAK		KOMPAK	
	Rerata	S.D.	Rerata	S.D.
DG01. Jumlah Kepala Keluarga	235,7	326,7	244,1	271,8
DG02. Jumlah keluarga yang mempunyai Kartu Keluarga	222,9	328,2	277,1	307,8
DG03. Jumlah penduduk	913,1	1,329	1,125	1,325
DG04. Jumlah penduduk laki-laki	486,4	796,7	622,0	741,8
DG05. Jumlah penduduk Perempuan	411,7	578,5	555,5	632,5
DG06. Jumlah penduduk dengan disabilitas (laki-laki)	1,8	2,0	2,3	2,0
DG06. Jumlah penduduk dengan disabilitas (perempuan)	1,5	1,5	1,3	1,1
DG07. Jumlah penduduk yang mempunyai KTP	630,9	1,101	763,5	778,3
DG16_RP Insentif kader (rupiah/bulan)	1.365.500	1.190.361	920.192	741.916

1.2.10 Seksi AF (Akses ke Fasilitas)

Tabel 1.2.10. Akses Rumah Tangga ke Fasilitas Publik

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
AF02.a. Di mana lokasi RUMAH SAKIT?						
Di distrik yang sama (n=7)	1	3,3	6	20,0	7	11,7
Di kabupaten/kota yang sama (n=43)	24	80,0	19	63,3	43	71,7
Di luar kabupaten/kota ini (n=10)	5	16,7	5	16,7	10	16,7
AF04a Jenis transportasi yang digunakan untuk ke RUMAH SAKIT						
AF04.a.a MOBIL						
Ya (n=36)	16	53,3	20	66,7	36	60,0
Tidak (n=24)	14	46,7	10	33,3	24	40,0
AF04.a.b. MOTOR						
Ya (n=13)	9	30,0	4	13,3	13	21,7
Tidak (n=47)	21	70,0	26	86,7	47	78,3
AF04.a.c. PERAHU BERMOTOR						
Ya (n=16)	5	16,7	11	36,7	16	26,7
Tidak (n=44)	25	83,3	19	63,3	44	73,3
AF04.a.d. PERAHU TANPA MOTOR						
Ya (n=2)	1	3,3	1	3,3	2	3,3
Tidak (n=58)	29	96,7	29	96,7	58	96,7
AF04.a.e. SEPEDA						
Tidak (n=60)	30	100,0	30	100,0	60	100,0
AF04.a.f. JALAN KAKI						
Ya (n=10)	6	20,0	4	13,3	10	16,7
Tidak (n=50)	24	80,0	26	86,7	50	83,3
AF04.a.v. [V] LAINNYA						
Ya (n=1)	1	3,3	0	0,0	1	1,7
Tidak (n=59)	29	96,7	30	100,0	59	98,3

Buku KK Module AF

Tabel xx, Akses Rumah Tangga ke Fasilitas Publik (Lanjutan) – Puskesmas

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
AF02.b. Di mana lokasi [B] PUSKESMAS?						
Di kampung yang sama (n=15)	5	16.7	10	33.3	15	25.0
Di distrik yang sama (n=40)	21	70.0	19	63.3	40	66.7
Di kabupaten/kota yang sama (n=5)	4	13.3	1	3.3	5	8.3
AF04b Jenis transportasi yang digunakan untuk ke PUSKESMAS						
AF04.b.a. [A] MOBIL?						
Ya (n=3)	2	6.7	1	3.3	3	5.0
Tidak (n=57)	28	93.3	29	96.7	57	95.0
AF04.b.b. [B] MOTOR?						
Ya (n=28)	13	43.3	15	50.0	28	46.7
Tidak (n=32)	17	56.7	15	50.0	32	53.3
AF04.b.c. [C] PERAHU BERMOTOR?						
Ya (n=11)	4	13.3	7	23.3	11	18.3
Tidak (n=49)	26	86.7	23	76.7	49	81.7
AF04.b.d. [D] PERAHU TANPA MOTOR?						
Ya (n=2)	1	3.3	1	3.3	2	3.3
Tidak (n=58)	29	96.7	29	96.7	58	96.7
AF04.b.e. [E] SEPEDA?						
Tidak (n=60)	30	100.0	30	100.0	60	100.0
AF04.b.f. [F] JALAN KAKI?						
Ya (n=28)	16	53.3	12	40.0	28	46.7
Tidak (n=32)	14	46.7	18	60.0	32	53.3
AF04.b.v. jenis [V] LAINNYA?						
Ya (n=1)	1	3.3	0	0.0	1	1.7
Tidak (n=59)	29	96.7	30	100.0	59	98.3

Buku KK Module AF

Tabel 1.2.10. Akses Rumah Tangga ke Fasilitas Publik (Lanjutan) – Pustu

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
AF02,c, Di mana lokasi [C] PUSKESMAS PEMBANTU						
Di kampung yang sama (n=26)	13	43,3	13	43,3	26	43,3
Di distrik yang sama (n=14)	5	16,7	9	30,0	14	23,3
Di kabupaten/kota yang sama (n=1)	0	0,0	1	3,3	1	1,7
TIDAK TAHU (n=19)	12	40,0	7	23,3	19	31,7
AF04.c. Jenis transportasi yang digunakan untuk ke Pustu						
AF04.c.a. MOBIL						
Ya (n=1)	0	0,0	1	4,3	1	2,4
Tidak (n=40)	18	100,0	22	95,7	40	97,6
AF04.c.b. MOTOR						
Ya (n=12)	7	38,9	5	21,7	12	29,3
Tidak (n=29)	11	61,1	18	78,3	29	70,7
AF04.c.c. PERAHU BERMOTOR						
Ya (n=3)	0	0,0	3	13,0	3	7,3
Tidak (n=38)	18	100,0	20	87,0	38	92,7
AF04.c.d. PERAHU TANPA MOTOR						
Ya (n=1)	1	5,6	0	0,0	1	2,4
Tidak (n=40)	17	94,4	23	100,0	40	97,6
AF04.c.e. SEPEDA						
Tidak (n=41)	18	100,0	23	100,0	41	100,0
AF04.c.f. JALAN KAKI						
Ya (n=25)	11	61,1	14	60,9	25	61,0
Tidak (n=16)	7	38,9	9	39,1	16	39,0
AF04.c.v. LAINNYA						
Tidak (n=41)	18	100,0	23	100,0	41	100,0

Buku KK Module AF

Tabel 1.2.10 Akses Rumah Tangga ke Fasilitas Publik (Lanjutan) - Poskesdes

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
AF02.d. Di mana lokasi [D] POSKESDES						
Di kampung yang sama (n=1)	1	3,3	0	0,0	1	1,7
Di distrik yang sama (n=3)	1	3,3	2	6,7	3	5,0
TIDAK TAHU (n=56)	28	93,3	28	93,3	56	93,3
AF04.d Jenis transportasi yang digunakan untuk ke Poskesdes						
AF04.d.a. MOBIL						
Tidak (n=4)	2	100,0	2	100,0	4	100,0
AF04.d.b. MOTOR						
Ya (n=1)	1	50,0	0	0,0	1	25,0
Tidak (n=3)	1	50,0	2	100,0	3	75,0
AF04.d.c. PERAHU BERMOTOR						
Ya (n=1)	0	0,0	1	50,0	1	25,0
Tidak (n=3)	2	100,0	1	50,0	3	75,0
AF04.d.d. PERAHU TANPA MOTOR						
Tidak (n=4)	2	100,0	2	100,0	4	100,0
AF04.d.e. SEPEDA						
Tidak (n=4)	2	100,0	2	100,0	4	100,0
AF04.d.f. JALAN KAKI						
Ya (n=3)	1	50,0	2	100,0	3	75,0
Tidak (n=1)	1	50,0	0	0,0	1	25,0
AF04.d.v. LAINNYA						
Tidak (n=4)	2	100,0	2	100,0	4	100,0

Buku KK Module AF

Tabel 1.2.10 Akses Rumah Tangga ke Fasilitas Publik (Lanjutan) - Polindes

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
AF02.e. Di mana lokasi [E] POLINDES						
Di kampung yang sama (n=10)	4	13,3	6	20,0	10	16,7
Di distrik yang sama (n=4)	1	3,3	3	10,0	4	6,7
Di kabupaten/kota yang sama (n=2)	2	6,7	0	0,0	2	3,3
TIDAK TAHU (n=44)	23	76,7	21	70,0	44	73,3
AF004e. Jenis transportasi yang digunakan untuk ke Polindes						
AF04.e.a. [A] MOBIL						
Ya (n=1)	1	14,3	0	0,0	1	6,3
Tidak (n=15)	6	85,7	9	100,0	15	93,8
AF04.e.b. [B] MOTOR						
Ya (n=5)	3	42,9	2	22,2	5	31,3
Tidak (n=11)	4	57,1	7	77,8	11	68,8
AF04.e.c. [C] PERAHU BERMOTOR						
Ya (n=1)	0	0,0	1	11,1	1	6,3
Tidak (n=15)	7	100,0	8	88,9	15	93,8
AF04.e.d. [D] PERAHU TANPA MOTOR						
Ya (n=1)	0	0,0	1	11,1	1	6,3
Tidak (n=15)	7	100,0	8	88,9	15	93,8
AF04.e.e. [E] SEPEDA						
Tidak (n=16)	7	100,0	9	100,0	16	100,0
AF04.e.f. [F] JALAN KAKI						
Ya (n=12)	4	57,1	8	88,9	12	75,0
Tidak (n=4)	3	42,9	1	11,1	4	25,0
AF04.e.v. jenis [V] LAINNYA						
Tidak (n=16)	7	100,0	9	100,0	16	100,0

Buku KK Module AF

Tabel 1.2.10 Akses Rumah Tangga ke Fasilitas Publik (Lanjutan) - Posyandu

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
AF02.f. Di mana lokasi [F]						
POSYANDU						
Di kampung yang sama (n=55)	26	86,7	29	96,7	55	91,7
Di distrik yang sama (n=2)	1	3,3	1	3,3	2	3,3
Di kabupaten/kota yang sama (n=1)	1	3,3	0	0,0	1	1,7
TIDAK TAHU (n=2)	2	6,7	0	0,0	2	3,3
AF04f Jenis transportasi yang digunakan untuk ke Posyandu						
AF04.f.a. MOBIL						
Tidak (n=58)	28	100,0	30	100,0	58	100,0
AF04.f.b. MOTOR						
Ya (n=5)	3	10,7	2	6,7	5	8,6
Tidak (n=53)	25	89,3	28	93,3	53	91,4
AF04.f.c. PERAHU BERMOTOR						
Tidak (n=58)	28	100,0	30	100,0	58	100,0
AF04.f.d. PERAHU TANPA MOTOR						
Tidak (n=58)	28	100,0	30	100,0	58	100,0
AF04.f.e. SEPEDA						
Tidak (n=58)	28	100,0	30	100,0	58	100,0
AF04.f.f. JALAN KAKI						
Ya (n=53)	25	89,3	28	93,3	53	91,4
Tidak (n=5)	3	10,7	2	6,7	5	8,6
AF04.f.v. LAINNYA						
Tidak (n=58)	28	100,0	30	100,0	58	100,0

Buku KK Module AF

Tabel 1.2.10 Akses Rumah Tangga ke Fasilitas Publik (Lanjutan) – Pos PAUD

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
AF02.g. Di mana lokasi [G] POS PAUD						
Di kampung yang sama (n=42)	22	73,3	20	66,7	42	70,0
Di distrik yang sama (n=9)	3	10,0	6	20,0	9	15,0
Di kabupaten/kota yang sama (n=1)	1	3,3	0	0,0	1	1,7
TIDAK TAHU (n=8)	4	13,3	4	13,3	8	13,3
AF04.g. Jenis transportasi yang digunakan untuk ke POS PAUD						
AF04.g.a. MOBIL						
Ya (n=1)	1	3,8	0	0,0	1	1,9
Tidak (n=51)	25	96,2	26	100,0	51	98,1
AF04.g.b. MOTOR						
Ya (n=13)	6	23,1	7	26,9	13	25,0
Tidak (n=39)	20	76,9	19	73,1	39	75,0
AF04.g.c. PERAHU BERMOTOR						
Ya (n=1)	1	3,8	0	0,0	1	1,9
Tidak (n=51)	25	96,2	26	100,0	51	98,1
AF04.g.d. PERAHU TANPA MOTOR						
Ya (n=1)	1	3,8	0	0,0	1	1,9
Tidak (n=51)	25	96,2	26	100,0	51	98,1
AF04.g.e. SEPEDA						
Tidak (n=52)	26	100,0	26	100,0	52	100,0
AF04.g.f. JALAN KAKI						
Ya (n=39)	20	76,9	19	73,1	39	75,0
Tidak (n=13)	6	23,1	7	26,9	13	25,0
AF04.g.v. LAINNYA						
Tidak (n=52)	26	100,0	26	100,0	52	100,0

Buku KK Module AF

Tabel 1.2.10 Akses Rumah Tangga ke Fasilitas Publik (Lanjutan) – SD/MI

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
AF02.h. Di mana lokasi [H] SD/MI						
Di kampung yang sama (n=44)	21	70,0	23	76,7	44	73,3
Di distrik yang sama (n=14)	7	23,3	7	23,3	14	23,3
Di kabupaten/kota yang sama (n=2)	2	6,7	0	0,0	2	3,3
AF04.h Jenis transportasi yang biasanya digunakan untuk mencapai SD/MI						
AF04.h.a. [A] MOBIL						
Ya (n=1)	1	3,3	0	0,0	1	1,7
Tidak (n=59)	29	96,7	30	100,0	59	98,3
AF04.h.b. [B] MOTOR						
Ya (n=9)	4	13,3	5	16,7	9	15,0
Tidak (n=51)	26	86,7	25	83,3	51	85,0
AF04.h.c. [C] PERAHU BERMOTOR						
Tidak (n=60)	30	100,0	30	100,0	60	100,0
AF04.h.d. [D] PERAHU TANPA MOTOR						
Tidak (n=60)	30	100,0	30	100,0	60	100,0
AF04.h.e. [E] SEPEDA						
Ya (n=1)	1	3,3	0	0,0	1	1,7
Tidak (n=59)	29	96,7	30	100,0	59	98,3
AF04.h.f. [F] JALAN KAKI						
Ya (n=50)	25	83,3	25	83,3	50	83,3
Tidak (n=10)	5	16,7	5	16,7	10	16,7
AF04.h.v. jenis [V] LAINNYA						
Tidak (n=60)	30	100,0	30	100,0	60	100,0

Buku KK Module AF

Tabel 1.2.10. Akses Rumah Tangga ke Fasilitas Publik (Lanjutan) – SDLB

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
AF02.i. Di mana lokasi [I] SDLB						
Di kabupaten/kota yang sama (n=8)	6	20,0	2	6,7	8	13,3
Di luar kabupaten/kota ini (n=3)	2	6,7	1	3,3	3	5,0
TIDAK TAHU (n=49)	22	73,3	27	90,0	49	81,7
AF04.i. Jenis transportasi yang biasanya digunakan untuk ke SDLB						
AF04.i.a. [A] MOBIL						
Ya (n=7)	5	62,5	2	66,7	7	63,6
Tidak (n=4)	3	37,5	1	33,3	4	36,4
AF04.i.b. [B] MOTOR						
Ya (n=6)	4	50,0	2	66,7	6	54,5
Tidak (n=5)	4	50,0	1	33,3	5	45,5
AF04.i.c. [C] PERAHU BERMOTOR						
Tidak (n=11)	8	100,0	3	100,0	11	100,0
AF04.i.d. [D] PERAHU TANPA MOTOR						
Tidak (n=11)	8	100,0	3	100,0	11	100,0
AF04.i.e. [E] SEPEDA						
Tidak (n=11)	8	100,0	3	100,0	11	100,0
AF04.i.f. [F] JALAN KAKI						
Tidak (n=11)	8	100,0	3	100,0	11	100,0
AF04.i.v. jenis [V] LAINNYA						
Tidak (n=11)	8	100,0	3	100,0	11	100,0

Buku KK Module AF

Tabel 1.2.10 Akses Rumah Tangga ke Fasilitas Publik (Lanjutan) – Kantor Distrik

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
AF02.j. Di mana lokasi [J] KANTOR DISTRIK/KECAMATAN						
Di kampung yang sama (n=13)	4	13,3	9	30,0	13	21,7
Di distrik yang sama (n=47)	26	86,7	21	70,0	47	78,3
AF04.j Jenis transportasi yang biasanya digunakan untuk ke KANTOR DISTRIK/KECAMATAN						
AF04.j.a. [A] MOBIL						
Ya (n=5)	3	10,0	2	6,7	5	8,3
Tidak (n=55)	27	90,0	28	93,3	55	91,7
AF04.j.b. [B] MOTOR						
Ya (n=26)	14	46,7	12	40,0	26	43,3
Tidak (n=34)	16	53,3	18	60,0	34	56,7
AF04.j.c. [C] PERAHU BERMOTOR						
Ya (n=10)	3	10,0	7	23,3	10	16,7
Tidak (n=50)	27	90,0	23	76,7	50	83,3
AF04.j.d. [D] PERAHU TANPA MOTOR						
Ya (n=3)	2	6,7	1	3,3	3	5,0
Tidak (n=57)	28	93,3	29	96,7	57	95,0
AF04.j.e. [E] SEPEDA						
Tidak (n=60)	30	100,0	30	100,0	60	100,0
AF04.j.f. [F] JALAN KAKI						
Ya (n=27)	14	46,7	13	43,3	27	45,0
Tidak (n=33)	16	53,3	17	56,7	33	55,0
AF04.j.v. jenis [V] LAINNYA						
Tidak (n=60)	30	100,0	30	100,0	60	100,0

Buku KK Module AF

Tabel xx, Akses Rumah Tangga ke Fasilitas Publik (Lanjutan) – Kantor Kabupaten

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
AF02.k. Di mana lokasi [K] KANTOR KABUPATEN						
Di kampung yang sama (n=2)	0	0,0	2	6,7	2	3,3
Di distrik yang sama (n=5)	1	3,3	4	13,3	5	8,3
Di kabupaten/kota yang sama (n=53)	29	96,7	24	80,0	53	88,3
AF04.k. Jenis transportasi yang biasanya digunakan untuk ke KANTOR KABUPATEN						
AF04.k.a. [A] MOBIL						
Ya (n=27)	13	43,3	14	46,7	27	45,0
Tidak (n=33)	17	56,7	16	53,3	33	55,0
AF04.k.b. [B] MOTOR						
Ya (n=21)	11	36,7	10	33,3	21	35,0
Tidak (n=39)	19	63,3	20	66,7	39	65,0
AF04.k.c. [C] PERAHU BERMOTOR						
Ya (n=16)	6	20,0	10	33,3	16	26,7
Tidak (n=44)	24	80,0	20	66,7	44	73,3
AF04.k.d. [D] PERAHU TANPA MOTOR						
Ya (n=1)	0	0,0	1	3,3	1	1,7
Tidak (n=59)	30	100,0	29	96,7	59	98,3
AF04.k.e. [E] SEPEDA						
Tidak (n=60)	30	100,0	30	100,0	60	100,0
AF04.k.f. [F] JALAN KAKI						
Ya (n=11)	7	23,3	4	13,3	11	18,3
Tidak (n=49)	23	76,7	26	86,7	49	81,7
AF04.k.v. jenis [V] LAINNYA						
Ya (n=2)	1	3,3	1	3,3	2	3,3
Tidak (n=58)	29	96,7	29	96,7	58	96,7

Buku KK Module AF

Tabel 1.2.10 Akses Rumah Tangga ke Fasilitas Publik (Lanjutan) – Jarak (dalam kilometer)

Variabel	Lokasi			
	Non-KOMPAK		KOMPAK	
	Rerata	S.D.	Rerata	S.D.
AF03.a. Berapa jarak ke Rumah Sakit dari kantor Kepala Kampung (km)	71,4	65,2	63,3	48,9
AF03.b. Berapa jarak ke Puskesmas dari kantor Kepala Kampung (km)	27,0	62,9	7,2	11,8
AF03.c. Berapa jarak ke Pustu dari kantor Kepala Kampung (km)	3,1	5,3	16,0	43,4
AF03.d. Berapa jarak ke Poskesdes dari kantor Kepala Kampung (km)	6	7,1	22,5	24,7
AF03.e. Berapa jarak ke Polindes dari kantor Kepala Kampung (km)	4,8	7,1	2,0	2,3
AF03.f. Berapa jarak ke Posyandu dari kantor Kepala Kampung (km)	0,6	1,2	0,5	1,1
AF03.g. Berapa jarak ke PAUD dari kantor Kepala Kampung (km)	5,3	13,1	1,4	2,8
AF03.h. Berapa jarak ke SD/MI dari kantor Kepala Kampung (km)	1,1	1,1	0,8	0,8
AF03.i. Berapa jarak ke SDLB dari kantor Kepala Kampung (km)	38,6	29,6	20,0	5,0
AF03.j. Berapa jarak ke Kantor Distrik dari kantor Kepala Kampung (km)	12,9	21,6	9,1	12,8
AF03.k. Berapa jarak ke Kantor Kabupaten tersebut dari kantor Kepala Kampung (km)	74,6	59,1	51,4	49,2

Tabel 1.2.10 Akses Rumah Tangga ke Fasilitas Publik (Lanjutan) – Waktu Tempuh (dalam jam)

VARIABEL: Waktu total satu kali jalan dari kantor kepala kampung ke [...]	Lokasi			
	Non-KOMPAK		KOMPAK	
	Rerata	S.D.	Rerata	S.D.
AF05.ka. [A] [Rumah Sakit]	2,050	1,510	2,028	1,087
AF05.kb. [B] [Puskesmas]	0,653	0,836	2,373	10,90
AF05.kc. [C] [Pustu]	0,680	2,329	0,393	0,492
AF05.kd. [D] [Poskesdes]	0,208	0,0589	0,333	0
AF05.ke. [E] [Polindes]	0,264	0,336	0,180	0,169
AF05.kf. [F] [Posyandu]	0,0839	0,107	0,0900	0,0899
AF05.kg. [G] [PAUD]	0,162	0,144	0,117	0,117
AF05.kh. [H] [SD/MI]	0,188	0,123	0,173	0,189
AF05.kj. [J] [SDLB]	1,104	0,644	1,500	0,866
AF05.kk. [K] [Kantor Distrik]	0,936	2,222	0,479	0,639
AF05.kl. [L] [Kantor Kabupaten]	1,973	1,299	1,723	1,276

Tabel xx, Akses Rumah Tangga ke Fasilitas Publik (Lanjutan) – Biaya Sekali Jalan (dalam Rupiah)

Variabel: Biaya transport sekali jalan ke [...]	Lokasi			
	Non-KOMPAK		KOMPAK	
	Rerata	S.D.	Rerata	S.D.
AF06.a. [A] Rumah Sakit	203,533	373,940	335,167	616,540
AF06.b. [B] Puskesmas	39,167	72,363	76,900	278,847
AF06.c. [C] Pustu	9,278	23,237	49,130	149,017
AF06.d. [D] Poskesdes	5,000	7,071	50,000	70,711
AF06.e. [E] Polindes	18,571	36,710	1,667	5,000
AF06.f. [F] Posyandu	607,1	2,097	333,3	1,269
AF06.g. [G] PAUD	13,923	58,554	2,462	5,665
AF05.h. [H] SD/MI	1,167	4,086	866,7	2,300
AF06.i. [I] SDLB	127,500	201,153	113,333	161,967
AF06.j. [J] Kantor Distrik	54,200	187,286	93,400	298,456
AF06.k. [K] Kantor Kabupaten	216,500	393,836	251,000	534,234

1.2.11 Seksi TD (Ketersediaan Dokumen)

Tabel 1.2.11 Ketersediaan Dokumen

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
TD01.a. Apakah kampung ini memiliki [A] APBK TAHUN 2020						
Ya (n=55)	28	93,3	27	90,0	55	91,7
Tidak (n=5)	2	6,7	3	10,0	5	8,3
TD02.a. Apakah kami dapat meminjamnya untuk disalin						
Ya, dokumen ada (n=27)	11	39,3	16	59,3	27	49,1
Ya, dokumen tidak ada (n=22)	14	50,0	8	29,6	22	40,0
Tidak (n=6)	3	10,7	3	11,1	6	10,9
TD03a Alasan dokumen APBK 2020 tidak dapat dipinjam						
TD03.a.a. [A] DOKUMEN RAHASIA KAMPUNG						
Ya (n=1)	1	3,6	0	0,0	1	1,8
Tidak (n=54)	27	96,4	27	100,0	54	98,2
TD03.a.b. [B] TAKUT HILANG						
Ya (n=2)	1	3,6	1	3,7	2	3,6
Tidak (n=53)	27	96,4	26	96,3	53	96,4
TD03.a.v. alasan [V] LAINNYA						
Ya (n=4)	2	7,1	2	7,4	4	7,3
Tidak (n=51)	26	92,9	25	92,6	51	92,7
TD01,b, Apakah kampung ini memiliki [B] APBK TAHUN 2021						
Ya (n=57)	29	96,7	28	93,3	57	95,0
Tidak (n=3)	1	3,3	2	6,7	3	5,0
TD02,b, Apakah kami dapat meminjamnya untuk disalin						
Ya, dokumen ada (n=37)	18	62,1	19	67,9	37	64,9
Ya, dokumen tidak ada (n=18)	10	34,5	8	28,6	18	31,6
Tidak (n=2)	1	3,4	1	3,6	2	3,5
TD03b, Alasan dokumen APBK 2021 tidak dapat dipinjam						
TD03.b.a. [A] DOKUMEN RAHASIA KAMPUNG						
Tidak (n=57)	29	100,0	28	100,0	57	100,0
TD03.b.b. [B] TAKUT HILANG						
Ya (n=1)	0	0,0	1	3,6	1	1,8
Tidak (n=56)	29	100,0	27	96,4	56	98,2
TD03.b.v. alasan [V] LAINNYA						
Ya (n=1)	1	3,4	0	0,0	1	1,8
Tidak (n=56)	28	96,6	28	100,0	56	98,2

Buku KK Module TD

Tabel 1.2.11 Ketersediaan Dokumen (Lanjutan)

Variabel	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
TD01.c. Apakah kampung ini memiliki [C] RPJMK TERBARU						
Ya (n=53)	27	90,0	26	86,7	53	88,3
Tidak (n=7)	3	10,0	4	13,3	7	11,7
TD02.c. Apakah kami dapat meminjamnya untuk disalin						
Ya, dokumen ada (n=14)	5	18,5	9	34,6	14	26,4
Ya, dokumen tidak ada (n=35)	20	74,1	15	57,7	35	66,0
Tidak (n=4)	2	7,4	2	7,7	4	7,5
TD03.c. Alasan dokumen RPJMK TERBARU tidak dapat dipinjam						
TD03.c.a. [A] DOKUMEN RAHASIA KAMPUNG						
Tidak (n=53)	27	100,0	26	100,0	53	100,0
TD03.c.b. [B] TAKUT HILANG						
Ya (n=1)	0	0,0	1	3,8	1	1,9
Tidak (n=52)	27	100,0	25	96,2	52	98,1
TD03.c.v. alasan [V] LAINNYA						
Ya (n=3)	2	7,4	1	3,8	3	5,7
Tidak (n=50)	25	92,6	25	96,2	50	94,3
TD01,d, Apakah kampung ini memiliki [D] RPKK TAHUN 2021						
Ya (n=54)	29	96,7	25	83,3	54	90,0
Tidak (n=6)	1	3,3	5	16,7	6	10,0
TD02,d, Apakah kami dapat meminjamnya untuk disalin						
Ya, dokumen ada (n=23)	12	41,4	11	44,0	23	42,6
Ya, dokumen tidak ada (n=29)	17	58,6	12	48,0	29	53,7
Tidak (n=2)	0	0,0	2	8,0	2	3,7
TD03.d. Alasan dokumen RPKK TAHUN 2021 tidak dapat dipinjam						
TD03.d.a. [A] DOKUMEN RAHASIA KAMPUNG						
Tidak (n=54)	29	100,0	25	100,0	54	100,0
TD03.d.a. [B] TAKUT HILANG						
Ya (n=1)	0	0,0	1	4,0	1	1,9
Tidak (n=53)	29	100,0	24	96,0	53	98,1
TD03.d.v. alasan [V] LAINNYA						
Ya (n=1)	0	0,0	1	4,0	1	1,9
Tidak (n=53)	29	100,0	24	96,0	53	98,1

Buku KK Module TD

1.3 Buku Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPMK)

1.3.1 Seksi LR (Latar Belakang Responden)

Tabel 1.3.1 Latar Belakang KPMK

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
LR06. Jenis kelamin KPMK						
Laki-laki (n=74)	34	69,4	40	80,0	74	74,7
Perempuan (n=25)	15	30,6	10	20,0	25	25,3
LR07. Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diikuti KPMK?						
SD/MI/Sederajat (n=5)	3	6,1	2	4,0	5	5,1
SMP/MTs/Sederajat (n=10)	8	16,3	2	4,0	10	10,1
SMA/MA/Sederajat (n=42)	17	34,7	25	50,0	42	42,4
Paket B (n=1)	0	0,0	1	2,0	1	1,0
Paket C (n=5)	4	8,2	1	2,0	5	5,1
D1/D2/D3 (n=2)	1	2,0	1	2,0	2	2,0
D4/S1 (n=34)	16	32,7	18	36,0	34	34,3
LR10. Apa agama yang dianut KPMK?						
Islam (n=14)	12	24,5	2	4,0	14	14,1
Kristen Protestan (n=73)	31	63,3	42	84,0	73	73,7
Katolik (n=12)	6	12,2	6	12,0	12	12,1
LR11. Apakah KPMK tinggal di kampung ini?						
Ya (n=96)	49	100,0	47	94,0	96	97,0
Tidak (n=3)	0	0,0	3	6,0	3	3,0
LR14. Apakah KPMK punya KTP?						
Ya (n=97)	48	98,0	49	98,0	97	98,0
Tidak (n=2)	1	2,0	1	2,0	2	2,0
LR15. Apakah KPMK punya KK?						
Ya (n=93)	43	87,8	50	100,0	93	93,9
Tidak (n=6)	6	12,2	0	0,0	6	6,1
LR16. Selain sebagai KPMK, apakah bekerja/membantu mencari pendapatan?						
Ya (n=82)	43	87,8	39	78,0	82	82,8
Tidak (n=17)	6	12,2	11	22,0	17	17,2
LR18. Lapangan usaha pekerjaan utama selain sebagai KPMK						
Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perburuan (n=39)	21	48,8	18	46,2	39	47,6
Industri pengolahan (n=1)	1	2,3	0	0,0	1	1,2
Konstruksi dan bangunan (n=6)	2	4,7	4	10,3	6	7,3
Perdagangan, akomodasi (n=9)	8	18,6	1	2,6	9	11,0
Transportasi (n=2)	1	2,3	1	2,6	2	2,4
Jasa (n=19)	9	20,9	10	25,6	19	23,2
Lainnya (n=6)	1	2,3	5	12,8	6	7,3
LR20. Apakah memiliki SK pengangkatan?						
Ya (n=53)	24	49,0	29	58,0	53	53,5
Tidak (n=46)	25	51,0	21	42,0	46	46,5

Buku KPMK Module LR

Tabel 1.3.1 Latar Belakang KPMK (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
LR21. Apakah I/B/S mendapat insentif KPMK?						
Ya (n=78)	38	77,6	40	80,0	78	78,8
Tidak (n=21)	11	22,4	10	20,0	21	21,2
LR22. Apakah I/B/S aktif di kegiatan kemasyarakatan?						
Ya (n=94)	47	95,9	47	94,0	94	94,9
Tidak (n=5)	2	4,1	3	6,0	5	5,1
LR23. Apa saja kegiatan kemasyarakatan yang I/B/S ikuti?						
LR23A. PKK						
Ya (n=19)	16	34,0	3	6,4	19	20,2
Tidak (n=75)	31	66,0	44	93,6	75	79,8
LR23B. PosYandu						
Ya (n=18)	12	25,5	6	12,8	18	19,1
Tidak (n=76)	35	74,5	41	87,2	76	80,9
LR23C. Kegiatan keagamaan						
Ya (n=84)	45	95,7	39	83,0	84	89,4
Tidak (n=10)	2	4,3	8	17,0	10	10,6
LR23D. Kegiatan kepemudaan						
Ya (n=57)	24	51,1	33	70,2	57	60,6
Tidak (n=37)	23	48,9	14	29,8	37	39,4
LR23E. Bamuskam						
Ya (n=34)	17	36,2	17	36,2	34	36,2
Tidak (n=60)	30	63,8	30	63,8	60	63,8
LR23F. Kegiatan kesenian & olah raga						
Ya (n=47)	25	53,2	22	46,8	47	50,0
Tidak (n=47)	22	46,8	25	53,2	47	50,0
LR23G. Kelompok tani/nelayan/pengrajin						
Ya (n=44)	24	51,1	20	42,6	44	46,8
Tidak (n=50)	23	48,9	27	57,4	50	53,2
LR23H. Ormas						
Ya (n=24)	9	19,1	15	31,9	24	25,5
Tidak (n=70)	38	80,9	32	68,1	70	74,5
LR23I. Partai						
Ya (n=7)	1	2,1	6	12,8	7	7,4
Tidak (n=87)	46	97,9	41	87,2	87	92,6
LR23V. Lainnya						
Ya (n=5)	4	8,5	1	2,1	5	5,3
Tidak (n=89)	43	91,5	46	97,9	89	94,7

Buku KPMK Module LR

Tabel 1.3.1 Latar Belakang KPMK (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
LR24. Apakah pernah menjadi perangkat kampung/bekerja di pemerintahan kampung?						
Ya (n=33)	23	46,9	10	20,0	33	33,3
Tidak (n=66)	26	53,1	40	80,0	66	66,7
LR25. Posisi terakhir di perangkat kampung						
Sekretaris kampung (n=9)	7	30,4	2	20,0	9	27,3
Kaur Perencanaan (n=2)	2	8,7	0	0,0	2	6,1
Kaur Keuangan (n=4)	3	13,0	1	10,0	4	12,1
Kasi Pemerintahan (n=4)	3	13,0	1	10,0	4	12,1
Kasi Kesejahteraan (n=3)	2	8,7	1	10,0	3	9,1
Kasi Pelayanan (n=1)	0	0,0	1	10,0	1	3,0
Perangkat kampung (n=1)	1	4,3	0	0,0	1	3,0
Kepala dusun (n=1)	1	4,3	0	0,0	1	3,0
Lainnya (n=8)	4	17,4	4	40,0	8	24,2

Buku KPMK Module LR

Tabel 1.3.1 Latar Belakang KPMK (Lanjutan)

Variabel	Lokasi			
	Non-KOMPAK		KOMPAK	
	Rerata	S.D.	Rerata	S.D.
LR05U. Umur KPMK (Tahun)	37,65	9,679	30,68	7,501
LR13N. Berapa orang yang tinggal di rumah KPMK? (Jumlah)	5,306	2,808	6,560	4,799
LR19Y. Lama bertugas sebagai KPMK (Tahun)	3,306	3,726	2,540	2,233
LR12T Jika tinggal di kampung survei, lama responden tinggal di sini (Tahun)	23,43	12,84	17,88	12,50
LR21RP. Insentif KPMK per bulan (Rupiah)	644.277	827.707	617.500	682.985

1.3.2 Seksi KR (Kesejahteraan Responden)

Tabel 1.3.2 Kesejahteraan KPMK

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
KR02. Apa status kepemilikan bangunan tempat tinggal I/B/S?						
Milik sendiri (n=79)	41	83,7	38	76,0	79	79,8
Kontrak/Sewa (n=2)	1	2,0	1	2,0	2	2,0
Bebas sewa (n=17)	7	14,3	10	20,0	17	17,2
Dinas (n=1)	0	0,0	1	2,0	1	1,0
KR03. Jenis material yang paling banyak digunakan untuk atap rumah I/B/S?						
Genteng (n=1)	1	2,0	0	0,0	1	1,0
Seng (n=97)	48	98,0	49	98,0	97	98,0
Ijuk/rumbia/alang-alang/gewang (n=1)	0	0,0	1	2,0	1	1,0
KR04. Jenis material yang paling banyak digunakan untuk dinding rumah I/B/S?						
Tembok (n=43)	20	40,8	23	46,0	43	43,4
Kayu (n=17)	8	16,3	9	18,0	17	17,2
Papan/bambu (n=38)	21	42,9	17	34,0	38	38,4
Lainnya (n=1)	0	0,0	1	2,0	1	1,0
KR05. Jenis material yang paling banyak digunakan untuk lantai rumah I/B/S?						
Marmer/keramik (n=25)	17	34,7	8	16,0	25	25,3
Ubin/tegel/teraso (n=6)	1	2,0	5	10,0	6	6,1
Plester/semen (n=35)	16	32,7	19	38,0	35	35,4
Kayu (n=4)	1	2,0	3	6,0	4	4,0
Papan/bambu/gewang (n=28)	14	28,6	14	28,0	28	28,3
Tanah (n=1)	0	0,0	1	2,0	1	1,0
KR06. Apakah rumah tangga I/B/S memiliki barang atau hewan ternak berikut?						
KR06.a. Mobil/mini bus/truk						
Ya (n=6)	6	12,2	0	0,0	6	6,1
Tidak (n=93)	43	87,8	50	100,0	93	93,9
KR06.b. Sepeda motor/vespa						
Ya (n=66)	35	71,4	31	62,0	66	66,7
Tidak (n=33)	14	28,6	19	38,0	33	33,3
KR06.c. Perahu bermotor						
Ya (n=15)	2	4,1	13	26,0	15	15,2
Tidak (n=84)	47	95,9	37	74,0	84	84,8
KR06.d. Perahu tanpa motor						
Ya (n=23)	6	12,2	17	34,0	23	23,2
Tidak (n=76)	43	87,8	33	66,0	76	76,8
KR06.e. Kerbau						
Ya (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tidak (n=99)	49	100,0	50	100,0	99	100,0
KR06.f. Sapi						
Ya (n=18)	16	32,7	2	4,0	18	18,2
Tidak (n=81)	33	67,3	48	96,0	81	81,8
KR06.g. Babi						
Ya (n=9)	4	8,2	5	10,0	9	9,1
Tidak (n=90)	45	91,8	45	90,0	90	90,9

Buku KPMK Module KR

Tabel 1.3.2 Kesejahteraan KPMK (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
	Kolom		Kolom		Kolom	
KR07. Apakah HH ini memiliki lahan pertanian dan/atau lahan non-pertanian?						
Ya (n=85)	42	85,7	43	86,0	85	85,9
Tidak (n=14)	7	14,3	7	14,0	14	14,1
KR09. Apakah ada bangunan di atas lahan tersebut?						
Ya (n=74)	36	85,7	38	88,4	74	87,1
Tidak (n=11)	6	14,3	5	11,6	11	12,9

Buku KPMK Module KR

Tabel 1.3.2 Kesejahteraan KPMK (Lanjutan)

Variabel	Lokasi			
	Non-KOMPAK		KOMPAK	
	Rerata	S.D.	Rerata	S.D.
KR01. Berapa luas lantai dari bangunan tempat tinggal I/B/S?	69,38	36,80	66,28	41,43
KR08. Luas lahan pertanian dan/atau lahan non-pertanian yang dimiliki? (Ha)	1,096	2,347	3,492	15,55

1.3.3 Seksi PM (Partisipasi Masyarakat)

Tabel 1.3.3 Partisipasi Masyarakat

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PM01. Selama setahun terakhir, apakah kampung mengadakan pertemuan tingkat kampung?						
Ya (n=85)	40	81,6	45	90,0	85	85,9
Tidak (n=13)	8	16,3	5	10,0	13	13,1
Tidak tahu (n=1)	1	2,0	0	0,0	1	1,0
PM05. Berapa kali pertemuan tingkat kampung dalam setahun terakhir?						
Ya (n=84)	40	100,0	44	97,8	84	98,8
Tidak tahu/Lupa (n=1)	0	0,0	1	2,2	1	1,2
PM06. Bila dibandingkan dng 2019, bagaimana frekuensi pertemuan tersebut?						
Lebih jarang (n=49)	26	65,0	23	51,1	49	57,6
Sama saja (n=11)	6	15,0	5	11,1	11	12,9
Lebih sering (n=18)	8	20,0	10	22,2	18	21,2
Tidak tahu (n=6)	0	0,0	6	13,3	6	7,1
Tidak berlaku (n=1)	0	0,0	1	2,2	1	1,2
PM06A. Selama setahun terakhir, apakah pernah diundang utk menghadiri pertemuan						
Ya (n=75)	36	90,0	39	86,7	75	88,2
Tidak (n=10)	4	10,0	6	13,3	10	11,8
PM07. Selama setahun terakhir, apakah pernah menghadiri pertemuan [PM06A]?						
Ya (n=72)	35	97,2	37	94,9	72	96,0
Tidak (n=3)	1	2,8	2	5,1	3	4,0
PM08. Dalam pertemuan tingkat kampung tersebut, apakah I/B/S [...]?						
PM08.a. Memberikan usulan kegiatan						
Ya (n=54)	29	82,9	25	67,6	54	75,0
Tidak (n=18)	6	17,1	12	32,4	18	25,0
PM08.b. Memberikan pendapat						
Ya (n=53)	28	80,0	25	67,6	53	73,6
Tidak (n=19)	7	20,0	12	32,4	19	26,4
PM08.c. Bertanya tentang program/kegiatan di kampung						
Ya (n=46)	21	60,0	25	67,6	46	63,9
Tidak (n=26)	14	40,0	12	32,4	26	36,1
PM08.d. Bertanya tentang target program/kegiatan kampung						
Ya (n=39)	18	51,4	21	56,8	39	54,2
Tidak (n=33)	17	48,6	16	43,2	33	45,8
PM08.e. Bertanya tentang dana/anggaran						
Ya (n=34)	22	62,9	12	32,4	34	47,2
Tidak (n=38)	13	37,1	25	67,6	38	52,8
PM08.f. Ikut mengambil suara untuk memutuskan						
Ya (n=50)	26	74,3	24	64,9	50	69,4
Tidak (n=22)	9	25,7	13	35,1	22	30,6
PM08.g. Ikut memfasilitasi pertemuan						
Ya (n=47)	24	68,6	23	62,2	47	65,3
Tidak (n=25)	11	31,4	14	37,8	25	34,7
PM08.h. Memberikan laporan						
Ya (n=49)	25	71,4	24	64,9	49	68,1
Tidak (n=23)	10	28,6	13	35,1	23	31,9

Tabel 1.3.3 Partisipasi Masyarakat (Lanjutan)

Variabel	Lokasi			
	Non-KOMPAK		KOMPAK	
	Rerata	S.D.	Rerata	S.D.
PM05N. Berapa kali pertemuan tingkat kampung dalam setahun terakhir? [JUMLAH]	3,375	3,920	2,205	1,825

1.3.4 Seksi IK (Sistem Informasi Kampung)

Tabel 1.3.4 Sistem Informasi Kampung

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
IK01. Apakah kampung ini sudah memiliki Sistem Informasi Kampung/SIK?						
Ya (n=84)	35	71,4	49	98,0	84	84,8
Tidak (n=15)	14	28,6	1	2,0	15	15,2
IK02. Sistem informasi Kampung/SIK apa yang digunakan oleh kampung ini?						
IK02.a. SAIK MODEL LAMA						
(n=72)	35	100,0	37	75,5	72	85,7
Ya (n=12)	0	0,0	12	24,5	12	14,3
IK02.b. SAIK+						
(n=53)	25	71,4	28	57,1	53	63,1
Ya (n=31)	10	28,6	21	42,9	31	36,9
IK02.c. SIO PAPUA						
(n=55)	35	100,0	20	40,8	55	65,5
Ya (n=29)	0	0,0	29	59,2	29	34,5
IK02.d. PRODESKEL						
(n=79)	31	88,6	48	98,0	79	94,0
Ya (n=5)	4	11,4	1	2,0	5	6,0
IK02.e. SID/SIK KEMENDES?						
(n=70)	33	94,3	37	75,5	70	83,3
Ya (n=14)	2	5,7	12	24,5	14	16,7
IK02.v. Lainnya						
(n=57)	11	31,4	46	93,9	57	67,9
Ya (n=27)	24	68,6	3	6,1	27	32,1
IK03. Apakah SIK mengumpulkan data sebagai berikut?						
IK03.a. Penduduk berdasarkan jenis kelamin						
Ya (n=58)	10	100,0	48	98,0	58	98,3
Tidak (n=1)	0	0,0	1	2,0	1	1,7
IK03.b. Penduduk OAP dan Non-OAP						
Ya (n=54)	9	90,0	45	91,8	54	91,5
Tidak (n=5)	1	10,0	4	8,2	5	8,5
IK03.c. Penduduk dengan disabilitas						
Ya (n=52)	6	60,0	46	93,9	52	88,1
Tidak (n=7)	4	40,0	3	6,1	7	11,9
IK03.d. Data kemiskinan						
Ya (n=48)	7	70,0	41	83,7	48	81,4
Tidak (n=11)	3	30,0	8	16,3	11	18,6
IK03.e. Data kepemilikan adminduk						
Ya (n=56)	9	90,0	47	95,9	56	94,9
Tidak (n=3)	1	10,0	2	4,1	3	5,1

Buku KPMK Module IK

Tabel 1.3.4 Sistem Informasi Kampung (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
IK03A. Sampai mana tahapan proses pendataan di kampung ini?						
Baru mulai pendataan (n=3)	1	10,0	2	4,1	3	5,1
Sedang dalam proses pendataan (n=6)	3	30,0	3	6,1	6	10,2
Sudah selesai pendataan tapi belum diinput (n=2)	0	0,0	2	4,1	2	3,4
Sudah selesai pendataan dan diinput sebagian (n=26)	5	50,0	21	42,9	26	44,1
Sudah selesai pendataan dan diinput lengkap (n=17)	1	10,0	16	32,7	17	28,8
Lainnya (n=5)	0	0,0	5	10,2	5	8,5
IK04 Apakah kampung menggunakan data yang dikumpulkan?						
Ya (n=37)	6	100,0	31	79,5	37	82,2
Tidak (n=8)	0	0,0	8	20,5	8	17,8
IK05. Data apa saja yang digunakan?						
IK05.a. Data berdasarkan jenis kelamin						
Ya (n=31)	6	100,0	25	80,6	31	83,8
Tidak (n=6)	0	0,0	6	19,4	6	16,2
IK05.b. Data OAP						
Ya (n=32)	5	83,3	27	87,1	32	86,5
Tidak (n=5)	1	16,7	4	12,9	5	13,5
IK05.c. Data disabilitas						
Ya (n=28)	5	83,3	23	74,2	28	75,7
Tidak (n=9)	1	16,7	8	25,8	9	24,3
IK05.d. Data kemiskinan						
Ya (n=29)	5	83,3	24	77,4	29	78,4
Tidak (n=8)	1	16,7	7	22,6	8	21,6
IK05.e. Data adminduk						
Ya (n=33)	6	100,0	27	87,1	33	89,2
Tidak (n=4)	0	0,0	4	12,9	4	10,8
IK05.v. Data lainnya						
Ya (n=7)	0	0,0	7	22,6	7	18,9
Tidak (n=30)	6	100,0	24	77,4	30	81,1

Buku KPMK Module IK

Tabel 1.3.4 Sistem Informasi Kampung (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
	Kolom	Kolom	Kolom	Kolom	Kolom	Kolom
IK06. Untuk hal apa saja penggunaan data kampung tersebut?						
IK06.a. Sebagai dasar penyusunan perencanaan kampung						
(n=9)	2	33,3	7	22,6	9	24,3
Ya (n=28)	4	66,7	24	77,4	28	75,7
IK06.b. Sebagai dasar penyusunan penganggaran apbk						
(n=12)	3	50,0	9	29,0	12	32,4
Ya (n=25)	3	50,0	22	71,0	25	67,6
IK06.c. Untuk keperluan pelaporan						
(n=6)	1	16,7	5	16,1	6	16,2
Ya (n=31)	5	83,3	26	83,9	31	83,8
IK06.d. Untuk mengidentifikasi penerima bantuan						
(n=3)	2	33,3	1	3,2	3	8,1
Ya (n=34)	4	66,7	30	96,8	34	91,9
IK06.e. Untuk menentukan target program						
(n=8)	0	0,0	8	25,8	8	21,6
Ya (n=29)	6	100,0	23	74,2	29	78,4
IK06.f. Untuk mendukung pelayanan dokumen adminduk						
(n=6)	0	0,0	6	19,4	6	16,2
Ya (n=31)	6	100,0	25	80,6	31	83,8
IK06.g. Koordinasi dan perencanaan penanggulangan c19						
(n=13)	5	83,3	8	25,8	13	35,1
Ya (n=24)	1	16,7	23	74,2	24	64,9
IK06.v. Lainnya						
(n=36)	6	100,0	30	96,8	36	97,3
Ya (n=1)	0	0,0	1	3,2	1	2,7
IK07. Apakah data SIK diupdate secara rutin?						
Ya (n=28)	3	50,0	25	64,1	28	62,2
Tidak (n=17)	3	50,0	14	35,9	17	37,8

Buku KPMK Module IK

Tabel 1.3.4 Sistem Informasi Kampung (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
IK07A.a. Mengapa data SIK tidak di-update secara rutin?						
IK07A.a. Masalah dengan jaringan/sinyal internet						
Ya (n=7)	3	6,1	4	8,0	7	7,1
Tidak (n=92)	46	93,9	46	92,0	92	92,9
IK07A.b. Data belum lengkap diinput						
Ya (n=3)	3	6,1	0	0,0	3	3,0
Tidak (n=96)	46	93,9	50	100,0	96	97,0
IK07A.c. Ada masalah dengan aplikasi						
Ya (n=1)	1	2,0	0	0,0	1	1,0
Tidak (n=98)	48	98,0	50	100,0	98	99,0
IK07A.d. Tidak ada waktu						
Ya (n=2)	1	2,0	1	2,0	2	2,0
Tidak (n=97)	48	98,0	49	98,0	97	98,0
IK07A.v. Alasan lainnya						
Ya (n=13)	0	0,0	13	26,0	13	13,1
Tidak (n=86)	49	100,0	37	74,0	86	86,9
IK09. Siapa yang melakukan pemutakhiran/update data?						
IK09.a. Operator data di kampung						
Ya (n=10)	1	33,3	9	36,0	10	35,7
Tidak (n=18)	2	66,7	16	64,0	18	64,3
IK09.b. Sekretaris kampung						
Ya (n=11)	1	33,3	10	40,0	11	39,3
Tidak (n=17)	2	66,7	15	60,0	17	60,7
IK09.c. Kaur perencanaan						
Ya (n=1)	0	0,0	1	4,0	1	3,6
Tidak (n=27)	3	100,0	24	96,0	27	96,4
IK09.d. Kaur TU/Umum						
Ya (n=1)	0	0,0	1	4,0	1	3,6
Tidak (n=27)	3	100,0	24	96,0	27	96,4
IK09.e. Kasi pemerintahan						
Ya (n=3)	0	0,0	3	12,0	3	10,7
Tidak (n=25)	3	100,0	22	88,0	25	89,3
IK09.f. Kasi pelayanan						
Ya (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tidak (n=28)	3	100,0	25	100,0	28	100,0
IK09.g. KPMK						
Ya (n=27)	3	100,0	24	96,0	27	96,4
Tidak (n=1)	0	0,0	1	4,0	1	3,6
IK09.v. Lainnya						
Ya (n=4)	0	0,0	4	16,0	4	14,3
Tidak (n=24)	3	100,0	21	84,0	24	85,7

Buku KPMK Module IK

Tabel 1.3.4 Sistem Informasi Kampung (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
IK010. Apakah terdapat alokasi anggaran kampung untuk SIK?						
Ya (n=65)	33	94,3	32	65,3	65	77,4
Tidak (n=14)	1	2,9	13	26,5	14	16,7
Tidak tahu (n=5)	1	2,9	4	8,2	5	6,0
IK10A. Dari mana sumber pendanaan untuk alokasi sistem informasi kampung tersebut?						
IK10A.a PROSPPEK						
Ya (n=10)	2	6,1	8	25,0	10	15,4
Tidak (n=55)	31	93,9	24	75,0	55	84,6
IK10A.b. OTSUS						
Ya (n=16)	10	30,3	6	18,8	16	24,6
Tidak (n=49)	23	69,7	26	81,3	49	75,4
IK10A.c. Dana kampung						
Ya (n=46)	18	54,5	28	87,5	46	70,8
Tidak (n=19)	15	45,5	4	12,5	19	29,2
IK10A.d. Bantuan keuangan dari kabupaten						
Ya (n=4)	4	12,1	0	0,0	4	6,2
Tidak (n=61)	29	87,9	32	100,0	61	93,8
IK10A.e. Bantuan keuangan dari provinsi						
Ya (n=3)	2	6,1	1	3,1	3	4,6
Tidak (n=62)	31	93,9	31	96,9	62	95,4
IK10A.f. Lainnya						
Ya (n=5)	3	9,1	2	6,3	5	7,7
Tidak (n=60)	30	90,9	30	93,8	60	92,3
IK10A.g. Tidak tahu						
Ya (n=4)	4	12,1	0	0,0	4	6,2
Tidak (n=61)	29	87,9	32	100,0	61	93,8
IK11. Selama setahun terakhir, apakah ada pendampingan dari pemerintah distrik?						
Ya (n=36)	8	80,0	28	57,1	36	61,0
Tidak (n=23)	2	20,0	21	42,9	23	39,0
IK12. Selama setahun terakhir, apakah ada pendampingan dari kabupaten?						
Ya (n=31)	7	70,0	24	49,0	31	52,5
Tidak (n=28)	3	30,0	25	51,0	28	47,5
IK13. Apakah ada panduan tertulis SIK (SAIK/SAIK+/SIO Papua)?						
Ya (n=41)	8	80,0	33	67,3	41	69,5
Tidak (n=16)	2	20,0	14	28,6	16	27,1
Tidak tahu (n=2)	0	0,0	2	4,1	2	3,4

Buku KPMK Module IK

1.3.5 Seksi PD (Pendampingan Distrik/Kecamatan dan Kabupaten)

Tabel 1.3.5 Pendampingan Kabupaten/Distrik

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PD01. Dalam satu tahun terakhir, pernah bertemu dengan pemerintah kabupaten?						
Ya (n=66)	34	69,4	32	64,0	66	66,7
Tidak (n=33)	15	30,6	18	36,0	33	33,3
PD02. Bila dibandingkan dengan 2019, bagaimana frekuensi pertemuan dengan PEMKAB?						
Lebih jarang (n=33)	19	55,9	14	43,8	33	50,0
Sama saja (n=6)	3	8,8	3	9,4	6	9,1
Lebih sering (n=13)	7	20,6	6	18,8	13	19,7
Tidak berlaku (n=11)	3	8,8	8	25,0	11	16,7
Tidak tahu (n=3)	2	5,9	1	3,1	3	4,5
PD03. Dengan bidang/dinas/bagian apa saja I/B/S bertemu?						
PD03a. Bupati/wakil bupati						
Ya (n=7)	6	17,6	1	3,1	7	10,6
Tidak (n=59)	28	82,4	31	96,9	59	89,4
PD03b. Unit keuangan daerah						
Ya (n=6)	4	11,8	2	6,3	6	9,1
Tidak (n=60)	30	88,2	30	93,8	60	90,9
PD03c. Unit pendapatan daerah						
Ya (n=4)	2	5,9	2	6,3	4	6,1
Tidak (n=62)	32	94,1	30	93,8	62	93,9
PD03d. Unit pengembangan kampung						
Ya (n=12)	6	17,6	6	18,8	12	18,2
Tidak (n=54)	28	82,4	26	81,3	54	81,8
PD03e. Dinas Pendidikan						
Ya (n=14)	5	14,7	9	28,1	14	21,2
Tidak (n=52)	29	85,3	23	71,9	52	78,8
PD03f. Dinas Kesehatan						
Ya (n=27)	14	41,2	13	40,6	27	40,9
Tidak (n=39)	20	58,8	19	59,4	39	59,1
PD03g. BPMK						
Ya (n=34)	14	41,2	20	62,5	34	51,5
Tidak (n=32)	20	58,8	12	37,5	32	48,5
PD03h. DPRD						
Ya (n=8)	7	20,6	1	3,1	8	12,1
Tidak (n=58)	27	79,4	31	96,9	58	87,9
PD03v. Lainnya						
Ya (n=31)	21	61,8	10	31,3	31	47,0
Tidak (n=35)	13	38,2	22	68,8	35	53,0

Buku KPMK Module PD

Tabel 1.3.5 Pendampingan Kabupaten/Distrik (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PD04. Topik apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut						
PD04a. Program bantuan						
Ya (n=29)	17	50,0	12	37,5	29	43,9
Tidak (n=37)	17	50,0	20	62,5	37	56,1
PD04b. RPJMK						
Ya (n=21)	9	26,5	12	37,5	21	31,8
Tidak (n=45)	25	73,5	20	62,5	45	68,2
PD04c. APBK						
Ya (n=20)	8	23,5	12	37,5	20	30,3
Tidak (n=46)	26	76,5	20	62,5	46	69,7
PD04d. Dana kampung						
Ya (n=28)	13	38,2	15	46,9	28	42,4
Tidak (n=38)	21	61,8	17	53,1	38	57,6
PD04e. Pajak daerah & retribusi daerah						
Ya (n=9)	6	17,6	3	9,4	9	13,6
Tidak (n=57)	28	82,4	29	90,6	57	86,4
PD04f. Kondisi terkini terkait covid19						
Ya (n=34)	18	52,9	16	50,0	34	51,5
Tidak (n=32)	16	47,1	16	50,0	32	48,5
PD04g. Permasalahan yang ada di kampung						
Ya (n=40)	20	58,8	20	62,5	40	60,6
Tidak (n=26)	14	41,2	12	37,5	26	39,4
PD04v. Lainnya						
Ya (n=27)	14	41,2	13	40,6	27	40,9
Tidak (n=39)	20	58,8	19	59,4	39	59,1
PD05. Dalam satu tahun terakhir, pernah bertemu dengan pemerintah distrik?						
Ya (n=64)	31	63,3	33	66,0	64	64,6
Tidak (n=35)	18	36,7	17	34,0	35	35,4
PD06. Bila dibandingkan dengan 2019, bagaimana frekuensi pertemuan dengan distrik?						
Lebih jarang (n=29)	17	56,7	12	37,5	29	46,8
Sama saja (n=12)	7	23,3	5	15,6	12	19,4
Lebih sering (n=13)	6	20,0	7	21,9	13	21,0
Tidak berlaku (n=8)	0	0,0	8	25,0	8	12,9

Buku KPMK Module PD

Tabel 1.3.5 Pendampingan Kabupaten/Distrik (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PD07. Topik apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut						
PD07a. Program bantuan						
Ya (n=29)	16	53,3	13	40,6	29	46,8
Tidak (n=33)	14	46,7	19	59,4	33	53,2
PD07b. RPJMK						
Ya (n=24)	12	40,0	12	37,5	24	38,7
Tidak (n=38)	18	60,0	20	62,5	38	61,3
PD07c. APBK						
Ya (n=26)	11	36,7	15	46,9	26	41,9
Tidak (n=36)	19	63,3	17	53,1	36	58,1
PD07d. Dana kampung						
Ya (n=35)	18	60,0	17	53,1	35	56,5
Tidak (n=27)	12	40,0	15	46,9	27	43,5
PD07e. Pajak daerah & retribusi daerah						
Ya (n=10)	8	26,7	2	6,3	10	16,1
Tidak (n=52)	22	73,3	30	93,8	52	83,9
PD07f. Kondisi terkini terkait covid19						
Ya (n=33)	16	53,3	17	53,1	33	53,2
Tidak (n=29)	14	46,7	15	46,9	29	46,8
PD07g. Permasalahan yang ada di kampung						
Ya (n=38)	17	56,7	21	65,6	38	61,3
Tidak (n=24)	13	43,3	11	34,4	24	38,7
PD07v. Lainnya						
Ya (n=19)	10	33,3	9	28,1	19	30,6
Tidak (n=43)	20	66,7	23	71,9	43	69,4
PD09. Dalam setahun terakhir, apakah pemerintah kampung menerima BINWAS dari distrik?						
Ya (n=26)	13	26,5	13	26,0	26	26,3
Tidak (n=73)	36	73,5	37	74,0	73	73,7
PD10. Apakah kampung menerima pendampingan teknis dari distrik terkait hal berikut?						
PD10a. Perencanaan & penganggaran kampung (RPJMK, RKPK, APBK, Siskeudes)						
Ya (n=22)	9	69,2	13	92,9	22	81,5
Tidak (n=5)	4	30,8	1	7,1	5	18,5
PD10b. Perencanaan & penganggaran kampung yang inklusif (melibatkan kelompok masyarakat rentan)						
Ya (n=17)	8	61,5	9	64,3	17	63,0
Tidak (n=10)	5	38,5	5	35,7	10	37,0
PD10c. Pengelolaan Sistem Informasi Kampung (SAIK+, SIO Papua)						
Ya (n=19)	6	46,2	13	92,9	19	70,4
Tidak (n=8)	7	53,8	1	7,1	8	29,6
PD10d. Layanan pengajuan adminduk						
Ya (n=19)	7	53,8	12	85,7	19	70,4
Tidak (n=8)	6	46,2	2	14,3	8	29,6
PD10e. Sosialisasi dan bimtek program prioritas Otsus						
Ya (n=19)	8	61,5	11	78,6	19	70,4
Tidak (n=8)	5	38,5	3	21,4	8	29,6

Tabel 1.3.5 Pendampingan Kabupaten/Distrik (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PD10f. Koordinasi dan perencanaan kegiatan penanggulangan covid 19						
Ya (n=25)	11	84.6	14	100.0	25	92.6
Tidak (n=2)	2	15.4	0	0.0	2	7.4
PD10g. Pelaksanaan BLT DD						
Ya (n=26)	12	92.3	14	100.0	26	96.3
Tidak (n=1)	1	7.7	0	0.0	1	3.7
PD10h. Mekanisme akuntabilitas sosial (mekanisme penanganan aduan, klinik kampung, dll)						
Ya (n=15)	6	46.2	9	64.3	15	55.6
Tidak (n=12)	7	53.8	5	35.7	12	44.4
PD10i. Sosialisasi kebijakan SDG's kampung						
Ya (n=21)	11	84.6	10	71.4	21	77.8
Tidak (n=6)	2	15.4	4	28.6	6	22.2
PD10j. Peningkatan kapasitas kampung dalam melakukan pembelajaran mandiri						
Ya (n=16)	8	61.5	8	57.1	16	59.3
Tidak (n=11)	5	38.5	6	42.9	11	40.7
PD11.a. Dalam satu tahun terakhir, apakah I/B/S pernah bertemu dengan Korkab LANDASAN?						
YA (n=44)	0	0,0	44	88,0	44	88,0
Tidak (n=5)	0	0,0	5	10,0	5	10,0
Tidak tahu/lupa (n=1)	0	0,0	1	2,0	1	2,0
PD11A.a. Dibandingkan dengan 2019, bagaimana frekuensi pertemuan dengan Korkab LANDASAN?						
Lebih jarang (n=17)	0	0,0	17	37,8	17	37,8
Sama saja (n=3)	0	0,0	3	6,7	3	6,7
Lebih sering (n=16)	0	0,0	16	35,6	16	35,6
Tidak tahu (n=9)	0	0,0	9	20,0	9	20,0
PD12.a. Dalam pertemuan dengan Korkab LANDASAN, apakah membicarakan topik berikut?						
PD12.a.a. Sinergi perencanaan kampung dengan unit layanan						
Ya (n=22)	0	0,0	22	48,9	22	48,9
Tidak (n=23)	0	0,0	23	51,1	23	51,1
PD12.a.b. Pengumpulan data SAIK/SIO Papua						
Ya (n=39)	0	0,0	39	86,7	39	86,7
Tidak (n=6)	0	0,0	6	13,3	6	13,3
PD12.a.c. Penginputan data SAIK/SIO Papua						
Ya (n=40)	0	0,0	40	88,9	40	88,9
Tidak (n=5)	0	0,0	5	11,1	5	11,1
PD12.a.d. Penyusunan dokumen pembangunan kampung						
Ya (n=22)	0	0,0	22	48,9	22	48,9
Tidak (n=23)	0	0,0	23	51,1	23	51,1
PD12.a.e. Peningkatan pelayanan adminduk						
Ya (n=22)	0	0,0	22	48,9	22	48,9
Tidak (n=23)	0	0,0	23	51,1	23	51,1
PD12.a.f. Program prioritas Otsus						
Tidak (n=27)	0	0,0	27	60,0	27	60,0
Ya (n=18)	0	0,0	18	40,0	18	40,0

Buku KPMK Module PD

Tabel 1.3.5 Pendampingan Kabupaten/Distrik (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PD12.a.g. Upaya penganggulangan Covid-19						
Ya (n=19)	0	0,0	19	42,2	19	42,2
Tidak (n=26)	0	0,0	26	57,8	26	57,8
PD12.a.v. Topik lainnya						
Ya (n=4)	0	0,0	4	8,9	4	8,9
Tidak (n=41)	0	0,0	41	91,1	41	91,1
PD11.b. Dalam satu tahun terakhir, apakah I/B/S pernah bertemu dengan fasilitator sinergi perencanaan kabupaten?						
Ya (n=14)	0	0,0	14	28,0	14	28,0
Tidak (n=34)	0	0,0	34	68,0	34	68,0
Tidak tahu/lupa (n=2)	0	0,0	2	4,0	2	4,0
PD12.b. Dalam pertemuan dengan fasilitator sinergi perencanaan kabupaten, apakah membicarakan topik berikut?						
PD12.b.a. Sinergi perencanaan kampung dengan unit layanan						
Ya (n=6)	0	0,0	6	37,5	6	37,5
Tidak (n=10)	0	0,0	10	62,5	10	62,5
PD12.b.b Pengumpulan data SAIK/SIOPapua						
Ya (n=15)	0	0,0	15	93,8	15	93,8
Tidak (n=1)	0	0,0	1	6,3	1	6,3
PD12.b.c. Penginputan data SAIK/SIO Papua						
Ya (n=14)	0	0,0	14	87,5	14	87,5
Tidak (n=2)	0	0,0	2	12,5	2	12,5
PD12.b.d. Penyusunan dokumen pembangunan kampung						
Ya (n=8)	0	0,0	8	50,0	8	50,0
Tidak (n=8)	0	0,0	8	50,0	8	50,0
PD12.b.e Peningkatan pelayanan adminduk						
Ya (n=11)	0	0,0	11	68,8	11	68,8
Tidak (n=5)	0	0,0	5	31,3	5	31,3
PD12.b.f. Program prioritas Otsus						
Ya (n=8)	0	0,0	8	50,0	8	50,0
Tidak (n=8)	0	0,0	8	50,0	8	50,0
PD12.b.g. Upaya penanggulangan Covid-19						
Ya (n=10)	0	0,0	10	62,5	10	62,5
Tidak (n=6)	0	0,0	6	37,5	6	37,5
PD12.b.v. Topik lainnya						
Ya (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tidak (n=16)	0	0,0	16	100,0	16	100,0

Buku KPMK Module PD

Tabel 1.3.5 Pendampingan Kabupaten/Distrik (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PD11.c. Dalam satu tahun terakhir, apakah I/B/S pernah bertemu dengan Korcam LANDASAN?						
Ya (n=43)	0	0,0	43	86,0	43	86,0
Tidak (n=5)	0	0,0	5	10,0	5	10,0
Tidak tahu/lupa (n=2)	0	0,0	2	4,0	2	4,0
PD11A.c. Bila dibandingkan dengan 2019, bagaimana frekuensi pertemuan dengan Korcam LANDASAN?						
Lebih jarang (n=15)	0	0,0	15	33,3	15	33,3
Sama saja (n=8)	0	0,0	8	17,8	8	17,8
Lebih sering (n=12)	0	0,0	12	26,7	12	26,7
Tidak tahu (n=10)	0	0,0	10	22,2	10	22,2
PD12.c. Dalam pertemuan dengan Korcam LANDASAN, apakah membicarakan topik berikut?						
PD12.c.a. Sinergi perencanaan kampung dengan unit layanan						
Ya (n=18)	0	0,0	18	40,0	18	40,0
Tidak (n=27)	0	0,0	27	60,0	27	60,0
PD12.c.b. Pengumpulan data SAIK/SIO Papua						
Ya (n=42)	0	0,0	42	93,3	42	93,3
Tidak (n=3)	0	0,0	3	6,7	3	6,7
PD12.c.c. Penginputan data SAIK/SIO Papua						
Ya (n=41)	0	0,0	41	91,1	41	91,1
Tidak (n=4)	0	0,0	4	8,9	4	8,9
PD12.c.d. Penyusunan dokumen pembangunan kampung						
Ya (n=22)	0	0,0	22	48,9	22	48,9
Tidak (n=23)	0	0,0	23	51,1	23	51,1
PD12.c.e. Peningkatan pelayanan adminduk						
Ya (n=23)	0	0,0	23	51,1	23	51,1
Tidak (n=22)	0	0,0	22	48,9	22	48,9
PD12.c.f. Program prioritas Otsus						
Ya (n=15)	0	0,0	15	33,3	15	33,3
Tidak (n=30)	0	0,0	30	66,7	30	66,7
PD12.c.g. Upaya penanggulangan Covid 19						
Ya (n=17)	0	0,0	17	37,8	17	37,8
Tidak (n=28)	0	0,0	28	62,2	28	62,2
PD12.c.v. Topik lainnya						
Ya (n=4)	0	0,0	4	8,9	4	8,9
Tidak (n=41)	0	0,0	41	91,1	41	91,1

Buku KPMK Module PD

Tabel 1.3.5 Pendampingan Kabupaten/Distrik (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PD11.d. Dalam satu tahun terakhir, apakah I/B/S pernah bertemu dengan fasilitator sinergi perencanaan distrik?						
Ya (n=13)	0	0,0	13	26,0	13	26,0
Tidak (n=35)	0	0,0	35	70,0	35	70,0
Tidak tahu/lupa (n=2)	0	0,0	2	4,0	2	4,0
PD12.d. Dalam pertemuan dengan fasilitator sinergi perencanaan distrik, apakah membicarakan topik berikut?						
PD12.d.a Sinergi perencanaan kampung dengan unit layanan						
Ya (n=5)	0	0,0	5	33,3	5	33,3
Tidak (n=10)	0	0,0	10	66,7	10	66,7
PD12.d.b. Pengumpulan data SAIK/SIO Papua						
Ya (n=13)	0	0,0	13	86,7	13	86,7
Tidak (n=2)	0	0,0	2	13,3	2	13,3
PD12.d.c. Penginputan data SAIK/SIO Papua						
Ya (n=13)	0	0,0	13	86,7	13	86,7
Tidak (n=2)	0	0,0	2	13,3	2	13,3
PD12.d.d. Penyusunan dokumen pembangunan kampung						
Ya (n=5)	0	0,0	5	33,3	5	33,3
Tidak (n=10)	0	0,0	10	66,7	10	66,7
PD12.d.e. Peningkatan pelayanan adminduk						
Ya (n=5)	0	0,0	5	33,3	5	33,3
Tidak (n=10)	0	0,0	10	66,7	10	66,7
PD12.d.f. Program prioritas Otsus						
Ya (n=6)	0	0,0	6	40,0	6	40,0
Tidak (n=9)	0	0,0	9	60,0	9	60,0
PD12.d.g. Upaya penanggulangan Covid 19						
Ya (n=6)	0	0,0	6	40,0	6	40,0
Tidak (n=9)	0	0,0	9	60,0	9	60,0
PD12.d.v. Topik Lainnya						
Ya (n=2)	0	0,0	2	13,3	2	13,3
Tidak (n=13)	0	0,0	13	86,7	13	86,7

Buku KPMK Module PD

Tabel 1.3.5 Pendampingan Kabupaten/Distrik (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PD12A. Apakah kampung sudah melakukan penyesuaian dokumen sinergi perencanaan dengan unit layanan?						
Ya (n=47)	21	42,9	26	52,0	47	47,5
Tidak (n=52)	28	57,1	24	48,0	52	52,5
PD13. Dokumen Sinergi Perencanaan apa saja yang telah disesuaikan?						
PD13.a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK)						
Ya (n=40)	18	85,7	22	84,6	40	85,1
Tidak (n=7)	3	14,3	4	15,4	7	14,9
PD13.b. Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK)						
Ya (n=35)	15	71,4	20	76,9	35	74,5
Tidak (n=12)	6	28,6	6	23,1	12	25,5
PD13.c. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Puskesmas						
Ya (n=32)	13	61,9	19	73,1	32	68,1
Tidak (n=15)	8	38,1	7	26,9	15	31,9
PD13.d. Rencana Kerja Sekolah (RKS)						
Ya (n=24)	9	42,9	15	57,7	24	51,1
Tidak (n=23)	12	57,1	11	42,3	23	48,9
PD13.e. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)						
Ya (n=22)	9	42,9	13	50,0	22	46,8
Tidak (n=25)	12	57,1	13	50,0	25	53,2
PD13.f. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekolah Dasar						
Ya (n=15)	6	28,6	9	34,6	15	31,9
Tidak (n=32)	15	71,4	17	65,4	32	68,1
PD13.v. Dokumen lainnya						
Ya (n=4)	4	19,0	0	0,0	4	8,5
Tidak (n=43)	17	81,0	26	100,0	43	91,5

Buku KPMK Module PD

Tabel 1.3.5 Pendampingan Kabupaten/Distrik (Lanjutan)

Variabel	Lokasi			
	Non-KOMPAK		KOMPAK	
	Rerata	S.D.	Rerata	S.D.
PD01N. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali pernah bertemu dengan pemerintah kabupaten?	4,059	6,569	2,563	2,139
PD05N. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali pernah bertemu dengan pemerintah distrik?	6,097	14,02	3,667	4,505
PD11_AN. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali I/B/S pernah bertemu dengan KORKAB LANDASAN?	-	-	7,773	18,06
PD11BN. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali I/B/S pernah bertemu dengan FASILITATOR SINERGI PERENCANAAN KABUPATEN?	-	-	1,429	0,756
PD11CN. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali I/B/S pernah bertemu dengan KORCAM LANDASAN?	-	-	12	24,03
PD11DN. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali I/B/S pernah bertemu dengan FASILITATOR SINERGI PERENCANAAN DISTRIK?	-	-	2,692	3,066

1.3.6 Seksi PK (Peningkatan Kapasitas)

Tabel 1.3.6 Peningkatan Kapasitas

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PK01. Selama 1 tahun terakhir, apakah I/B/S pernah mengikuti pelatihan?						
Ya (n=74)	33	67,3	41	82,0	74	74,7
Tidak (n=24)	16	32,7	8	16,0	24	24,2
Tidak tahu (n=1)	0	0,0	1	2,0	1	1,0
PK02. Pelatihan apa yang I/B/S ikuti dalam setahun terakhir?						
PK02.a. Pengelolaan keuangan kampung						
Ya (n=23)	13	39,4	10	23,8	23	30,7
Tidak (n=52)	20	60,6	32	76,2	52	69,3
PK02.b. Penulisan laporan kampung						
Ya (n=29)	15	45,5	14	33,3	29	38,7
Tidak (n=46)	18	54,5	28	66,7	46	61,3
PK02.c. Pembuatan peraturan kampung						
Ya (n=14)	4	12,1	10	23,8	14	18,7
Tidak (n=61)	29	87,9	32	76,2	61	81,3
PK02.d. Pengelolaan data kampung						
Ya (n=54)	24	72,7	30	71,4	54	72,0
Tidak (n=21)	9	27,3	12	28,6	21	28,0
PK02.e. Penanganan konflik						
Ya (n=9)	4	12,1	5	11,9	9	12,0
Tidak (n=66)	29	87,9	37	88,1	66	88,0
PK02.f. Tata kelola pemerintahan						
Ya (n=18)	10	30,3	8	19,0	18	24,0
Tidak (n=57)	23	69,7	34	81,0	57	76,0
PK02.g. Kesetaraan gender						
Ya (n=12)	4	12,1	8	19,0	12	16,0
Tidak (n=63)	29	87,9	34	81,0	63	84,0
PK02.h. Pengumpulan data						
Ya (n=57)	23	69,7	34	81,0	57	76,0
Tidak (n=18)	10	30,3	8	19,0	18	24,0
PK02.v. Pelatihan lainnya						
Ya (n=20)	13	39,4	7	16,7	20	26,7
Tidak (n=55)	20	60,6	35	83,3	55	73,3
PK03. Siapa pemberi materi dalam pelatihan yang I/B/S ikuti?						
PK03.a Pemerintah kabupaten						
Ya (n=51)	28	84,8	23	54,8	51	68,0
Tidak (n=24)	5	15,2	19	45,2	24	32,0
PK03.b. Pemerintah distrik						
Ya (n=23)	11	33,3	12	28,6	23	30,7
Tidak (n=52)	22	66,7	30	71,4	52	69,3
PK03.c. Pelaku program KOMPAK (LANDASAN, SAIK, SAIK+)						
Ya (n=49)	11	33,3	38	90,5	49	65,3
Tidak (n=26)	22	66,7	4	9,5	26	34,7

Buku KPMK Module PK

Tabel 1.3.6 Peningkatan Kapasitas (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PK03.d. Akademisi/Universitas						
Ya (n=2)	1	3,0	1	2,4	2	2,7
Tidak (n=73)	32	97,0	41	97,6	73	97,3
PK03.e. Organisasi/Lembaga level kabupaten-pusat						
Ya (n=9)	4	12,1	5	11,9	9	12,0
Tidak (n=66)	29	87,9	37	88,1	66	88,0
PK03.v. Pihak lainnya						
Ya (n=10)	7	21,2	3	7,1	10	13,3
Tidak (n=65)	26	78,8	39	92,9	65	86,7
PK04. Selama setahun terakhir, apakah pernah mendapatkan pelatihan dari program LANDASAN?						
Ya (n=41)	2	4,1	39	78,0	41	41,4
Tidak (n=50)	40	81,6	10	20,0	50	50,5
Tidak tahu/lupa (n=8)	7	14,3	1	2,0	8	8,1
PK06. Pelatihan apa saja yang didapatkan dari LANDASAN?						
PK06.a. Pendataan penduduk kampung						
Ya (n=37)	2	100,0	35	89,7	37	90,2
Tidak (n=4)	0	0,0	4	10,3	4	9,8
PK06.b. Operasional SAIK/SAIK+/SIO Papua						
Ya (n=33)	2	100,0	31	79,5	33	80,5
Tidak (n=8)	0	0,0	8	20,5	8	19,5
PK06.c. Peningkatan pelayanan adminduk/PASH						
Ya (n=20)	2	100,0	18	46,2	20	48,8
Tidak (n=21)	0	0,0	21	53,8	21	51,2
PK06.d. Sinergi perencanaan dengan unit pelayanan						
Ya (n=17)	2	100,0	15	38,5	17	41,5
Tidak (n=24)	0	0,0	24	61,5	24	58,5
PK06.e. DMMD (Program Distrik Membangun, Membangun Distrik)						
Ya (n=5)	0	0,0	5	12,8	5	12,2
Tidak (n=36)	2	100,0	34	87,2	36	87,8
PK06.f. Penanggulangan Covid-19						
Ya (n=11)	0	0,0	11	28,2	11	26,8
Tidak (n=30)	2	100,0	28	71,8	30	73,2
PK06.g. BANGGA Papua						
Ya (n=1)	0	0,0	1	2,6	1	2,4
Tidak (n=40)	2	100,0	38	97,4	40	97,6
PK06.h. Pencegahan malaria						
Ya (n=13)	0	0,0	13	33,3	13	31,7
Tidak (n=28)	2	100,0	26	66,7	28	68,3
PK06.v. Lainnya						
Ya (n=1)	0	0,0	1	2,6	1	2,4
Tidak (n=40)	2	100,0	38	97,4	40	97,6

Buku KPMK Module PK

Tabel 1.3.6 Peningkatan Kapasitas (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PK08. Siapa saja anggota masyarakat yang mengikuti pelatihan tersebut?						
PK08.a. KPMK/Kader program						
Ya (n=40)	2	100,0	38	97,4	40	97,6
Tidak (n=1)	0	0,0	1	2,6	1	2,4
PK08.b. Kepala sekolah						
Ya (n=10)	0	0,0	10	25,6	10	24,4
Tidak (n=31)	2	100,0	29	74,4	31	75,6
PK08.c. Guru						
Ya (n=14)	0	0,0	14	35,9	14	34,1
Tidak (n=27)	2	100,0	25	64,1	27	65,9
PK08.d. Komite sekolah						
Ya (n=8)	0	0,0	8	20,5	8	19,5
Tidak (n=33)	2	100,0	31	79,5	33	80,5
PK03.e. Kader posyandu						
Ya (n=10)	0	0,0	10	25,6	10	24,4
Tidak (n=31)	2	100,0	29	74,4	31	75,6
PK08.f. Bidan kampung						
Ya (n=11)	0	0,0	11	28,2	11	26,8
Tidak (n=30)	2	100,0	28	71,8	30	73,2
PK08.g. Tokoh masyarakat/adat/agama						
Ya (n=10)	0	0,0	10	25,6	10	24,4
Tidak (n=31)	2	100,0	29	74,4	31	75,6
PK08.h. PKK						
Ya (n=5)	0	0,0	5	12,8	5	12,2
Tidak (n=36)	2	100,0	34	87,2	36	87,8
PK08.i. Perwakilan kelompok perempuan						
Ya (n=8)	0	0,0	8	20,5	8	19,5
Tidak (n=33)	2	100,0	31	79,5	33	80,5
PK08.j. Tokoh pemuda/karang taruna						
Ya (n=9)	0	0,0	9	23,1	9	22,0
Tidak (n=32)	2	100,0	30	76,9	32	78,0
PK08.k. Perwakilan kelompok penyandang disabilitas						
Ya (n=1)	0	0,0	1	2,6	1	2,4
Tidak (n=40)	2	100,0	38	97,4	40	97,6
PK08.l. Perwakilan OAP						
Ya (n=8)	0	0,0	8	20,5	8	19,5
Tidak (n=33)	2	100,0	31	79,5	33	80,5
PK08.v. Lainnya						
Ya (n=6)	0	0,0	6	15,4	6	14,6
Tidak (n=35)	2	100,0	33	84,6	35	85,4

Buku KPMK Module PK

Tabel 1.3.6 Peningkatan Kapasitas (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PK09. Apa saja yang menjadi tugas KPMK di kampung ini?						
PK09.a. Mengumpulkan data penduduk						
Ya (n=93)	43	87,8	50	100,0	93	93,9
Tidak (n=6)	6	12,2	0	0,0	6	6,1
PK09.b. Input data SAIK/SAIK+/SIO PAPUA						
Ya (n=61)	14	28,6	47	94,0	61	61,6
Tidak (n=38)	35	71,4	3	6,0	38	38,4
PK09.c. Membantu memberi layanan adminduk						
Ya (n=70)	28	57,1	42	84,0	70	70,7
Tidak (n=29)	21	42,9	8	16,0	29	29,3
PK09.d. Membantu penyusunan RPJMK						
Ya (n=46)	17	34,7	29	58,0	46	46,5
Tidak (n=53)	32	65,3	21	42,0	53	53,5
PK09.e. Membantu memfasilitasi pertemuan						
Ya (n=63)	30	61,2	33	66,0	63	63,6
Tidak (n=36)	19	38,8	17	34,0	36	36,4
PK09.f. Membantu memfasilitasi pertemuan dengan unit layanan						
Ya (n=56)	25	51,0	31	62,0	56	56,6
Tidak (n=43)	24	49,0	19	38,0	43	43,4
PK09.g. Sosialisasi pandemic Covid-19						
Ya (n=50)	26	53,1	24	48,0	50	50,5
Tidak (n=49)	23	46,9	26	52,0	49	49,5
PK09.h. Membantu menyalurkan bantuan						
Ya (n=51)	25	51,0	26	52,0	51	51,5
Tidak (n=48)	24	49,0	24	48,0	48	48,5
PK09.i. Membantu verifikasi data penerima bantuan						
Ya (n=59)	26	53,1	33	66,0	59	59,6
Tidak (n=40)	23	46,9	17	34,0	40	40,4
PK09.v. Tugas lainnya						
Ya (n=6)	6	12,2	0	0,0	6	6,1
Tidak (n=93)	43	87,8	50	100,0	93	93,9
PK10. Menurut I/B/S, apakah pelatihan dari Program LANDASAN bermanfaat?						
Tidak Bermanfaat (n=1)	1	2,0	0	0,0	1	1,0
Bermanfaat (n=14)	3	6,1	11	22,0	14	14,1
Sangat bermanfaat (n=37)	2	4,1	35	70,0	37	37,4
Tidak berlaku (n=44)	42	85,7	2	4,0	44	44,4
Tidak tahu (n=3)	1	2,0	2	4,0	3	3,0

Buku KPMK Module PK

1.4 Buku Kepala Puskesmas

1.4.1 Seksi LR (Latar Belakang Responden)

Tabel 1.4.1. Latar Belakang Responden Kepala Puskesmas

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
LR02. Apa posisi I/B/S saat ini di Puskesmas?						
Kepala Puskesmas (n=11)	6	66,7	5	50,0	11	57,9
Dokter Puskesmas (n=1)	0	0,0	1	10,0	1	5,3
Koordinator Bidan (n=3)	1	11,1	2	20,0	3	15,8
Lainnya (n=4)	2	22,2	2	20,0	4	21,1
LR06. Jenis kelamin kepala Puskesmas						
Laki-laki (n=10)	5	55,6	5	50,0	10	52,6
Perempuan (n=9)	4	44,4	5	50,0	9	47,4
LR07. Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diikuti kepala Puskesmas?						
D1/D2/D3 (n=8)	5	55,6	3	30,0	8	42,1
D4/S1 (n=10)	3	33,3	7	70,0	10	52,6
S2/S3 (n=1)	1	11,1	0	0,0	1	5,3
LR08. Kelas tertinggi yang sedang/pernah diduduki kepala Puskesmas						
Kelas/tingkat 2 (n=1)	1	11,1	0	0,0	1	5,3
Tamat (n=18)	8	88,9	10	100,0	18	94,7

Buku KPUS Module LR

Tabel 1.4.1. Latar Belakang Responden Kepala Puskesmas (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
LR09.a. Apakah suku bangsa kepala Puskesmas?						
Moor (n=1)	1	11,1	0	0,0	1	5,3
Toraja (n=1)	1	11,1	0	0,0	1	5,3
Arfak (n=1)	0	0,0	1	10,0	1	5,3
Batak (n=1)	0	0,0	1	10,0	1	5,3
Jawa (n=4)	2	22,2	2	20,0	4	21,1
Maluku (n=1)	1	11,1	0	0,0	1	5,3
Maumere (n=1)	1	11,1	0	0,0	1	5,3
Mee (n=1)	1	11,1	0	0,0	1	5,3
Moi (n=3)	1	11,1	2	20,0	3	15,8
Moor (n=1)	0	0,0	1	10,0	1	5,3
Nabire (n=1)	0	0,0	1	10,0	1	5,3
Namblong (n=1)	1	11,1	0	0,0	1	5,3
Toraja (n=1)	0	0,0	1	10,0	1	5,3
Waropeny (n=1)	0	0,0	1	10,0	1	5,3
LR09.b. Provinsi asal suku bangsa [lr09a]?						
Jawa Tengah (n=2)	0	0,0	2	20,0	2	10,5
Jawa Timur (n=1)	1	11,1	0	0,0	1	5,3
Kepulauan Maluku (n=1)	1	11,1	0	0,0	1	5,3
Nusa Tenggara Timur (n=1)	1	11,1	0	0,0	1	5,3

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
Papua (n=6)	3	33,3	3	30,0	6	31,6
Papua Barat (n=4)	1	11,1	3	30,0	4	21,1
Sulawesi Selatan (n=1)	1	11,1	0	0,0	1	5,3
Sulawesi Tenggara (n=1)	1	11,1	0	0,0	1	5,3
Sulawesi Utara (n=1)	0	0,0	1	10,0	1	5,3
Sumatra Utara (n=1)	0	0,0	1	10,0	1	5,3
LR10. Apakah agama yang dianut kepala Puskesmas?						
Islam (n=5)	2	22,2	3	30,0	5	26,3
Kristen Protestan (n=12)	5	55,6	7	70,0	12	63,2
Katolik (n=2)	2	22,2	0	0,0	2	10,5
LR14. Apakah kepala Puskesmas punya KTP?						
Ya (n=19)	9	100,0	10	100,0	19	100,0
Tidak (0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
LR15. Apakah kepala Puskesmas punya KK?						
Ya (n=19)	9	100,0	10	100,0	19	100,0
Tidak (0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Buku KPUS Module LR

Tabel 1.4.1. Latar Belakang Responden Kepala Puskesmas (Lanjutan)

VARIABEL	Lokasi			
	Non-KOMPAK		KOMPAK	
	Rerata	S.D.	Rerata	S.D.
LR04. Sejak kapan Kepala Puskesmas menjabat sebagai kepala puskesmas	2,018	2,646	2,017	3,736
LR05.u. Umur	44,44	9,593	44,60	9,288

1.4.2 Seksi DP (Data Pelayanan Puskesmas)

Tabel 1.4.2. Data Pelayanan Puskesmas

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
DP10. Apakah tersedia listrik di puskesmas?						
Ya (n=19)	9	100,0	10	100,0	19	100,0
Tidak (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
DP11. Apakah listrik tersedia sepanjang waktu (24 jam per hari)?						
Ya (n=14)	7	77,8	7	70,0	14	73,7
Tidak (n=5)	2	22,2	3	30,0	5	26,3
DP12. Apakah gedung/bangunan ini digunakan juga oleh lembaga/institusi lain?						
Ya (n=3)	1	11,1	2	20,0	3	15,8
Tidak (n=16)	8	88,9	8	80,0	16	84,2
DP13. Apakah puskesmas ini adalah pengguna utama gedung ini?						
Ya (n=3)	1	100,0	2	100,0	3	100,0
DP15. Apakah ada pelayanan berikut ini:						
DP15.a. Pemeriksaan ibu hamil oleh bidan						
Ya (n=19)	9	100,0	10	100,0	19	100,0
DP15.b. Pemeriksaan ibu hamil oleh dokter						
Ya (n=12)	5	55,6	7	70,0	12	63,2
Tidak (n=7)	4	44,4	3	30,0	7	36,8
DP15.c. Jasa persalinan oleh bidan						
Ya (n=18)	8	88,9	10	100,0	18	94,7
Tidak (n=1)	1	11,1	0	0,0	1	5,3
DP15.d. Jasa persalinan oleh dokter						
Ya (n=9)	4	44,4	5	50,0	9	47,4
Tidak (n=10)	5	55,6	5	50,0	10	52,6
DP15.e. Ruang bersalin						
Ya (n=15)	7	77,8	8	80,0	15	78,9
Tidak (n=4)	2	22,2	2	20,0	4	21,1
DP15.f. Vacum ekstraksi/forsep						
Ya (n=2)	2	22,2	0	0,0	2	10,5
Tidak (n=17)	7	77,8	10	100,0	17	89,5

Buku KPUS Module DP

Tabel 1.4.2. Data Pelayanan Puskesmas (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
DP15. Apakah ada pelayanan berikut ini:						
DP15.g. Pemberian imunisasi untuk bayi dan balita						
Ya (n=19)	9	100,0	10	100,0	19	100,0
Tidak (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
DP15.h. Imunisasi Tetanus Toxoid [TT] untuk ibu hamil						
Ya (n=18)	8	88,9	10	100,0	18	94,7
Tidak (n=1)	1	11,1	0	0,0	1	5,3
DP15.i. KB (Pil,IUD, Implant dll)						
Ya (n=19)	9	100,0	10	100,0	19	100,0
Tidak (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
DP15.j. Pengukuran antropometri pada bayi dan balita						
Ya (n=19)	9	100,0	10	100,0	19	100,0
Tidak (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
DP15.k. Pengajaran Tubuh Kembang Anak						
Ya (n=14)	6	66,7	8	80,0	14	73,7
Tidak (n=5)	3	33,3	2	20,0	5	26,3
DP15.l. Kelas gizi ibu dan anak						
Ya (n=12)	5	55,6	7	70,0	12	63,2
Tidak (n=7)	4	44,4	3	30,0	7	36,8
Buku KPUS Module DP						
DP15. Apakah ada pelayanan berikut ini:						
DP15.m. Kelas ibu hamil						
Ya (n=13)	5	55,6	8	80,0	13	68,4
Tidak (n=6)	4	44,4	2	20,0	6	31,6
DP15.n. Rawat inap						
Ya (n=11)	5	55,6	6	60,0	11	57,9
Tidak (n=8)	4	44,4	4	40,0	8	42,1
DP15.o. Pembuatan akte kelahiran untuk bayi baru lahir						
Ya (n=5)	2	22,2	3	30,0	5	26,3
Tidak (n=14)	7	77,8	7	70,0	14	73,7
DP15.p. Pelayanan pasien COVID-19						
Ya (n=14)	6	66,7	8	80,0	14	73,7
Tidak (n=5)	3	33,3	2	20,0	5	26,3
DP15.q. Isolasi mandiri bagi OTG						
Ya (n=12)	5	55,6	7	70,0	12	63,2
Tidak (n=7)	4	44,4	3	30,0	7	36,8
DP15.r. Pelayanan vaksin COVID-19						
Ya (n=14)	7	77,8	7	70,0	14	73,7
Tidak (n=5)	2	22,2	3	30,0	5	26,3
DP15.s. Kunjungan rumah untuk pasien dengan disabilitas yang tidak bisa datang ke Puskesmas						
Ya (n=15)	7	77,8	8	80,0	15	78,9
Tidak (n=4)	2	22,2	2	20,0	4	21,1
Buku KPUS Module DP						

Tabel 1.4.2. Data Pelayanan Puskesmas (Lanjutan)

VARIABEL	Lokasi			
	Non-KOMPAK		KOMPAK	
	Rerata	S.D.	Rerata	S.D.
DP01.a. Jumlah kampung	8,500	4,036	9,900	4,977
DP01.b. Jumlah penduduk	4,396	4,412	5,222	3,191
DP01.c. Jumlah KK	1,722	1,366	1,333	910,1
DP02. Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu)	2	0,756	2,500	1,650
DP03. Jumlah Puskesmas Keliling (Pusling) / Puskesmas terapung	1,222	2,224	3,571	5,996
DP04. Jumlah Bidan Desa	4,444	6,386	4,400	3,134
DP05. Jumlah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	8,889	5,134	11,90	6,367
DP06. Jumlah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang aktif	8,889	5,134	11,90	6,367
DP07. Jumlah kader Posyandu yang aktif	36,33	26,68	45,11	26,28
DP08. Jumlah Pondok Bersalin Desa (Polindes)	0,375	0,744	1,500	1,049
DP09. Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)	0,250	0,707	1	1,265
DP14.a. Jumlah tenaga DOKTER UMUM	1	0,707	1,400	0,843
DP14.b. Jumlah tenaga DOKTER GIGI	0,111	0,333	0,400	0,699
DP14.c. Jumlah tenaga PERAWAT/MANTRI	12,89	7,149	17,60	19,09
DP14.d. Jumlah tenaga PERAWAT GIGI	0,111	0,333	0,300	0,483
DP14.e. Jumlah tenaga BIDAN	6,444	5,028	11,20	9,138
DP14.f. Jumlah tenaga BIDAN DESA	2,444	2,603	4,400	3,134
DP14.g. Jumlah tenaga AHLI GIZI/PEMBANTU AHLI GIZI	1,333	1	2,100	1,287
DP14.i. Jumlah tenaga KESEHATAN LAINNYA	2,333	2,398	3,700	3,401

1.4.3 Seksi PM (Partisipasi Masyarakat)

Tabel 1.4.3. Partisipasi Masyarakat

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PM06.a. Selama setahun terakhir, apakah puskesmas diundang menghadiri pertemuan tingkat kampung yang membahas perencanaan kegiatan/program kampung?						
Ya (n=13)	6	66,7	7	70,0	13	68,4
Tidak (n=6)	3	33,3	3	30,0	6	31,6
PM07. Selama setahun terakhir, apakah I/B/S menghadiri pertemuan tingkat kampung tsb						
Ya (n=9)	3	50,0	6	85,7	9	69,2
Tidak (n=4)	3	50,0	1	14,3	4	30,8
PM07. Pihak yang hadir dalam pertemuan tingkat kampung [PM06a]						
PM07.a.a. Kepala Kampung						
Ya (n=1)	0	0,0	1	100,0	1	25,0
Tidak (n=3)	3	100,0	0	0,0	3	75,0
PM07.a.b. Dokter						
Ya (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tidak (n=4)	3	100,0	1	100,0	4	100,0
PM07.a.c. Staf Administrasi						
Ya (n=1)	0	0,0	1	100,0	1	25,0
Tidak (n=3)	3	100,0	0	0,0	3	75,0
PM07.a.d. Bidan Puskesmas						
Ya (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tidak (n=4)	3	100,0	1	100,0	4	100,0
PM07.a.v Lainnya						
Ya (n=4)	3	100,0	1	100,0	4	100,0
Tidak (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Buku KPUS Module PM

Tabel 1.4.3. Partisipasi Masyarakat (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PM08. Dalam pertemuan tsb, apakah I/B/S						
PM08.a. Memberikan usulan kegiatan						
Ya (n=9)	3	100,0	6	100,0	9	100,0
Tidak (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
PM08.b. Memberikan pendapat						
Ya (n=9)	3	100,0	6	100,0	9	100,0
Tidak (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
PM08.c. Bertanya tentang program/kegiatan di kampung						
Ya (n=9)	3	100,0	6	100,0	9	100,0
Tidak (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
PM08.d. Bertanya tentang target program/ kegiatan di kampung						
Ya (n=6)	3	100,0	3	50,0	6	66,7
Tidak (n=3)	0	0,0	3	50,0	3	33,3
PM08.e. Bertanya tentang dana/anggaran						
Ya (n=5)	2	66,7	3	50,0	5	55,6
Tidak (n=4)	1	33,3	3	50,0	4	44,4
PM08.f. Ikut mengambil suara untuk memutuskan						
Ya (n=2)	0	0,0	2	33,3	2	22,2
Tidak (n=7)	3	100,0	4	66,7	7	77,8

Buku KPUS Module PM

1.4.4 Seksi PD (Pendampingan Distrik/Kecamatan dan Kabupaten)

Tabel 1.4.4. Pendampingan Distrik/Kecamatan dan Kabupaten

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PD01. Selama satu tahun terakhir, berapa kali I/B/S bertemu pemerintah kabupaten baik mengunjungi maupun dikunjungi?						
Ya (n=19)	9	100,0	10	100,0	19	100,0
Tidak (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
PD02. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, bagaimana frekuensi pertemuan tersebut lebih sering atau lebih jarang?						
Lebih jarang (n=13)	6	66,7	7	70,0	13	68,4
SAMA SAJA (n=4)	2	22,2	2	20,0	4	21,1
Lebih sering (n=2)	1	11,1	1	10,0	2	10,5
PD03. Apakah I/B/S bertemu dengan						
PD03.a. DINAS KESEHATAN						
Ya (n=19)	9	100,0	10	100,0	19	100,0
Tidak (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
PD03.b. BUPATI/WAKIL BUPATI						
Ya (n=7)	3	33,3	4	40,0	7	36,8
Tidak (n=12)	6	66,7	6	60,0	12	63,2
PD03.c. DPRD						
Ya (n=5)	1	11,1	4	40,0	5	26,3
Tidak (n=14)	8	88,9	6	60,0	14	73,7
PD03.d. BPKM						
Ya (n=5)	1	11,1	4	40,0	5	26,3
Tidak (n=14)	8	88,9	6	60,0	14	73,7
PD03.v. LAINNYA						
Ya (n=5)	2	22,2	3	30,0	5	26,3
Tidak (n=14)	7	77,8	7	70,0	14	73,7

Buku KPUS Module PD

Tabel 1.4.4. Pendampingan Distrik/Kecamatan dan Kabupaten (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PD04. Topik apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut						
PD04.a. PELAYANAN PUSKESMAS KE KAMPUNG-KAMPUNG						
Ya (n=15)	8	88,9	7	70,0	15	78,9
Tidak (n=4)	1	11,1	3	30,0	4	21,1
PD04.b. PERENCANAAN YANG MELIBATKAN PUSKESMAS						
Ya (n=12)	5	55,6	7	70,0	12	63,2
Tidak (n=7)	4	44,4	3	30,0	7	36,8
PD04.c. PROGRAM BANTUAN						
Ya (n=14)	5	55,6	9	90,0	14	73,7
Tidak (n=5)	4	44,4	1	10,0	5	26,3
PD04.d. PENANGANAN PANDEMI						
Ya (n=16)	7	77,8	9	90,0	16	84,2
Tidak (n=3)	2	22,2	1	10,0	3	15,8
PD04.e. PERMASALAHAN SARANA PRASARANA PUSKESMAS						
Ya (n=14)	7	77,8	7	70,0	14	73,7
Tidak (n=5)	2	22,2	3	30,0	5	26,3
PD04.f. MONITORING						
Ya (n=14)	7	77,8	7	70,0	14	73,7
Tidak (n=5)	2	22,2	3	30,0	5	26,3
PD04.v. LAINNYA						
Ya (n=5)	3	33,3	2	20,0	5	26,3
Tidak (n=14)	6	66,7	8	80,0	14	73,7

Buku KPUS Module PD

Tabel 1.4.4. Pendampingan Distrik/Kecamatan dan Kabupaten (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PD05. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali I/B/S bertemu dengan pemerintah distrik (pemerintah distrik), baik mengunjungi maupun dikunjungi?						
YA (n=13)	8	88,9	5	50,0	13	68,4
BELUM PERNAH BERTEMU (n=4)	1	11,1	3	30,0	4	21,1
TIDAK TAHU/LUPA (n=2)	0	0,0	2	20,0	2	10,5
PD06. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, bagaimana frekuensi pertemuan tersebut lebih sering atau lebih jarang?						
Lebih jarang (n=7)	2	25,0	5	71,4	7	46,7
SAMA SAJA (n=3)	2	25,0	1	14,3	3	20,0
Lebih sering (n=5)	4	50,0	1	14,3	5	33,3
PD07. Topik apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut						
PD07.a. PELAYANAN PUSKESMAS KE KAMPUNG-KAMPUNG?						
Ya (n=11)	7	87,5	4	57,1	11	73,3
Tidak (n=4)	1	12,5	3	42,9	4	26,7
PD07.b. PERENCANAAN YANG MELIBATKAN PUSKESMAS?						
Ya (n=8)	4	50,0	4	57,1	8	53,3
Tidak (n=7)	4	50,0	3	42,9	7	46,7
PD07.c. PROGRAM BANTUAN?						
Ya (n=6)	3	37,5	3	42,9	6	40,0
Tidak (n=9)	5	62,5	4	57,1	9	60,0
PD07.d. PENANGANAN PANDEMI?						
Ya (n=9)	5	62,5	4	57,1	9	60,0
Tidak (n=6)	3	37,5	3	42,9	6	40,0
PD07.e. PERMASALAHAN SARANA PRASARANA PUSKESMAS?						
Ya (n=6)	3	37,5	3	42,9	6	40,0
Tidak (n=9)	5	62,5	4	57,1	9	60,0
PD07.f. MONITORING?						
Ya (n=4)	3	37,5	1	14,3	4	26,7
Tidak (n=11)	5	62,5	6	85,7	11	73,3
PD07.v. LAINNYA?						
Ya (n=3)	1	12,5	2	28,6	3	20,0
Tidak (n=12)	7	87,5	5	71,4	12	80,0

Buku KPUS Module PD

Tabel 1.4.4. Pendampingan Distrik/Kecamatan dan Kabupaten (Lanjutan)

VARIABEL	Lokasi			
	Non-KOMPAK		KOMPAK	
	Rerata	S.D.	Rerata	S.D.
PD01.n. Selama satu tahun terakhir, berapa kali I/B/S bertemu pemerintah kabupaten, baik mengunjungi maupun dikunjungi?	9,222	7,225	10,40	10,23
PD05.n. Dalam satu tahun terakhir, pernah bertemu dengan pemerintah distrik (pemerintah distrik), baik mengunjungi maupun dikunjungi?	5	5,732	4,600	4,219

1.4.5 Seksi PK (Peningkatan Kapasitas)

Tabel 1.4.5. Peningkatan Kapasitas

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PK01. Selama satu tahun terakhir, Apakah I/B/S pernah mengikuti pelatihan?						
YA (n=17)	7	77,8	10	100,0	17	89,5
BELUM PERNAH BERTEMU (n=2)	2	22,2	0	0,0	2	10,5
PK02. Pelatihan apa saja yang pernah I/B/S ikuti dalam satu tahun terakhir						
PK02.a. MANAJEMEN PUSKESMAS						
Ya (n=9)	5	71,4	4	40,0	9	52,9
Tidak (n=8)	2	28,6	6	60,0	8	47,1
PK02.b. PENGELOLAAN ANGGARAN PUSKESMAS						
Ya (n=7)	4	57,1	3	30,0	7	41,2
Tidak (n=10)	3	42,9	7	70,0	10	58,8
PK02.c. SINERGI PERENCANAAN PUSKESMAS DENGAN KAMPUNG						
Ya (n=8)	3	42,9	5	50,0	8	47,1
Tidak (n=9)	4	57,1	5	50,0	9	52,9
PK02.d. PENCEGAHAN PENYAKIT						
Ya (n=9)	4	57,1	5	50,0	9	52,9
Tidak (n=8)	3	42,9	5	50,0	8	47,1
PK02.v. LAINNYA						
Ya (n=9)	3	42,9	6	60,0	9	52,9
Tidak (n=8)	4	57,1	4	40,0	8	47,1
Buku KPUS Module PK						
PK03. Pemberi materi pelatihan						
PK03.a. PEMERINTAH KABUPATEN						
Ya (n=11)	5	71,4	6	60,0	11	64,7
Tidak (n=6)	2	28,6	4	40,0	6	35,3
PK03.b. PEMERINTAH DISTRIK						
Ya (n=1)	0	0,0	1	10,0	1	5,9
Tidak (n=16)	7	100,0	9	90,0	16	94,1
PK03.c. PELAKU PROGRAM LANDASAN						
Ya (n=5)	0	0,0	5	50,0	5	29,4
Tidak (n=12)	7	100,0	5	50,0	12	70,6
PK03.d. AKADEMISI/UNIVERSITAS						
Ya (n=1)	0	0,0	1	10,0	1	5,9
Tidak (n=16)	7	100,0	9	90,0	16	94,1
PK03.e. ORGANISASI/LEMBAGA (LEVEL KABUPATEN-PUSAT)						
Ya (n=5)	2	28,6	3	30,0	5	29,4
Tidak (n=12)	5	71,4	7	70,0	12	70,6
PK03.v. LAINNYA						
Ya (n=8)	3	42,9	5	50,0	8	47,1
Tidak (n=9)	4	57,1	5	50,0	9	52,9
Buku KPUS Module PK						

Tabel 1.4.5. Peningkatan Kapasitas (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PK04. Selama setahun terakhir, apakah I/B/S atau staf lain pernah mendapatkan pelatihan dari program LANDASAN?						
Ya (n=7)	0	0,0	7	70,0	7	36,8
Tidak (n=11)	8	88,9	3	30,0	11	57,9
TIDAK TAHU (n=1)	1	11,1	0	0,0	1	5,3
PK05. Siapa saja dari puskesmas ini yang pernah mengikuti pelatihan LANDASAN						
PK05.a. Kepala Puskesmas						
Ya (n=7)	7	100,0	7	100,0		
Tidak (n=0)	0	0,0	0	0,0		
PK05.b. Dokter						
Ya (n=3)	3	42,9	3	42,9		
Tidak (n=4)	4	57,1	4	57,1		
PK05.c. Staf Administrasi						
Ya (n=5)	5	71,4	5	71,4		
Tidak (n=2)	2	28,6	2	28,6		
PK05.d. Bidan Puskesmas						
Ya (n=5)	5	71,4	5	71,4		
Tidak (n=2)	2	28,6	2	28,6		
PK05.v. Lainnya						
Ya (n=1)	1	14,3	1	14,3		
Tidak (n=6)	6	85,7	6	85,7		

Buku KPUS Module PK

Tabel 1.4.5. Peningkatan Kapasitas (Lanjutan)

	Lokasi					
	KOMPAK		Total			
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom		
PK06. Apakah I/B/S atau staf lain di puskesmas ini pernah mendapatkan pelatihan:						
PK06.a. SINERGI PERENCANAAN PUSKESMAS DENGAN KAMPUNG						
Ya (n=7)	7	100,0	7	100,0		
Tidak (n=0)	0	0,0	0	0,0		
PK06.b. AKREDITASI PUSKESMAS						
Ya (n=3)	3	42,9	3	42,9		
Tidak (n=4)	4	57,1	4	57,1		
PK06.c. KESADARAN TENTANG PENYAKIT HIV						
Ya (n=3)	3	42,9	3	42,9		
Tidak (n=4)	4	57,1	4	57,1		
PK06.d. KESADARAN TENTANG PENYAKIT MALARIA						
Ya (n=4)	4	57,1	4	57,1		
Tidak (n=3)	3	42,9	3	42,9		
PK10. Menurut I/B/S, apakah pelatihan dari Program LANDASAN bermanfaat?						
Bermanfaat (n=2)	2	28,6	2	28,6		
Sangat bermanfaat (n=5)	5	71,4	5	71,4		
PK11. Apakah Puskesmas sudah menyelesaikan Rancangan Usulan Kegiatan [RUK] ?						
Ya (n=15)	7	77,8	8	80,0	15	78,9
Tidak (n=4)	2	22,2	2	20,0	4	21,1

Buku KPUS Module PK

Tabel 1.4.5. Peningkatan Kapasitas (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PK12. Apakah dokumen RUK sudah disinergikan dengan perencanaan kampung?						
Ya (n=7)	1	14,3	6	75,0	7	46,7
Tidak (n=8)	6	85,7	2	25,0	8	53,3
PK13. Apakah I/B/S mengetahui SAIK+/SIO Papua?						
Ya (n=4)	0	0,0	4	40,0	4	21,1
Tidak (n=15)	9	100,0	6	60,0	15	78,9
PK14. Apakah Puskesmas memanfaatkan data SAIK+/SIO Papua?						
Ya (n=3)	3	75,0	3	75,0		
Tidak (n=1)	1	25,0	1	25,0		
PK15. Untuk apa saja data SAIK+/SIO Papua digunakan?						
PK15.a. MELIHAT DEMOGRAFI KAMPUNG CAKUPAN						
Ya (n=2)	2	66,7	2	66,7		
Tidak (n=1)	1	33,3	1	33,3		
PK15.b. MELIHAT DAN MENGONFIRMASI SASARAN						
Ya (n=3)	3	100,0	3	100,0		
Tidak (n=0)	0	0,0	0	0,0		
PK15.c. MELIHAT DAN MENGONFIRMASI DATA SASARAN BALITA						
Ya (n=3)	3	100,0	3	100,0		
Tidak (n=0)	0	0,0	0	0,0		
PK15.d. MENENTUKAN DATA SASARAN KELOMPOK PENYANDANG DISABILITAS						
Ya (n=2)	2	66,7	2	66,7		
Tidak (n=1)	1	33,3	1	33,3		
PK15.e. MENYUSUN PERENCANAAN KEGIATAN PUSKESMAS						
Ya (n=2)	2	66,7	2	66,7		
Tidak (n=1)	1	33,3	1	33,3		
PK15.v. LAINNYA						
Ya (n=0)	0	0,0	0	0,0		
Tidak (n=3)	3	100,0	3	100,0		

Buku KPUS Module PK

Tabel 1.4.5 Peningkatan Kapasitas (Lanjutan)

VARIABEL	Lokasi			
	Non-KOMPAK		KOMPAK	
	Rerata	S.D.	Rerata	S.D.
PK01.n. Selama satu tahun terakhir, berapa kali I/B/S mengikuti pelatihan? (jumlah)	3,571	1,618	3,300	2,751

1.4.6 Seksi DK (Dukungan Pemerintah Kampung)

Tabel 1.4.6. Dukungan Pemerintah Kampung

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
DK01. Masalah kesehatan di distrik ini						
DK01.a. CAKUPAN PUSKESMAS TERLALU LUAS						
Ya (n=4)	2	22,2	2	20,0	4	21,1
Tidak (n=15)	7	77,8	8	80,0	15	78,9
DK01.b. SARANA PRASARANA PUSKESMAS KURANG MEMADAI						
Ya (n=15)	7	77,8	8	80,0	15	78,9
Tidak (n=4)	2	22,2	2	20,0	4	21,1
DK01.c. JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASIH KURANG						
Ya (n=15)	6	66,7	9	90,0	15	78,9
Tidak (n=4)	3	33,3	1	10,0	4	21,1
DK01.d. JARAK FASILITAS KE KAMPUNG-KAMPUNG TERLALU JAUH						
Ya (n=8)	4	44,4	4	40,0	8	42,1
Tidak (n=11)	5	55,6	6	60,0	11	57,9
DK01.e. MASIH BANYAK ANAK DENGAN GIZI BURUK						
Ya (n=6)	3	33,3	3	30,0	6	31,6
Tidak (n=13)	6	66,7	7	70,0	13	68,4
DK01.f. KESEHATAN IBU DAN ANAK MASIH KURANG BAIK						
Ya (n=9)	5	55,6	4	40,0	9	47,4
Tidak (n=10)	4	44,4	6	60,0	10	52,6
DK01.g. PENYAKIT ENDEMIK MASIH TINGGI (MALARIA, HIV)						
Ya (n=12)	5	55,6	7	70,0	12	63,2
Tidak (n=7)	4	44,4	3	30,0	7	36,8
DK01.h. LAYANAN BELUM DAPAT DIAKSES OLEH PENYANDANG DISABILITAS						
Ya (n=8)	3	33,3	5	50,0	8	42,1
Tidak (n=11)	6	66,7	5	50,0	11	57,9
DK01.y. [Y] TIDAK TAHU						
Ya (n=19)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tidak (n=19)	9	100,0	10	100,0	19	100,0

Buku KPUS Module DK

Tabel 1.4.6. Dukungan Pemerintah Kampung (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
DK01. Masalah kesehatan di distrik ini						
DK01.v. Apakah masalah [V] LAINNYA?						
Tidak (n=9)	5	55,6	4	40,0	9	47,4
Ya (n=10)	4	44,4	6	60,0	10	52,6
DK01.v.o. Sebutkan [V] LAINNYA						
Adanya beberapa pasien terdiagnosa Penyakit sifilis (n=1)	1	25,0	0	0,0	1	10,0
BPJS belum terorganisir baik (n=1)	1	25,0	0	0,0	1	10,0
Bangunan trancom rubuh karena abrasi dan kekurangan ruangan (n=1)	0	0,0	1	16,7	1	10,0
ISPA,kebersihan (n=1)	0	0,0	1	16,7	1	10,0
Kesadaran kesehatan masyarakat masih kurang (n=1)	0	0,0	1	16,7	1	10,0
Kesadaran masyarakat tentang sanitasi tidak berjamban, bawa anak ke posyandu, pemeriksaan ibu hamil (n=1)	1	25,0	0	0,0	1	10,0
Masyarakat belum terbuka terhadap kesehatan (n=1)	0	0,0	1	16,7	1	10,0
Pemahaman masyarakat terhadap kesehatan masih kurang (n=1)	0	0,0	1	16,7	1	10,0
Sanitasi (n=1)	1	25,0	0	0,0	1	10,0
Sumber Daya Manusia, etos kerja (n=1)	0	0,0	1	16,7	1	10,0
DK02. Masalah yang bisa ditangani bersama dengan pemerintah kampung						
DK02.a. Cakupan puskesmas terlalu luas						
Ya (n=1)	0	0,0	1	10,0	1	5,3
Tidak (n=18)	9	100,0	9	90,0	18	94,7
DK02.b. Sarana prasarana kurang memadai						
Ya (n=7)	3	33,3	4	40,0	7	36,8
Tidak (n=12)	6	66,7	6	60,0	12	63,2
DK02.c. Jumlah tenaga kerja kesehatan						
Ya (n=6)	2	22,2	4	40,0	6	31,6
Tidak (n=13)	7	77,8	6	60,0	13	68,4
DK02.d. Jarak fasilitas ke kampung-kampung terlalu jauh						
Tidak (n=16)	8	88,9	8	80,0	16	84,2
Ya (n=3)	1	11,1	2	20,0	3	15,8

Buku KPUS Module DK

Tabel 1.4.6. Dukungan Pemerintah Kampung (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
DK02. Masalah yang bisa ditangani bersama dengan pemerintah kampung						
DK02.e. Masih banyak anak dengan gizi buruk						
Ya (n=6)	3	33,3	3	30,0	6	31,6
Tidak (n=13)	6	66,7	7	70,0	13	68,4
DK02.f. Kesehatan ibu dan anak masih kurang baik						
Ya (n=8)	4	44,4	4	40,0	8	42,1
Tidak (n=11)	5	55,6	6	60,0	11	57,9
DK02.g. Penyakit endemik masih tinggi (malaria, HIV)						
Ya (n=10)	3	33,3	7	70,0	10	52,6
Tidak (n=9)	6	66,7	3	30,0	9	47,4
DK02.h. Layanan belum dapat diakses oleh penyandang disabilitas						
Ya (n=4)	1	11,1	3	30,0	4	21,1
Tidak (n=15)	8	88,9	7	70,0	15	78,9
DK02.w. Tidak ada						
Ya (n=1)	1	11,1	0	0,0	1	5,3
Tidak (n=18)	8	88,9	10	100,0	18	94,7
DK02.y. Tidak tahu						
Ya (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tidak (n=19)	9	100,0	10	100,0	19	100,0

Buku KPUS Module DK

Tabel 1.4.6. Dukungan Pemerintah Kampung (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
DK02. Masalah yang bisa ditangani bersama dengan pemerintah kampung						
DK02.v. Lainnya						
Tidak (n=12)	7	77,8	5	50,0	12	63,2
Ya (n=7)	2	22,2	5	50,0	7	36,8
DK02.v.o. Sebutkan masalah lainnya						
Biaya rujuk dari kampung dan bensin, sanitasi pengadaan jamban (n=1)	1	50,0	0	0,0	1	14,3
ISPA, Kebersihan (n=1)	0	0,0	1	20,0	1	14,3
Kesadaran kesehatan masyarakat (n=1)	0	0,0	1	20,0	1	14,3
Masyarakat belum terbuka terhadap kesehatan (n=1)	0	0,0	1	20,0	1	14,3
Pemahaman masyarakat terhadap kesehatan masih kurang (n=1)	0	0,0	1	20,0	1	14,3
Pembentukan kader kesehatan tiap kampung (n=1)	0	0,0	1	20,0	1	14,3
Sanitasi (n=1)	1	50,0	0	0,0	1	14,3
DK03. Apakah pemecahan masalah tersebut [DK02] pernah diusulkan ke dalam RPJMK?						
Ya (n=16)	6	75,0	10	100,0	16	88,9
Tidak (n=1)	1	12,5	0	0,0	1	5,6
Tidak Tahu (n=1)	1	12,5	0	0,0	1	5,6
DK03.a. Apakah pemecahan masalah tersebut [DK02] pernah diusulkan ke dalam RKPK?						
Ya (n=12)	5	62,5	7	70,0	12	66,7
Tidak (n=4)	2	25,0	2	20,0	4	22,2
Tidak Tahu (n=2)	1	12,5	1	10,0	2	11,1
DK04. Apakah ada kegiatan RPJMK yang memberikan dukungan dana pada kegiatan Puskesmas ini?						
Ya (n=10)	4	44,4	6	60,0	10	52,6
Tidak (n=7)	4	44,4	3	30,0	7	36,8
Tidak Tahu (n=2)	1	11,1	1	10,0	2	10,5
DK04.a. Apakah ada kegiatan terkait kesehatan yang masuk ke dalam RKPK TA 2021?						
Ya (n=10)	3	33,3	7	70,0	10	52,6
Tidak (n=6)	3	33,3	3	30,0	6	31,6
Tidak Tahu (n=3)	3	33,3	0	0,0	3	15,8

Buku KPUS Module DK

Tabel 1.4.6. Dukungan Pemerintah Kampung (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
DK05. Kegiatan yang masuk ke dalam RKPK TA 2021						
DK05.a. Kegiatan perbaikan fasilitas puskesmas						
Ya (n=3)	0	0,0	3	42,9	3	30,0
Tidak (n=7)	3	100,0	4	57,1	7	70,0
DK05.b. Kegiatan pembelian alat medis						
Ya (n=6)	2	66,7	4	57,1	6	60,0
Tidak (n=4)	1	33,3	3	42,9	4	40,0
DK05.c. Kegiatan honor bidan desa						
Ya (n=5)	0	0,0	5	71,4	5	50,0
Tidak (n=5)	3	100,0	2	28,6	5	50,0
DK05.d. Kegiatan dana PMT bagi anak atau ibu hamil						
Ya (n=6)	1	33,3	5	71,4	6	60,0
Tidak (n=4)	2	66,7	2	28,6	4	40,0
DK05.f. Kegiatan uang transportasi						
Ya (n=3)	2	66,7	1	14,3	3	30,0
Tidak (n=7)	1	33,3	6	85,7	7	70,0
DK05.v. Lainnya						
Ya (n=5)	1	33,3	4	57,1	5	50,0
Tidak (n=5)	2	66,7	3	42,9	5	50,0
DK05.y. Tidak tahu						
Ya (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tidak (n=10)	3	100,0	7	100,0	10	100,0
DK06. Menurut I/B/S bagaimana kondisi kesehatan distrik ini secara umum?						
Lebih buruk (n=1)	1	11,1	0	0,0	1	5,3
SAMA SAJA (n=6)	3	33,3	3	30,0	6	31,6
Lebih baik (n=12)	5	55,6	7	70,0	12	63,2

Buku KPUS Module DK

1.5 Buku Kader Posyandu

1.5.1 Seksi LR (Latar Belakang Responden)

Tabel 1.5.1. Latar Belakang Responden Kader Posyandu

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
LR02. Apa jabatan I/B/S saat ini di posyandu?						
Ketua Posyandu (n=34)	15	53,6	19	61,3	34	57,6
Kader Posyandu (n=24)	12	42,9	12	38,7	24	40,7
Lainnya (n=1)	1	3,6	0	0,0	1	1,7
LR06, Jenis kelamin responden						
Lak-laki (n=5)	3	10,7	2	6,5	5	8,5
Perempuan (n=54)	25	89,3	29	93,5	54	91,5
LR07, Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diikuti responden						
Tidak/belum pernah sekolah (n=1)	0	0,0	1	3,2	1	1,7
SD/MI/Sederajat (n=15)	10	35,7	5	16,1	15	25,4
SMP/MTs/Sederajat (n=15)	4	14,3	11	35,5	15	25,4
SMA/MA/Sederajat (n=21)	12	42,9	9	29,0	21	35,6
Paket B (n=1)	0	0,0	1	3,2	1	1,7
Paket C (n=4)	1	3,6	3	9,7	4	6,8
D4/S1 (n=2)	1	3,6	1	3,2	2	3,4
LR08, Kelas tertinggi yang sedang/pernah diduduki responden						
Kelas/tingkat 1 (n=1)	1	3,6	0	0,0	1	1,7
Kelas/tingkat 2 (n=6)	2	7,1	4	12,9	6	10,2
Kelas/tingkat 3 (n=2)	1	3,6	1	3,2	2	3,4
Kelas/tingkat 4 (n=2)	1	3,6	1	3,2	2	3,4
Kelas/tingkat 5 (n=1)	1	3,6	0	0,0	1	1,7
Kelas/tingkat 6 (n=1)	1	3,6	0	0,0	1	1,7
Tamat (n=45)	21	75,0	24	77,4	45	76,3
TIDAK/BELUM SEKOLAH (n=1)	0	0,0	1	3,2	1	1,7
LR09B. Provinsi asal suku bangsa responden						
Jawa Barat (n=1)	1	3,6	0	0,0	1	1,7
Jawa Tengah (n=4)	3	10,7	1	3,2	4	6,8
Jawa Timur (n=3)	2	7,1	1	3,2	3	5,1
Maluku (n=1)	0	0,0	1	3,2	1	1,7
Papua (n=30)	12	42,9	18	58,1	30	50,8
Papua Barat (n=19)	9	32,1	10	32,3	19	32,2
Yogyakarta (n=1)	1	3,6	0	0,0	1	1,7

Buku Kader Posyandu Module LR

Tabel 1.5.1 Latar Belakang Responden Kader Posyandu (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
LR10, Agama responden						
Islam (n=9)	6	21,4	3	9,7	9	15,3
Kristen Protestan (n=41)	16	57,1	25	80,6	41	69,5
Katolik (n=9)	6	21,4	3	9,7	9	15,3
LR11, Apakah I/B/S tinggal di kampung ini?						
Ya (n=58)	27	96,4	31	100,0	58	98,3
Tidak (n=1)	1	3,6	0	0,0	1	1,7
LR14, Apakah I/B/S punya KTP?						
Ya (n=57)	26	92,9	31	100,0	57	96,6
Tidak (n=2)	2	7,1	0	0,0	2	3,4
LR15, Apakah I/B/S punya KK?						
Ya (n=57)	27	96,4	30	96,8	57	96,6
Tidak (n=2)	1	3,6	1	3,2	2	3,4

Buku Kader Posyandu Module LR

Tabel 1.5.1 Latar Belakang Responden Kader Posyandu (Lanjutan)

VARIABEL	Lokasi			
	Non-KOMPAK		KOMPAK	
	Rerata	S.D.	Rerata	S.D.
LR04. Sudah berapa lama I/B/S menjadi kader posyandu? (Tahun)	9,321	8,878	13,77	9,725
LR05. Umur responden (Tahun)	42	8,739	44,48	11,34
LR12. Sudah berapa lama responden telah tinggal di kampung ini? (Tahun)	10,43	12,20	19,35	15,87

1.5.2 Seksi IP (Informasi Posyandu)

Tabel 1.5.2 Informasi Posyandu

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
IP01. Apakah posyandu ini buka setiap bulan?						
Ya (n=55)	26	92,9	29	93,5	55	93,2
Tidak (n=4)	2	7,1	2	6,5	4	6,8
IP03. Apakah posyandu ini memberikan pelayanan berikut:						
IP03.a. Pemeriksaan ibu hamil						
Ya (n=48)	22	78,6	26	83,9	48	81,4
Tidak (n=11)	6	21,4	5	16,1	11	18,6
IP03.b. Imunisasi						
Ya (n=58)	28	100,0	30	96,8	58	98,3
Tidak (n=1)	0	0,0	1	3,2	1	1,7
IP03.c. Penimbangan bayi dan anak						
Ya (n=59)	28	100,0	31	100,0	59	100,0
Tidak (n=1)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
IP03.d. Pemberian vitamin A						
Ya (n=58)	28	100,0	30	96,8	58	98,3
Tidak (n=1)	0	0,0	1	3,2	1	1,7
IP03.e. Pemberian pil zat besi bagi ibu hamil						
Ya (n=47)	22	78,6	25	80,6	47	79,7
Tidak (n=12)	6	21,4	6	19,4	12	20,3
IP03.f. Pemberian makanan tambahan						
Ya (n=58)	28	100,0	30	96,8	58	98,3
Tidak (n=1)	0	0,0	1	3,2	1	1,7
IP03.g. Penyuluhan tumbuh kembang anak						
Ya (n=53)	25	89,3	28	90,3	53	89,8
Tidak (n=6)	3	10,7	3	9,7	6	10,2
IP03.h. Pelayanan kelas ibu hamil						
Ya (n=29)	12	42,9	17	54,8	29	49,2
Tidak (n=30)	16	57,1	14	45,2	30	50,8
IP05. Apakah posyandu ini mendapatkan biaya transport atau honorarium untuk kader posyandu?						
Ya (n=51)	24	85,7	27	87,1	51	86,4
Tidak (n=8)	4	14,3	4	12,9	8	13,6

Buku Kader Posyandu Module IP

Tabel 1.5.2 Informasi Posyandu (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
IP06. Apakah pembiayaan transport atau honor untuk kader posyandu bersumber dari:						
IP06.a. Anggaran Kampung/APBK						
Ya (n=36)	16	66,7	20	74,1	36	70,6
Tidak (n=15)	8	33,3	7	25,9	15	29,4
IP06.b. Kas yang dikumpulkan warga						
Ya (n=1)	0	0,0	1	3,7	1	2,0
Tidak (n=50)	24	100,0	26	96,3	50	98,0
IP06.c. Insentif dari Puskesmas						
Ya (n=16)	11	45,8	5	18,5	16	31,4
Tidak (n=35)	13	54,2	22	81,5	35	68,6
IP06.v. Sumber lainnya						
Ya (n=7)	3	12,5	4	14,8	7	13,7
Tidak (n=44)	21	87,5	23	85,2	44	86,3
IP06.y. Responden TIDAK TAHU						
Ya (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tidak (n=51)	24	100,0	27	100,0	51	100,0
IP07. Apa level wilayah kerja posyandu ini?						
Seluruh kampung (n=48)	24	85,7	24	77,4	48	81,4
Dusun (n=6)	4	14,3	2	6,5	6	10,2
RW (n=2)	0	0,0	2	6,5	2	3,4
RT (n=2)	0	0,0	2	6,5	2	3,4
Lainnya (n=1)	0	0,0	1	3,2	1	1,7
IP08. Di mana biasanya (paling sering) tempat kegiatan posyandu ini dilaksanakan?						
Balai kampung (n=18)	7	25,0	11	35,5	18	30,5
Polindes/Poskesdes (n=3)	1	3,6	2	6,5	3	5,1
Rumah perangkat kampung (n=2)	0	0,0	2	6,5	2	3,4
Rumah kader (n=8)	5	17,9	3	9,7	8	13,6
Gedung posyandu (n=23)	13	46,4	10	32,3	23	39,0
IP09. Apakah Kepala Kampung pernah menghadiri kegiatan posyandu dalam 12 bulan terakhir?						
Ya (n=28)	11	39,3	17	54,8	28	47,5
Tidak (n=31)	17	60,7	14	45,2	31	52,5
IP10. Apakah Puskesmas pernah mengunjungi posyandu ini dalam 12 bulan terakhir?						
Ya (n=58)	27	96,4	31	100,0	58	98,3
Tidak (n=1)	1	3,6	0	0,0	1	1,7
IP11. Dalam 12 bulan terakhir, apakah posyandu ini menerima bantuan dari luar kampung?						
Ya (n=24)	11	39,3	13	41,9	24	40,7
Tidak (n=35)	17	60,7	18	58,1	35	59,3

Buku Kader Posyandu Module IP

Tabel 1.5.2 Informasi Posyandu (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
IP12. Bantuan/dukungan apa saja yang pernah posyandu ini terima dalam 12 bulan terakhir?						
IP12.a. Obat-obatan						
Ya (n=10)	4	36,4	6	46,2	10	41,7
Tidak (n=14)	7	63,6	7	53,8	14	58,3
IP12.b. Dana						
Ya (n=6)	2	18,2	4	30,8	6	25,0
Tidak (n=18)	9	81,8	9	69,2	18	75,0
IP12.c. Peralatan kesehatan (alat timbang, alat ukur tinggi)						
Ya (n=10)	3	27,3	7	53,8	10	41,7
Tidak (n=14)	8	72,7	6	46,2	14	58,3
IP12.d. Perlengkapan posyandu (furnitur, atk)						
Ya (n=8)	1	9,1	7	53,8	8	33,3
Tidak (n=16)	10	90,9	6	46,2	16	66,7
IP12.e. Produk makanan tambahan						
Ya (n=20)	10	90,9	10	76,9	20	83,3
Tidak (n=4)	1	9,1	3	23,1	4	16,7
IP12.v. Bantuan/dukungan Lainnya						
Ya (n=2)	1	9,1	1	7,7	2	8,3
Tidak (n=22)	10	90,9	12	92,3	22	91,7
IP13. Apakah bantuan/dukungan tersebut (IP12) berasal dari pihak-pihak berikut?						
IP13.a. Pemerintah kabupaten (Dinas Kesehatan)						
Ya (n=8)	2	18,2	6	46,2	8	33,3
Tidak (n=16)	9	81,8	7	53,8	16	66,7
IP13.b. Pemerintah distrik						
Ya (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tidak (n=24)	11	100,0	13	100,0	24	100,0
IP13.c. Puskesmas						
Ya (n=19)	10	90,9	9	69,2	19	79,2
Tidak (n=5)	1	9,1	4	30,8	5	20,8
IP13.d. Organisasi/lembaga						
Ya (n=2)	0	0,0	2	15,4	2	8,3
Tidak (n=22)	11	100,0	11	84,6	22	91,7
IP13.e. Pihak swasta						
Ya (n=3)	0	0,0	3	23,1	3	12,5
Tidak (n=21)	11	100,0	10	76,9	21	87,5
IP13.v. Pihak lainnya						
Ya (n=2)	0	0,0	2	15,4	2	8,3
Tidak (n=22)	11	100,0	11	84,6	22	91,7

Buku Kader Posyandu Module IP

Tabel 1.5.2 Informasi Posyandu (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
IP14. Dalam 12 bulan terakhir, apakah ada layanan khusus masyarakat dengan disabilitas?						
Ya (n=5)	3	10,7	2	6,5	5	8,5
Tidak (n=54)	25	89,3	29	93,5	54	91,5
IP15. Apa bentuk layanan khusus tersebut (IP14)?						
IP15.a. Prioritas mendapatkan layanan						
Ya (n=1)	1	33,3	0	0,0	1	20,0
Tidak (n=4)	2	66,7	2	100,0	4	80,0
IP15.b. Kunjungan ke rumah						
Ya (n=3)	2	66,7	1	50,0	3	60,0
Tidak (n=2)	1	33,3	1	50,0	2	40,0
IP15.c. Adanya sesi khusus difabel						
Ya (n=1)	1	33,3	0	0,0	1	20,0
Tidak (n=4)	2	66,7	2	100,0	4	80,0
IP15.d. Adanya posyandu untuk penyandang disabilitas						
Ya (n=1)	1	33,3	0	0,0	1	20,0
Tidak (n=4)	2	66,7	2	100,0	4	80,0
IP15.v. Bentuk layanan lainnya						
Ya (n=1)	0	0,0	1	50,0	1	20,0
Tidak (n=4)	3	100,0	1	50,0	4	80,0

Buku Kader Posyandu Module IP

Tabel 1.5.2 Informasi Posyandu (Lanjutan)

VARIABEL	Lokasi			
	Non-KOMPAK		KOMPAK	
	Rerata	S.D.	Rerata	S.D.
IP02. Dalam 12 bulan terakhir berapa kali posyandu ini melakukan kegiatan pelayanan?	12,54	5,378	11,87	3,030
IP04. Dalam setiap kegiatan posyandu, rata-rata berapa jumlah tenaga kader yang aktif?	4,964	2,365	4,452	1,524
IP05. Berapa nominal transport atau honorarium untuk kader posyandu?	249.486	320.870	271.539	233.239
IP09. Berapa kali kepala kampung menghadiri kegiatan posyandu dalam 12 bulan terakhir?	1,893	4,605	3,065	4,226
IP10. Berapa kali pihak puskesmas mengunjungi posyandu ini dalam 12 bulan terakhir?	12,21	6,500	12,26	3,732

1.5.3 Seksi PM (Partisipasi Masyarakat)

Tabel 1.5.3 Partisipasi Masyarakat

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PM06a. Selama setahun terakhir, apakah posyandu pernah diundang menghadiri pertemuan tingkat kampung yang membahas perencanaan kegiatan/program kampung?						
Ya (n=34)	16	57,1	18	58,1	34	57,6
Tidak (n=25)	12	42,9	13	41,9	25	42,4
PM07. Selama setahun terakhir, apakah I/B/S pernah menghadiri pertemuan tingkat kampung tersebut?						
Ya (n=32)	15	93,8	17	94,4	32	94,1
Tidak (n=2)	1	6,3	1	5,6	2	5,9
PM08. Dalam pertemuan tersebut apakah I/B/S melakukan hal berikut?						
PM08.a. Memberikan usulan kegiatan						
Ya (n=26)	11	73,3	15	88,2	26	81,3
Tidak (n=6)	4	26,7	2	11,8	6	18,8
PM08.b. Memberikan pendapat						
Ya (n=23)	11	73,3	12	70,6	23	71,9
Tidak (n=9)	4	26,7	5	29,4	9	28,1
PM08.c. Bertanya tentang program/kegiatan						
Ya (n=16)	8	53,3	8	47,1	16	50,0
Tidak (n=16)	7	46,7	9	52,9	16	50,0
PM08.d. Bertanya tentang target program/kegiatan di kampung						
Ya (n=11)	3	20,0	8	47,1	11	34,4
Tidak (n=21)	12	80,0	9	52,9	21	65,6
PM08.e. Bertanya tentang dana/anggaran						
Ya (n=17)	9	60,0	8	47,1	17	53,1
Tidak (n=15)	6	40,0	9	52,9	15	46,9
PM08.f. Ikut mengambil suara untuk memutuskan						
Ya (n=16)	9	60,0	7	41,2	16	50,0
Tidak (n=16)	6	40,0	10	58,8	16	50,0

Buku Kader Posyandu Module PM

1.5.4 Seksi PD (Pendampingan Distrik/Kecamatan dan Kabupaten)

Tabel 1.5.4 Pendampingan Distrik/Kecamatan dan Kabupaten

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PD05. Dalam satu tahun terakhir, apakah I/B/S bertemu dengan puskesmas, baik mengunjungi maupun dikunjungi?						
Ya (n=58)	27	96,4	31	100,0	58	98,3
Tidak (n=1)	1	3,6	0	0,0	1	1,7
PD06. Bila dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu (sebelum pandemi COVID-19), bagaimana frekuensi kunjungan petugas puskesmas ke posyandu ini?						
Lebih jarang (n=12)	5	18,5	7	22,6	12	20,7
Sama saja (n=30)	10	37,0	20	64,5	30	51,7
Lebih sering (n=13)	9	33,3	4	12,9	13	22,4
Tidak tahu (n=3)	3	11,1	0	0,0	3	5,2
PD07. Topik apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan dengan pihak puskesmas tersebut [PD05]?						
PD07.a. Pencegahan penyakit menular						
Ya (n=38)	15	55,6	23	74,2	38	65,5
Tidak (n=20)	12	44,4	8	25,8	20	34,5
PD07.b. Penyuluhan kesehatan						
Ya (n=47)	20	74,1	27	87,1	47	81,0
Tidak (n=11)	7	25,9	4	12,9	11	19,0
PD07.c. Pengelolaan posyandu						
Ya (n=44)	19	70,4	25	80,6	44	75,9
Tidak (n=14)	8	29,6	6	19,4	14	24,1
PD07.d. Tumbuh kembang balita						
Ya (n=48)	20	74,1	28	90,3	48	82,8
Tidak (n=10)	7	25,9	3	9,7	10	17,2
PD07.e. Gizi						
Ya (n=48)	21	77,8	27	87,1	48	82,8
Tidak (n=10)	6	22,2	4	12,9	10	17,2
PD07.f. Kesehatan ibu dan anak (KIA)						
Ya (n=45)	19	70,4	26	83,9	45	77,6
Tidak (n=13)	8	29,6	5	16,1	13	22,4
PD07.g. Sanitasi						
Ya (n=29)	12	44,4	17	54,8	29	50,0
Tidak (n=29)	15	55,6	14	45,2	29	50,0
PD07.h. Permasalahan yang ada di kampung						
Ya (n=17)	9	33,3	8	25,8	17	29,3
Tidak (n=41)	18	66,7	23	74,2	41	70,7
PD07.v. Topik lainnya						
Ya (n=7)	4	14,8	3	9,7	7	12,1
Tidak (n=51)	23	85,2	28	90,3	51	87,9

Buku Kader Posyandu Module PD

Tabel 1.5.4 Pendampingan Distrik/Kecamatan dan Kabupaten (Lanjutan)

VARIABEL	Lokasi			
	Non-KOMPAK		KOMPAK	
	Rerata	S.D.	Rerata	S.D.
PD05. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali I/B/S bertemu dengan puskesmas, baik dikunjungi maupun mengunjungi?	13,04	7,100	11,19	5,095

1.5.5 Seksi PK (Peningkatan Kapasitas)

Tabel 1.5.5 Peningkatan Kapasitas

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PK01. Selama satu tahun terakhir, apakah I/B/S pernah mengikuti pelatihan?						
Ya (n=34)	16	57,1	18	58,1	34	57,6
Tidak (n=25)	12	42,9	13	41,9	25	42,4
PK02. Apakah dalam setahun terakhir pernah mengikuti pelatihan berikut?						
PK02.a. Gizi						
Ya (n=18)	7	43,8	11	61,1	18	52,9
Tidak (n=16)	9	56,3	7	38,9	16	47,1
PK02.b. Perkembangan anak dan balita						
Ya (n=24)	11	68,8	13	72,2	24	70,6
Tidak (n=10)	5	31,3	5	27,8	10	29,4
PK02.c. Kesehatan ibu dan anak						
Ya (n=18)	8	50,0	10	55,6	18	52,9
Tidak (n=16)	8	50,0	8	44,4	16	47,1
PK02.d. Pencegahan penyakit						
Ya (n=16)	6	37,5	10	55,6	16	47,1
Tidak (n=18)	10	62,5	8	44,4	18	52,9
PK02.e. Sanitasi						
Ya (n=7)	4	25,0	3	16,7	7	20,6
Tidak (n=27)	12	75,0	15	83,3	27	79,4
PK02.f. Pengelolaan keuangan						
Ya (n=4)	1	6,3	3	16,7	4	11,8
Tidak (n=30)	15	93,8	15	83,3	30	88,2
PK02.g. Pengelolaan organisasi						
Ya (n=8)	4	25,0	4	22,2	8	23,5
Tidak (n=26)	12	75,0	14	77,8	26	76,5
PK02.v. Topik pelatihan lainnya						
Ya (n=13)	8	50,0	5	27,8	13	38,2
Tidak (n=21)	8	50,0	13	72,2	21	61,8

Buku Kader Posyandu Module PK

Tabel 1.5.5 Peningkatan Kapasitas (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PK03. Siapa pemberi materi dari pelatihan yang I/B/S ikuti?						
PK03.a. Pemerintah kabupaten						
Ya (n=21)	9	56,3	12	66,7	21	61,8
Tidak (n=13)	7	43,8	6	33,3	13	38,2
PK03.b. Pemerintah distrik						
Ya (n=7)	3	18,8	4	22,2	7	20,6
Tidak (n=27)	13	81,3	14	77,8	27	79,4
PK03.c. Pelaku program LANDASAN						
Ya (n=3)	0	0,0	3	16,7	3	8,8
Tidak (n=31)	16	100,0	15	83,3	31	91,2
PK03.d. Akademisi (Universitas)						
Ya (n=3)	1	6,3	2	11,1	3	8,8
Tidak (n=31)	15	93,8	16	88,9	31	91,2
PK03.e. Organisasi/Lembaga						
Ya (n=5)	1	6,3	4	22,2	5	14,7
Tidak (n=29)	15	93,8	14	77,8	29	85,3
PK03.v. Pihak lainnya						
Ya (n=9)	4	25,0	5	27,8	9	26,5
Tidak (n=25)	12	75,0	13	72,2	25	73,5

Buku Kader Posyandu Module PK

Tabel 1.5.5 Peningkatan Kapasitas (Lanjutan)

VARIABEL	Lokasi			
	Non-KOMPAK		KOMPAK	
	Rerata	S.D.	Rerata	S.D.
PK01. Selama satu tahun terakhir, berapa kali I/B/S mengikuti pelatihan?	0,857	1,079	1,032	1,251

1.5.6 Seksi DK (Dukungan Pemerintah Kampung)

Tabel 1.5.6 Dukungan Pemerintah Kampung

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
DK01. Menurut pendapat I/B/S, apakah yang menjadi masalah kesehatan di kampung ini?						
DK01.a. Kurangnya fasilitas Kesehatan						
Ya (n=29)	13	46,4	16	51,6	29	49,2
Tidak (n=30)	15	53,6	15	48,4	30	50,8
DK01.b. Kurangnya alat Kesehatan						
Ya (n=35)	17	60,7	18	58,1	35	59,3
Tidak (n=24)	11	39,3	13	41,9	24	40,7
DK01.c. Kurangnya tenaga kesehatan/kader posyandu aktif						
Ya (n=23)	8	28,6	15	48,4	23	39,0
Tidak (n=36)	20	71,4	16	51,6	36	61,0
DK01.d. Jauhnya jarak ke puskesmas/puskesmas pembantu						
Ya (n=12)	8	28,6	4	12,9	12	20,3
Tidak (n=47)	20	71,4	27	87,1	47	79,7
DK01.e. Gizi Buruk						
Ya (n=27)	14	50,0	13	41,9	27	45,8
Tidak (n=32)	14	50,0	18	58,1	32	54,2
DK01.f. Penyakit seperti: diare, malaria, filariasis masih tinggi						
Ya (n=31)	14	50,0	17	54,8	31	52,5
Tidak (n=28)	14	50,0	14	45,2	28	47,5
DK01.v. Masalah lainnya						
Ya (n=16)	9	32,1	7	22,6	16	27,1
Tidak (n=43)	19	67,9	24	77,4	43	72,9
DK01.y. Tidak tahu						
Ya (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tidak (n=59)	28	100,0	31	100,0	59	100,0

Buku Kader Posyandu Module DK

Tabel 1.5.6 Dukungan Pemerintah Kampung (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
DK02. Menurut I/B/S masalah mana yang bisa ditanggulangi bersama dengan pemerintah kampung?						
DK02.a. Kurangnya fasilitas Kesehatan (Gedung Posyandu, Rumah Bidan Desa, Poskesdes)						
Ya (n=23)	10	35,7	13	41,9	23	39,0
Tidak (n=36)	18	64,3	18	58,1	36	61,0
DK02.b. Kurangnya alat Kesehatan (Alat timbangbayi dll)						
Ya (n=24)	13	46,4	11	35,5	24	40,7
Tidak (n=35)	15	53,6	20	64,5	35	59,3
DK02.c. Kurangnya tenaga kesehatan/kader posyandu aktif						
Ya (n=17)	7	25,0	10	32,3	17	28,8
Tidak (n=42)	21	75,0	21	67,7	42	71,2
DK02.d. Jauhnya jarak ke puskesmas/pustu						
Ya (n=3)	3	10,7	0	0,0	3	5,1
Tidak (n=56)	25	89,3	31	100,0	56	94,9
DK02.e. Gizi buruk						
Ya (n=21)	12	42,9	9	29,0	21	35,6
Tidak (n=38)	16	57,1	22	71,0	38	64,4
DK02.f. Penyakit seperti diare, malaria, filariasis, dll masih tinggi						
Ya (n=14)	6	21,4	8	25,8	14	23,7
Tidak (n=45)	22	78,6	23	74,2	45	76,3
DK02.v. Masalah lainnya						
Ya (n=10)	4	14,3	6	19,4	10	16,9
Tidak (n=49)	24	85,7	25	80,6	49	83,1
DK02.w. Tidak ada						
Ya (n=6)	3	10,7	3	9,7	6	10,2
Tidak (n=53)	25	89,3	28	90,3	53	89,8
DK02.y. tidak tahu						
Ya (n=1)	0	0,0	1	3,2	1	1,7
Tidak (n=58)	28	100,0	30	96,8	58	98,3

Buku Kader Posyandu Module DK

Tabel 1.5.6 Dukungan Pemerintah Kampung (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
DK03. Apakah pemecahan masalah tersebut [DK02] pernah diusulkan ke dalam RPJMK?						
Ya (n=30)	12	48,0	18	64,3	30	56,6
Tidak (n=15)	9	36,0	6	21,4	15	28,3
Tidak tahu (n=8)	4	16,0	4	14,3	8	15,1
DK03a. Apakah pemecahan masalah tersebut [DK02] pernah diusulkan ke dalam RKPK?						
Ya (n=25)	9	36,0	16	57,1	25	47,2
Tidak (n=21)	13	52,0	8	28,6	21	39,6
Tidak tahu (n=7)	3	12,0	4	14,3	7	13,2
DK04. Sepengetahuan I/B/S, apakah ada kegiatan RPJMK memberikan dukungan dana untuk kegiatan posyandu ini?						
Ya (n=36)	15	53,6	21	67,7	36	61,0
Tidak (n=14)	9	32,1	5	16,1	14	23,7
Tidak tahu (n=9)	4	14,3	5	16,1	9	15,3
DK04a. Sepengetahuan I/B/S, apakah ada kegiatan kesehatan yang masuk RKPK TA 2021?						
Ya (n=30)	12	42,9	18	58,1	30	50,8
Tidak (n=16)	9	32,1	7	22,6	16	27,1
Tidak tahu (n=13)	7	25,0	6	19,4	13	22,0
DK05. Kegiatan apa yang masuk ke dalam RKPK TA 2021?						
DK05.a. Pembangunan gedung posyandu/poskesdes						
Ya (n=9)	4	33,3	5	27,8	9	30,0
Tidak (n=21)	8	66,7	13	72,2	21	70,0
DK05.b. Kegiatan pembelian alat kesehatan						
Ya (n=13)	4	33,3	9	50,0	13	43,3
Tidak (n=17)	8	66,7	9	50,0	17	56,7
DK05.c. Insentif tenaga kesehatan/kader						
Ya (n=23)	8	66,7	15	83,3	23	76,7
Tidak (n=7)	4	33,3	3	16,7	7	23,3
DK05.d. Pemberian makanan tambahan (PMT)						
Ya (n=19)	8	66,7	11	61,1	19	63,3
Tidak (n=11)	4	33,3	7	38,9	11	36,7
DK05.v. Kegiatan lainnya						
Ya (n=3)	2	16,7	1	5,6	3	10,0
Tidak (n=27)	10	83,3	17	94,4	27	90,0
DK05.y. Tidak tahu						
Ya (n=2)	1	8,3	1	5,6	2	6,7
Tidak (n=28)	11	91,7	17	94,4	28	93,3
Menurut I/B/S bagaimana kondisi kesehatan di kampung ini secara umum?						
Lebih buruk (n=9)	5	17,9	4	12,9	9	15,3
Sama saja (n=12)	6	21,4	6	19,4	12	20,3
Lebih baik (n=37)	16	57,1	21	67,7	37	62,7
Tidak tahu (n=1)	1	3,6	0	0,0	1	1,7

Buku Kader Posyandu DK

1.6 Buku Kepala Sekolah

1.6.1 Seksi LR (Latar Belakang Responden)

Tabel 1.6.1. Latar Belakang Responden Kepala Sekolah

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
LR02. Apa posisi I/B/S saat ini di sekolah?						
Kepala_Sekolah (n=34)	13	52,0	21	72,4	34	63,0
PJS (n=2)	1	4,0	1	3,4	2	3,7
Wakil_Kepala_Sekolah (n=2)	2	8,0	0	0,0	2	3,7
Guru (n=16)	9	36,0	7	24,1	16	29,6
LR06. Jenis kelamin I/B/S						
Laki-laki (n=28)	12	48,0	16	53,3	28	50,9
Perempuan (n=27)	13	52,0	14	46,7	27	49,1
LR07. Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diikuti I/B/S?						
SMA/MA/Sederajat (n=2)	0	0,0	2	6,7	2	3,6
D4/S1 (n=50)	24	96,0	26	86,7	50	90,9
S2/S3 (n=3)	1	4,0	2	6,7	3	5,5
LR08. Kelas tertinggi yang sedang/pernah diduduki I/B/S						
Tamat (n=55)	25	100,0	30	100,0	55	100,0
LR10. Apakah agama yang dianut I/B/S?						
Islam (n=9)	6	24,0	3	10,0	9	16,4
Kristen Protestan (n=37)	16	64,0	21	70,0	37	67,3
Katolik (n=9)	3	12,0	6	20,0	9	16,4
LR14. Apakah I/B/S punya KTP?						
Ya (n=55)	25	100,0	30	100,0	55	100,0
Tidak (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
LR15. Apakah I/B/S punya KK?						
Ya (n=55)	25	100,0	30	100,0	55	100,0
Tidak (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Buku Kepala Sekolah Module LR

Tabel 1.6.1. Latar Belakang Responden Kepala Sekolah (Lanjutan)

VARIABEL	Lokasi			
	Non-KOMPAK		KOMPAK	
	Rerata	S.D.	Rerata	S.D.
LR05. Umur Responden	47.20	9.403	49.70	8.730

1.6.2 Seksi DS (Data Sekolah)

Tabel 1.6.2. Data Sekolah

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
DS09. Selama tahun ajaran 2020-2021, bagaimana kegiatan belajar/ mengajar (KBM)?						
Pembelajaran tatap muka (PTM) (n=29)	11	44,0	18	60,0	29	52,7
Pembelajaran jarak jauh (PJJ) (n=6)	4	16,0	2	6,7	6	10,9
Campuran PTM dan PJJ (n=20)	10	40,0	10	33,3	20	36,4
Buku Kepala Puskesmas Module DS						

Tabel 1.6.2. Data Sekolah (Lanjutan)

VARIABEL	Lokasi			
	Non-KOMPAK		KOMPAK	
	Rerata	S.D.	Rerata	S.D.
DS01.a. Berapa jumlah siswa KELAS 1 yang terdaftar? (TA 2021/2022)	29,96	19,95	32,93	28,86
DS02.a. Berapa jumlah rombel untuk (Kelas 1)	1,360	0,700	1,400	0,675
DS01.b. Berapa jumlah siswa KELAS 2 yang terdaftar? (TA 2021/2022)	20,60	14,55	31,80	25,25
DS02.b. Berapa jumlah rombel untuk (Kelas 2)	1,320	0,627	1,433	0,679
DS01.c. Berapa jumlah siswa KELAS 3 yang terdaftar? (TA 2021/2022)	20,48	13,55	38,47	33,52
DS02.c. Berapa jumlah rombel untuk (Kelas 3)	1,280	0,614	1,567	0,728
DS01.d. Berapa jumlah siswa KELAS 4 yang terdaftar? (TA 2021/2022)	22,76	17,15	36,70	32,37
DS02.d. Berapa jumlah rombel untuk (Kelas 4)	1,120	0,332	1,467	0,730
DS01.e. Berapa jumlah siswa KELAS 5 yang terdaftar? (TA 2021/2022)	20,60	14,22	32,37	28,03
DS02.e. Berapa jumlah rombel untuk (Kelas 5)	1,240	0,436	1,433	0,728
DS03.a. Berapa jumlah total siswa? (laki-laki)	75,04	47,99	104,9	84,48
DS03.b. Berapa jumlah total siswa? (perempuan)	62,56	40,35	95,73	79,79
DS04.a. Berapa jumlah siswa drop out pada tahun ajaran 2020/2021? (laki-laki)	1,440	6,035	0,300	0,794
DS04.b. Berapa jumlah siswa drop out pada tahun ajaran 2020/2021? (perempuan)	0,480	1,295	0,200	0,484
DS05.a. Berapa jumlah siswa dengan disabilitas? (laki-laki)	0,440	0,583	0,400	0,563
DS05.b. Berapa jumlah siswa dengan disabilitas? (perempuan)	0,0800	0,277	0,367	0,765
DS06. Menurut pendapat I/B/S, berapa persentase murid yang berasal dari keluarga	72,96	32,04	77,60	26,20
DS07.a.a. Berapa jumlah Guru PNS (laki-laki)	2,320	1,464	1,967	1,273
DS07.a.b. Berapa jumlah Guru PNS (perempuan)	2,720	2,227	3,400	3,212

Tabel 1.6.2. Data Sekolah (Lanjutan)

VARIABEL	Lokasi			
	Non-KOMPAK		KOMPAK	
	Rerata	S.D.	Rerata	S.D.
DS07.b.a. Berapa jumlah Guru Honor Sekolah/Yayasan (laki-laki)	0,640	0,700	1,167	1,577
DS07.b.b. Berapa jumlah Guru Honor Sekolah/Yayasan (perempuan)	2,320	2,036	2,933	3,413
DS07.c.a. Berapa jumlah Guru Honor Daerah (laki-laki)	0,720	1,429	2,033	4,303
DS07.c.b. Berapa jumlah Guru Honor Daerah (perempuan)	0,920	1,288	2,400	3,510
DS07.d.a. Berapa jumlah Guru dengan disabilitas (laki-laki)	0	0	0,0333	0,183
DS07.d.b. Berapa jumlah Guru dengan disabilitas (perempuan)	0	0	0	0
DS08.a. Berapa jml Ruang Kelas yang ada dan berfungsi?	6,200	2,236	7,433	3,181
DS08.b. Berapa jml Ruang Kepala Sekolah yang ada dan berfungsi?	0,800	0,408	0,733	0,450
DS08.c. Berapa jml Ruang Guru yang ada dan berfungsi?	0,840	0,374	0,900	0,305
DS08.d.a. Berapa jml Kamar Mandi/WC guru yang ada dan berfungsi? (Guru perempuan)	0,280	0,458	0,300	0,596
DS08.d.b. Berapa jml Kamar Mandi/WC guru yang ada dan berfungsi? (Guru laki-laki)	0,280	0,458	0,267	0,521
DS08.d.c. Berapa jml Kamar Mandi/WC guru yang ada dan berfungsi? (Campur)	0,600	0,500	0,667	0,606
DS08.e.a. Berapa jml Kamar Mandi/WC murid yang ada dan berfungsi? (Murid perempuan)	0,720	1,242	0,767	0,898
DS08.e.b. Berapa jml Kamar Mandi/WC murid yang ada dan berfungsi? (Murid laki-laki)	0,600	0,866	0,767	0,898
DS08.e.c. Berapa jml Kamar Mandi/WC murid yang ada dan berfungsi? (Campur)	0,560	0,961	0,500	0,900
DS08.f. Berapa jml Komputer/Laptop yang ada dan berfungsi?	5,320	5,779	3,167	4,496
DS08.g. Berapa jml Alat Peraga yang ada dan berfungsi?	6,800	10,62	9,633	11,04

1.6.3 Seksi PM (Partisipasi Masyarakat)

Tabel 1.6.3. Partisipasi Masyarakat

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PM06a. Selama setahun terakhir, apakah sekolah pernah diundang dalam pertemuan tingkat kampung yang membahas perencanaan kegiatan/program kampung?						
Ya (n=20)	11	44,0	9	30,0	20	36,4
Tidak (n=35)	14	56,0	21	70,0	35	63,6
PM07. Selama setahun terakhir, apakah I/B/S pernah menghadiri pertemuan [PM06a] tersebut?						
Ya (n=15)	8	72,7	7	77,8	15	75,0
Tidak (n=5)	3	27,3	2	22,2	5	25,0
PM07a. Siapa dari sekolah ini yang pernah menghadiri pertemuan tingkat kampung yang membahas perencanaan						
PM07a.a. Kepala sekolah						
Ya (n=2)	1	33,3	1	50,0	2	40,0
Tidak (n=3)	2	66,7	1	50,0	3	60,0
PM07a.b. Guru						
Ya (n=3)	1	33,3	2	100,0	3	60,0
Tidak (n=2)	2	66,7	0	0,0	2	40,0
PM07a.c. Staf administrasi						
Ya (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tidak (n=5)	3	100,0	2	100,0	5	100,0
PM07a.d. Komite sekolah						
Ya (n=1)	1	33,3	0	0,0	1	20,0
Tidak (n=4)	2	66,7	2	100,0	4	80,0
PM07a.v. Lainnya						
Ya (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tidak (n=5)	3	100,0	2	100,0	5	100,0

Buku Kepala Sekolah Module PM

Tabel 1.6.3. Partisipasi Masyarakat (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PM08. Dalam pertemuan tingkat kampung tersebut, apakah I/B/S						
PM08.a. Memberikan usulan kegiatan?						
Ya (n=14)	7	87,5	7	100,0	14	93,3
Tidak (n=1)	1	12,5	0	0,0	1	6,7
PM08.b. Memberikan pendapat?						
Ya (n=13)	6	75,0	7	100,0	13	86,7
Tidak (n=2)	2	25,0	0	0,0	2	13,3
PM08.c. Bertanya tentang program/kegiatan di kampung?						
Ya (n=9)	3	37,5	6	85,7	9	60,0
Tidak (n=6)	5	62,5	1	14,3	6	40,0
PM08.d. Bertanya tentang target program/kegiatan di kampung?						
Ya (n=8)	3	37,5	5	71,4	8	53,3
Tidak (n=7)	5	62,5	2	28,6	7	46,7
PM08.e. Bertanya tentang dana/anggaran?						
Ya (n=8)	3	37,5	5	71,4	8	53,3
Tidak (n=7)	5	62,5	2	28,6	7	46,7
PM08.f. Ikut mengambil suara untuk memutuskan?						
Ya (n=6)	2	25,0	4	57,1	6	40,0
Tidak (n=9)	6	75,0	3	42,9	9	60,0

Buku Kepala Sekolah Module PM

1.6.4 Seksi PD (Pendampingan Distrik/Kecamatan dan Kabupaten)

Tabel 1.6.4. Pendampingan Distrik/Kecamatan dan Kabupaten

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PD01. Dalam satu tahun terakhir, apakah pernah bertemu dengan pemerintah kabupaten?						
YA (n=43)	19	76,0	24	80,0	43	78,2
TIDAK PERNAH BERTEMU (n=12)	6	24,0	6	20,0	12	21,8
PD02. Bila dibandingkan dengan 2019 (sebelum pandemi), bagaimana frekuensi pertemuan dengan Pemkab?						
Lebih jarang (n=22)	11	57,9	11	45,8	22	51,2
SAMA SAJA (n=8)	1	5,3	7	29,2	8	18,6
Lebih sering (n=11)	6	31,6	5	20,8	11	25,6
TIDAK BERLAKU (n=2)	1	5,3	1	4,2	2	4,7
PD03. Dengan bidang/dinas/bagian apa saja I/B/S bertemu?						
PD03.a. Dinas Pendidikan						
Ya (n=41)	18	94,7	23	95,8	41	95,3
Tidak (n=2)	1	5,3	1	4,2	2	4,7
PD03.b. Bupati/ Wakil Bupati						
Ya (n=6)	2	10,5	4	16,7	6	14,0
Tidak (n=37)	17	89,5	20	83,3	37	86,0
PD03.c. DPRD						
Ya (n=6)	2	10,5	4	16,7	6	14,0
Tidak (n=37)	17	89,5	20	83,3	37	86,0
PD03.d. BPK						
Ya (n=3)	1	5,3	2	8,3	3	7,0
Tidak (n=40)	18	94,7	22	91,7	40	93,0
PD03.v. Lainnya						
Ya (n=10)	5	26,3	5	20,8	10	23,3
Tidak (n=33)	14	73,7	19	79,2	33	76,7

Buku Kepala Sekolah Module PD

Tabel 1.6.4. Pendampingan Distrik/Kecamatan dan Kabupaten (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PD04. Topik apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut (dengan pemerintah kabupaten)						
PD04.a. Kurikulum						
Ya (n=26)	11	57,9	15	62,5	26	60,5
Tidak (n=17)	8	42,1	9	37,5	17	39,5
PD04.b. Perencanaan yang melibatkan sekolah						
Ya (n=16)	5	26,3	11	45,8	16	37,2
Tidak (n=27)	14	73,7	13	54,2	27	62,8
PD04.c. Program bantuan						
Ya (n=27)	15	78,9	12	50,0	27	62,8
Tidak (n=16)	4	21,1	12	50,0	16	37,2
PD04.d. Permasalahan KBM						
Ya (n=29)	12	63,2	17	70,8	29	67,4
Tidak (n=14)	7	36,8	7	29,2	14	32,6
PD04.e. Permasalah infrastruktur sekolah						
Ya (n=23)	11	57,9	12	50,0	23	53,5
Tidak (n=20)	8	42,1	12	50,0	20	46,5
PD04.f. Monitoring						
Ya (n=23)	9	47,4	14	58,3	23	53,5
Tidak (n=20)	10	52,6	10	41,7	20	46,5
PD04.v. Lainnya						
Ya (n=11)	4	21,1	7	29,2	11	25,6
Tidak (n=32)	15	78,9	17	70,8	32	74,4

Buku Kepala Sekolah Module PD

Tabel 1.6.4. Pendampingan Distrik/Kecamatan dan Kabupaten (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
	Kolom		Kolom		Kolom	
PD05. Dalam satu tahun terakhir, apakah pernah bertemu dengan pemerintah distrik?						
YA (n=25)	13	52,0	12	40,0	25	45,5
TIDAK PERNAH BERTEMU (n=30)	12	48,0	18	60,0	30	54,5
PD06. Bila dibandingkan dengan 2019, bagaimana frekuensi pertemuan dengan pemerintah distrik?						
Lebih jarang (n=12)	8	61,5	4	33,3	12	48,0
SAMA SAJA (n=3)	2	15,4	1	8,3	3	12,0
Lebih sering (n=9)	3	23,1	6	50,0	9	36,0
TIDAK BERLAKU (n=1)	0	0,0	1	8,3	1	4,0
PD07. Topik apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut (dengan pemerintah distrik)						
PD07.a. Kurikulum						
Ya (n=4)	3	23,1	1	8,3	4	16,0
Tidak (n=21)	10	76,9	11	91,7	21	84,0
PD07.b. Perencanaan yang melibatkan sekolah						
Ya (n=10)	3	23,1	7	58,3	10	40,0
Tidak (n=15)	10	76,9	5	41,7	15	60,0
PD07.c. Program bantuan						
Ya (n=6)	3	23,1	3	25,0	6	24,0
Tidak (n=19)	10	76,9	9	75,0	19	76,0
PD07.d. Permasalahan KBM						
Ya (n=8)	4	30,8	4	33,3	8	32,0
Tidak (n=17)	9	69,2	8	66,7	17	68,0
PD07.e. Permasalahan infrastruktur sekolah						
Ya (n=9)	5	38,5	4	33,3	9	36,0
Tidak (n=16)	8	61,5	8	66,7	16	64,0
PD07.f. Monitoring						
Ya (n=10)	6	46,2	4	33,3	10	40,0
Tidak (n=15)	7	53,8	8	66,7	15	60,0
PD07.v. Lainnya						
Ya (n=9)	6	46,2	3	25,0	9	36,0
Tidak (n=16)	7	53,8	9	75,0	16	64,0

Buku Kepala Sekolah Module PD

Tabel 1.6.4. Pendampingan Distrik/Kecamatan dan Kabupaten (Lanjutan)

VARIABEL	Lokasi			
	Non-KOMPAK		KOMPAK	
	Rerata	S.D.	Rerata	S.D.
PD01. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali bertemu dengan pemerintah kabupaten baik mengunjungi maupun dikunjungi?	4,280	4,496	6,333	15,38
PD05. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali bertemu dengan pemerintah distrik baik mengunjungi maupun dikunjungi?	3,800	9,840	2,133	4,783

1.6.5 Seksi PK (Peningkatan Kapasitas)

Tabel 1.6.5. Peningkatan Kapasitas

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PK01. Selama satu tahun terakhir, apakah I/B/S mengikuti pelatihan?						
Ya (n=34)	15	60,0	19	63,3	34	61,8
Tidak Mengikuti (n=21)	10	40,0	11	36,7	21	38,2
PK02. Pelatihan yang diikuti dalam satu tahun terakhir						
PK02.a. Manajemen sekolah (MBS, SPM)						
Ya (n=26)	10	66,7	16	84,2	26	76,5
Tidak (n=8)	5	33,3	3	15,8	8	23,5
PK02.b. Pengelolaan anggaran sekolah						
Ya (n=17)	6	40,0	11	57,9	17	50,0
Tidak (n=17)	9	60,0	8	42,1	17	50,0
PK02.c. Sinergi perencanaan sekolah dengan kampung						
Ya (n=6)	0	0,0	6	31,6	6	17,6
Tidak (n=28)	15	100,0	13	68,4	28	82,4
PK02.v. Lainnya						
Ya (n=16)	8	53,3	8	42,1	16	47,1
Tidak (n=18)	7	46,7	11	57,9	18	52,9

Buku Kepala Sekolah Module PK

Tabel 1.6.5. Peningkatan Kapasitas (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PK03. Pemberi materi pelatihan						
PK03.a. PEMERINTAH KABUPATEN						
Ya (n=28)	12	80,0	16	84,2	28	82,4
Tidak (n=6)	3	20,0	3	15,8	6	17,6
PK03.b. PEMERINTAH DISTRIK						
Ya (n=1)	0	0,0	1	5,3	1	2,9
Tidak (n=33)	15	100,0	18	94,7	33	97,1
PK03.c. PELAKU PROGRAM LANDASAN						
Ya (n=5)	0	0,0	5	26,3	5	14,7
Tidak (n=29)	15	100,0	14	73,7	29	85,3
PK03.d. AKADEMISI/UNIVERSITAS						
Ya (n=4)	3	20,0	1	5,3	4	11,8
Tidak (n=30)	12	80,0	18	94,7	30	88,2
PK03.e. ORGANISASI/LEMBAGA (LEVEL KABUPATEN-PUSAT)						
Ya (n=3)	0	0,0	3	15,8	3	8,8
Tidak (n=31)	15	100,0	16	84,2	31	91,2
PK03.v. LAINNYA						
Ya (n=17)	8	53,3	9	47,4	17	50,0
Tidak (n=17)	7	46,7	10	52,6	17	50,0

Buku Kepala Sekolah Module PK

Tabel 1.6.5. Peningkatan Kapasitas (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PK04. Selama setahun terakhir, apakah I/B/S atau staf/guru lain mendapatkan pelatihan dari program LANDASAN?						
Ya (n=12)	0	0,0	12	40,0	12	21,8
Tidak (n=40)	23	92,0	17	56,7	40	72,7
Tidak tahu/lupa (n=3)	2	8,0	1	3,3	3	5,5
PK05. Siapa saja dari sekolah ini yang pernah mengikuti pelatihan LANDASAN						
PK05.a. Kepala sekolah						
Ya (n=11)	n/a	n/a	11	91,7	11	91,7
Tidak (n=1)	n/a	n/a	1	8,3	1	8,3
PK05.b. Guru						
Ya (n=9)	n/a	n/a	9	75,0	9	75,0
Tidak (n=3)	n/a	n/a	3	25,0	3	25,0
PK05.c. Staf administrasi						
Ya (n=5)	n/a	n/a	5	41,7	5	41,7
Tidak (n=7)	n/a	n/a	7	58,3	7	58,3
PK05.d. Komite sekolah						
Ya (n=5)	n/a	n/a	5	41,7	5	41,7
Tidak (n=7)	n/a	n/a	7	58,3	7	58,3
PK05.v. Lainnya						
Ya (n=2)	n/a	n/a	2	16,7	2	16,7
Tidak (n=10)	n/a	n/a	10	83,3	10	83,3

Buku Kepala Sekolah Module PK

Tabel 1.6.5. Peningkatan Kapasitas (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	Kol%	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PK06. Apakah I/B/S atau staf/guru lain di sekolah ini pernah mendapatkan pelatihan dari Program LANDASAN seperti berikut:						
PK06.a. SINERGI PERENCANAAN SEKOLAH DENGAN KAMPUNG						
Ya (n=12)	n/a	n/a	12	100,0	12	100,0
PK06.b. SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMUM)						
Ya (n=10)	n/a	n/a	10	83,3	10	83,3
Tidak (n=2)	n/a	n/a	2	16,7	2	16,7
PK06.c. KOMITE SEKOLAH						
Ya (n=11)	n/a	n/a	11	91,7	11	91,7
Tidak (n=1)	n/a	n/a	1	8,3	1	8,3
PK06.d. MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH						
Ya (n=11)	n/a	n/a	11	91,7	11	91,7
Tidak (n=1)	n/a	n/a	1	8,3	1	8,3
PK06.e. LAYANAN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF						
Ya (n=8)	n/a	n/a	8	66,7	8	66,7
Tidak (n=4)	n/a	n/a	4	33,3	4	33,3
PK10. Menurut I/B/S, apakah pelatihan dari Program LANDASAN bermanfaat?						
Bermanfaat (n=6)	n/a	n/a	6	50,0	6	50,0
Sangat bermanfaat (n=6)	n/a	n/a	6	50,0	6	50,0
PK11. Apakah pihak sekolah sudah menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS)?						
Ya (n=40)	15	60,0	25	83,3	40	72,7
Tidak (n=15)	10	40,0	5	16,7	15	27,3
PK12. Apakah dokumen RKS dan RKAS sudah disinergikan dengan perencanaan kampung?						
Ya (n=12)	2	13,3	10	40,0	12	30,0
Tidak (n=28)	13	86,7	15	60,0	28	70,0

Buku Kepala Sekolah Module PK

Tabel 1.6.5. Peningkatan Kapasitas (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PK13. Apakah I/B/S mengetahui SAIK+/SIO Papua						
Ya (n=11)	1	4,0	10	33,3	11	20,0
Tidak (n=44)	24	96,0	20	66,7	44	80,0
PK14. Apakah sekolah memanfaatkan data SAIK+/SIO Papua						
Ya (n=2)	0	0,0	2	20,0	2	18,2
Tidak (n=9)	1	100,0	8	80,0	9	81,8
PK15. Untuk apa saja Data SAIK+/SIO Papua digunakan						
PK15.a. MEMBUAT PERENCANAAN SEKOLAH						
Ya (n=2)	n/a	n/a	2	100,0	2	100,0
Tidak (n=0)	n/a	n/a	0	0,0	0	0,0
PK15.b. MENGIDENTIFIKASI ANAK PUTUS SEKOLAH						
Ya (n=2)	n/a	n/a	2	100,0	2	100,0
Tidak (n=0)	n/a	n/a	0	0,0	0	0,0
PK15.c. MENENTUKAN SASARAN KELOMPOK PENYANDANG DISABILITAS						
Ya (n=0)	n/a	n/a	0	0,0	0	0,0
Tidak (n=2)	n/a	n/a	2	100,0	2	100,0
PK15.v. LAINNYA						
Ya (n=0)	n/a	n/a	0	0,0	0	0,0
Tidak (n=2)	n/a	n/a	2	100,0	2	100,0
Buku Kepala Sekolah Module PK						

Tabel 1.6.5. Peningkatan Kapasitas (Lanjutan)

VARIABEL	Lokasi			
	Non-KOMPAK		KOMPAK	
	Rerata	S.D.	Rerata	S.D.
PK01. Selama satu tahun terakhir, berapa kali I/B/S mengikuti pelatihan?	1.640	2.307	1.467	1.655

1.6.6 Seksi DK (Dukungan Pemerintah Kampung)

Tabel 1.6.6. Dukungan Pemerintah Kampung

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
DK01. Masalah Pendidikan di kampung ini						
DK01.a. DAYA TAMPUNG SEKOLAH TIDAK MEMADAI?						
Ya (n=24)	13	52,0	11	36,7	24	43,6
Tidak (n=31)	12	48,0	19	63,3	31	56,4
DK01.b. SARANA PRASARANA SEKOLAH TIDAK MEMADAI?						
Ya (n=43)	20	80,0	23	76,7	43	78,2
Tidak (n=12)	5	20,0	7	23,3	12	21,8
DK01.c. JUMLAH GURU MASIH KURANG?						
Ya (n=22)	11	44,0	11	36,7	22	40,0
Tidak (n=33)	14	56,0	19	63,3	33	60,0
DK01.d. JAUHNYA JARAK SEKOLAH?						
Ya (n=13)	8	32,0	5	16,7	13	23,6
Tidak (n=42)	17	68,0	25	83,3	42	76,4
DK01.e. TINGKAT KEHADIRAN SISWA RENDAH?						
Ya (n=34)	14	56,0	20	66,7	34	61,8
Tidak (n=21)	11	44,0	10	33,3	21	38,2
DK01.f. JUMLAH ANAK PUTUS SEKOLAH TINGGI?						
Ya (n=10)	4	16,0	6	20,0	10	18,2
Tidak (n=45)	21	84,0	24	80,0	45	81,8
DK01.g. TINGGINYA JUMLAH ANAK YANG TIDAK MELANJUTKAN KE JENJANG SELANJUTNYA?						
Ya (n=14)	8	32,0	6	20,0	14	25,5
Tidak (n=41)	17	68,0	24	80,0	41	74,5
DK01.h. TINGKAT KEHADIRAN GURU RENDAH?						
Ya (n=17)	8	32,0	9	30,0	17	30,9
Tidak (n=38)	17	68,0	21	70,0	38	69,1
DK01.i. LAYANAN PENDIDIKAN YANG BELUM DAPAT DIAKSES SISWA						
Tidak (n=42)	19	76,0	23	76,7	42	76,4
Ya (n=13)	6	24,0	7	23,3	13	23,6
DK01.v. LAINNYA						
Tidak (n=27)	17	68,0	10	33,3	27	49,1
Ya (n=28)	8	32,0	20	66,7	28	50,9
DK01.y. TIDAK TAHU						
Ya (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tidak (n=55)	25	100,0	30	100,0	55	100,0

Buku Kepala Sekolah Module DK

Tabel 1.6.6 Dukungan Pemerintah Kampung (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
	Kolom		Kolom		Kolom	
DK02. Masalah yang bisa ditanggulangi dengan pemerintah kampung						
DK02.a. DAYA TAMPUNG SEKOLAH TIDAK MEMADAI						
Ya (n=9)	4	16,0	5	16,7	9	16,4
Tidak (n=46)	21	84,0	25	83,3	46	83,6
DK02.b. SARANA PRASARANA SEKOLAH TIDAK MEMADAI						
Ya (n=31)	16	64,0	15	50,0	31	56,4
Tidak (n=24)	9	36,0	15	50,0	24	43,6
DK02.c. JUMLAH GURU MASIH KURANG						
Ya (n=10)	3	12,0	7	23,3	10	18,2
Tidak (n=45)	22	88,0	23	76,7	45	81,8
DK02.d. JAUHNYA JARAK SEKOLAH						
Ya (n=4)	2	8,0	2	6,7	4	7,3
Tidak (n=51)	23	92,0	28	93,3	51	92,7
DK02.e. TINGKAT KEHADIRAN SISWA RENDAH						
Ya (n=21)	10	40,0	11	36,7	21	38,2
Tidak (n=34)	15	60,0	19	63,3	34	61,8
DK02.f. JUMLAH ANAK PUTUS SEKOLAH YANG TINGGI						
Ya (n=6)	3	12,0	3	10,0	6	10,9
Tidak (n=49)	22	88,0	27	90,0	49	89,1
DK02.g. TINGGINYA JUMLAH ANAK YANG TIDAK MELANJUTKAN KE JENJANG SELANJUTNYA						
Ya (n=11)	7	28,0	4	13,3	11	20,0
Tidak (n=44)	18	72,0	26	86,7	44	80,0
DK02.h. RENDAHNYA TINGKAT KEHADIRAN GURU						
Ya (n=7)	2	8,0	5	16,7	7	12,7
Tidak (n=48)	23	92,0	25	83,3	48	87,3

Buku Kepala Sekolah Module DK

Tabel 1.6.6. Dukungan Pemerintah Kampung

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
DK02. Masalah yang bisa ditanggulangi dengan pemerintah kampung						
DK02.i. LAYANAN PENDIDIKAN YANG BELUM DAPAT DIAKSES SISWA						
Ya (n=11)	5	20,0	6	20,0	11	20,0
Tidak (n=44)	20	80,0	24	80,0	44	80,0
DK02.v. LAINNYA						
Ya (n=15)	4	16,0	11	36,7	15	27,3
Tidak (n=40)	21	84,0	19	63,3	40	72,7
DK02.w. TIDAK ADA USULAN						
Ya (n=8)	2	8,0	6	20,0	8	14,5
Tidak (n=47)	23	92,0	24	80,0	47	85,5
DK02.y. TIDAK TAHU						
Ya (n=0)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tidak (n=55)	25	100,0	30	100,0	55	100,0

Buku Kepala Sekolah Module DK

Tabel 1.6.6. Dukungan Pemerintah Kampung (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
DK03. Apakah pemecahan masalah tersebut [DK02] pernah diusulkan ke dalam RPJMK?						
Ya (n=26)	8	32,0	18	60,0	26	47,3
Tidak (n=27)	15	60,0	12	40,0	27	49,1
Tidak tahu/lupa (n=2)	2	8,0	0	0,0	2	3,6
DK03a. Apakah pemecahan masalah tersebut [DK02] pernah diusulkan ke dalam RKPK?						
Ya (n=22)	8	32,0	14	46,7	22	40,0
Tidak (n=30)	14	56,0	16	53,3	30	54,5
Tidak tahu/lupa (n=3)	3	12,0	0	0,0	3	5,5
DK04. Sepengetahuan I/B/S, apakah ada dukungan RPJMK untuk kegiatan sekolah ini?						
Ya (n=27)	10	40,0	17	56,7	27	49,1
Tidak (n=24)	12	48,0	12	40,0	24	43,6
Tidak tahu/lupa (n=4)	3	12,0	1	3,3	4	7,3
DK04a. Sepengetahuan I/B/S, apakah ada kegiatan pendidikan dalam RKPK TA 2021?						
Ya (n=14)	5	20,0	9	30,0	14	25,5
Tidak (n=25)	11	44,0	14	46,7	25	45,5
Tidak tahu/lupa (n=16)	9	36,0	7	23,3	16	29,1
DK05. Kegiatan yang masuk ke dalam RKPK TA 2021						
DK05.a. RENOVASI GEDUNG SEKOLAH						
Ya (n=4)	1	20,0	3	33,3	4	28,6
Tidak (n=10)	4	80,0	6	66,7	10	71,4
DK05.b. PEMELIHARAAN FASILITAS SEKOLAH						
Ya (n=3)	1	20,0	2	22,2	3	21,4
Tidak (n=11)	4	80,0	7	77,8	11	78,6
DK05.c. HONOR GURU BANTU						
Ya (n=4)	1	20,0	3	33,3	4	28,6
Tidak (n=10)	4	80,0	6	66,7	10	71,4
DK05.d. BEASISWA SISWA KAMPUNG						
Tidak (n=8)	4	80,0	4	44,4	8	57,1
Ya (n=6)	1	20,0	5	55,6	6	42,9
DK05.e. UANG TRANSPORTASI						
Tidak (n=13)	4	80,0	9	100,0	13	92,9
Ya (n=1)	1	20,0	0	0,0	1	7,1
DK05.v. LAINNYA						
Tidak (n=9)	3	60,0	6	66,7	9	64,3
Ya (n=5)	2	40,0	3	33,3	5	35,7
DK05.y. TIDAK TAHU						
Tidak (n=12)	5	100,0	7	77,8	12	85,7
Ya (n=2)	0	0,0	2	22,2	2	14,3
DK06. Kondisi pendidikan kampung ini dibandingkan dengan dua tahun yang lalu?						
Lebih buruk (n=26)	10	40,0	16	53,3	26	47,3
Sama saja (n=5)	3	12,0	2	6,7	5	9,1
Lebih baik (n=22)	11	44,0	11	36,7	22	40,0
Tidak berlaku (n=2)	1	4,0	1	3,3	2	3,6

Buku Kepala Sekolah Module DK

1.7 Buku Rumah Tangga (HH)

1.7.1 Seksi AR (Daftar Anggota Rumah Tangga)

Tabel 1.7.1. Kepemilikan JKN/KIS dan Kartu Papua Sehat

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
AR17. Apakah ada ART yang mempunyai BPJS kesehatan JKN/ KIS?						
Ya (n=470)	211	69,9	259	84,4	470	77,2
Tidak (n=139)	91	30,1	48	15,6	139	22,8
AR18. Apakah ada ART yang mempunyai Kartu Papua Sehat?						
Ya (n=75)	37	12,3	38	12,4	75	12,3
Tidak (n=534)	265	87,7	269	87,6	534	87,7

Buku Rumah Tangga Modul AR. DAFTAR ANGGOTA RUMAH TANGGA

Tabel 1.7.1 Kepemilikan JKN/KIS dan Kartu Papua Sehat (Lanjutan)

VARIABEL	AR17. Berapa jumlah anggota rumah tangga ini yang mempunyai BPJS kesehatan/JKN/KIS? (YA)		AR18. Berapa jumlah anggota rumah tangga ini yang mempunyai Kartu Papua Sehat? (YA)	
KOMPAK	2,327*** (0,468)	2,401*** (0,493)	1,012 (0,250)	0,952 (0,262)
Constant	2,319*** (0,291)	2,887*** (0,713)	0,140*** (0,0245)	0,00861*** (0,00857)
Observations	609	609	609	609
Kabupaten FE	NO	YES	NO	YES
Pseudo R2	0,0281	0,0646	4,94e-06	0,225

Robust seeform in parentheses

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

1.7.2 Seksi KR (Kesejahteraan)

Tabel 1.7.2. Kesejahteraan Rumah Tangga

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
KR00. Apakah rumah tangga ini memiliki Kartu Keluarga (KK)?						
Ya (n=569)	272	90,1	297	96,7	569	93,4
Tidak (n=40)	30	9,9	10	3,3	40	6,6
KR02. Apa status kepemilikan bangunan tempat tinggal I/B/S?						
Milik sendiri (n=501)	227	75,2	274	89,3	501	82,3
Kontrak/Sewa (n=7)	5	1,7	2	0,7	7	1,1
Bebas sewa (n=85)	70	23,2	15	4,9	85	14,0
Dinas (n=16)	0	0,0	16	5,2	16	2,6
KR03. Apa jenis bahan/material yang paling banyak untuk ATAP rumah?						
Seng (n=586)	291	96,4	295	96,1	586	96,2
Asbes (n=1)	0	0,0	1	0,3	1	0,2
Ijuk/rumbia/alang-alang/gewang (n=22)	11	3,6	11	3,6	22	3,6
KR04. Apa jenis bahan/material yang paling banyak untuk DINDING rumah?						
Tembok (n=242)	117	38,7	125	40,7	242	39,7
Kayu (n=104)	40	13,2	64	20,8	104	17,1
Papan/bambu (n=246)	135	44,7	111	36,2	246	40,4
Rumbia/alang-alang/gewang (n=6)	5	1,7	1	0,3	6	1,0
Lainnya (n=11)	5	1,7	6	2,0	11	1,8
KR05. Apa jenis bahan/material yang paling banyak untuk LANTAI rumah?						
Marmer/keramik (n=125)	66	21,9	59	19,2	125	20,5
Ubin/tegel/teraso (n=17)	10	3,3	7	2,3	17	2,8
Plester/semen (n=241)	115	38,1	126	41,0	241	39,6
Kayu (n=29)	14	4,6	15	4,9	29	4,8
Papan/bambu/gewang (n=192)	96	31,8	96	31,3	192	31,5
Tanah (n=5)	1	0,3	4	1,3	5	0,8

Tabel 1.7.2. Kesejahteraan Rumah Tangga (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
KR06. Barang-barang dan/atau hewan ternak yang rumah tangga I/B/S						
KR06.1. MOBIL/MINI BUS/TRUK						
Ya (n=45)	29	9,6	16	5,2	45	7,4
Tidak (n=564)	273	90,4	291	94,8	564	92,6
KR06.2. SEPEDA MOTOR/VESPA						
Ya (n=313)	168	55,6	145	47,2	313	51,4
Tidak (n=296)	134	44,4	162	52,8	296	48,6
KR06.3. PERAHU BERMOTOR						
Ya (n=85)	14	4,6	71	23,1	85	14,0
Tidak (n=524)	288	95,4	236	76,9	524	86,0
KR06.4. PERAHU TANPA MOTOR						
Ya (n=136)	39	12,9	97	31,6	136	22,3
Tidak (n=473)	263	87,1	210	68,4	473	77,7
KR06.5. KERBAU						
Tidak (n=609)	302	100,0	307	100,0	609	100,0
KR06.6. SAPI						
Ya (n=81)	59	19,5	22	7,2	81	13,3
Tidak (n=528)	243	80,5	285	92,8	528	86,7

Buku Rumah Tangga Modul KR. Kesejahteraan Rumah Tangga

Tabel 1.7.2. Kesejahteraan Rumah Tangga (Lanjutan)

VARIABEL	KR01. Berapa luas lantai dari bangunan tempat tinggal I/B/S? (meter ²)	
KOMPAK	3,276*** (1,228)	3,417*** (1,315)
Constant	9,067*** (1,746)	6,224*** (1,893)
Observations	609	488
Kabupaten FE	NO	YES
Pseudo R2	0,0390	0,0891

Robust seeform in parentheses

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

1.7.3 Seksi (PR) Program Bantuan

Tabel 1.7.3. Program Bantuan Pemerintah

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PR01. Selama setahun terakhir, apakah rumah tangga ini mendapatkan program bantuan?						
Ya (n=510)	255	84,4	255	83,1	510	83,7
Tidak (n=99)	47	15,6	52	16,9	99	16,3
PR02. Program bantuan apa saja yang diterima rumah tangga						
PR02.a. PKH						
Ya (n=131)	57	22,4	74	29,0	131	25,7
Tidak (n=379)	198	77,6	181	71,0	379	74,3
PR02.b. KARTU SEMBAKO/BPNT						
Ya (n=148)	60	23,5	88	34,5	148	29,0
Tidak (n=362)	195	76,5	167	65,5	362	71,0
PR02.c. BANTUAN SOSIAL TUNAI						
Ya (n=146)	75	29,4	71	27,8	146	28,6
Tidak (n=364)	180	70,6	184	72,2	364	71,4
PR02.d. BPUM/BLT UMKM						
Ya (n=11)	7	2,7	4	1,6	11	2,2
Tidak (n=364)	180	70,6	184	72,2	364	71,4
PR02.e. BANTUAN BERAS BULOG						
PPKM						
Ya (n=69)	46	18,0	23	9,0	69	13,5
Tidak (n=441)	209	82,0	232	91,0	441	86,5
PR02.f. BLT-DD						
Ya (n=324)	166	65,1	158	62,0	324	63,5
Tidak (n=186)	89	34,9	97	38,0	186	36,5
PR02.g. DISKON TARIF LISTRIK						
Ya (n=40)	19	7,5	21	8,2	40	7,8
Tidak (n=470)	236	92,5	234	91,8	470	92,2
PR02.h. SUBSIDI KUOTA INTERNET						
Ya (n=25)	16	6,3	9	3,5	25	4,9
Tidak (n=485)	239	93,7	246	96,5	485	95,1
PR02. Program bantuan apa saja yang diterima rumah tangga						
PR02.i. JKN?						
Ya (n=145)	89	34,9	56	22,0	145	28,4
Tidak (n=365)	166	65,1	199	78,0	365	71,6
PR02.j. BANTUAN UNTUK IBU HAMIL?						
Ya (n=7)	3	1,2	4	1,6	7	1,4
Tidak (n=503)	252	98,8	251	98,4	503	98,6
PR02.k. KARTU PRAKERJA ?						
Ya (n=2)	1	0,4	1	0,4	2	0,4
Tidak (n=508)	254	99,6	254	99,6	508	99,6
PR02.l. BANTUAN RUMAH BERSUBSIDI ?						
Ya (n=24)	13	5,1	11	4,3	24	4,7
Tidak (n=486)	242	94,9	244	95,7	486	95,3

Buku Rumah Tangga Modul PR. Program Bantuan

Tabel 1.7.3. Persepsi Tentang Program Bantuan Pemerintah (Lanjutan)

	Lokasi				Total	
	Non-KOMPAK		KOMPAK			
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PR02. Program bantuan apa saja yang diterima rumah tangga						
PR02.m. TANGAN KASIH?						
Ya (n=15)	6	2,4	9	3,5	15	2,9
Tidak (n=495)	249	97,6	246	96,5	495	97,1
PR02.v. LAINNYA?						
Ya (n=79)	28	11,0	51	20,0	79	15,5
Tidak (n=431)	227	89,0	204	80,0	431	84,5

Buku Rumah Tangga Modul PR. Program Bantuan

Tabel 1.7.3. Perbedaan Penerimaan Program Bantuan Pemerintah antara Lokasi KOMPAK dan Non-KOMPAK

VARIABEL	PR01. Selama setahun terakhir, apakah rumah tangga ini mendapatkan program bantuan? (YA)	
KOMPAK	0,904 (0,199)	0,900 (0,201)
Constant	5,426*** (0,862)	7,990*** (2,337)
Observations	609	609
Kabupaten FE	NO	YES
Pseudo R2	0,000391	0,0316

Robust seeform in parentheses

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

1.7.4 Seksi KD (Pelayanan Kesehatan dan Admindak)

Tabel 1.7.4. Penggunaan Pelayanan Kesehatan dan Admindak (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
KD01. Dalam setahun terakhir, apakah rumah tangga ini pernah ke [...] untuk mendapatkan layanan (sakit, cek rutin)?						
KD01.a. PUSKESMAS/PUSTU?						
Ya (n=458)	210	69,5	248	80,8	458	75,2
Tidak (n=151)	92	30,5	59	19,2	151	24,8
KD01.b. POLINDES/POSKESDES?						
Ya (n=42)	16	5,3	26	8,5	42	6,9
Tidak (n=567)	286	94,7	281	91,5	567	93,1
KD01.c. POSYANDU?						
Ya (n=277)	129	42,7	148	48,2	277	45,5
Tidak (n=332)	173	57,3	159	51,8	332	54,5
KD02.a. Dalam setahun terakhir, apakah RT ini pernah mengurus [A] AKTE KELAHIRAN?						
Ya (n=123)	49	16,2	74	24,1	123	20,2
Tidak (n=486)	253	83,8	233	75,9	486	79,8
KD03.a. Apakah RT ini dibantu oleh KPMK/kader saat mengurus [A] AKTE KELAHIRAN?						
Ya (n=23)	5	10,2	18	24,3	23	18,7
Tidak (n=100)	44	89,8	56	75,7	100	81,3
KD04.a. Apakah I/B/S merasa puas dengan pelayanan pengurusan [A] AKTE KELAHIRAN?						
Sangat tidak puas (n=3)	2	4,1	1	1,4	3	2,4
Tidak puas (n=29)	16	32,7	13	17,6	29	23,6
Biasa saja (n=13)	5	10,2	8	10,8	13	10,6
Puas (n=62)	21	42,9	41	55,4	62	50,4
Sangat puas (n=12)	3	6,1	9	12,2	12	9,8
TIDAK TAHU (n=4)	2	4,1	2	2,7	4	3,3
KD02.b. Dalam setahun terakhir, apakah RT ini pernah mengurus [B] KTP?						
Ya (n=134)	57	18,9	77	25,1	134	22,0
Tidak (n=475)	245	81,1	230	74,9	475	78,0
KD03.b. Apakah RT ini dibantu oleh KPMK/kader saat mengurus [B] KTP?						
Ya (n=32)	11	19,3	21	27,3	32	23,9
Tidak (n=102)	46	80,7	56	72,7	102	76,1
KD04.b. Apakah I/B/S merasa puas dengan pelayanan pengurusan [B] KTP?						
Sangat tidak puas (n=5)	1	1,8	4	5,2	5	3,7
Tidak puas (n=25)	10	17,5	15	19,5	25	18,7
Biasa saja (n=16)	6	10,5	10	13,0	16	11,9
Puas (n=76)	36	63,2	40	51,9	76	56,7
Sangat puas (n=10)	3	5,3	7	9,1	10	7,5
TIDAK TAHU (n=2)	1	1,8	1	1,3	2	1,5

Buku Rumah Tangga Modul KD. Pelayanan Kesehatan dan Admindak

Tabel 1.7.4. Persepsi Tentang Pelayanan Kesehatan dan Adminduk (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
KD02.c. Dalam setahun terakhir, apakah RT ini pernah mengurus [C] KK?						
Ya (n=145)	61	20,2	84	27,4	145	23,8
Tidak (n=464)	241	79,8	223	72,6	464	76,2
KD03.c. Apakah RT ini dibantu oleh KPMK/kader saat mengurus [C] KK?						
Ya (n=38)	11	18,0	27	32,1	38	26,2
Tidak (n=107)	50	82,0	57	67,9	107	73,8
KD04.c. Apakah I/B/S merasa puas dengan pelayanan pengurusan [C] KK?						
Sangat tidak puas (n=3)	2	3,3	1	1,2	3	2,1
Tidak puas (n=26)	15	24,6	11	13,1	26	17,9
Biasa saja (n=18)	7	11,5	11	13,1	18	12,4
Puas (n=85)	31	50,8	54	64,3	85	58,6
Sangat puas (n=11)	4	6,6	7	8,3	11	7,6
TIDAK TAHU (n=2)	2	3,3	0	0,0	2	1,4
KD02.d. Dalam setahun terakhir, apakah rt ini pernah mengurus [D] AKTE KEMATIAN?						
Ya (n=16)	7	2,3	9	2,9	16	2,6
Tidak (n=593)	295	97,7	298	97,1	593	97,4
KD03.d. Apakah RT ini dibantu oleh KPMK/kader saat mengurus [D] AKTE KEMATIAN?						
Ya (n=5)	3	42,9	2	22,2	5	31,3
Tidak (n=11)	4	57,1	7	77,8	11	68,8
KD04.d. Apakah I/B/S merasa puas dengan pelayanan pengurusan [D] AKTE KEMATIAN?						
Tidak puas (n=3)	0	0,0	3	33,3	3	18,8
Biasa saja (n=1)	1	14,3	0	0,0	1	6,3
Puas (n=11)	5	71,4	6	66,7	11	68,8
Sangat puas (n=1)	1	14,3	0	0,0	1	6,3

Buku Rumah Tangga Modul KD. Pelayanan Kesehatan dan Adminduk

Tabel 1.7.4. Persepsi Tentang Pelayanan Kesehatan dan Adminduk (Lanjutan)

VARIABEL	KD01. Dalam setahun terakhir, apakah rumah tangga ini pernah ke [...] untuk mendapatkan layanan (sakit, cek rutin)? (YA)					
	a. Puskesmas/ Pustu		b. Polindes/ Poskesdes		c. Posyandu	
KOMPAK	1,841*** (0,353)	1,875*** (0,370)	1,654 (0,544)	1,650 (0,557)	1,248 (0,204)	1,274 (0,218)
Constant	2,283*** (0,286)	1,969*** (0,438)	0,0559*** (0,0144)	0,0469*** (0,0175)	0,746** (0,0868)	0,916 (0,187)
Observations	609	609	609	489	609	609
Kabupaten FE	NO	YES	NO	YES	NO	YES
Pseudo R2	0,0152	0,0586	0,00787	0,106	0,00221	0,0702

Robust seeform in parentheses

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Tabel 1.7.4. Persepsi Tentang Pelayanan Kesehatan dan Adminduk (Lanjutan)

VARIABEL	KD02. Dalam setahun terakhir, apakah rumah tangga ini pernah mengurus [...]							
	a. Akte Kelahiran		b. KTP		c. KK		d. Akte Kematian	
KOMPAK	1,640** (0,337)	1,649** (0,339)	1,439* (0,284)	1,442* (0,286)	1,488** (0,286)	1,496** (0,295)	1,273 (0,650)	1,270 (0,656)
Constant	0,194*** (0,0303)	0,191*** (0,0504)	0,233*** (0,0342)	0,251*** (0,0651)	0,253*** (0,0363)	0,258*** (0,0624)	0,0237*** (0,00908)	0,00740*** (0,00831)
Observations	609	609	609	609	609	609	609	609
Kabupaten FE	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES
Pseudo R2	0,00963	0,0279	0,00534	0,0190	0,00646	0,0413	0,00152	0,0473

Robust seeform in parentheses

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Tabel 1.7.4. Persepsi Tentang Pelayanan Kesehatan dan Adminduk (Lanjutan)

VARIABEL	KD03. Apakah rumah tangga ini mendapat bantuan dari KPMK/kader kampung pada saat mengurus [...]?							
	a. Akte Kelahiran		b. KTP		c. KK		d. Akte Kematian	
KOMPAK	2,829*	3,726**	1,568	1,566	2,153*	2,239*	0,381	0,138
	(1,546)	(2,038)	(0,664)	(0,742)	(0,879)	(1,010)	(0,436)	(0,212)
Constant	0,114***	0,227**	0,239***	0,400**	0,220***	0,329**	0,750	3,42e-08***
	(0,0538)	(0,144)	(0,0806)	(0,185)	(0,0735)	(0,150)	(0,592)	(3,39e-08)
Observations	123	123	134	134	145	145	16	12
Kabupaten FE	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES
Pseudo R2	0,0348	0,0945	0,00790	0,146	0,0225	0,134	0,0392	0,320

Robust seeform in parentheses

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Tabel 1.7.4. Persepsi Tentang Pelayanan Kesehatan dan Adminduk (Lanjutan)

VARIABEL	KD04. Apakah I/B/S merasa puas dengan pelayanan pengurusan [...]?							
	a. Akte Kelahiran		b. KTP		c. KK		d. Akte Kematian	
KOMPAK	2,178**	1,771	0,706	0,743	1,819*	1,763	0,333	
	(0,849)	(0,723)	(0,266)	(0,297)	(0,658)	(0,664)	(0,444)	
Constant	1,043	1,372	2,294***	2,663**	1,458	1,724	6,000	1,500
	(0,306)	(0,715)	(0,669)	(1,145)	(0,388)	(0,814)	(6,693)	(1,531)
Observations	119	119	132	132	143	143	16	5
Kabupaten FE	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES
Pseudo R2	0,0257	0,0564	0,00510	0,0107	0,0152	0,0235	0,0442	0

Robust seeform in parentheses

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

1.8 Buku Anggota Rumah Tangga (ART)

1.8.1 Seksi PM (Partisipasi Masyarakat)

Tabel 1.8.1. Persepsi Anggota Rumah Tangga terkait Partisipasi Masyarakat

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
PM09. Selama setahun terakhir, apakah I/B/S berpartisipasi dlm keg kemasyarakatan?						
Ya (n=927)	457	81,5	470	84,1	927	82,8
Tidak (n=193)	104	18,5	89	15,9	193	17,2
PM10. Jenis kegiatan apa saja yang pernah I/B/S ikuti selama setahun terakhir						
PM10.a. KEAGAMAAN						
Ya (n=450)	217	91,2	233	87,9	450	89,5
Tidak (n=53)	21	8,8	32	12,1	53	10,5
PM10.b. PKK/KEL PEREMPUAN						
Ya (n=166)	78	32,8	88	33,2	166	33,0
Tidak (n=337)	160	67,2	177	66,8	337	67,0
PM10.c. KEPEMUDAAN (KARANG TARUNA)						
Ya (n=107)	44	18,5	63	23,8	107	21,3
Tidak (n=396)	194	81,5	202	76,2	396	78,7
PM10.d. KEL KESENIAN & OLAH RAGA						
Ya (n=139)	64	26,9	75	28,3	139	27,6
Tidak (n=364)	174	73,1	190	71,7	364	72,4
PM10.e. KEL USAHA/TANI/ NELAYAN						
Ya (n=181)	92	38,7	89	33,6	181	36,0
Tidak (n=322)	146	61,3	176	66,4	322	64,0
PM10.v. LAINNYA						
Ya (n=75)	35	14,7	40	15,1	75	14,9
Tidak (n=428)	203	85,3	225	84,9	428	85,1
PM11. Apakah I/B/S pernah menghadiri pertemuan tingkat kampung yang diadakan 1 tahun terakhir?						
Ya (n=534)	253	45,1	281	50,3	534	47,7
Tidak (n=586)	308	54,9	278	49,7	586	52,3

Buku Anggota Rumah Tangga Modul PM. Partisipasi Masyarakat

Tabel 1.8.1. Persepsi Anggota Rumah Tangga terkait Partisipasi Masyarakat (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
	Kolom		Kolom		Kolom	
PM12. Topik apa saja yang dibahas dalam pertemuan di tingkat kampung yang I/B/S hadiri						
PM12.a. PERMASALAHAN KAMPUNG						
Ya (n=383)	185	33,0	198	35,4	383	34,2
Tidak (n=737)	376	67,0	361	64,6	737	65,8
PM12.b. PROGRAM DI KAMPUNG						
Ya (n=422)	203	36,2	219	39,2	422	37,7
Tidak (n=698)	358	63,8	340	60,8	698	62,3
PM12.c. PERENCANAAN KAMPUNG						
Ya (n=342)	162	28,9	180	32,2	342	30,5
Tidak (n=778)	399	71,1	379	67,8	778	69,5
PM12.d. PENANGGULANGAN PENYAKIT						
Ya (n=200)	103	18,4	97	17,4	200	17,9
Tidak (n=920)	458	81,6	462	82,6	920	82,1
PM12.e. KEGIATAN KEMASYARAKATAN						
Ya (n=302)	157	28,0	146	26,1	303	27,1
Tidak (n=817)	404	72,0	413	73,9	817	72,9
PM12.v. LAINNYA						
Ya (n=48)	29	5,2	19	3,4	48	4,3
Tidak (n=1.072)	532	94,8	540	96,6	1.072	95,7
PM08. Dalam pertemuan tingkat kampung tersebut, apakah I/B/S [...]?						
PM08.a. MEMBERIKAN USULAN?						
Ya (n=273)	111	43,9	162	57,7	273	51,1
Tidak (n=261)	142	56,1	119	42,3	261	48,9
PM08.b. MEMBERIKAN PENDAPAT?						
Ya (n=281)	113	44,7	168	59,8	281	52,6
Tidak (n=253)	140	55,3	113	40,2	253	47,4
PM08.c. BERTANYA TENTANG PROGRAM/KEGIATAN?						
Ya (n=228)	82	32,4	146	52,0	228	42,7
Tidak (n=306)	171	67,6	135	48,0	306	57,3
PM08.d. BERTANYA TENTANG TARGET/PENERIMA MANFAAT?						
Ya (n=177)	67	26,5	110	39,1	177	33,1
Tidak (n=357)	186	73,5	171	60,9	357	66,9
PM08.e. BERTANYA TENTANG DANA/ANGGARAN KAMPUS?						
Ya (n=168)	64	25,3	104	37,0	168	31,5
Tidak (n=366)	189	74,7	177	63,0	366	68,5
PM08.f. IKUT MENGAMBIL SUARA UNTUK MEMUTUSKAN?						
Ya (n=245)	113	44,7	132	47,0	245	45,9
Tidak (n=289)	140	55,3	149	53,0	289	54,1

Buku Anggota Rumah Tangga Modul PM. Partisipasi Masyarakat

Tabel 1.8.1. Persepsi Anggota Rumah Tangga terkait Partisipasi Masyarakat (Lanjutan)

VARIABEL	PM09. Selama setahun terakhir, apakah I/B/S pernah berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan? (YA)			PM10. Jenis kegiatan apa saja yang pernah I/B/S ikuti?					
				a. Keagamaan			b. PKK/ Kelompok Perempuan Lain		
KOMPAK	1,229 (0,199)	1,229 (0,199)	1,036 (0,249)	0,846 (0,261)	0,841 (0,262)	1,523 (0,699)	1,008 (0,197)	1,303 (0,390)	1,222 (0,372)
Perempuan		0,879 (0,144)	0,759 (0,170)		0,715 (0,227)	1,413 (0,696)		433,7*** (351,4)	265,7*** (223,7)
KOMPAK x Perempuan			1,365 (0,442)			0,318* (0,199)			
Constant	12,67*** (3,433)	13,62*** (3,917)	14,83*** (4,555)	18,83*** (8,239)	22,47*** (10,98)	15,96*** (7,835)	0,562*** (0,109)	0,00587*** (0,00520)	0,00987*** (0,00939)
Observations	1,120	1,120	1,120	503	503	503	503	503	381
Kabupaten FE	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Pseudo R2	0,0323	0,0329	0,0338	0,0976	0,101	0,111	0,0234	0,544	0,446

Robust seeform in parentheses

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Tabel 1.8.1. Persepsi Anggota Rumah Tangga terkait Partisipasi Masyarakat (Lanjutan)

VARIABEL	PM10. Jenis kegiatan apa saja yang pernah I/B/S ikuti?								
	c. Kepemudaan (Karang Taruna)			d. Kelompok Kesenian/ Olahraga			e. Kelompok tani/ usaha/ nelayan		
KOMPAK	1,323 (0,306)	1,287 (0,304)	1,286 (0,352)	1,007 (0,227)	1,005 (0,226)	0,770 (0,230)	0,766 (0,149)	0,744 (0,146)	0,978 (0,249)
Perempuan		0,242*** (0,0641)	0,242*** (0,0946)		0,944 (0,207)	0,687 (0,225)		0,541*** (0,106)	0,746 (0,206)
KOMPAK x Perempuan			1,000 (0,519)			1,806 (0,793)			0,522* (0,204)
Constant	0,284*** (0,0632)	0,500*** (0,124)	0,500*** (0,129)	0,835 (0,162)	0,859 (0,189)	1,004 (0,250)	0,736 (0,140)	0,993 (0,211)	0,851 (0,199)
Observations	503	503	503	503	503	503	503	503	503
Kabupaten FE	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Pseudo R2	0,0160	0,0825	0,0825	0,129	0,129	0,132	0,0299	0,0450	0,0492

Robust seeform in parentheses

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Tabel 1.8.1. Persepsi Anggota Rumah Tangga terkait Partisipasi Masyarakat (Lanjutan)

VARIABEL	PM10. Jenis kegiatan apa saja yang pernah I/B/S ikuti? v. Lainnya			PM11. Apakah I/B/S pernah menghadiri pertemuan di tingkat kampung yang diadakan setahun terakhir? (YA)			PM08. Dalam pertemuan tingkat kampung tersebut, apakah I/B/S [...]? a. Memberikan Usulan		
	KOMPAK	0,975 (0,252)	0,937 (0,248)	0,851 (0,266)	1,254* (0,156)	1,259* (0,158)	1,634*** (0,299)	1,609*** (0,288)	1,583** (0,299)
Perempuan		0,320*** (0,0903)	0,270*** (0,114)		0,519*** (0,0658)	0,664** (0,113)		0,249*** (0,0477)	0,287*** (0,0786)
KOMPAK x Perempuan			1,378 (0,786)			0,611* (0,154)			0,760 (0,285)
Constant	0,217*** (0,0560)	0,346*** (0,0974)	0,366*** (0,107)	1,978*** (0,305)	2,871*** (0,495)	2,523*** (0,458)	0,704* (0,130)	1,358 (0,289)	1,272 (0,290)
Observations	503	503	503	1,120	1,120	1,120	534	534	534
Kabupaten FE	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Pseudo R2	0,0488	0,0896	0,0903	0,0503	0,0677	0,0702	0,0223	0,0993	0,100

Robust seeform in parentheses

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Tabel 1.8.1. Persepsi Anggota Rumah Tangga terkait Partisipasi Masyarakat (Lanjutan)

VARIABEL	PM08. Dalam pertemuan tingkat kampung tersebut, apakah I/B/S [...]?								
	b. Memberikan Pendapat			c. Bertanya Program/Kegiatan Kampung			d. Bertanya Target/ Penerima Manfaat		
KOMPAK	1,707*** (0,307)	1,683*** (0,315)	1,588* (0,404)	2,135*** (0,391)	2,146*** (0,412)	2,493*** (0,619)	1,666*** (0,319)	1,636** (0,325)	1,714** (0,419)
Perempuan		0,287*** (0,0542)	0,268*** (0,0725)		0,290*** (0,0564)	0,358*** (0,104)		0,296*** (0,0607)	0,320*** (0,0997)
KOMPAK x Perempuan			1,135 (0,421)			0,688 (0,264)			0,874 (0,359)
Constant	0,803 (0,147)	1,473* (0,309)	1,520* (0,347)	0,496*** (0,0946)	0,864 (0,184)	0,795 (0,184)	0,312*** (0,0641)	0,519*** (0,116)	0,505*** (0,121)
Observations	534	534	534	534	534	534	534	534	534
Kabupaten FE	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Pseudo R2	0,0276	0,0898	0,0900	0,0372	0,0969	0,0982	0,0266	0,0823	0,0825

Robust seeform in parentheses

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Tabel 1.8.1. Persepsi Anggota Rumah Tangga terkait Partisipasi Masyarakat (Lanjutan)

VARIABEL	PM08. Dalam pertemuan tingkat kampung tersebut, apakah I/B/S [...]?					
	e. Bertanya Tentang Anggaran Kampung			f. Ikut Bersuara untuk Mengambil Keputusan		
KOMPAK	1,663*** (0,321)	1,634** (0,334)	1,903*** (0,467)	1,203 (0,218)	1,170 (0,214)	1,285 (0,320)
Perempuan		0,209*** (0,0465)	0,277*** (0,0904)		0,542*** (0,0984)	0,604* (0,157)
KOMPAK x Perempuan			0,610 (0,266)			0,812 (0,293)
Constant	0,292*** (0,0620)	0,540*** (0,125)	0,494*** (0,123)	1,046 (0,190)	1,426* (0,296)	1,353 (0,306)
Observations	534	534	534	534	534	534
Kabupaten FE	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Pseudo R2	0,0212	0,108	0,110	0,0302	0,0457	0,0461

Robust seeform in parentheses

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

1.8.2 Seksi KD (Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, dan Adminduk)

Tabel 1.8.2. Persepsi Anggota Rumah Tangga terkait Pelayanan Publik

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
KD05.a. Apakah I/B/S merasa puas dgn [A] PELAYANAN KESEHATAN di kampung saat ini?						
Sangat tidak puas (n=18)	12	2,1	6	1,1	18	1,6
Tidak puas (n=284)	138	24,6	146	26,1	284	25,4
Puas (n=749)	382	68,1	367	65,7	749	66,9
Sangat puas (n=52)	15	2,7	37	6,6	52	4,6
TIDAK TAHU (n=17)	14	2,5	3	0,5	17	1,5
KD06.a. Bagaimana pelayanan [A] PELAYANAN KESEHATAN bila dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu?						
Lebih buruk (n=187)	84	15,0	103	18,4	187	16,7
SAMA SAJA (n=383)	186	33,2	197	35,2	383	34,2
Lebih baik (n=510)	268	47,8	242	43,3	510	45,5
TIDAK TAHU (n=40)	23	4,1	17	3,0	40	3,6
KD07.a. Pernahkah I/B/S menyampaikan kritik ttg [B] PELAYANAN PENDIDIKAN 1 tahun terakhir?						
Ya (n=166)	54	9,6	112	20,0	166	14,8
Tidak (n=954)	507	90,4	447	80,0	954	85,2
KD08.a. Apakah I/B/S puas dgn tindak lanjut dari penanganan kritik ttg [A] PELAYANAN KESEHATAN?						
Ya (n=60)	20	37,0	40	35,7	60	36,1
Tidak (n=39)	13	24,1	26	23,2	39	23,5
TIDAK ADA TINDAK LANJUT (n=65)	20	37,0	45	40,2	65	39,2
TIDAK TAHU (n=2)	1	1,9	1	0,9	2	1,2
KD05.b. Apakah I/B/S merasa puas dgn [B] PELAYANAN PENDIDIKAN di kampung saat ini?						
Sangat tidak puas (n=22)	13	2,3	9	1,6	22	2,0
Tidak puas (n=342)	173	30,8	169	30,2	342	30,5
Puas (n=660)	323	57,6	337	60,3	660	58,9
Sangat puas (n=31)	14	2,5	17	3,0	31	2,8
TIDAK TAHU (n=65)	38	6,8	27	4,8	65	5,8

Tabel 1.8.2. Persepsi Anggota Rumah Tangga terkait Pelayanan Publik (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
KD06.b. Bagaimana pelayanan [B] PELAYANAN PENDIDIKAN bila dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu?						
Lebih buruk (n=291)	133	23,7	158	28,3	291	26,0
SAMA SAJA (n=316)	158	28,2	158	28,3	316	28,2
Lebih baik (n=433)	223	39,8	210	37,6	433	38,7
TIDAK TAHU (n=80)	47	8,4	33	5,9	80	7,1
KD07.b. Pernahkah I/B/S menyampaikan kritik ttg [B] PELAYANAN PENDIDIKAN 1 tahun terakhir?						
Ya (n=168)	71	12,7	97	17,4	168	15,0
Tidak (n=952)	490	87,3	462	82,6	952	85,0
KD08.b. Apakah I/B/S puas dgn tindak lanjut dari penanganan kritik ttg [B] PELAYANAN PENDIDIKAN?						
Ya (n=47)	12	16,9	35	36,1	47	28,0
Tidak (n=38)	22	31,0	16	16,5	38	22,6
TIDAK ADA TINDAK LANJUT (n=79)	35	49,3	44	45,4	79	47,0
TIDAK TAHU (n=4)	2	2,8	2	2,1	4	2,4

Buku Anggota Rumah Tangga Modul KD. Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, dan Adminduk

Tabel 1.8.2. Persepsi Anggota Rumah Tangga terkait Pelayanan Publik (Lanjutan)

	Lokasi					
	Non-KOMPAK		KOMPAK		Total	
	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom	Jumlah	% Kolom
KD05.c. Apakah I/B/S merasa puas dgn [C] PELAYANAN ADMINDUK di kampung saat ini?						
Sangat tidak puas (n=13)	6	1,1	7	1,3	13	1,2
Tidak puas (n=278)	127	22,6	151	27,0	278	24,8
Puas (n=727)	377	67,2	350	62,6	727	64,9
Sangat puas (n=47)	16	2,9	31	5,5	47	4,2
TIDAK TAHU (n=55)	35	6,2	20	3,6	55	4,9
KD06.c. Bagaimana pelayanan [C] PELAYANAN ADMINDUK bila dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu?						
Lebih buruk (n=163)	65	11,6	98	17,5	163	14,6
SAMA SAJA (n=438)	227	40,5	211	37,7	438	39,1
Lebih baik (n=441)	231	41,2	210	37,6	441	39,4
TIDAK TAHU (n=78)	38	6,8	40	7,2	78	7,0
KD07.c. Pernahkah I/B/S menyampaikan kritik ttg [C] PELAYANAN ADMINDUK 1 tahun terakhir?						
Ya (n=162)	66	11,8	96	17,2	162	14,5
Tidak (n=958)	495	88,2	463	82,8	958	85,5
KD08.c. Apakah I/B/S puas dgn tindak lanjut dari penanganan kritik ttg [C] PELAYANAN ADMINDUK?						
Ya (n=51)	15	22,7	36	37,5	51	31,5
Tidak (n=42)	17	25,8	25	26,0	42	25,9
TIDAK ADA TINDAK LANJUT (n=67)	33	50,0	34	35,4	67	41,4
TIDAK TAHU (n=2)	1	1,5	1	1,0	2	1,2
KD09. Menurut I/B/S, apakah pembangunan kampung sesuai dengan kebutuhan masyarakat?						
Sangat tidak sesuai (n=63)	29	5,2	34	6,1	63	5,6
Tidak sesuai (n=549)	245	43,7	304	54,4	549	49,0
Sesuai (n=472)	269	48,0	203	36,3	472	42,1
Sangat sesuai (n=22)	10	1,8	12	2,1	22	2,0
TIDAK TAHU (n=14)	8	1,4	6	1,1	14	1,3

Buku Anggota Rumah Tangga Modul KD. Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, dan Adminduk

Tabel 1.8.2. Persepsi Anggota Rumah Tangga terkait Pelayanan Publik (Lanjutan)

VARIABEL	KD05. Apakah I/B/S merasa sangat puas/puas terhadap pelayanan [...] di kampung saat ini?								
	a. Kesehatan			b. Pendidikan			c. Admindak		
KOMPAK	0,997 (0,136)	0,998 (0,136)	1,030 (0,202)	1,113 (0,145)	1,113 (0,146)	1,311 (0,248)	0,823 (0,115)	0,823 (0,115)	0,920 (0,185)
Perempuan		1,251 (0,171)	1,290 (0,249)		1,275* (0,167)	1,491** (0,272)		1,156 (0,161)	1,294 (0,265)
KOMPAK x Perempuan			0,941 (0,257)			0,730 (0,191)			0,807 (0,225)
Constant	1,775*** (0,276)	1,571*** (0,270)	1,546** (0,287)	1,356* (0,212)	1,191 (0,205)	1,097 (0,200)	3,449*** (0,597)	3,193*** (0,605)	3,009*** (0,614)
Observations	1,103	1,103	1,103	1,055	1,055	1,055	1,065	1,065	1,065
Kabupaten FE	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Pseudo R2	0,0117	0,0138	0,0138	0,00718	0,00970	0,0108	0,0149	0,0158	0,0163

Robust seeform in parentheses

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Tabel 1.8.2. Persepsi Anggota Rumah Tangga terkait Pelayanan Publik (Lanjutan)

VARIABEL	KD06. Dibandingkan dengan dua tahun lalu, apakah pelayanan [...] lebih baik atau sama saja?								
	a. Kesehatan			b. Pendidikan			c. Admindak		
KOMPAK	0,817* (0,100)	0,816* (0,100)	0,844 (0,152)	0,883 (0,112)	0,883 (0,112)	0,777 (0,144)	0,870 (0,110)	0,869 (0,110)	0,915 (0,168)
Perempuan		1,201 (0,149)	1,239 (0,216)		0,931 (0,119)	0,824 (0,147)		0,850 (0,109)	0,893 (0,160)
KOMPAK x Perempuan			0,940 (0,231)			1,275 (0,323)			0,905 (0,230)
Constant	0,871 (0,132)	0,789 (0,131)	0,776 (0,139)	0,684** (0,106)	0,711** (0,120)	0,758 (0,138)	1,051 (0,161)	1,146 (0,194)	1,117 (0,203)
Observations	1,080	1,080	1,080	1,040	1,040	1,040	1,042	1,042	1,042
Kabupaten FE	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Pseudo R2	0,00813	0,00960	0,00964	0,00811	0,00834	0,00899	0,0162	0,0173	0,0174

Robust seeform in parentheses

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Tabel 1.8.2. Persepsi Anggota Rumah Tangga terkait Pelayanan Publik (Lanjutan)

VARIABEL	KD07. Pernahkah I/B/S menyampaikan kritik, keluhan, atau saran kepada siapa pun di pihak kampung, distrik atau kabupaten berkaitan dengan [...] di Kampung ini selama satu tahun terakhir? (YA)								
	a. Kesehatan			b. Pendidikan			c. Admindak		
KOMPAK	2,403** *	2,416** *	2,159** *	1,472**	1,478**	1,384	1,564** *	1,578** *	1,658**
	(0,431)	(0,434)	(0,516)	(0,249)	(0,253)	(0,307)	(0,271)	(0,277)	(0,366)
Perempuan		0,602** *	0,509**		0,463** *	0,422** *		0,398** *	0,430** *
		(0,104)	(0,150)		(0,0802)	(0,111)		(0,0709)	(0,118)
KOMPAK x Perempuan			1,294			1,179			0,875
			(0,471)			(0,413)			(0,317)
Constant	0,169** *	0,218** *	0,234** *	0,224** *	0,324** *	0,337** *	0,132** *	0,200** *	0,194** *
	(0,0347)	(0,0484)	(0,0562)	(0,0445)	(0,0697)	(0,0752)	(0,0285)	(0,0459)	(0,0483)
Observations	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120
Kabupaten FE	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Pseudo R2	0,0407	0,0498	0,0504	0,0157	0,0369	0,0372	0,0103	0,0401	0,0403

Robust seeform in parentheses

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Tabel 1.8.2. Persepsi Anggota Rumah Tangga terkait Pelayanan Publik (Lanjutan)

VARIABEL	KD08. Apakah I/B/S puas dengan tindak lanjut dari penanganan kritik, keluhan, atau saran tersebut? (YA)								
	a. Kesehatan			b. Pendidikan			c. Admindak		
KOMPAK	0,956	0,942	1,161	4,161***	4,185***	3,587***	2,284**	2,276**	1,610
	(0,336)	(0,333)	(0,547)	(1,709)	(1,715)	(1,762)	(0,881)	(0,875)	(0,714)
Perempuan		1,170	1,643		0,823	0,579		0,646	0,240*
		(0,390)	(0,966)		(0,310)	(0,426)		(0,246)	(0,198)
KOMPAK x Perempuan			0,607			1,641			4,072
			(0,431)			(1,407)			(3,905)
Constant	0,530	0,498*	0,437*	0,208***	0,222***	0,249***	0,440*	0,500	0,605
	(0,208)	(0,206)	(0,206)	(0,0956)	(0,108)	(0,128)	(0,195)	(0,231)	(0,283)
Observations	164	164	164	164	164	164	160	160	160
Kabupaten FE	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Pseudo R2	0,0146	0,0156	0,0179	0,0813	0,0826	0,0843	0,0651	0,0712	0,0834

Robust seeform in parentheses

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Tabel 1.8.2. Persepsi Anggota Rumah Tangga terkait Pelayanan Publik (Lanjutan)

VARIABEL	KD09. Menurut I/B/S, apakah pembangunan kampung sangat sesuai/sesuai dengan kebutuhan kampung?		
	Model 1	Model 2	Model 3
KOMPAK	0,625*** (0,0766)	0,624*** (0,0766)	0,710* (0,128)
Perempuan		1,259* (0,156)	1,417** (0,246)
KOMPAK x Perempuan			0,785 (0,193)
Constant	1,134 (0,169)	1,002 (0,164)	0,940 (0,165)
Observations	1,106	1,106	1,106
Kabupaten FE	YES	YES	YES
Pseudo R2	0,0186	0,0209	0,0215

Robust seeform in parentheses

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1